



hatulistiwa

KAJIAN FISKAL REGIONAL GABUNGAN

2024

Peningkatan Produktivitas
sebagai Penggerak
Ekonomi Inklusif dan
Berkelanjutan

Foto:
Ade Prakarsa | Kanwil DJPb Kalimantan Tengah



**Pengarah:**

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti

Penanggung Jawab:

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Moudy Hermawan

Koordinator:

Kepala Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran,
Arie Suwandani Wiwit Warastuti

Kontributor:

Andrianto Purbo Ary Nugroho, Teguh Puspandoyo, Arief Priyantoro,
Bayu Yudistira, Teguh Dwi Prasetyo, Dian Merini, Agung Herlambang,
Alif Shofia Salsabila, Chyntia Bella Br. Sitepu, Prasetya Adi Kurniawan,
Rifqi Achmad Rafi, Wawan Ibnu Riyadi, Angeline Lorenzky, Syakti Syach,
Sulthan Muhammad Yusa, Taufan Maulana Harits,
Krisnandrini Lita Saviera

Layout & Desain:

Prasetya Adi Kurniawan, Nugraheni Vikri Puspitaningtyas,
Siti Nurhalizah, Wirasukma Legendani, Aln Pujo Priambodo

Unit Support & Teknis:

Joko Tatang Adiantoro, Bayu Adi Handoko, Dwi Ismanto, Paryanto,
Wiwin Arivinanto, Zahratun Afifah

Laporan Khatulistiwa

Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Gd. Prijadi Praptosuhardjo Lt.4
Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta Pusat



**Astera
Primanto Bhakti**

Direktur Jenderal Perbendaharaan

**ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI
WABAROKATUH
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha kuasa, atas rahmat-Nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menerbitkan Laporan Khatulistiwa Tahun 2024. Laporan ini merupakan hasil konsolidasi Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh seluruh Kantor Wilayah DJPb di Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk menyediakan analisis fiskal yang komprehensif dan terintegrasi.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perkembangan atas implementasi kebijakan fiskal serta keterkaitannya dengan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat nasional dan regional. Penyusunan dilakukan secara spasial berdasarkan enam regional utama yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua, yang masing-masing regional memiliki karakteristik geografis, ekonomi, sosial budaya, serta sumber daya alam yang saling beririsan.

Khatulistiwa Tahun 2024 mengusung tema "*Peningkatan Produktivitas sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan*" sebagai bentuk optimisme peran fiskal sekaligus kewaspadaan dalam menghadapi dinamika global agar tetap dapat mewujudkan pemulihan ekonomi nasional sekaligus melanjutkan target pembangunan melalui penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk para stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Pembaca yang terhormat,
Sebagai negara berdaulat (*sovereign nation*), pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mewujudkan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni "*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*". Oleh karena itu, kebijakan fiskal dirancang tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkecil ketimpangan, dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.

Pembaca yang budiman,

Tahun 2024 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan akibat tekanan global, penyesuaian ekonomi domestik, dan masa transisi pemerintahan baru. Namun demikian, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,03 persen, melampaui rata-rata global dan mendekati asumsi APBN 2024. Secara regional, seluruh wilayah mencatat pertumbuhan positif, dengan Maluku–Papua sebagai yang tertinggi (7,81 persen). Dari sisi kesejahteraan, berbagai indikator menunjukkan perbaikan: IPM nasional meningkat menjadi 75,02, tingkat kemiskinan turun ke 8,57 persen, pengangguran menurun signifikan, serta Nilai Tukar Petani meningkat hingga 120,26, mencerminkan membaiknya daya beli petani.

Meski demikian, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan, terutama antara Indonesia Barat dan Timur. Perekonomian nasional saat ini masih terkonsentrasi di regional Jawa dan Sumatera dengan kontribusi sebesar 77,76 persen terhadap PDB Nasional. Upaya pemerataan pembangunan secara berkesinambungan harus terus dilakukan dengan menciptakan peluang-peluang baru guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar kawasan Jawa-Sumatera.

Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan secara inklusif melalui optimalisasi fungsi APBN/APBD sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, termasuk melalui peningkatan alokasi anggaran belanja pemerintah terutama bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI), penyempurnaan kebijakan TKDD, terutama penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah terdesentralisasi pencairan anggarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta sinkronisasinya dengan belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, kemandirian fiskal pemerintah perlu terus didorong dengan strategi dan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis pada pengembangan potensi daerah secara spesifik sebagai keunggulan masing-masing daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, khususnya dalam ketahanan pangan, yang merupakan salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat. Indeks Ketahanan Pangan nasional menunjukkan tren membaik meskipun masih terdapat disparitas, terutama di Maluku–Papua. Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan penguatan infrastruktur pangan untuk mengurangi kerentanan wilayah dengan IKP rendah. Pada saat yang sama, berbagai program ketahanan pangan lintas K/L dengan total alokasi Rp52,77 triliun menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing regional diulas dalam Laporan Khatulistiwa ini. Dengan demikian, Laporan Khatulistiwa Tahun 2024 ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian fiskal dan perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat nasional dan regional.

Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

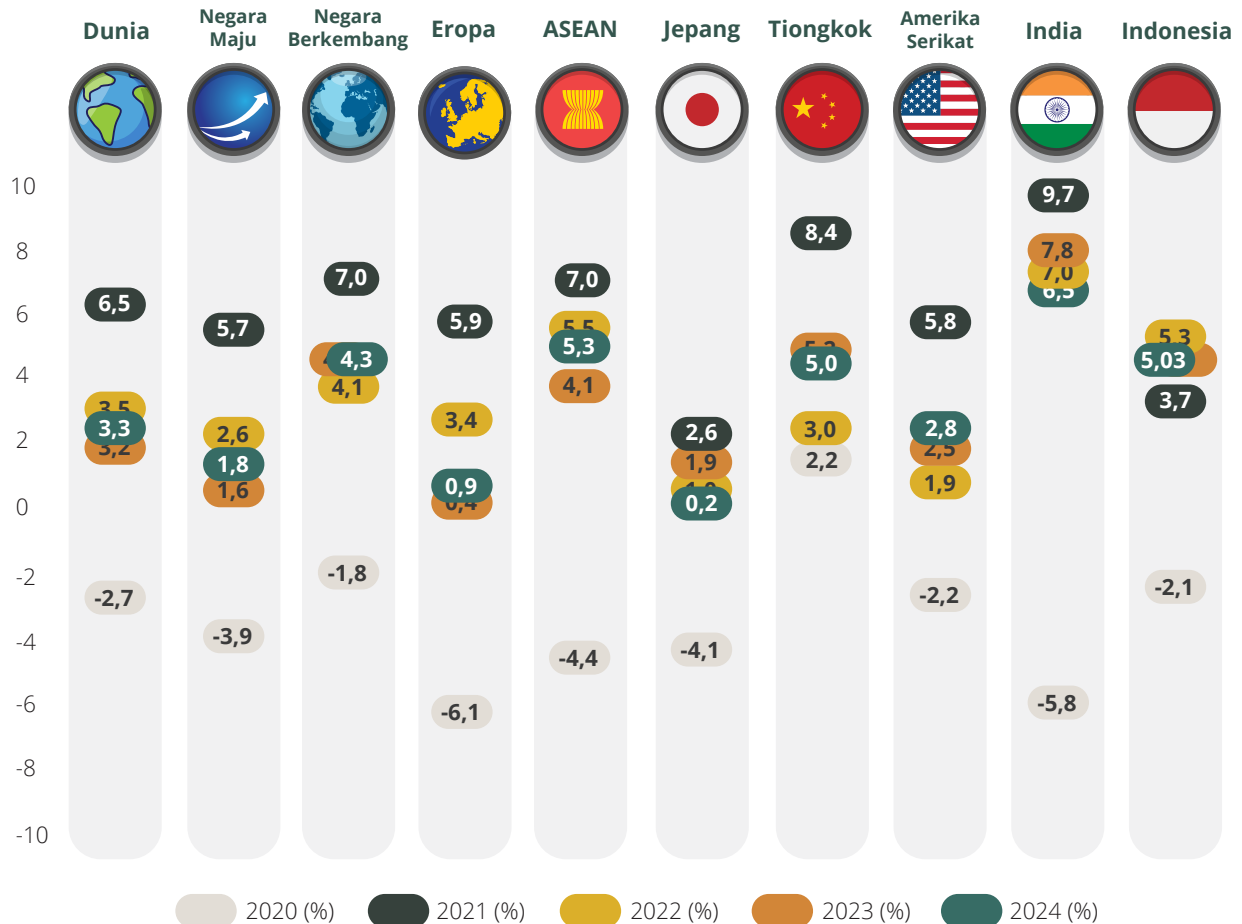
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

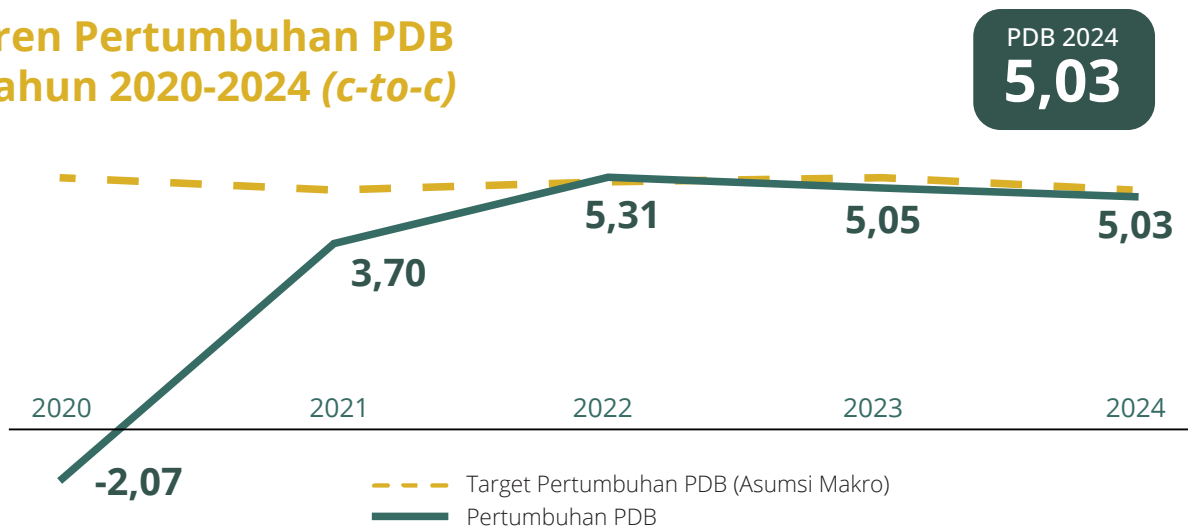
Jakarta, September 2025

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2020 - 2024



Tren Pertumbuhan PDB Tahun 2020-2024 (c-to-c)



Pendapatan Negara

Rp2.850,61 T

Defisit
(Rp509,16 T)

Belanja Negara

Rp3.359,77 T

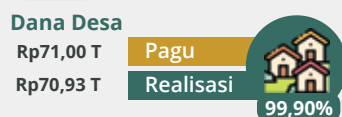
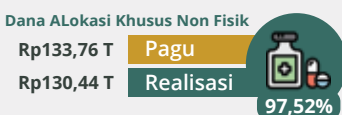
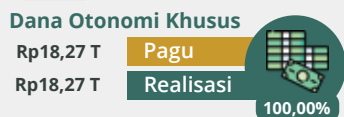
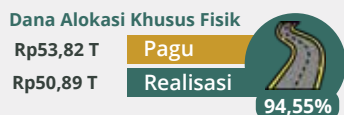


Target sesuai Perpres 206/2024

Realisasi APBN 2024

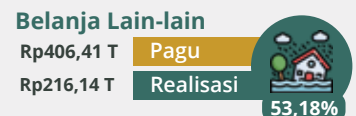
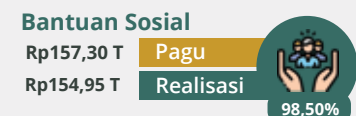
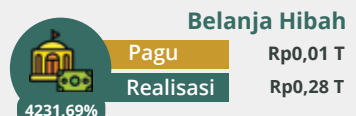
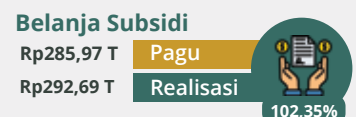
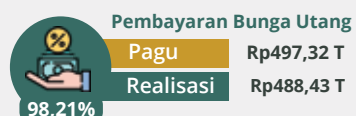
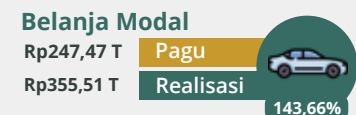
TKD dan Dana Desa

Rp863,54 T 100,69%



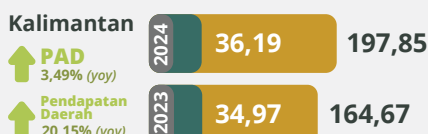
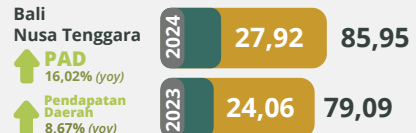
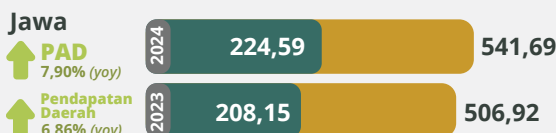
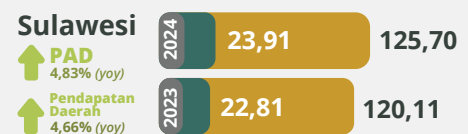
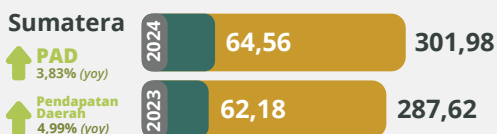
Belanja Pemerintah Pusat

Rp2.496,22 T 100,42%



DASHBOARD

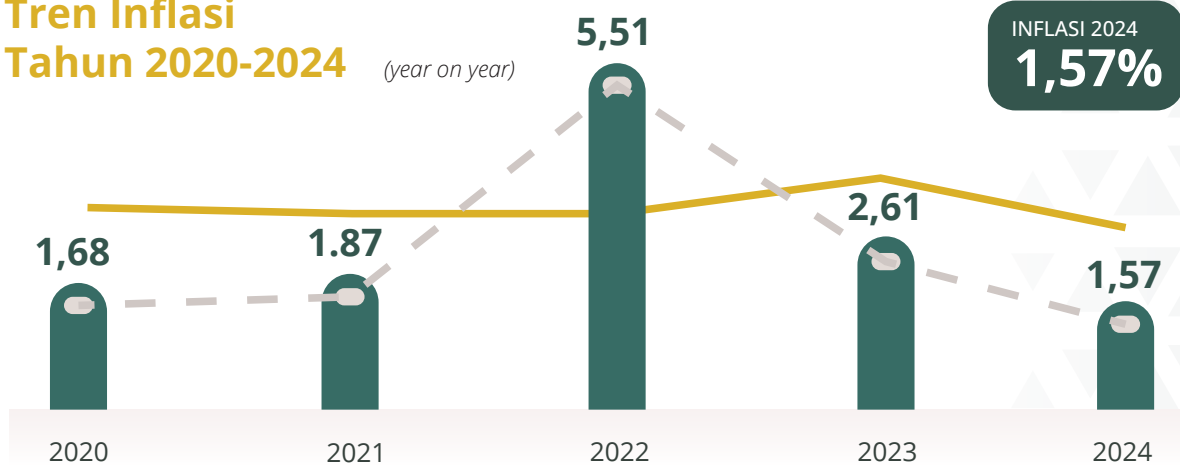
Realisasi PAD dan Pendapatan Daerah per Regional Tahun 2023-2024



Pendapatan Asli Daerah (Triliun Rp)

Pendapatan Daerah (Triliun Rp)

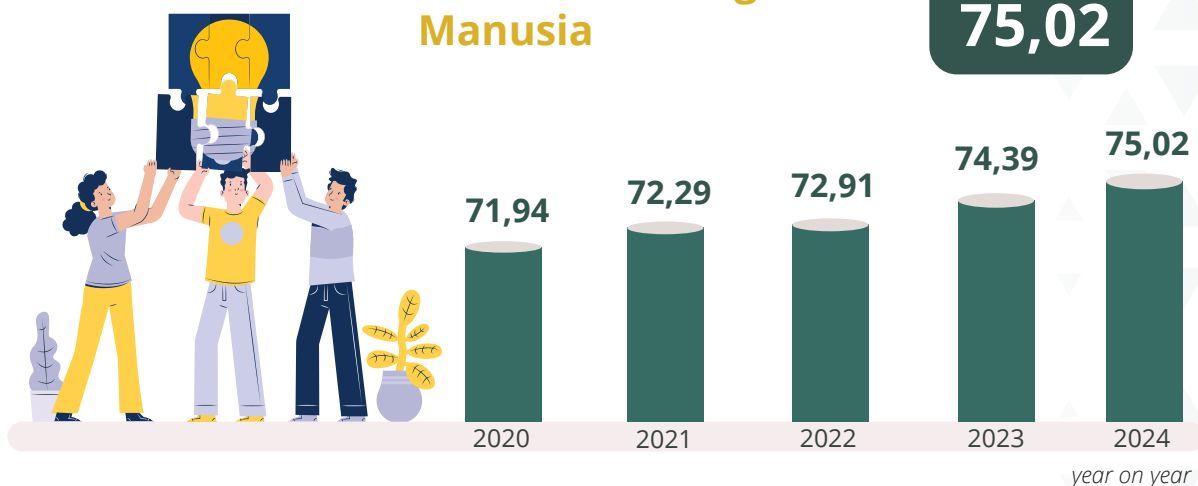
Tren Inflasi Tahun 2020-2024 (year on year)



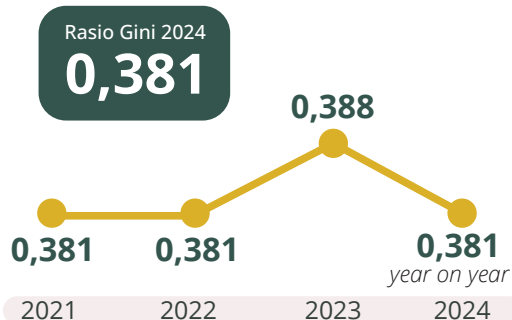
Capaian Inflasi tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (*y-on-y*), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan inflasi yang stabil dan terkendali, berada di bawah target sasaran inflasi dalam asumsi makro sebesar 2,80 persen. Inflasi yang terkendali ini tidak lepas dari penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan antar instansi pusat dan daerah, serta perbaikan rantai pasok domestik turut menjaga stabilitas harga.

— — — Inflasi (%)
— Target Inflasi (Asumsi Makro)

Indeks Pembangunan Manusia



Rasio Gini

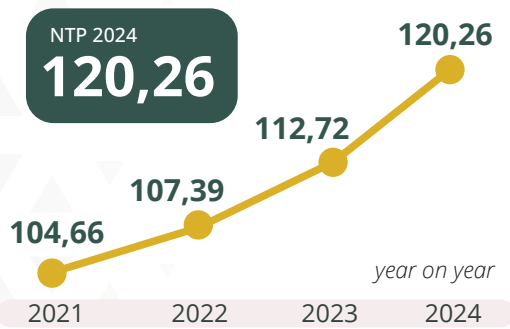


Secara tren, terjadi penurunan angka Rasio Gini sebesar 0,007 poin dibanding September 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, antara lain didorong oleh pemulihan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, serta membaiknya distribusi pendapatan rumah tangga.



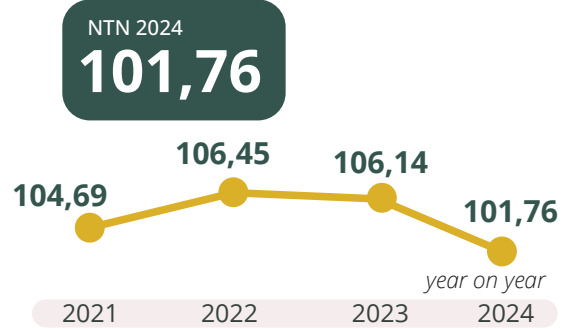
Photo by Tim Media KPPN Denpasar

Nilai Tukar Petani



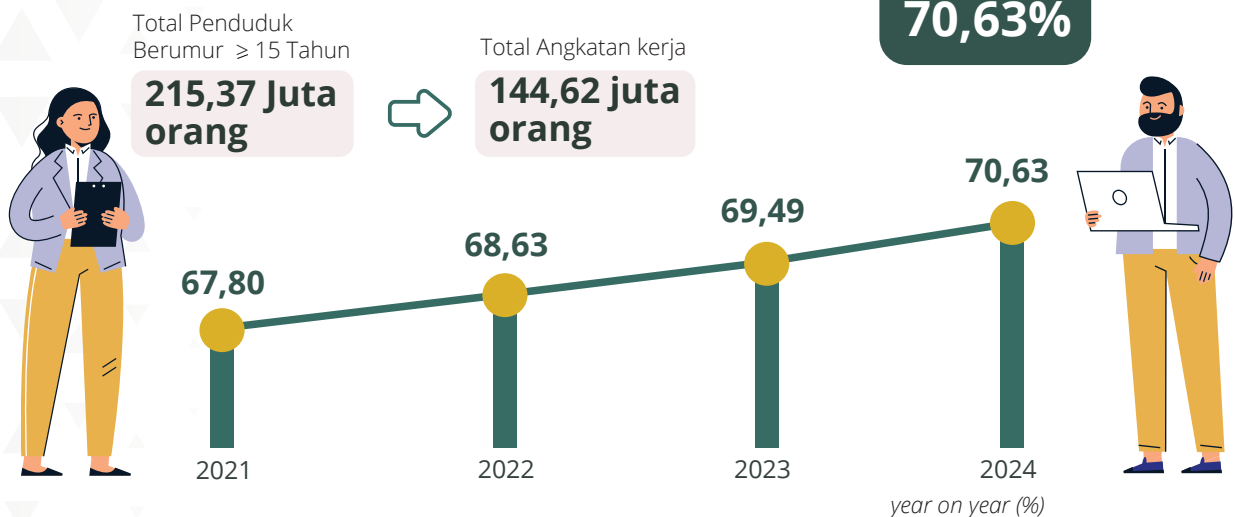
Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tahun 2024 mencapai 120,26, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan bahwa daya beli petani terus membaik, seiring dengan naiknya nilai produksi pertanian.

Nilai Tukar Nelayan

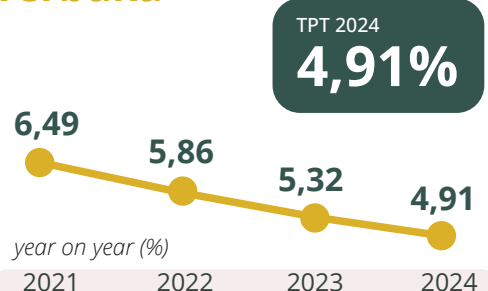


Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional pada tahun 2024 tercatat mengalami penurunan menjadi 101,76. Meskipun masih berada sedikit di atas angka 100, penurunan ini mengindikasikan melemahnya daya beli nelayan akibat peningkatan biaya produksi dan fluktuasi harga hasil tangkapan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Tingkat Pengangguran Terbuka



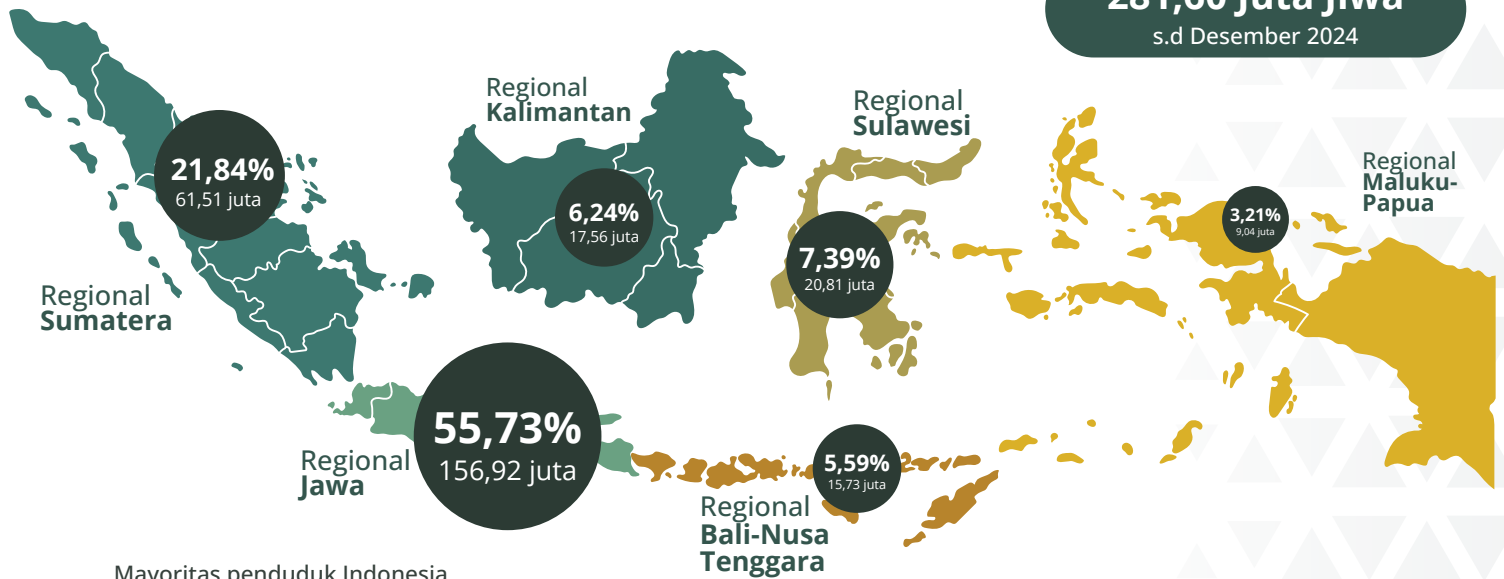
TPT tahun 2024 terus mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 4,91 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja nasional, seiring dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor.



SEBARAN PENDUDUK MENURUT REGIONAL

Populasi Penduduk Indonesia

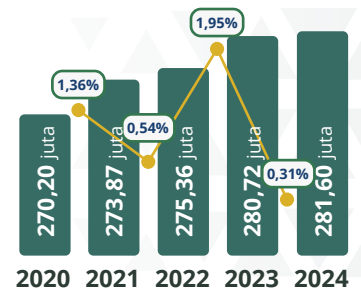
281,60 Juta Jiwa
s.d Desember 2024



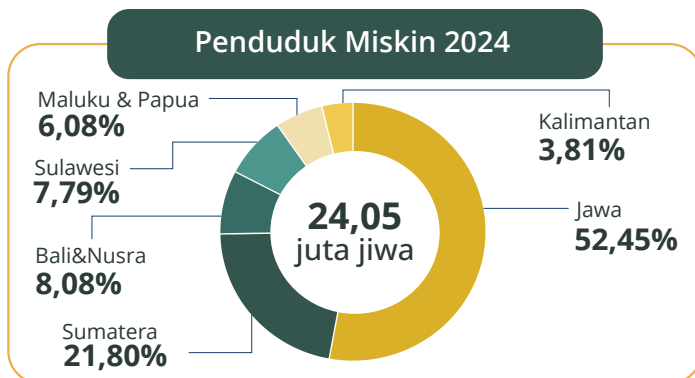
Mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan proporsi 55,73% atau 156,92 juta jiwa.

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK NASIONAL

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Tren pertumbuhan penduduk stabil namun melambat di tahun 2024.



SEBARAN PENDUDUK MISKIN REGIONAL



Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 24,05 juta jiwa. Sebaran penduduk miskin terbesar berada di Pulau Jawa dengan proporsi 52,45%. Namun demikian, tingkat kemiskinan nasional terus menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir sebesar 8,57% pada tahun 2024.

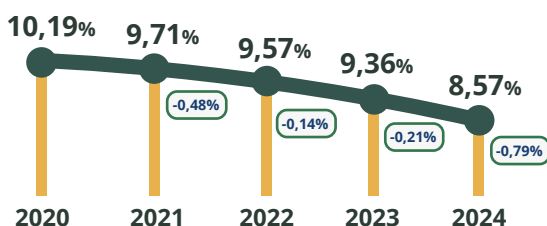
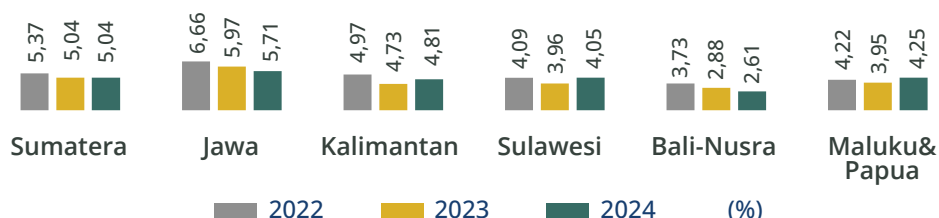


Photo by Eka Yulistira | KPPN Atambua

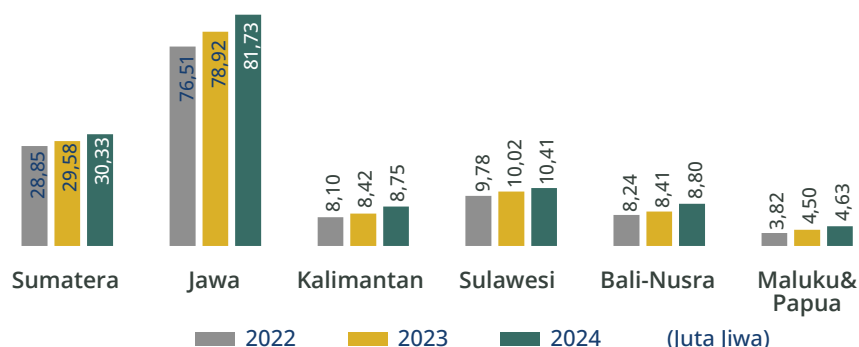
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT REGIONAL

Secara spasial, dari sisi pesentase menunjukkan tren penurunan TPT sejak Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2024 di sebagian besar wilayah. Regional Jawa menjadi daerah dengan TPT tertinggi di Indonesia dimana pada Agustus 2024 sebesar 5,71%.



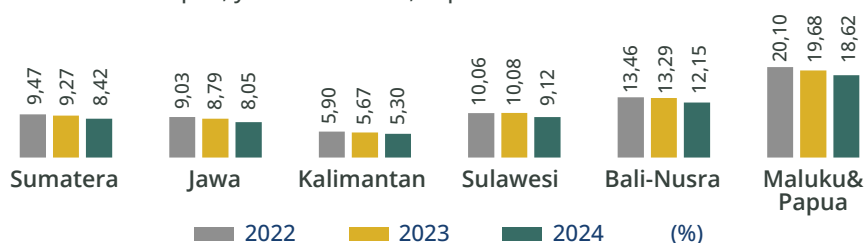
JUMLAH ANGKATAN KERJA MENURUT REGIONAL

Jumlah angkatan kerja tahun 2024 mengalami peningkatan di seluruh regional dibandingkan tahun sebelumnya. Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar dengan 81,73 juta jiwa. Kenaikan ini mencerminkan penguatan pasar kerja nasional dan peningkatan partisipasi angkatan kerja di berbagai wilayah Indonesia.



TINGKAT KEMISKINAN MENURUT REGIONAL

Tingkat kemiskinan di wilayah regional sebanding dengan jumlah penduduknya. Persentase penduduk miskin terbesar berada di regional Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,62 persen.



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	20
---------------------	----

I.

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi dan Kesejahteraan

Indikator Makro Ekonomi	28
-------------------------	----

Indikator Kesejahteraan Masyarakat	32
------------------------------------	----

II.

Perkembangan Fiskal APBN, APBD, dan Anggaran Konsolidasian

Overview Nasional 2024	48
------------------------	----

Perkembangan Kinerja Anggaran Regional	63
--	----

Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Agregat	79
--	----

Perkembangan Capaian Output Belanja Strategis (K/L & TKDD)	97
---	----

III.

Analisis Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L Dan DAK Fisik

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kanwil DJPb	116
---	-----

Pagu dan Realisasi Belanja K/L Secara Nasional	117
--	-----

Pagu dan Realisasi Belanja K/L Per Bidang	120
---	-----

Kendala dan Tantangan Secara Nasional	123
---------------------------------------	-----

Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda	125
--	-----

Regional Sumatera	126
-------------------	-----

Regional Jawa	132
---------------	-----

Regional Sulawesi	138
-------------------	-----

Regional Kalimantan	142
---------------------	-----

Regional Bali-Nusa Tenggara	148
-----------------------------	-----

Regional Maluku-Papua	152
-----------------------	-----



IV.

Analisis Tematik:

Sinergi Pusat-Daerah
Dalam Memperkuat
Ketahanan Pangan

Overview Sinergi Pusat-Daerah
Dalam Upaya Memperkuat
Ketahanan Pangan

160

Komposisi Realisasi dan Analisis Belanja
Ketahanan Pangan per Kementerian/Lembaga

164

Kesenjangan antara Alokasi Anggaran dengan
Prioritas Masalah

165

Perkembangan Ketahanan Pangan per Regional

174

Regional Jawa

174

Regional Sumatera

183

Regional Kalimantan

189

Regional Sulawesi

194

Regional Bali-Nusa Tenggara

200

Regional Maluku-Papua

205

V.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

214

Rekomendasi

218



Photo by
Tim Media Kanwil DJPb Prov. Sulteng

DAFTAR TABEL

I.

Tabel 1. 1.	Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020 dan Target 2024	29
Tabel 1. 2.	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Spasial	29
Tabel 1. 3.	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 2020 - 2024	30
Tabel 1. 4.	Laju Pertumbuhan PDB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	30
Tabel 1. 5.	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Spasial	30
Tabel 1. 6.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (persen), Maret 2022 - Maret 2024	35
Tabel 1. 7.	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2021 dan September 2024	36
Tabel 1. 8.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Regional September 2024	37
Tabel 1. 9.	Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Regional Tahun 2021-2024	40
Tabel 1. 10.	NTP Tertinggi dan Terendah Per Regional Tahun 2024	41
Tabel 1. 11.	NTN Tertinggi dan Terendah Per Regional Tahun 2024	43

II.

Tabel 2. 1.	Sebaran Pendapatan Negara di Tingkat Regional Tahun 2024	49
Tabel 2. 2.	Sebaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Tingkat Regional Tahun 2024 (triliun rupiah)	52
Tabel 2. 3.	I-Account APBD 2024	54
Tabel 2. 4.	APBN Regional Sumatera (triliun rupiah)	64
Tabel 2. 5.	APBN Regional Jawa (triliun rupiah)	65
Tabel 2. 6.	APBN Regional Kalimantan (triliun rupiah)	66
Tabel 2. 7.	APBN Regional Sulawesi (triliun rupiah)	67
Tabel 2. 8.	APBN Regional Bali-Nusa Tenggara (triliun rupiah)	68
Tabel 2. 9.	APBN Regional Maluku-Papua (triliun rupiah)	70
Tabel 2. 10.	APBD Regional Sumatera (triliun rupiah)	72
Tabel 2. 11.	APBD Regional Jawa (triliun rupiah)	73
Tabel 2. 12.	APBD Regional Kalimantan (triliun rupiah)	74
Tabel 2. 13.	APBD Regional Sulawesi (triliun rupiah)	75
Tabel 2. 14.	APBD Regional Bali-Nusa Tenggara (triliun rupiah)	76
Tabel 2. 15.	APBD Regional Maluku-Papua (triliun rupiah)	78
Tabel 2. 16.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sumatera	81
Tabel 2. 17.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Jawa	82
Tabel 2. 18.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Kalimantan	83
Tabel 2. 19.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Bali-Nusa Tenggara	83
Tabel 2. 20.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sulawesi	84
Tabel 2. 21.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Maluku-Papua	85
Tabel 2. 22.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sumatera	86
Tabel 2. 23.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Jawa	86
Tabel 2. 24.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Kalimantan	87
Tabel 2. 25.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Bali-Nusa Tenggara	88
Tabel 2. 26.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sulawesi	88
Tabel 2. 27.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Maluku-Papua	89
Tabel 2. 28.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sumatera	90
Tabel 2. 29.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Jawa	91
Tabel 2. 30.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Kalimantan	91
Tabel 2. 31.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara	92
Tabel 2. 32.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sulawesi	92
Tabel 2. 33.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Maluku-Papua	93
Tabel 2. 34.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sumatera	94
Tabel 2. 35.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Jawa	95
Tabel 2. 36.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Kalimantan	95
Tabel 2. 37.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara	96
Tabel 2. 38.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sulawesi	96
Tabel 2. 39.	Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Maluku-Papua	97
Tabel 2. 40.	Realisasi Output Strategis Tahun 2024	99
Tabel 2. 41.	Realisasi Output Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2024	101
Tabel 2. 42.	Realisasi Output Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2024	103
Tabel 2. 43.	Realisasi Output Strategis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2024	106
Tabel 2. 44.	Realisasi Output Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2024	108
Tabel 2. 45.	Realisasi Output Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2024	110
Tabel 2. 46.	Realisasi Output Strategis pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2024	112

III.

Tabel 3. 1.	Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar (miliar rupiah)	117
Tabel 3. 2.	Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi (miliar rupiah)	118
Tabel 3. 3.	Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang (miliar rupiah)	119
Tabel 3. 4.	Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Tahun 2024 (miliar rupiah)	120
Tabel 3. 5.	Alokasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB (miliar rupiah)	120
Tabel 3. 6.	Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan (miliar rupiah)	121
Tabel 3. 7.	Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian (miliar rupiah)	122
Tabel 3. 8.	Pagu Realisasi K/L Bidang Sanitasi (miliar rupiah)	123
Tabel 3. 9.	Pagu Realisasi K/L Bidang Air Minum (miliar rupiah)	123
Tabel 3. 10.	Klaster Tantangan Penganggaran	124
Tabel 3. 11.	Klaster Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa	124
Tabel 3. 12.	Klaster Tantangan Eksekusi Kegiatan	124
Tabel 3. 13.	Klaster Tantangan Regulasi Pelaksanaan Anggaran	125
Tabel 3. 14.	Klaster Tantangan SDM	125
Tabel 3. 15.	Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Sumatera (dalam miliar)	126
Tabel 3. 16.	Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Sumatera (dalam miliar)	127
Tabel 3. 17.	Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Jawa (miliar rupiah)	133
Tabel 3. 18.	Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Jawa (miliar rupiah)	134
Tabel 3. 19.	Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Sulawesi (miliar rupiah)	138
Tabel 3. 20.	Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Sulawesi (miliar rupiah)	139
Tabel 3. 21.	Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Kalimantan (miliar rupiah)	142
Tabel 3. 22.	Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Kalimantan (miliar rupiah)	143
Tabel 3. 23.	Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Bali - Nusa Tenggara (miliar rupiah)	149
Tabel 3. 24.	Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Bali - Nusa Tenggara (miliar rupiah)	149
Tabel 3. 25.	Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Maluku - Papua (miliar rupiah)	152
Tabel 3. 26.	Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Maluku - Papua (miliar rupiah)	153

IV.

Tabel 4. 1.	Komposisi Kinerja Program Ketahanan Pangan per Kementerian/Lembaga Tahun 2024	165
Tabel 4. 2.	Komposisi Kinerja Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan per Kementerian/Lembaga Tahun 2024	166
Tabel 4. 3.	Sasaran Ketahanan Pangan dalam RPJMN Tahun 2020-2024	167
Tabel 4. 4.	Alokasi Rincian Output Regulasi yang Belum Sesuai dalam Belanja Ketahanan Pangan K/L 2024	169
Tabel 4. 5.	Alokasi Rincian Output Non Regulasi yang Belum Sesuai dalam Belanja Ketahanan Pangan K/L 2024	169
Tabel 4. 6.	Alokasi Rincian Output Barang Non Infrastruktur yang Belum Sesuai dalam Belanja Ketahanan Pangan K/L 2024	170
Tabel 4. 7.	Alokasi Rincian Output Barang Infrastruktur yang Belum Sesuai dalam Belanja Ketahanan Pangan K/L 2024	171
Tabel 4. 8.	Kinerja Anggaran Program Ketahanan Pangan Regional Jawa vs Nasional 2024	177
Tabel 4. 9.	Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan Regional Jawa 2024	177
Tabel 4. 10.	IPM Regional Sumatera Tahun 2021-2024	183
Tabel 4. 11.	Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Tahun 2021-2024	183
Tabel 4. 12.	Kinerja Anggaran Program Ketahanan Pangan Regional Sumatera vs Nasional 2024	185
Tabel 4. 13.	Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan Regional Sumatera 2024	186
Tabel 4. 14.	Kinerja Anggaran Program Ketahanan Pangan Regional Kalimantan vs Nasional 2024	192
Tabel 4. 15.	Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan Regional Kalimantan 2024	192
Tabel 4. 16.	Kinerja Anggaran Program Ketahanan Pangan Regional Sulawesi vs Nasional 2024	197
Tabel 4. 17.	Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan Regional Sulawesi 2024	198
Tabel 4. 18.	Kinerja Anggaran Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Regional Bali - Nusa Tenggara Tahun 2024	202
Tabel 4. 19.	Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Program Ketahanan Pangan Regional Bali - Nusa Tenggara Tahun 2024	203
Tabel 4. 20.	Kinerja Anggaran Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Regional Maluku-Papua Tahun 2024	208
Tabel 4. 21.	Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Program Ketahanan Pangan Regional Maluku-Papua Tahun 2024	209

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1.	Pelaksanaan APBN di Tingkat Regional	23
Gambar A.2.	Pelaksanaan APBD di Tingkat Regional	24
Gambar 1.1.	Sebaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Spasial Tahun 2024	29
Gambar 1.2.	IPM 2024 Nasional	24
Gambar 2.1.	Pelaksanaan APBD di Tingkat Regional	56
Gambar 4.1.	Indeks Ketahanan Pangan Regional Jawa Tahun 2024	174
Gambar 4.2.	Indeks Ketahanan Pangan Regional Sumatera Tahun 2024	184
Gambar 4.3.	Indeks Ketahanan Pangan Regional Kalimantan Tahun 2024	189
Gambar 4.4.	Indeks Ketahanan Pangan Regional Sulawesi Tahun 2024	195
Gambar 4.5.	Indeks Ketahanan Pangan Regional Bali-Nusra Tahun 2024	200
Gambar 4.6.	Indeks Ketahanan Pangan Regional Maluku-Papua Tahun 2024	206

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Produk Domestik Regional Bruto 2020 - 2024	28
Grafik 1.2.	Distribusi PDB Tahun 2024	29
Grafik 1.4.	Perkembangan Laju Inflasi Nasional	31
Grafik 1.3.	Tingkat Inflasi Tahunan Indonesia	31
Grafik 1.5.	Tingkat Inflasi Provinsi Tahun 2024	32
Grafik 1.6.	Perkembangan IPM Tahun 2017 - 2024	33
Grafik 1.7.	Perbandingan IPM 2024 per Provinsi	34
Grafik 1.8.	Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2017-2024	34
Grafik 1.9.	Perbandingan Rasio Gini per Provinsi	35
Grafik 1.10.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2024 (Juta/%)	36
Grafik 1.11.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2021-2024	37
Grafik 1.12.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2021-2024	38
Grafik 1.13.	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024	38
Grafik 1.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 Menurut Tempat Tinggal	38
Grafik 1.15.	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 Menurut Jenis Kelamin	39
Grafik 1.16.	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2024 Menurut Tingkat Pendidikan (%)	39
Grafik 1.17.	Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2023-2024 (%)	39
Grafik 1.18.	Nilai Tukar Petani Per Provinsi Tahun 2024	41
Grafik 1.19.	Nilai Tukar Nelayan Per Provinsi Tahun 2024	43

Grafik 2. 1.	Sebaran Pendapatan Negara Tingkat Daerah Selain di Regional Jawa Tahun 2024	50
Grafik 2. 2.	Sebaran Belanja Pemerintah Pusat Selain di DKI Jakarta Tahun 2024	51
Grafik 2. 3.	Distribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tingkat Daerah Tahun 2024	52
Grafik 2. 4.	Perkembangan Target Komponen APBD 2022 - 2024 (triliun rupiah)	55
Grafik 2. 5.	Pertumbuhan Realisasi APBD Regional Dibandingkan Nasional	56
Grafik 2. 6.	Kontribusi Realisasi Komponen PAD	57
Grafik 2. 7.	Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer	57
Grafik 2. 8.	Perkembangan Pendapatan Regional Per Jenis	58
Grafik 2. 9.	Komposisi Belanja APBD 2024	58
Grafik 2. 10.	Realisasi Komponen Belanja Operasi Regional	59
Grafik 2. 11.	Pertumbuhan Belanja Operasional per Regional Tahun 2024	59
Grafik 2. 12.	Persentase Pertumbuhan Belanja di Luar Operasi Per Regional Tahun 2024	60
Grafik 2. 13.	Pertumbuhan Komponen Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SILPA (2022-2024) (triliun rupiah)	61
Grafik 2. 14.	Komposisi dan Perkembangan Penerimaan Pembiayaan (2023-2024) (triliun rupiah)	61
Grafik 2. 15.	Komposisi dan Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan (2023-2024) (triliun rupiah)	62
Grafik 2. 16.	Perkembangan Pembiayaan Regional (2023-2024) (miliar rupiah)	63
Grafik 2. 17.	Komposisi Belanja Pemerintah Regional Sumatera	65
Grafik 2. 18.	Komposisi Belanja Pemerintah Regional Jawa	66
Grafik 2. 19.	Komposisi Belanja Pemerintah Regional Kalimantan	67
Grafik 2. 20.	Komposisi Belanja Pemerintah Regional Sulawesi	68
Grafik 2. 21.	Komposisi Belanja Pemerintah Regional Bali-Nusa Tenggara	69
Grafik 2. 22.	Komposisi Belanja Pemerintah Regional Maluku-Papua	70
Grafik 2. 23.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 (c-to-c) Menurut Lapangan Usaha	80
Grafik 2. 24.	Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2024 (c-to-c) Menurut Pengeluaran	80
Grafik 2. 25.	Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2024 (c-to-c) Menurut Pengeluaran	81
Grafik 2. 26.	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Sumatera	81
Grafik 2. 27.	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Jawa	82
Grafik 2. 28.	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Kalimantan	83
Grafik 2. 29.	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Bali-Nusa Tenggara	83
Grafik 2. 30.	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Sulawesi	84
Grafik 2. 31.	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Maluku-Papua	85
Grafik 2. 32.	Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Tiap Regional Terhadap PDRB 2024	85
Grafik 2. 33.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Sumatera	86
Grafik 2. 34.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Jawa	87
Grafik 2. 35.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Kalimantan	87
Grafik 2. 36.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Bali-Nusa Tenggara	87
Grafik 2. 37.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Sulawesi	88
Grafik 2. 38.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Maluku-Papua	88

Grafik 2. 39.	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tiap Regional Terhadap PDRB 2024	89
Grafik 2. 40.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sumatera	90
Grafik 2. 41.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Jawa	90
Grafik 2. 43.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Kalimantan	91
Grafik 2. 42.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara	91
Grafik 2. 44.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sulawesi	92
Grafik 2. 45.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Maluku-Papua	93
Grafik 2. 46.	Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Tiap Regional terhadap PDRB 2024	93
Grafik 2. 47.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sumatera	94
Grafik 2. 48.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Jawa	95
Grafik 2. 49.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Kalimantan	95
Grafik 2. 50.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara	96
Grafik 2. 51.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sulawesi	96
Grafik 2. 52.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Maluku-Papua	97
Grafik 2. 53.	Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tiap Regional terhadap PDRB 2024	97

III.

Grafik 3.1 .	Permasalahan/Tantangan Atas Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik Tahun 2024	124
--------------	---	-----

IV.

Grafik 4.1.	Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2018 – 2024	161
Grafik 4.2.	Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional	162
Grafik 4.3.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nasional	163
Grafik 4.4.	Alokasi Ketahanan Pangan Tahun 2024	166
Grafik 4.5.	Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023 - 2024	172
Grafik 4.6.	Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Jawa dan Nasional Tahun 2018-2024	174
Grafik 4.7.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Jawa	175
Grafik 4.8.	Perbandingan Subsektor NTP Regional Jawa	175
Grafik 4.9.	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Jawa	176
Grafik 4.10.	Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2018-2024	184
Grafik 4.11.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Sumatera	184
Grafik 4.12.	Perbandingan Subsektor NTP Regional Sumatera	184
Grafik 4.13.	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2020 -2024 Regional Sumatera	185
Grafik 4.14.	Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2018-2024	189
Grafik 4.15.	Kategori Skor IKP Regional Kalimantan	189
Grafik 4.16.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Kalimantan	190
Grafik 4.17.	Perbandingan Subsektor NTP Regional Kalimantan	190
Grafik 4.18.	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Kalimantan	191
Grafik 4.19.	Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Sulawesi dan Nasional Tahun 2018-2024	195
Grafik 4.20.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Sulawesi	195
Grafik 4.21.	Perbandingan Subsektor NTP Regional Sulawesi	196
Grafik 4.22.	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2020 -2024 Regional Sulawesi	196
Grafik 4.23.	Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Bali - Nusa Tenggara dan Nasional Tahun 2018-2024	200
Grafik 4.24.	Sebaran Skor IKP Regional Bali - Nusa Tenggara Tahun 2024	200
Grafik 4.25.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Bali - Nusa Tenggara	201
Grafik 4.26.	Perbandingan Subsektor NTP Regional Bali - Nusa Tenggara	201
Grafik 4.27.	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2020 -2024 Regional Maluku-Papua	202
Grafik 4.28.	Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Maluku-Papua dan Nasional Tahun 2018-2024	206
Grafik 4.29.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Maluku Papua	207
Grafik 4.30.	Perbandingan Subsektor NTP Regional Maluku - Papua	207
Grafik 4.31.	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2020 -2024 Regional Maluku-Papua	208



*Halaman ini
sengaja dikosongkan*



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi dan Kesejahteraan

Tahun 2024 merupakan masa transisi pemerintahan yang diwarnai dengan berbagai isu global. Perlambatan ekonomi Tiongkok, kebijakan moneter “*Higher for Longer*” di Amerika Serikat, konflik perang berkelanjutan Rusia-Ukraina, eskalasi konflik di Timur Tengah, dan perang dagang Amerika Serikat – Tiongkok sedikit banyak mempengaruhi pergerakan ekonomi di Indonesia. APBN sebagai *shock absorber* memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara dalam segala aspek untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif.

Di tengah badai isu global, kebijakan fiskal dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. APBN dan APBD sebagai instrumen pemerintah dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif dan menjaga risiko sebagai *buffer* perekonomian tetap terkendali, sehingga sehat dan berkelanjutan. Belanja pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian.

Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan performa yang *resilient* dengan menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp22.139 triliun sehingga berhasil mencapai Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan tersebut telah berhasil melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi global dan mendekati asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2024 sebesar 5,2 persen (y-on-y). Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Maluku-Papua yaitu sebesar 7,81 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi paling rendah tercatat pada regional Sumatera dengan tingkat pertumbuhan 4,45 persen.

Hal tersebut menandakan bahwa momentum pertumbuhan perekonomian nasional tetap terjaga di tengah gejolak tantangan global. Sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar PDB Nasional, dengan pertumbuhan sebesar 4,94 persen pada tahun 2024. Kelompok konsumsi yang tumbuh paling tinggi adalah transportasi dan komunikasi

dengan laju pertumbuhan sebesar 6,56 persen sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat atas mobilitas, distribusi dan teknologi komunikasi. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menjadi penyumbang PDB terbesar pada tahun 2024.

Tingkat inflasi Indonesia di tahun 2024 berhasil menurun ke angka 1,57 persen (y-on-y) setelah meningkat tinggi di tahun 2022 hingga 5,51 persen (y-on-y) akibat pandemi. Permintaan yang sempat tertahan mulai stabil, dan rantai pasokan kembali berfungsi normal. Penurunan tingkat inflasi juga ditopang oleh terjaganya berbagai komponen inflasi. Dari sisi tingkat inflasi regional, Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi baru memiliki tingkat inflasi tertinggi secara nasional yaitu 5,36 persen (y-on-y), tingginya inflasi Provinsi ini beriringan dengan tingginya inflasi pada Provinsi Papua Tengah yang juga merupakan provinsi baru dengan inflasi sebesar 3,27 persen. Tingginya inflasi pada kedua provinsi tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai provinsi baru, selain itu juga relatif masih rendahnya aksesibilitas dan distribusi.

Salah satu sasaran utama kebijakan fiskal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari perbaikan berbagai indikator kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,81 pada 2017 menjadi 75,02 pada 2024, menggambarkan kemajuan dalam kemampuan dasar penduduk untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan memiliki standar hidup layak. Secara spasial, pada 2024 terdapat 24 provinsi dengan nilai IPM di bawah angka nasional, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tertinggal mulai mengalami perbaikan pembangunan manusia. Namun demikian, kesenjangan antardaerah masih nyata, terlihat dari selisih hampir 30 poin antara IPM tertinggi di DKI Jakarta dan terendah di Papua Pegunungan, yang menegaskan

tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.

Secara nasional, tingkat ketimpangan pendapatan Indonesia sempat membaik sejak 2017 hingga kemudian terganggu oleh pandemi Covid-19. Pada 2024, Gini Ratio kembali membaik menjadi 0,379—level terendah dalam tujuh tahun terakhir. Dari sisi kewilayahan, 31 provinsi memiliki tingkat ketimpangan yang berada di bawah rata-rata nasional, dengan rasio tertinggi di DI Yogyakarta (0,435) dan terendah di Bangka Belitung (0,244). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan relatif lebih rendah di sebagian besar daerah.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan lonjakan jumlah penduduk miskin pada 2020, tetapi berbagai program pemulihan ekonomi berhasil mengembalikan tren penurunannya. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen—level terendah dalam satu dekade terakhir. Pemulihan serupa terlihat pada tingkat pengangguran terbuka. Seiring pertumbuhan ekonomi kembali positif, konsumsi meningkat, dan investasi bergerak, sektor-sektor padat karya mulai kembali menyerap tenaga kerja. Jumlah pengangguran pun turun signifikan dari 9,77 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 7,47 juta orang pada Agustus 2024. Secara nasional, Nilai Tukar Petani menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024 yang meningkat cukup signifikan hingga mencapai 120,26. Laju kenaikan indeks Harga yg Diterima Petani (It) yang jauh lebih tinggi dibandingkan indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) menunjukkan harga komoditas pertanian yang dijual petani mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan kenaikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100, menandakan kesejahteraan petani yang relatif baik.

Tren fluktuatif di lima tahun terakhir atas Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih terjadi hingga

tahun 2024. Indeks Harga yg Diterima Nelayan (It) mengalami penurunan di tahun 2024 dari 122 pada tahun 2023 menjadi 120,86, hal ini disebabkan karena penurunan pada komponen penerimaan Penangkapan Laut sebesar 1,36 basis poin (y-on-y), sementara kenaikan pada komponen penerimaan Penangkapan Perairan Umum hanya sebesar 1,7 basis poin (y-on-y) sehingga tidak cukup menahan laju penurunan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Lb) dari 115,75 di tahun 2023 menjadi 118,77, didorong oleh kelompok pengeluaran indeks konsumsi Rumah Tangga, indeks Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal. Secara umum, Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2024 mengalami penurunan di hampir seluruh provinsi. Secara nasional, kondisi ini menyebabkan jumlah provinsi dengan NTN di bawah 100 meningkat signifikan, dari sebelumnya hanya 5 provinsi pada 2023 menjadi 14 provinsi pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya yang dibayar nelayan (lb), baik konsumsi rumah tangga maupun biaya operasional seperti BBM yang lebih cepat dibandingkan kenaikan harga ikan yang diterima (It), sehingga daya beli nelayan di banyak daerah semakin tertekan.

Perkembangan Fiskal APBN, APBD dan Anggaran Konsolidasian

Di tahun 2024, Pendapatan negara dan hibah dapat mencapai kinerja yang baik melalui stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik, penguatan penerimaan perpajakan, dukungan penerimaan PNPB serta peningkatan signifikan realisasi hibah. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 2,4 persen (y-on-y) dari Rp2.783,93 triliun di tahun 2023 menjadi Rp2.850,60 triliun pada tahun 2024, realisasi tersebut melewati target tahun 2024 hingga 101,72 persen. Regional Jawa berhasil mencapai realisasi pendapatan negara tertinggi seiring dengan kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan yang lebih banyak terjadi di regional Jawa. Realisasi pendapatan pajak di regional Jawa di tahun 2024 mencapai Rp1.929,68 triliun sementara pendapatan PNPB sebesar Rp540,12 triliun. Tingginya tingkat ekonomi di regional Jawa

dipengaruhi oleh tingginya tingkat penerimaan pajak.

Belanja negara juga mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen dari Rp3.121,22 triliun di tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.359,77 triliun di tahun 2024. Realisasi tersebut melampaui alokasi APBN 2024 sebesar 100,49 persen dari target Rp3.343,49 triliun. Realisasi belanja K/L antara lain digunakan untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN, dan pelaksanaan pemilu tahun 2024, sementara belanja non K/L dimanfaatkan untuk pembayaran bunga utang, pembayaran subsidi energi dan pupuk, dan penyaluran bantuan kemasyarakatan. Wilayah Jawa mendapatkan distribusi realisasi belanja K/L tertinggi sebesar 72,77 persen, diikuti wilayah Sumatera 9,75 persen, Kalimantan 6,43 persen, Sulawesi 5,04 persen, Maluku-Papua 3,31 persen serta Bali-Nusa Tenggara 2,7 persen. Beberapa alasan perbedaan proporsi dari masing-masing wilayah antara lain (1) pencatatan belanja dalam rangka kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di wilayah Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program perlindungan sosial; dan (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

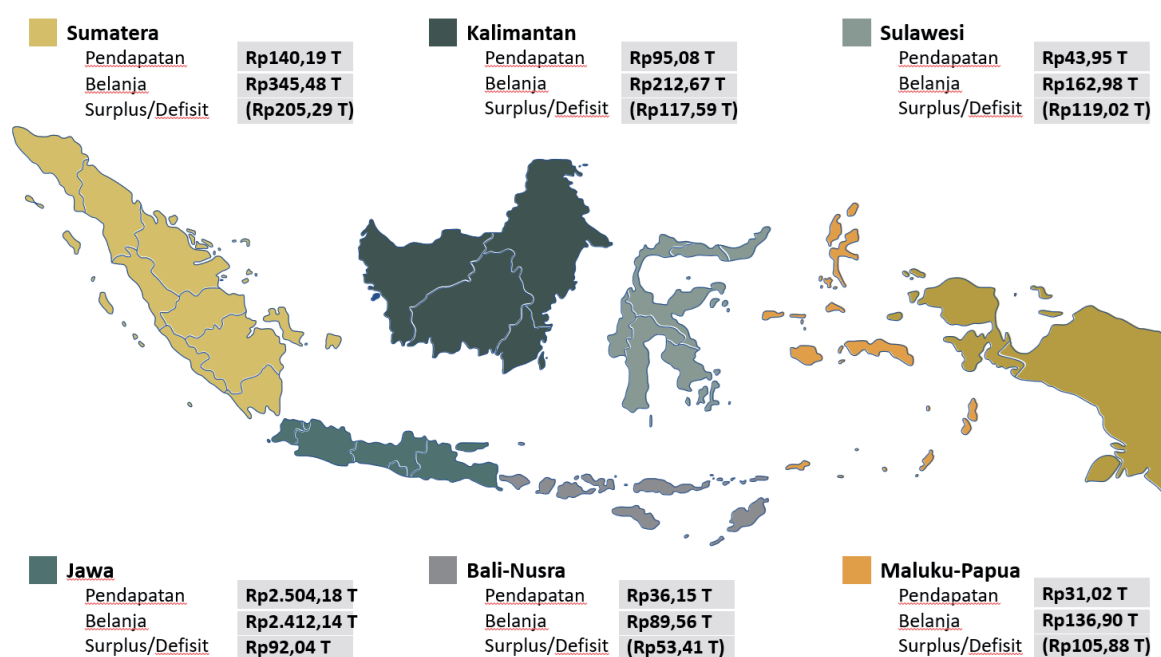
Pertumbuhan negatif terjadi pada realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 2,03 persen menjadi sebesar Rp863 triliun di tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan Dana Bagi Hasil hingga 25,52 persen menjadi sebesar Rp153,17 triliun di tahun 2024 akibat penurunan penerimaan ekspor dan harga komoditas pertambangan di tahun sebelumnya. Kalimantan mendapatkan proporsi terbesar dari realisasi DBH yaitu sebesar 42,04 persen; sedangkan Jawa mendapatkan proporsi terbesar untuk realisasi DAU sebesar 31,59 persen. Kontraksi yang terjadi di sebagian besar wilayah menandakan adanya penyesuaian kebijakan transfer fiskal. Lebih lanjut penurunan

tajam pada wilayah Kalimantan sebesar 10,89 persen (y-on-y) menunjukkan adanya pergeseran prioritas alokasi belanja karena pembangunan IKN lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah pusat.

Realisasi defisit APBN tahun 2024 sebesar Rp509,16 triliun ditutupi oleh pembiayaan yang terkumpul sebanyak Rp554,89 triliun. Selisih dari keduanya menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 45,73 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk

penyempitan defisit dan bahkan menjadi surplus. SiLPA/SIKPA juga diproyeksikan turun dari Rp90,91 triliun di tahun 2023 menjadi Rp75,71 triliun di tahun 2024, atau berkurang 15,2 triliun. Hal ini menggambarkan adanya optimalisasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga dana yang mengendap pada akhir tahun dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, arah kebijakan fiskal daerah tahun 2024 menunjukkan pengelolaan yang lebih sehat dengan defisit yang menyempit menjadi surplus, berkurangnya kebutuhan pembiayaan,

Gambar A.1. Pelaksanaan APBN di Tingkat Regional



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

mendukung kebutuhan prioritas nasional maupun penyelesaian kewajiban pemerintah. Dari sisi anggaran daerah, dalam kurun waktu 2022 – 2024, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi Surplus/Defisit APBD secara nasional menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, defisit yang sebelumnya sebesar Rp7,44 triliun di tahun 2023 menjadi surplus Rp3,42 triliun atau mengalami perbaikan sebesar Rp10,86 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan belanja, sehingga terjadi

serta pemanfaatan anggaran yang lebih optimal untuk mendukung capaian pembangunan daerah.

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2024 di tiap regional berkisar antara 6,48 persen – 18,10 persen. Dengan gap sebesar 11,62 persen, regional Maluku-Papua menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB terbesar dan regional Jawa menjadi yang terendah. Sedangkan untuk Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2024 di seluruh regional berkisar antara 28,48 persen – 36,43 persen,

dengan regional Sulawesi menjadi kawasan dengan kontribusi tertinggi, dan wilayah Maluku-Papua dengan kontribusi terendah. Selanjutnya kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) terhadap PDRB tahun 2024 di seluruh regional rata-rata cukup tinggi dengan regional Sumatera, Jawa, Bali - Nusa Tenggara dan Sulawesi berada di atas 45%.

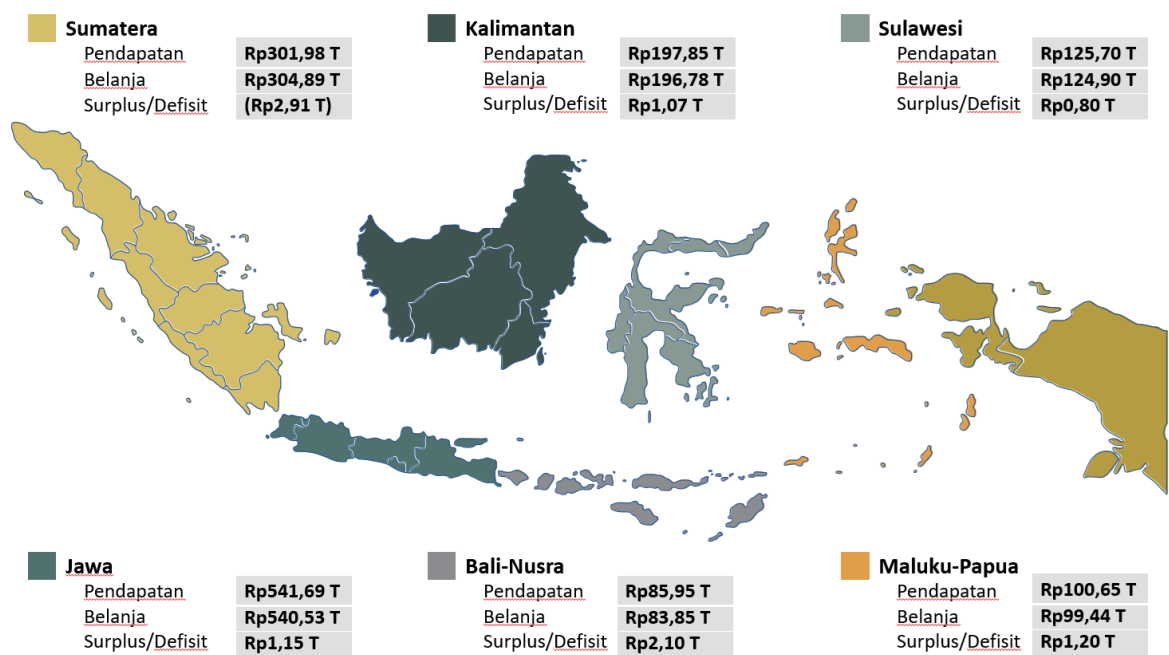
Dalam rangka mendukung implementasi penganggaran berbasis kinerja melalui Monev Pelaksanaan Anggaran, sejak tahun 2019,

mencapai Rp1.321,93 triliun.

Monev Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD 2024

Monev sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik dilakukan terhadap 6 bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu bidang air minum, bidang jalan, bidang kesehatan dan KB, bidang pendidikan, bidang pertanian dan bidang sanitasi yang dialokasikan pada beberapa K/L antara lain, Kementerian PUPR,

Gambar A.2. Pelaksanaan APBD di Tingkat Regional



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

seluruh Satker K/L telah melaporkan data capaian output dengan tingkat partisipasi pada tahun 2024 mencapai 99,89 persen setiap bulan. Sebagai upaya untuk mendorong kualitas dan pemanfaatan data capaian output Satker K/L, telah dilakukan identifikasi dan pengelompokkan output-output yang bersifat strategis berdasarkan sektor prioritas yaitu sektor perndidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor perlindungan sosial, dan sektor ketahanan pangan. Untuk mendukung ketercapaian output tersebut, pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga telah merealisasikan belanja K/L pada tahun 2024

Kemendikbud Ristek, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dengan total pagu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik pada keempat K/L tersebut sebesar Rp97.518,2 miliar atau 24,3% dari total anggaran yang dialokasikan untuk keempat K/L tersebut. Berdasarkan provinsi, alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik secara nominal terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp26.680,7 miliar. Hal ini dikarenakan terdapat program nasional yang dibayarkan secara terpusat dari Jakarta, namun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia.

Alokasi belanja terbesar dengan nominal Rp56.941,1 miliar ada di bidang jalan dengan realisasi mencapai 98,1% atau Rp55.853,5 miliar. Hal ini menunjukkan penyerapan yang baik di bidang jalan. Untuk bidang kesehatan dan KB, alokasi belanja K/L mencapai Rp144,1 miliar dengan realisasi 70,1% atau Rp101 miliar. Masih terdapat beberapa RO dengan tingkat penyerapan yang beragam. Selanjutnya, kinerja realisasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik bidang pendidikan menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan realisasi sebesar 98,1% atau sebesar Rp25.279,8 miliar. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam belanja untuk mendukung berbagai program di sektor pendidikan. Di bidang pertanian, alokasi realisasi belanja K/L mencapai 94,8% atau sebesar Rp2.863,6 miliar. Hal ini menunjukkan efektivitas penyaluran yang baik dengan beberapa RO menunjukkan penyerapan optimal mendekati 100%, antara lain area penyaluran benih jagung, benih padi, jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi, dan layanan kesehatan hewan. Berikutnya, realisasi belanja K/L untuk bidang sanitasi mencapai 64,7% atau sebesar 2.733,9 miliar. Hal ini menunjukkan proyek-proyek sanitasi telah berjalan dengan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran yang lebih baik.

Sinergi Pusat-Daerah Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan

Salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional yaitu ketahanan pangan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengukur capaian tersebut, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas konsumsi masyarakatnya. Berdasarkan data terbaru, rata-rata IKP nasional mencapai sekitar 76,6. Perkembangan IKP di seluruh regional dalam periode 2018-2024 berada di rentang

65-80, kecuali regional Maluku-Papua yang berada di rentang 45-50. Daerah Indonesia timur dengan rata-rata nilai IKP rendah masih menghadapi tantangan pada aspek konektivitas logistik, ketergantungan pada komoditas tunggal, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Secara keseluruhan, tren 2018-2024 menunjukkan peningkatan ketahanan pangan nasional yang positif, dengan kesenjangan antarwilayah yang masih perlu diatasi melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur logistik pangan, serta pemanfaatan data dan inovasi teknologi pertanian untuk menjangkau daerah-daerah dengan ketahanan pangan rendah.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tahun 2024 dilaksanakan melalui berbagai program lintas kementerian/lembaga yang mencakup aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan tata kelola pangan. Berdasarkan data realisasi anggaran di tahun 2024, total alokasi anggaran untuk program-program ketahanan pangan mencapai Rp52,77 triliun, dengan realisasi sebesar Rp43,51 triliun atau 82,45% persen dari pagu nasional. Kementerian PUPR mencatat kontribusi terbesar dengan pagu Rp29,64 triliun dan realisasi 76,5 persen, yang dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta infrastruktur air. Kementerian Pertanian memiliki pagu Rp15,62 triliun dan realisasi 91,54 persen, dengan kinerja tertinggi pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (98,06 persen). Kementerian Kelautan dan Perikanan merealisasikan 86,57 persen dari total pagu Rp7,25 triliun, dengan capaian tertinggi pada Program Kualitas Lingkungan Hidup (92,25 persen). Kementerian Perdagangan menunjukkan kinerja terbaik secara persentase dengan realisasi 99,31 persen dari pagu Rp241,1 miliar. Sementara itu, Badan Pangan Nasional walaupun masih dalam tahap awal pelaksanaan dapat mencapai realisasi 99,43 persen dari pagu Rp29,1 miliar, seiring proses penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.



*Halaman ini
sengaja dikosongkan*

A woman is cooking in a traditional stone kitchen. She is sitting on the floor, stirring a large pot of food over a wood fire. The kitchen has a rustic, stone wall and a thatched roof. The lighting is warm and focused on the woman and the fire.

I. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN



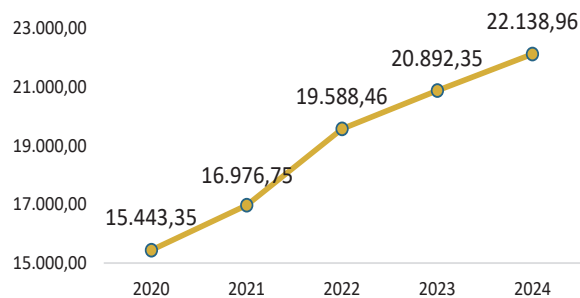
I. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

I.1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

I.1.A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diwarnai dengan berbagai isu global yang menantang. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, kebijakan moneter “*Higher for Longer*” di Amerika Serikat, konflik perang yang berkelanjutan Rusia-Ukraina, eskalasi konflik di Timur Tengah, perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dengan tarif impor baru telah sedikit banyak mempengaruhi pergerakan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, pemilihan umum Presiden Indonesia pada kuartal kedua tahun 2024 serta beragam kebijakan baru dari pemerintah terpilih yang baru, semakin mewarnai kondisi ekonomi Indonesia di penghujung tahun 2024. APBN sebagai *shock absorber* memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara dalam segala aspek untuk tetap berada pada koridor pertumbuhan yang positif.

Grafik 1.1. Produk Domestik Bruto 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tahun 2024 dipenuhi kondisi ketidakpastian dan volatilitas ekonomi global, namun kinerja perekonomian Indonesia terbukti menunjukkan performa yang *resilient* dengan berhasil menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp22.138,96 triliun. Capaian ini secara historis berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen dari periode sebelumnya tahun 2023 sebesar Rp20.892,35 triliun. Pertumbuhan tersebut telah berhasil melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi global namun belum berhasil melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2024 sebesar 5,2 persen (*y-on-y*).

Tabel 1. 1. Produk Domestik Bruto Tahun 2020 dan Target 2024

Negara/Kelompok Negara	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dunia	2,9	-2,7	6,6	3,6	3,5	3,3
Negara Maju	1,8	-3,9	5,9	3	1,7	1,8
Amerika Serikat	2,5	-2,2	6	2,5	2,8	2,7
Eropa	1,6	-6,0	6,3	3,5	0,4	0,8
Jepang	-0,4	-4,1	2,6	0,9	1,4	0,1
Negara Berkembang	3,6	-1,8	7	4,1	4,3	4,2
ASEAN-5	4,2	-4,4	4,1	5,5	4,1	4,6
Tiongkok	6	2,2	8,4	3	5,2	4,8
India	3,9	-5,8	9,7	7,6	9,1	6,5
Indonesia	5	-2,1	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber : *World Economics Outlook IMF* (database April 2025)

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOORLD

I.1.A.1. Pertumbuhan Ekonomi Spasial

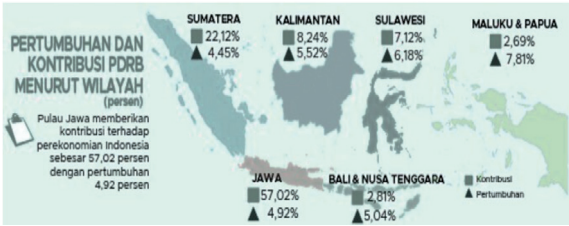
Pertumbuhan positif juga ditunjukkan secara spasial, pertumbuhan ekonomi masih didominasi regional Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 57,02 persen, diikuti regional Sumatera 22,12 persen, regional Kalimantan 8,24 persen, regional Sulawesi 7,12 persen, regional Bali-Nusa Tenggara 2,81 persen, dan regional Maluku-Papua sebesar 2,69 persen. Namun, regional Maluku-Papua memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibandingkan regional lain, sebesar 7,81 persen. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan beragam program prioritas pada RPJMN 2020-2024 yang berakhir pada tahun ini, di bidang infrastruktur dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah terdapat pada regional Sumatera dengan tingkat pertumbuhan 4,45 persen. Kontribusi dan pertumbuhan ekonomi secara spasial masing-masing wilayah disajikan dalam tabel 1.2 di bawah. Porsi perekonomian yang masih tersentralisasi pada pulau Jawa memberikan dampak sangat signifikan

Tabel 1. 2. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

	Nominal PDRB 2024	Proporsi PDRB 2024	Pertumbuhan Ekonomi
Sumatera	4.870.293,25	22,12%	4,45%
Jawa	12.555.910,68	57,02%	4,92%
Kalimantan	1.815.074,48	8,24%	5,52%
Sulawesi	1.568.828,50	7,12%	6,18%
Bali-Nusra	617.989,18	2,81%	5,04%
Maluku-Papua	592.453,29	2,69%	7,81%
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (C-to-C)			5,03%
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (Y-on-Y)			5,02%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1. Sebaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Spasial Tahun 2024



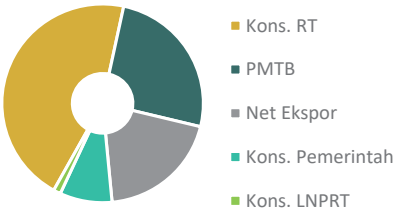
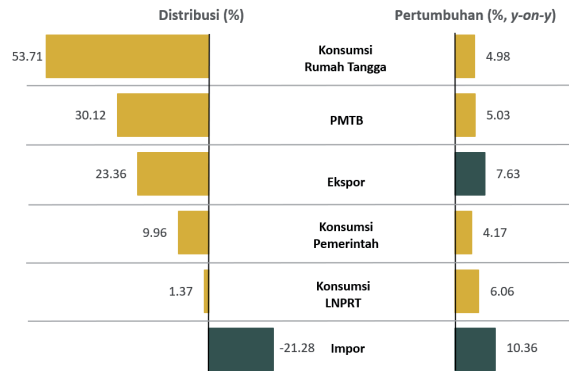
Sumber : Badan Pusat Statistik

pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan signifikannya pengaruh porsi perekonomian pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi pulau Jawa berhasil mengalami peningkatan menjadi 4,92 persen (Y-on-y) pada tahun 2024 dari 4,86 persen (Y-on-y) pada tahun 2023.

I.1.A.1. Perkembangan PDB Berdasarkan Pengeluaran

Pada sisi pengeluaran, Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar PDB nasional, konsumsi ini pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2023 sebesar 4,82 persen.

Grafik 1.2. Distribusi PDB Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1. 3. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 2020 - 2024

	Perkembangan Pertumbuhan Komponen Pengeluaran					
	2020	2021	2022	2023	2024	Tren
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,01	4,94	4,82	4,94	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-4,21	1,62	5,66	10,03	12,48	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,12	4,25	-4,42	3,02	6,61	
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-4,96	3,8	3,87	3,76	4,61	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1. 4. Laju Pertumbuhan PDB Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Laju Pertumbuhan PDB Pengeluaran (Seri 2010), Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2020	2021	2022	2023	2024
a. Makanan dan Minuman	0,51	1,46	3,46	3,44	4,25
b. Pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya	-4,21	-0,07	4,31	4,47	2,55
c. Perumahan dan perlengkapan rumah tangga	2,28	2,19	2,79	3,8	4,34
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,09	1,7	2,41	3,99	4,02
e. Transportasi dan komunikasi	-9,57	2,59	9,38	7,59	6,56
f. Restoran dan hotel	-8,14	3,87	6,57	6,38	6,53
g. Lainnya	-0,65	1,83	2,7	2,9	3,47

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh seiring terkendalinya inflasi dan daya beli masyarakat dengan kelompok konsumsi yang tumbuh paling tinggi adalah transportasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 6,56 persen. Laju pertumbuhan ini masih tinggi sejalan dengan

semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat atas mobilitas, distribusi, dan teknologi komunikasi. Selain itu, laju pertumbuhan restoran dan hotel juga masih tinggi sebesar 6,53 persen, hal ini masih berkaitan dengan pertumbuhan transportasi. Namun, apabila dilihat berdasarkan delta peningkatan laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya, kelompok pengeluaran makanan dan minuman (selain restoran) mengalami delta laju pertumbuhan yang paling tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,81 persen. Kelompok pengeluaran lainnya dengan peningkatan sebesar 0,57 persen, yang ditopang oleh peningkatan aktivitas rekreasi seiring peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, serta berbagai event olahraga dan hiburan.

I.1.A.3. Perkembangan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari sisi Lapangan Usaha, sektor Industri Pengolahan dan (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, menjadi penyumbang PDB terbesar pada tahun 2024. Porsi PDB pada kedua sektor tersebut mencapai sepertiga dari PDB Nasional.

Seluruh sektor menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Sektor jasa lainnya menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi sebesar 9,8 persen, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki laju pertumbuhan

Tabel 1. 5. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

No.	PDB Lapangan Usaha	Distribusi PDB ADHB			Laju Pertumbuhan					
		2023	2024	Tren	2020	2021	2022	2023	2024	Tren
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,53	12,61		1,77	1,87	2,25	1,31	0,67	
2.	Pertambangan dan Penggalian	10,52	9,15		-1,95	4	4,38	6,12	4,9	
3.	Industri Pengolahan	18,67	18,98		-2,93	3,39	4,89	4,64	4,43	
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	1,03		-2,34	5,55	6,61	4,91	4,77	
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06		4,94	4,97	3,23	4,9	1,56	
6.	Konstruksi	9,92	10,09		-3,26	2,81	2,01	4,91	7,02	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,94	13,07		-3,79	4,63	5,53	4,85	4,86	
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,89	6,13		-15,05	3,24	19,87	13,96	8,69	
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,52	2,64		-10,26	3,88	11,94	10	8,56	
10.	Informasi dan Komunikasi	4,23	4,34		10,61	6,82	7,73	7,59	7,57	
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	4,17		3,25	1,56	1,93	4,77	4,74	
12.	Real Estat	2,42	2,35		2,32	2,78	1,72	1,43	2,5	
13.	Jasa Perusahaan	1,83	1,92		-5,44	0,73	8,77	8,24	8,38	
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,95	3,04		-0,03	-0,03	2,52	1,51	6,4	
15.	Jasa Pendidikan	2,79	2,81		2,61	0,11	0,55	1,77	3,75	
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	1,26		11,56	10,45	2,75	4,67	8,11	
17.	Jasa Lainnya	1,94	2,05		-4,1	2,12	9,47	10,52	9,8	

Sumber : Badan Pusat Statistik

paling rendah sebesar 0,67 persen. Tingginya laju pertumbuhan Sektor jasa lainnya sejalan dengan aktivitas rekreasi dan pariwisata, serta pertumbuhan pada jasa-jasa lainnya seperti beragam jasa konsultasi, dan perhelatan beragam event besar.

Sektor transportasi dan pergudangan masih memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini masih relevan seperti tahun sebelumnya dimana masih dalam koridor RPJMN 2020-2024. Dalam periode ini terdapat program prioritas yang ditargetkan harus selesai pada tahun terakhir. Penyelesaian pekerjaan pada akhir periode tersebut secara langsung dapat meningkatkan beragam fasilitas transportasi seperti jalan tol, kereta api, dan bandara.

I.1.B. Perkembangan Tingkat Inflasi

I.1.B.1. Perkembangan Inflasi Nasional

Setelah mengalami peningkatan inflasi tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir pada tahun 2022 hingga 5,51 persen (y-on-y), pada tahun 2024 tingkat inflasi nasional berhasil menurun berada pada angka 1,57 persen (y-on-y). Tahun 2024 ditandai dengan mulai normalnya total aktivitas ekonomi setelah pandemi Covid-19. Permintaan yang sempat tertahan mulai stabil, dan rantai pasokan kembali berfungsi normal. Penurunan ketidakpastian global dan perbaikan situasi ekonomi domestik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjaga harga tetap stabil.

Grafik 1.3. Tingkat Inflasi Tahunan Indonesia

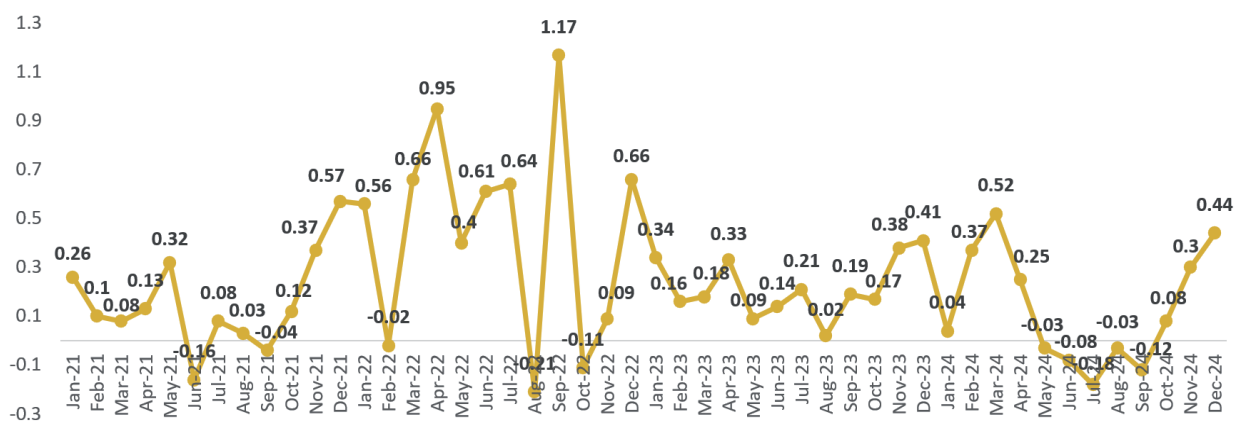


Sumber : Badan Pusat Statistik

Meskipun tekanan eksternal mereda, peran kebijakan domestik sangat vital. Bank Indonesia (BI) dan pemerintah (melalui TPID dan TPID) menunjukkan koordinasi yang kuat. BI merespons kenaikan inflasi di tahun 2022 dengan menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan permintaan. Langkah ini berhasil mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara itu, pemerintah fokus pada stabilisasi pasokan pangan domestik melalui berbagai program seperti operasi pasar yang membantu menjaga harga pangan tetap terjangkau. Stabilitas harga ini sangat penting karena menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Di tengah risiko volatilitas kondisi global, APBN Tahun 2024 berperan penting sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejala perekonomian global.

Laju inflasi dalam beberapa tahun memiliki pola yang cenderung sama yaitu terjadi peningkatan pada periode kuartal ke-2 dan kuartal ke-4. Pada tahun 2024 terdapat perubahan berupa majunya laju inflasi semester pertama pada kuartal ke-1 yang disebabkan waktu yang

Grafik 1.4. Perkembangan Laju Inflasi Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik

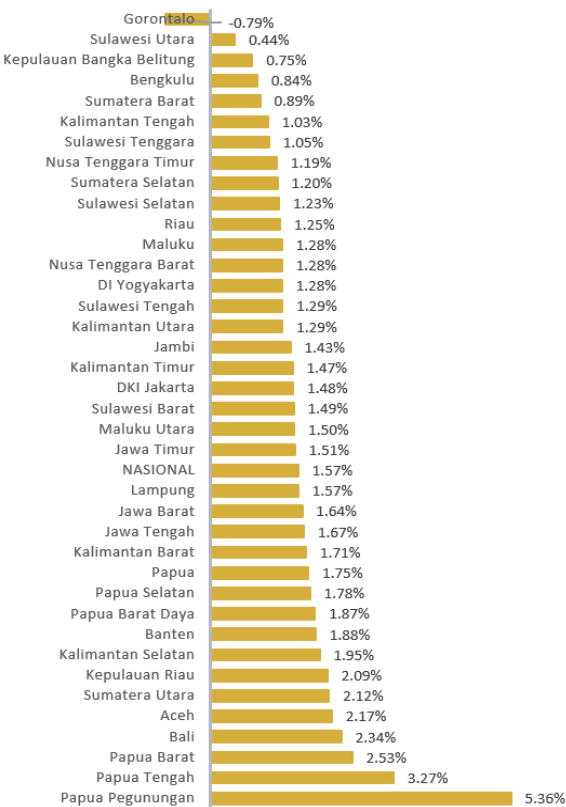
bertepatan dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada momentum hari raya keagamaan dan libur sekolah. Namun di tahun 2024 laju inflasi memiliki pola yang lebih stabil dimana tidak terdapat kenaikan yang signifikan maupun penurunan yang drastis apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi bulanan Desember 2024 memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya tetapi lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,59 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,93 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,48 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,30 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.

I.1.B.2. Perkembangan Inflasi Regional

Tingkat inflasi seluruh provinsi di Indonesia memiliki variasi yang berbeda. Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi baru memiliki tingkat inflasi tertinggi secara nasional yaitu 5,36 persen (*y-on-y*), tingginya inflasi Provinsi ini beriringan dengan tingginya inflasi pada Provinsi Papua Tengah yang juga merupakan provinsi baru dengan inflasi sebesar 3,27 persen. Pada Provinsi Papua Pegunungan, inflasi paling tinggi sebesar 5,36 persen yang terjadi pada Kabupaten Jayawijaya. Tingginya

Grafik 1.5. Tingkat Inflasi Provinsi Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

inflasi pada kedua provinsi tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai provinsi baru dan masih rendahnya aksesibilitas dan distribusi barang.

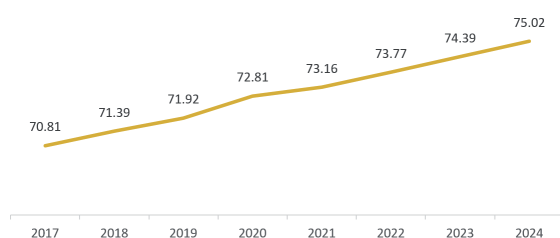
I.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I.2.A. Indeks Pembangunan Manusia

I.2.A.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam tujuh tahun terakhir, pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan kemajuan yang konsisten. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 70,81 pada 2017 menjadi 75,02 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kemampuan dasar manusia untuk hidup sehat, berpengetahuan, dan memiliki standar hidup layak. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kualitas antarprovinsi yang perlu diperhatikan.

Grafik 1.6. Perkembangan IPM Tahun 2017 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

Keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang disertai upaya pemulihan ekonomi menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Sejak tahun 2017, IPM Indonesia terus bertumbuh secara konsisten dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia kembali menunjukkan peningkatan dan mencapai 75,02, naik 0,63 poin dibandingkan tahun 2023 (74,39). Pertumbuhan ini relatif stabil dengan tren peningkatan jangka panjang sejak 2017, dan sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan tahunan periode 2010–2022.

Sehubungan dengan dicabutnya status pandemi COVID-19, tingkat pertumbuhan IPM tahun 2023 dan 2024 bernilai hampir sama (0,62–0,63), menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas pembangunan manusia. Kenaikan IPM tahun 2024 ditopang oleh perbaikan pada seluruh dimensi, khususnya standar hidup layak yang terus pulih seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional.

Seluruh dimensi yang menjadi pembentuk IPM kembali menunjukkan peningkatan pada 2024. Hal ini menegaskan bahwa kualitas hidup penduduk terus membaik, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun daya beli. Pada dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada 2024 mencapai 74,15 tahun, naik 0,22 tahun dibandingkan 2023 yang sebesar 73,93 tahun.

Peningkatan UHH menunjukkan semakin baiknya kualitas kesehatan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan lingkungan yang sehat. Dari sisi pendidikan,

Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,15 tahun menjadi 13,21 tahun. Begitu pula dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang meningkat dari 8,77 tahun pada 2023 menjadi 8,85 tahun pada 2024.

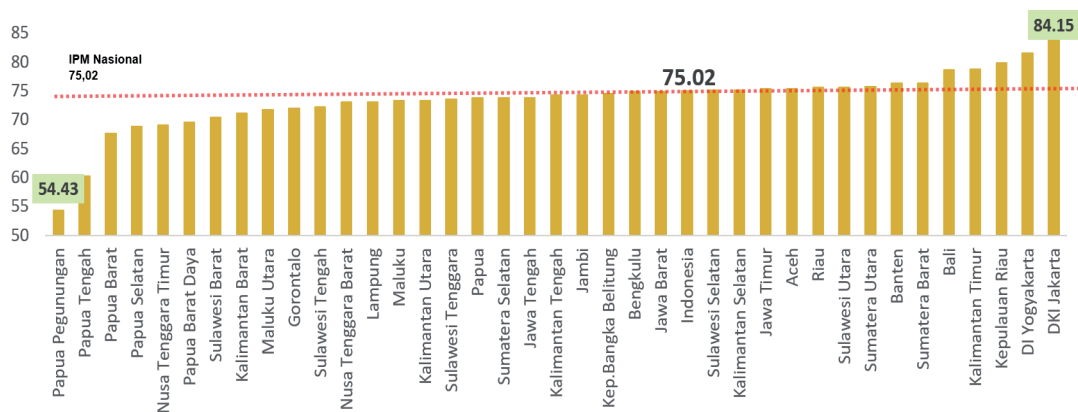
Meningkatnya 2 indikator ini menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan formal serta semakin mudahnya akses pendidikan. Dimensi standar hidup layak juga mencatat perkembangan positif. Pengeluaran per kapita riil per tahun naik dari Rp11,9 juta pada 2023 menjadi Rp12,34 juta pada 2024. Dengan demikian, peningkatan daya beli masyarakat tercermin semakin konsisten dalam delapan tahun terakhir.

Secara spasial, pada tahun 2024 terdapat 24 Provinsi yang memiliki nilai IPM dibawah nasional dimana kondisi ini sama dengan tahun 2023. Secara umum, seluruh provinsi mengalami kenaikan nilai IPM. Mulai tahun 2024, BPS menyajikan IPM untuk 38 provinsi dan provinsi Papua Pegunungan memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi sebesar 1,83% (0,98 poin) namun status pembangunan manusia masih dalam level rendah. Adapun rata-rata kenaikan setiap provinsi adalah sebesar 0,66 poin.

Pada 2024, status pembangunan manusia di Sulawesi Barat meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM sebesar 70,46 dan status pembangunan manusia di Papua Tengah meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”, dengan capaian IPM sebesar 60,25. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 30 provinsi, berstatus “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 5 provinsi, dan berstatus “rendah” ($\text{IPM} < 60$) sebanyak 1 provinsi. Sementara itu, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta memiliki status pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

Pergeseran status ini penting karena memperlihatkan bahwa pembangunan manusia di wilayah tertinggal, khususnya Papua, mulai menunjukkan arah perbaikan. Namun

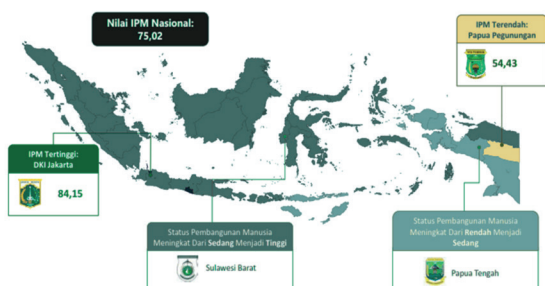
Grafik 1.7. Perbandingan IPM 2024 per Provinsi



Sumber : Badan Pusat Statistik

demikian, jurang disparitas antara kawasan timur dan barat Indonesia masih cukup besar. Sebagai ilustrasi, selisih IPM antara provinsi tertinggi (DKI Jakarta) dan terendah (Papua Pegunungan) mencapai hampir 30 poin. Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.

Gambar 1.2. IPM 2024 Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik

I.2.A.3. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

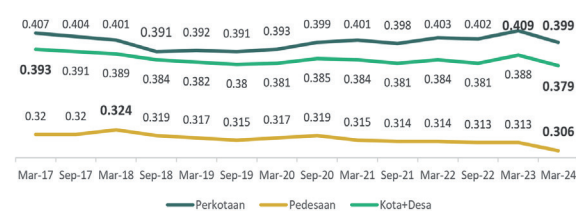
Pada level nasional, sejak Maret 2017 sampai dengan September 2019, angka Gini Ratio menurun dari 0,393 menjadi 0,380. Penurunan tersebut mencerminkan perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia. Pandemi Covid-19 pada 2020 menyebabkan terhentinya tren positif. Angka Gini Ratio meningkat menjadi 0,381 pada Maret 2020 dan kembali naik menjadi 0,385 pada September 2020.

Pada periode selanjutnya, Gini Ratio bergerak

fluktuatif dengan kecenderungan meningkat hingga mencapai 0,388 pada Maret 2023 atau mencapai level tertinggi sejak 2017. Pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca-pandemi memiliki dampak langsung dalam memperlebar kesenjangan pendapatan yang menyebabkan angka Gini Ratio meningkat. Secara lokasi, ketimpangan di wilayah perkotaan konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Pada Maret 2023, Gini Ratio perkotaan tercatat sebesar 0,409, naik 0,007 poin dibanding September 2022 dan menjadi yang tertinggi sejak Maret 2017.

Sebaliknya, Gini Ratio di perdesaan relatif lebih stabil. Pada September 2022 nilainya 0,313, bahkan sedikit lebih rendah dibanding Maret 2017. Fluktuasi di perdesaan cenderung kecil, termasuk ketika pandemi 2020 berlangsung. Tren ini kemudian membaik pada Maret 2024, ketika Gini Ratio nasional turun signifikan menjadi 0,379, level terendah dalam tujuh tahun terakhir. Penurunan ini memberi sinyal perbaikan distribusi pengeluaran penduduk,

Grafik 1.8. Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2017-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1. 6. Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (persen), Maret 2022 - Maret 2024

TAHUN	PERKOTAAN			PERDESAAN			PERKOTAAN-PERDESAAN		
	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 40% Teratas	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 40% Teratas	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 40% Teratas
Maret 2022	17,07	35,00	47,93	21,01	38,91	40,08	18,06	35,74	46,20
Sept- 2022	17,19	34,99	47,82	21,06	38,97	39,97	18,24	35,78	45,98
Maret 2023	16,99	34,42	48,59	21,18	38,61	40,21	18,04	35,25	46,71
Maret 2024	17,41	34,87	47,72	21,39	39,17	39,44	18,40	35,69	45,91

Sumber : Badan Pusat Statistik

meski ketimpangan perkotaan masih menjadi tantangan utama.

Selain menggunakan Gini Ratio, ketimpangan juga dapat diukur melalui persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah (P40) atau dikenal sebagai ukuran Bank Dunia. Semakin besar persentase P40, semakin merata distribusi pengeluaran di masyarakat.

Pada Maret 2024, persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 18,40 persen. Angka ini meningkat 0,36 persen poin dibandingkan Maret 2023 (18,04 persen), serta naik 0,16 persen poin dibanding September 2022 (18,24 persen). Kenaikan ini menunjukkan perbaikan distribusi pengeluaran penduduk setelah sempat melebar pada masa pandemi.

Dilihat menurut wilayah, kondisi perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang berbeda:

- Perkotaan: P40 pada Maret 2024 tercatat 17,41 persen, naik 0,42 persen poin dibanding Maret 2023 (16,99 persen) dan

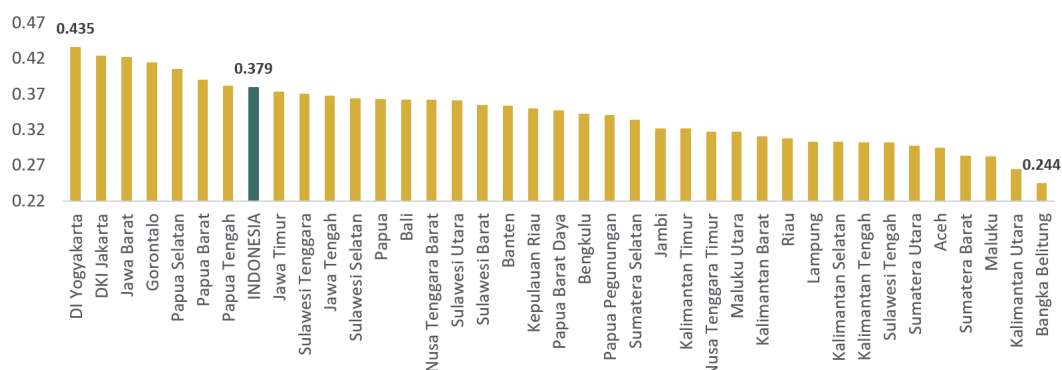
meningkat 0,22 persen poin dari September 2022 (17,19 persen). Meski masih lebih rendah dibanding perdesaan, peningkatan ini menandakan adanya perbaikan pemerataan di kota.

- Perdesaan: P40 mencapai 21,39 persen pada Maret 2024, meningkat 0,21 persen poin dibanding Maret 2023 (21,18 persen) dan naik 0,33 persen poin dibanding September 2022 (21,06 persen). Angka yang relatif lebih tinggi dari perkotaan menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di desa lebih baik dan lebih stabil.

Secara keseluruhan, perbaikan P40 pada 2024 mengonfirmasi tren penurunan ketimpangan yang juga terlihat dari menurunnya Gini Ratio. Hal ini menunjukkan distribusi pengeluaran masyarakat Indonesia perlahan semakin merata, meski ketimpangan perkotaan masih lebih tinggi dibanding perdesaan.

Secara spasial, sebanyak 31 provinsi memiliki

Grafik 1.9. Perbandingan Rasio Gini per Provinsi



Sumber : Badan Pusat Statistik

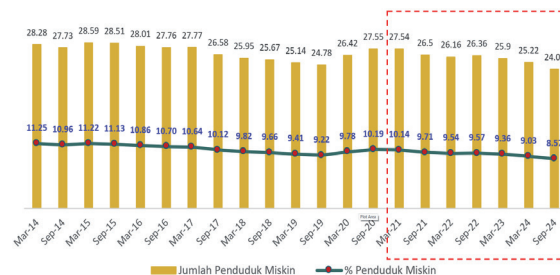
tingkat ketimpangan di bawah nilai nasional (0,379). Nilai Rasio Gini tertinggi terdapat pada Provinsi DI Yogyakarta (0,435) dan terendah pada Provinsi Bangka Belitung (0,244). Dengan jumlah provinsi di bawah rata-rata nasional yang lebih banyak, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi relatif lebih rendah di sebagian besar daerah. Ketimpangan yang lebih tinggi di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan beberapa provinsi timur Indonesia (seperti Papua dan Gorontalo) menggambarkan adanya perbedaan pengeluaran antar kelompok penduduk yang masih cukup besar di wilayah tersebut.

Sementara itu, provinsi dengan ketimpangan rendah seperti Bangka Belitung, Maluku, dan Kalimantan Tengah menunjukkan distribusi pengeluaran yang lebih merata. Pola ini menegaskan bahwa ketimpangan tidak selalu berhubungan dengan tingkat kemajuan ekonomi wilayah. Daerah dengan IPM tinggi seperti Yogyakarta justru mencatat Gini Ratio yang tinggi. Hal ini memberikan tantangan dalam pemerataan hasil pembangunan. Sebaliknya, provinsi dengan basis ekonomi yang relatif lebih kecil dapat memiliki ketimpangan rendah karena distribusi pengeluaran antar penduduk lebih seimbang.

I.2.A.4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Selama periode 2014-2024, Indonesia telah berhasil mencapai langkah maju dalam pengentasan kemiskinan walaupun dari sisi tren cenderung fluktuatif. Sebelum pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan nasional berada dalam tren penurunan yang stabil dimana Indonesia dapat mencapai titik terendah pada September 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,78 juta atau 9,22%. Pandemi COVID-19 menjadi faktor pendorong utama yang menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin di tahun 2020. Namun demikian, melalui program pemulihan ekonomi nasional, Indonesia berhasil memperoleh kembali tren penurunannya yang mencapai titik terendahnya dalam satu dekade terakhir dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,06

Grafik 1.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2024 (Juta/%)



Sumber : Badan Pusat Statistik

juta atau menjadi 8,57% pada bulan September 2024.

Dalam kurun waktu empat tahun pasca pandemi (Maret 2021—September 2024), jumlah penduduk miskin menurun sebesar 3,48 juta orang. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan Maret 2024, terdapat penurunan sebesar 1,16 juta orang. Perkembangan positif penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak lepas dari perkembangan ekonomi dalam kurun waktu tersebut. Dirilis dalam Berita Resmi Statistik tanggal 15 Januari 2025, faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia antara lain: (i) pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,35 persen pada Triwulan III-2024 dibandingkan dengan Triwulan I-2024, (ii) peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2024 sebesar 2,63 persen dibandingkan Triwulan I-2024; serta (iii) adanya pertumbuhan sektor-sektor Produk Domestik Bruto (PDB) yang meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan atas dasar harga konstan sebesar 23,54 persen dibandingkan Triwulan I-2024.

Tabel 1. 7. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2021 dan September 2024

Daerah/Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)
Perkotaan:		
Maret 2021	7,89	12,18
September 2024	6,66	11,05
Perdesaan:		
Maret 2021	13,10	15,37
September 2024	11,34	13,01
Jumlah:		
Maret 2021	10,14	27,54
September 2024	8,57	24,06

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Sampai dengan bulan September 2024, sebesar 54,07 persen jumlah penduduk miskin berada di wilayah perdesaan. Dalam kurun waktu empat tahun yaitu Maret 2021 sampai dengan September 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 1,13 juta orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 2,36 juta orang. Dari sisi persentase, kemiskinan di perkotaan turun dari 7,89 persen menjadi 6,66 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 11,34 persen.

Tingkat kemiskinan di wilayah regional berbanding lurus dengan jumlah penduduknya

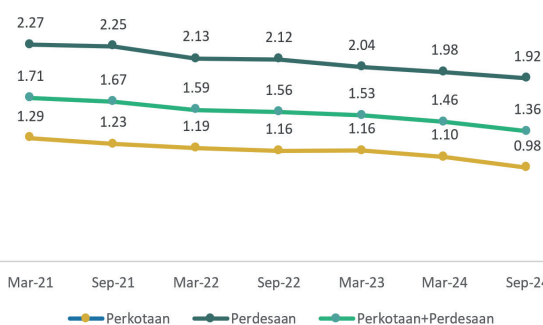
Tabel 1. 8. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Regional September 2024

No.	Wilayah	Tingkat Kemiskinan (%)		Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		Distribusi Kemiskinan (%)	
		Maret 2021	Sept 2024	Maret 2021	Sept 2024	Maret 2021	Sept 2024
1	Regional Sumatera	10,15	8,42	6,06	5,25	22	21,82
2	Regional Jawa	9,67	8,05	14,75	12,62	53,55	52,45
3	Regional Kalimantan	6,09	5,30	1,01	0,91	3,67	3,78
4	Regional Sulawesi	10,29	9,12	2,04	1,88	7,41	7,18
5	Regional Bali-Nusra	13,84	12,15	2,12	1,94	7,69	8,06
6	Regional Maluku-Papua	20,66	18,62	1,54	1,46	5,59	6,06
Jumlah		10,14	8,57	27,54	24,06		

Sumber : Badan Pusat Statistik

(Tabel 1.9). Dari sisi perkembangan distribusi kemiskinan, tidak terdapat perubahan komposisi walaupun dari perkembangannya terus membaik dimana tingkat kemiskinan di seluruh regional menurun. Pada September 2024, distribusi kemiskinan terbesar berada di regional Jawa dengan persentase sebesar 52,45 persen, namun secara komposisi menurun bersama dengan regional Sumatera dan Sulawesi. Pergeseran tersebut berdampak pada meningkatnya distribusi kemiskinan di wilayah Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua. Dari sisi tingkat kemiskinan, persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,62 persen pada September 2024, sedangkan, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,30 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk

Grafik 1.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2021-2024



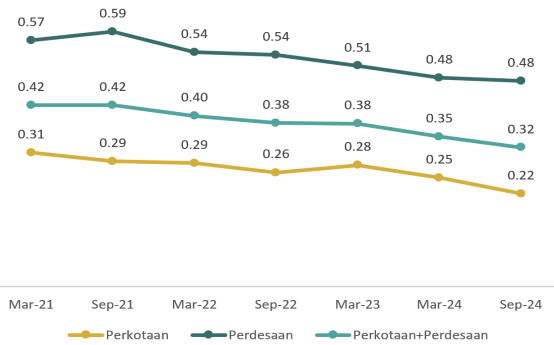
Sumber : Badan Pusat Statistik

miskin masih berada di Pulau Jawa yaitu 12,62 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,91 juta orang).

Perkembangan Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan selama periode Maret 2021 sampai September 2024 menggambarkan terjadinya perbaikan pasca pandemi Covid-19. Pada kurun waktu tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Untuk indeks P1, terjadi penurunan dari semula 1,71 pada bulan Maret 2021 menjadi 1,36 pada bulan September 2024 (Grafik 1.12). Hal tersebut menggambarkan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan pada penduduk miskin. Demikian pula, indeks P2 juga mengalami penurunan dari 0,42 di bulan Maret 2021 menjadi 0,32 di bulan September 2024. Hal tersebut menggambarkan pendapatan penduduk sangat miskin yang meningkat sehingga memperkecil kesenjangan pendapatan pada kelompok penduduk miskin. Kedua hal tersebut juga memberikan gambaran terjadinya pertumbuhan ekonomi yang membaik dan keberhasilan program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika ditinjau berdasarkan daerah, indeks P1 dan P2 di wilayah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai indeks P1 perkotaan sebesar 0,98 sedangkan di wilayah

Grafik 1.12. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Tahun 2021-2024



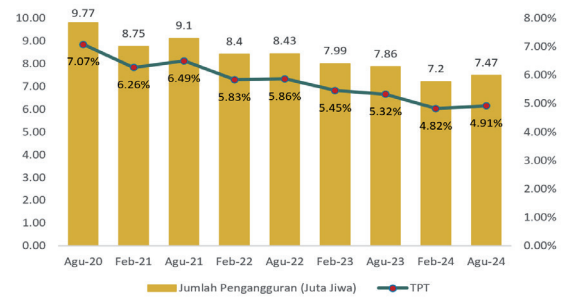
Sumber : Badan Pusat Statistik

perdesaan jauh lebih tinggi yang mencapai 1,92. Demikian pula, nilai indeks P2 di perkotaan sebesar 0,22, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 0,48. Kondisi ini menegaskan bahwa walaupun secara jumlah, orang miskin di perkotaan lebih banyak dibandingkan di pedesaan, namun demikian, pendapatan penduduk miskin di wilayah pedesaan jauh lebih kecil dengan persentase jumlah penduduk sangat miskin yang lebih besar. Untuk itu, program-program strategis Pemerintah perlu difokuskan untuk pengembangan wilayah pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.2.A.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran

Perkembangan ekonomi pasca Covid-19 memberikan harapan pemulihan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 membawa dampak yang berat terhadap angka pengangguran di Indonesia dimana tingkat pengangguran terbuka yang tinggi karena ekonomi tertekan, banyak sektor terhenti, dan mobilitas dibatasi. Namun demikian, pemulihan secara bertahap terjadi mulai 2022, dengan ekonomi yang mulai tumbuh kembali, konsumsi meningkat, investasi kembali bergerak, dan sektor-sektor yang padat karya kembali mulai menyerap tenaga kerja. Secara umum penurunan cukup konsisten dimana jumlah pengangguran mengalami penurunan

Grafik 1.13. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024

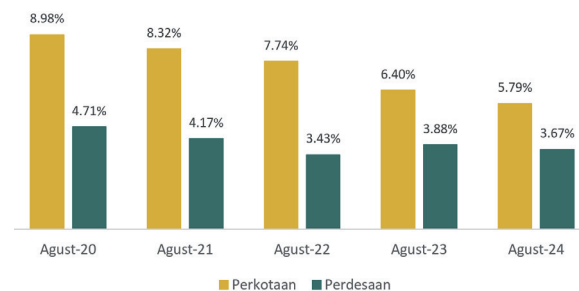


Sumber : Badan Pusat Statistik

sebesar 2,3 juta jiwa, yaitu dari 9,77 juta jiwa pada Agustus 2020 menjadi 7,47 juta jiwa pada Agustus 2024. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan Februari 2024, terdapat kenaikan jumlah pengangguran sebesar kurang lebih 270 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan sebesar 0,41 persen, dari 5,32 persen pada Agustus 2023 menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024. Diharapkan, jika pertumbuhan ekonomi terus berkembang maka angka pengangguran juga akan terus menurun.

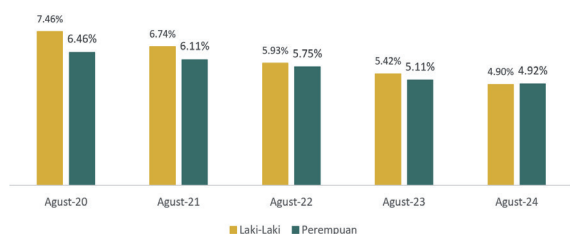
Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan masih cenderung lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan. Pada bulan Agustus 2024, TPT di daerah perkotaan sebesar 5,79 persen sedangkan di daerah pedesaan sebesar 3,67 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,61 persen. Demikian pula, TPT pedesaan juga sedikit mengalami penurunan sebesar 0,21 persen. Secara umum, kecenderungan TPT di daerah perkotaan lebih tinggi disebabkan dari sisi jenis lapangan kerja formal lebih ketat dan

Grafik 1.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 Menurut Tempat Tinggal



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1.15. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 Menurut Jenis Kelamin



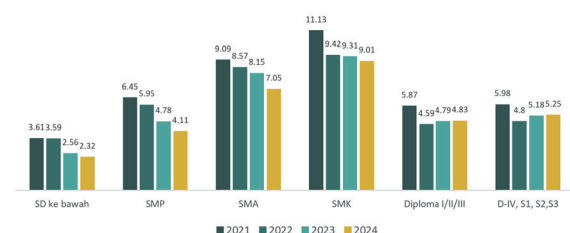
Sumber : Badan Pusat Statistik

memiliki daya serah tenaga kerja terbatas, arus urbanisasi, serta ekspektasi pekerjaan lebih tinggi dari para pencari kerja.

Jika ditinjau dari jenis kelamin, perbandingan TPT antara laki-laki dan perempuan cenderung memiliki selisih yang tidak terlalu jauh, kecuali kondisi pada saat pandemi tahun 2020 dimana TPT laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan (7,46 persen laki-laki dan 6,46 persen perempuan). Kondisi pada Agustus 2024 sedikit berbeda dimana TPT perempuan lebih tinggi dimana TPT laki-laki sebesar 4,90 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 4,92 persen.

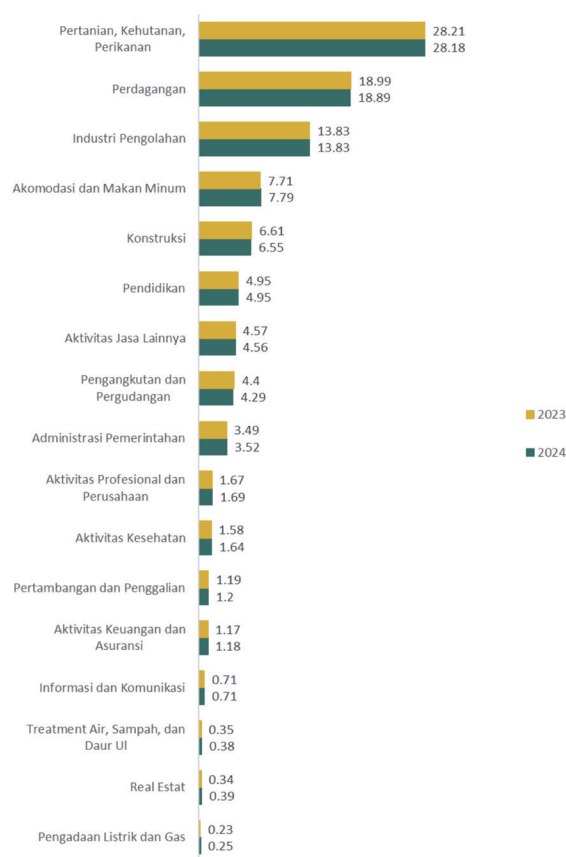
Sepanjang 2021-2024, TPT masih didominasi oleh lulusan SMK dan SMA. Untuk bulan Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,01 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,32 persen. Penurunan TPT terjadi pada level SD sampai dengan SMA/SMK, dengan penurunan terbesar pada orang yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebesar 0,67 persen. Sementara, terdapat peningkatan TPT pada kelompok

Grafik 1.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021-2024 Menurut Tingkat Pendidikan (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1.17. Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2023-2024 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik

lulusan Diploma I/II/III sebesar 0,04 persen dan kelompok lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 0,07 persen poin.

Dari sisi jenis lapangan pekerjaan, terdapat tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,18 persen; Perdagangan sebesar 18,89 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 13,83 persen. Jika dibandingkan dengan komposisi lapangan usaha di tahun 2023, pola yang terbentuk dalam menyerap tenaga kerja ini masih relatif sama walaupun terdapat kecenderungan menurun. Hal tersebut menggambarkan adanya pergeseran jumlah orang yang bekerja pada sektor-sektor lapangan kerja yang dominan. Dibandingkan Agustus 2023, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase jumlah tenaga kerja terbesar yaitu Aktivitas Kesehatan (0,06%); Real

Estate (0,03%); dan Administrasi Pemerintahan (0,03%). Sektor lapangan usaha mengalami penurunan tertinggi yaitu Pengangkutan dan Pergudangan sebesar 0,11%.

Secara spasial, jika dibandingkan antara TPT Agustus 2024 dan Agustus 2023, beberapa wilayah mengalami penurunan TPT yaitu di regional Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara. Sedangkan di regional Sulawesi dan Maluku-Papua, terdapat kecenderungan peningkatan TPT walaupun relatif kecil. Untuk regional Sulawesi, kenaikan TPT tersebut hanya 0,01 persen, sedangkan di regional Maluku dan Papua, kenaikan TPT sebesar 0,07 persen. Regional Jawa menjadi daerah dengan TPT tertinggi di Indonesia dimana pada Agustus 2024 mencapai sebesar 5,32 persen diikuti regional Sumatera yang mencapai 4,75 persen. Sementara, TPT di regional Bali dan Nusa Tenggara cukup rendah yaitu 2,51 persen.

Berdasarkan wilayah provinsi, berdasarkan data BPS bulan Agustus 2024, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pengangguran tertinggi. jumlah pengangguran di Jawa Barat

Tabel 1. 9. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Regional Tahun 2021-2024

No.	Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka*)			
		2021	2022	2023	2024
1	Regional Sumatera	5,69%	5,33%	4,97%	4,75%
2	Regional Jawa	7,26%	6,45%	5,87%	5,35%
3	Regional Kalimantan	5,34%	4,83%	4,56%	4,42%
4	Regional Sulawesi	4,43%	3,73%	3,64%	3,65%
5	Regional Bali-Nusra	4,05%	3,74%	2,88%	2,51%
6	Regional Maluku-Papua	4,58%	4,12%	4,35%	4,42%
NASIONAL		6,49%	5,86%	5,32%	4,91%

*) Rata-rata TPT Provinsi

Sumber : Badan Pusat Statistik

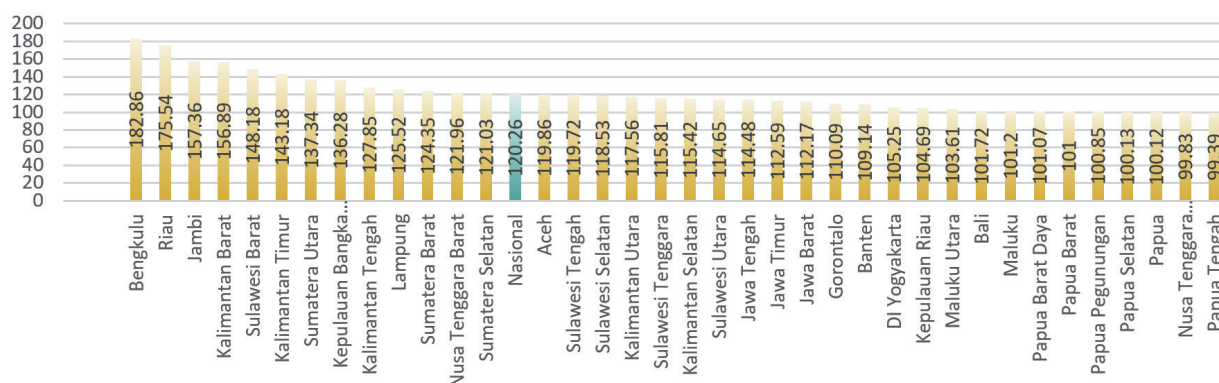
pada Agustus 2024 adalah 1,77 juta orang (dari total angkatan kerja 26,19 juta orang) dengan TPT sebesar 6,75 persen. Dari sisi TPT, persentase tingkat pengangguran terbesar diikuti oleh Provinsi Banten dengan TPT 6,68 persen dimana jumlah pengangguran di Banten adalah 414,75 ribu orang (atau sekitar 414.750 orang).

I.2.A.6. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani secara nasional menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, NTP tercatat sebesar 101,69, kemudian naik menjadi 104,66 pada 2021, 107,39 pada 2022, dan 112,72 pada 2023. Tren kenaikan ini berlanjut secara signifikan pada tahun 2024, ketika NTP meningkat cukup signifikan hingga mencapai 120,26 yang menjadi capaian tertinggi dalam periode tersebut. Kenaikan NTP pada tahun 2024 tidak terlepas dari perubahan signifikan pada Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, It tercatat sebesar 131,95 dan Ib sebesar 117,06, menghasilkan NTP 112,72. Sedangkan pada tahun 2024, It meningkat menjadi 145,34 atau 10,15%, sedangkan Ib hanya meningkat menjadi 120,85 atau sekitar 3,24%. Laju pertumbuhan It yang jauh lebih tinggi dibandingkan Ib menunjukkan bahwa harga komoditas pertanian yang dijual petani mengalami kenaikan yang lebih besar daripada kenaikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani mengalami peningkatan signifikan disertai dengan perbaikan daya beli, meskipun biaya hidup dan produksi tetap mengalami kenaikan. Keadaan tersebut mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani yang lebih solid dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen pengeluaran petani tahun 2024 menunjukkan kenaikan pada hampir semua kelompok, baik Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) maupun Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Pada kelompok IKRT, pengeluaran tertinggi tercatat pada komponen Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan indeks 126,53 atau naik 6,42 basis poin (y-on-y). Sementara pada kelompok BPPBM, Transportasi masih menjadi komponen dengan indeks tertinggi sebesar 123,86, namun kenaikan terbesar terjadi pada komponen Bibit yang mencapai 115,93 atau naik 3,07 basis poin (y-on-y). Hal ini menunjukkan bahwa

Grafik 1.18. Nilai Tukar Petani Per Provinsi Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

kenaikan pengeluaran petani terutama dipicu oleh konsumsi pangan, biaya transportasi, dan kenaikan biaya bibit yang langsung memengaruhi biaya produksi.

Sepanjang tahun 2020–2024, sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100, menandakan kesejahteraan petani yang relatif baik atau adanya surplus. Pada tahun 2024, Provinsi Bengkulu menjadi provinsi dengan NTP tertinggi secara nasional sebesar 182,86 atau naik signifikan 35,44 basis poin (y-on-y). Tren bulanan menunjukkan kenaikan konsisten, dari 160,86 pada Januari hingga puncak 203,86 pada Desember. Peningkatan NTP Bengkulu terutama didorong oleh meningkatnya harga komoditas unggulan seperti kopi, kelapa sawit, karet, dan kol/kubis. Harga kopi naik tajam akibat penurunan produksi di berbagai negara produsen dan dukungan pemerintah daerah yang mendorong konsumsi domestik serta ekspor. Sementara itu, harga kelapa sawit cenderung fluktuatif mengikuti pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO)

Tabel 1. 10. NTP Tertinggi dan Terendah Per Regional Tahun 2024

Regional	Tertinggi	Terendah
Regional Sumatera	Bengkulu (182,86)	Kepulauan Riau (104,69)
Regional Jawa	Jawa Tengah (114,48)	DI Yogyakarta (105,25)
Regional Kalimantan	Kalimantan Barat (156,89)	Kalimantan Selatan (115,42)
Regional Sulawesi	Sulawesi Barat (148,18)	Gorontalo (110,09)
Regional Bali-Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat (121,96)	Nusa Tenggara Timur (99,83)
Regional Maluku-Papua	Maluku Utara (103,61)	Papua Tengah (99,39)

Sumber : Badan Pusat Statistik

global, tingkat permintaan internasional, serta kondisi distribusi dan infrastruktur lokal. Meski mayoritas provinsi memiliki NTP di atas 100, masih ada daerah yang mencatat NTP di bawah 100 atau defisit, yakni Nusa Tenggara Timur (99,83) dan Papua Tengah (99,39). Namun, jumlah provinsi dengan kondisi defisit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, capaian Nilai Tukar Petani (NTP) pada setiap regional sebagian besar menunjukkan surplus dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Regional Sumatera, Jawa dan Kalimantan berhasil mempertahankan seluruh provinsinya pada angka NTP di atas 100, dengan Bengkulu menjadi yang tertinggi secara nasional sebesar 182,86. Namun, di regional Sulawesi dan Maluku-Papua masih terdapat provinsi dengan NTP defisit, yaitu Nusa Tenggara Timur dengan NTP 99,83 dan Papua Tengah dengan NTP sebesar 99,39. Secara umum, Sumatera menjadi regional dengan capaian rata-rata NTP tertinggi, sedangkan Maluku-Papua berada di posisi terendah.

Pada regional Sumatera, Provinsi Bengkulu mencatat NTP tertinggi sebesar 182,86, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau berada di posisi terendah dengan NTP 104,69. Perbedaan ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geografis. Bengkulu memiliki lahan subur, posisi strategis, dan ekosistem yang mendukung berbagai komoditas pertanian. Sebaliknya, Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi lahan bakau dan

tanah bauksit, serta keterbatasan luas lahan, menghadapi kendala dalam mengoptimalkan produktivitas dan nilai tukar petani. Sementara itu, pada regional Jawa, NTP Provinsi Jawa Tengah sebesar 114,48 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Jawa, sedangkan NTP Provinsi DI Yogyakarta sebesar 105,25 merupakan yang terendah. Meskipun demikian, NTP DIY telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani (It) karena kenaikan harga beberapa komoditas unggulan seperti telur ayam ras, ketela pohon, cabai merah, melon, dan bawang merah. Kemudian pada regional Kalimantan, provinsi dengan NTP tertinggi yaitu Provinsi Kalimantan Barat sebesar 156,89 dan provinsi dengan NTP terendah yaitu Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 115,42. Tingginya NTP Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari adanya kenaikan pada harga yang diterima petani pada komoditas kelapa sawit, karet, gabah, kelapa, jeruk, ayam ras, dan babi.

NTP Provinsi Sulawesi Barat sebesar 148,18 merupakan NTP dengan angka tertinggi di regional Sulawesi, sedangkan NTP Provinsi Gorontalo sebesar 110,09 merupakan NTP dengan angka yang terendah. Tingginya NTP Provinsi Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh naik turunnya nilai tanaman perkebunan rakyat (NTPR) yang merupakan lapangan usaha pertanian utama di Sulawesi Barat. Pada regional Bali - Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki NTP dengan angka tertinggi sebesar 121,96. Sedangkan, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan NTP terendah sebesar 99,83 atau kurang dari angka 100. Meskipun demikian, terdapat peningkatan NTP Provinsi NTT dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 96,84 yang disumbang oleh komoditas gabah, jagung, kakao/coklat biji, kacang hijau dan bawang merah yang mempengaruhi indeks terima petani. Sementara itu, pada regional Maluku-Papua, Maluku Utara menjadi provinsi dengan NTP tertinggi sebesar 103,61 sedangkan Provinsi Papua tengah dengan NTP sebesar

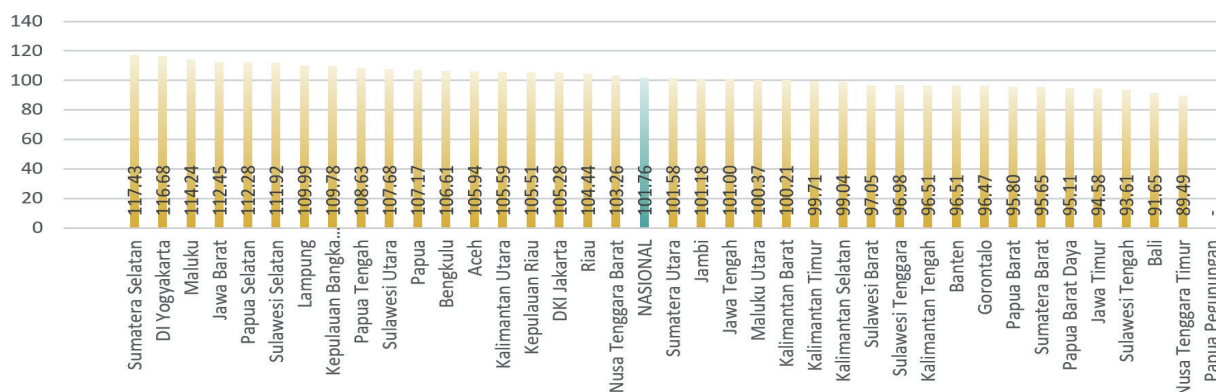
99,39 merupakan yang terendah. Rendahnya NTP pada Provinsi Papua Tengah dipengaruhi oleh tekanan biaya produksi tinggi, infrastruktur terbatas dan kurangnya pasar yang kompetitif.

I.2.A.7. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 100,22, meningkat konsisten hingga mencapai 106,45 pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi 106,14 di tahun 2023 hingga menurun signifikan pada tahun 2024 sebesar 101,76 sekaligus mendekati angka keseimbangan 100 yang menunjukkan tekanan terhadap kesejahteraan nelayan. Perubahan ini erat kaitannya dengan dinamika Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib). Pada tahun 2024, Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) mengalami penurunan dari 122 pada tahun 2023 menjadi 120,86 atau turun sebesar 1,14 basis poin (*y-on-y*), sementara Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) meningkat dari 115,75 menjadi 118,77 atau naik sebesar 3,02 basis poin (*y-on-y*).

Penurunan pada tahun 2024 disebabkan karena adanya penurunan pada komponen penerimaan Penangkapan Laut sebesar 1,36 basis poin (*y-on-y*), sementara kenaikan pada komponen penerimaan Penangkapan Perairan Umum sebesar hanya 1,7 basis poin (*y-on-y*) sehingga tidak cukup menahan laju penurunan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan Ib didorong oleh kelompok pengeluaran Indeks Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan kelompok pengeluaran dengan kenaikan tertinggi sebesar 4,9 basis poin (*y-on-y*) khususnya pada komponen Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memiliki indeks tertinggi sebesar 126,17. Kenaikan Ib juga disumbang oleh kelompok pengeluaran Indeks Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM) khususnya pada komponen Transportasi dan Komunikasi yang merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi sebesar 121,02. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun nelayan

Grafik 1.19. Nilai Tukar Nelayan Per Provinsi Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik

masih memperoleh tambahan pendapatan, lonjakan biaya hidup dan kebutuhan produksi lebih tinggi sehingga mempersempit margin keuntungan. Dengan demikian, turunnya NTN tahun 2024 menandakan bahwa kesejahteraan nelayan relatif menurun dan memerlukan perhatian lebih dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli nelayan.

Tren Nilai Tukar Nelayan pada setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan penurunan secara umum dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi provinsi dengan NTN tertinggi yaitu sebesar 117,43, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 121,11 yang merupakan NTN terbesarnya selama 5 tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa nelayan di Provinsi Sumatera Selatan masih berada dalam kondisi surplus pendapatan, meskipun terdapat tekanan tertentu yang menurunkan NTN. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat NTN

terendah sebesar 89,49 yang juga menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Secara nasional, hampir seluruh provinsi mengalami penurunan NTN, yang berdampak pada meningkatnya jumlah provinsi dengan NTN di bawah 100 dari 5 provinsi pada tahun 2023 menjadi 14 provinsi pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya yang dibayar nelayan (Ib), baik konsumsi rumah tangga maupun biaya operasional seperti BBM, yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan harga ikan yang diterima (It), sehingga daya beli nelayan di banyak daerah semakin tertekan.

Pada tahun 2024, capaian NTN di setiap regional menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tidak ada satu pun regional yang seluruh provinsinya mencatat NTN di atas 100. Pada 2023, Sumatera menjadi satu-satunya regional yang seluruh provinsinya mencatat NTN diatas 100, namun kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2024. Di regional Jawa, sebagian besar provinsi masih mempertahankan NTN di atas 100 meskipun dua provinsi mengalami penurunan hingga di bawah 100. Pola serupa terlihat di Kalimantan, dengan mayoritas provinsi berada di bawah 100. Sementara itu, Bali–Nusa Tenggara dan Sulawesi juga didominasi oleh NTN di bawah 100. Sebaliknya, regional Maluku–Papua relatif lebih baik karena mayoritas provinsinya masih memiliki NTN di atas 100, meskipun terjadi penurunan pada Papua Barat yang turun di bawah 100.

Tabel 1. 11. NTN Tertinggi dan Terendah Per Regional Tahun 2024

Regional	Tertinggi	Terendah
Regional Sumatera	Sumatera Selatan (117,43)	Sumatera Barat (95,65)
Regional Jawa	DI Yogyakarta (116,68)	Jawa Timur (94,58)
Regional Kalimantan	Kalimantan Utara (105,59)	Kalimantan Tengah (96,51)
Regional Sulawesi	Sulawesi Selatan (111,92)	Sulawesi Tengah (93,61)
Regional Bali-Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat (103,26)	Nusa Tenggara Timur (89,49)
Regional Maluku-Papua	Maluku (114,24)	Papua Barat Daya (95,11)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan NTN tertinggi di regional Sumatera dengan NTN sebesar 117,43 dan hanya terdapat 1 provinsi dengan NTN dibawah 100 yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,65 yang merupakan terendah pada regionalnya. Rendahnya NTN Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor nasional seperti *oversupply* ikan, peningkatan harga BBM, serta cuaca buruk dan gelombang tinggi yang berpengaruh pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Pada regional Jawa, NTN tertinggi pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 116,68 yang didorong oleh kenaikan nilai tukar beberapa komoditas unggulan seperti cakalang, layur, beladang, tenggiri, lobster, dan tuna, serta diperkuat dengan dukungan pemerintah melalui alokasi DAK Fisik yang direalisasikan dalam berbagai program strategis. Sedangkan, NTN terendah pada regional Jawa adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 94,58 yang telah direspon dengan beberapa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui revitalisasi pelabuhan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, pada regional Kalimantan, NTN Provinsi Kalimantan Utara sebesar 105,59 merupakan NTN dengan angka tertinggi, sedangkan NTN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 96,51 merupakan yang terendah, namun besaran ini telah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh naiknya indeks harga produksi pada kelompok penangkapan perairan umum pada komoditas lais, baong, dan gabus.

Pada regional Bali-Nusa Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat NTN tertinggi sebesar 103,26, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan NTN sebesar 89,49 menjadi yang terendah secara nasional maupun regional. Rendahnya NTN pada Provinsi NTT dipengaruhi oleh cuaca tidak menentu dan risiko badai siklon yang membatasi penangkapan ikan, pengelolaan tradisional tanpa hilirisasi, dampak erupsi Gunung Lewotobi yang menurunkan produksi, serta keterbatasan distribusi dan

BBM sehingga potensi perikanan belum mampu optimal meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pada regional Sulawesi, NTN tertinggi pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 111,92 dan NTN terendah pada Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 93,61. Meski memiliki potensi perikanan besar, Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu mengoptimalkan sektor ini. Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan tertekan oleh biaya produksi yang tinggi, harga jual rendah, dan kuantitas hasil yang menurun. Dampak hilirisasi nikel dan besi juga menurunkan produktivitas perikanan, sehingga NTN daerah ini tetap rendah. Adapun pada regional Maluku-Papua, Provinsi Maluku memiliki NTN dengan angka tertinggi sebesar 114,24, sedangkan NTN Provinsi Papua Barat Daya sebesar 95,11 merupakan yang terendah. Berbeda dengan provinsi lain pada regionalnya yang mengalami penurunan, Provinsi Maluku mencatat sedikit kenaikan NTN jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 100,22, meningkat konsisten hingga mencapai 106,45 pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi 106,14 di tahun 2023 hingga menurun signifikan pada tahun 2024 sebesar 101,76 sekaligus mendekati angka keseimbangan 100 yang menunjukkan tekanan terhadap kesejahteraan nelayan. Perubahan ini erat kaitannya dengan dinamika Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib). Pada tahun 2024, Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) mengalami penurunan dari 122 pada tahun 2023 menjadi 120,86 atau turun sebesar 1,14 basis poin (*y-on-y*), sementara Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) meningkat dari 115,75 menjadi 118,77 atau naik sebesar 3,02 basis poin (*y-on-y*).

Penurunan pada tahun 2024 disebabkan karena adanya penurunan pada komponen penerimaan Penangkapan Laut sebesar 1,36 basis poin (*y-on-y*), sementara kenaikan pada komponen penerimaan Penangkapan Perairan Umum sebesar hanya 1,7 basis poin (*y-on-y*).

sehingga tidak cukup menahan laju penurunan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan Ib didorong oleh kelompok pengeluaran Indeks Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan kelompok pengeluaran dengan kenaikan tertinggi sebesar 4,9 basis poin (*y-on-y*) khususnya pada komponen Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memiliki indeks tertinggi sebesar 126,17. Kenaikan Ib juga disumbang oleh kelompok pengeluaran Indeks Biaya Produksi dan Penambah Barang Modal (BPPBM) khususnya pada komponen Transportasi dan Komunikasi yang merupakan pengeluaran dengan indeks tertinggi sebesar 121,02. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun nelayan masih memperoleh tambahan pendapatan, lonjakan biaya hidup dan kebutuhan produksi lebih tinggi sehingga mempersempit margin keuntungan. Dengan demikian, turunnya NTN tahun 2024 menandakan bahwa kesejahteraan nelayan relatif menurun dan memerlukan perhatian lebih dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli nelayan.

Tren Nilai Tukar Nelayan pada setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan penurunan secara umum dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi provinsi dengan NTN tertinggi yaitu sebesar 117,43, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 121,11 yang merupakan NTN terbesarnya.

*Halaman ini
sengaja dikosongkan*



II. PERKEMBANGAN FISKAL APBN, APBD, DAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN



II. PERKEMBANGAN FISKAL APBN, APBD, DAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

II.1. OVERVIEW NASIONAL 2024

II.1.A. Analisis APBN

II.1.A.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang solid seiring dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik, penguatan penerimaan perpajakan melalui implementasi berkelanjutan reformasi perpajakan, serta optimalisasi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, dukungan penerimaan dari PNPB yang ditopang kinerja BLU dan PNPB Lainnya, serta peningkatan signifikan realisasi hibah terutama terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dan program prioritas pembangunan, turut memperkuat capaian pendapatan negara pada tahun berjalan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat tumbuh sebesar 2,40 persen (y-on-y) dari sebesar Rp2.783,93 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp2.850,60 triliun pada tahun 2024. Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2024 sebesar Rp Rp2.802,46 triliun (101,72 persen).

Adapun kontribusi komponen Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 3,60 persen dari sebesar Rp2.154,21 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp2.231,84 triliun pada tahun 2024. Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2024 tersebut tercapai sebesar 100,61 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp2.218,40 triliun. Jika dilihat rinciannya, terdapat komponen Pendapatan Pajak Dalam Negeri tercapai sebesar Rp2.157,98 triliun dari target APBN 2024 sebesar Rp2.146,47 triliun (100,54 persen). Adapun pada komponen Pajak Perdagangan Internasional tercapai sebesar Rp73,86 triliun dari target APBN 2024 sebesar Rp71,93 triliun (102,67 persen). Penerimaan perpajakan yang melampaui target tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik maupun eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil mendorong aktivitas produksi, konsumsi, dan perdagangan sehingga memperkuat basis penerimaan pajak. Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan melalui reformasi administrasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak turut meningkatkan

realisasi. Kinerja ekspor-impor yang lebih baik dari perkiraan serta harga komoditas global yang masih relatif tinggi juga berkontribusi signifikan, terutama pada penerimaan Pajak Perdagangan Internasional yang tercatat melampaui target.

Sementara itu, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 tercatat sebesar Rp584,38 triliun, atau menurun 4,60 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar Rp612,54 triliun. Namun demikian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024 mencapai target sebesar 106,42 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp549.13 triliun. Jika dilihat rinciannya, capaian PNBP tertinggi terdapat pada komponen PNBP Badan Layanan Umum sebesar Rp104.72 triliun (130,19 persen dari Perpres APBN), diikuti PNBP Lainnya sebesar Rp164.35 triliun (111,54 persen dari Perpres APBN). Capaian PNBP yang melampaui target Capaian PNBP yang melampaui target ditopang oleh kinerja positif PNBP Badan Layanan Umum yang berhasil menghimpun penerimaan di atas target melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan dana pemerintah, serta PNBP Lainnya yang ditunjang oleh optimalisasi pengelolaan aset negara, layanan kementerian/ lembaga, serta penerimaan berbasis regulasi baru yang mendorong peningkatan setoran ke kas negara.

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2024 sebesar Rp34,39 triliun atau telah melampaui target APBN sebesar Rp34,92 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2023 yang sebesar Rp17,18 triliun atau terjadi kenaikan sebesar 200,11 persen. Peningkatan penerimaan hibah tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penerimaan hibah langsung dalam negeri yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Regional Jawa mencatatkan realisasi Pendapatan Negara tertinggi dibandingkan regional lainnya seiring dengan kegiatan ekonomi yang lebih banyak terjadi di regional Jawa dan pusat pemerintahan yang berada di regional Jawa,

Tabel 2. 1. Sebaran Pendapatan Negara di Tingkat Regional Tahun 2024

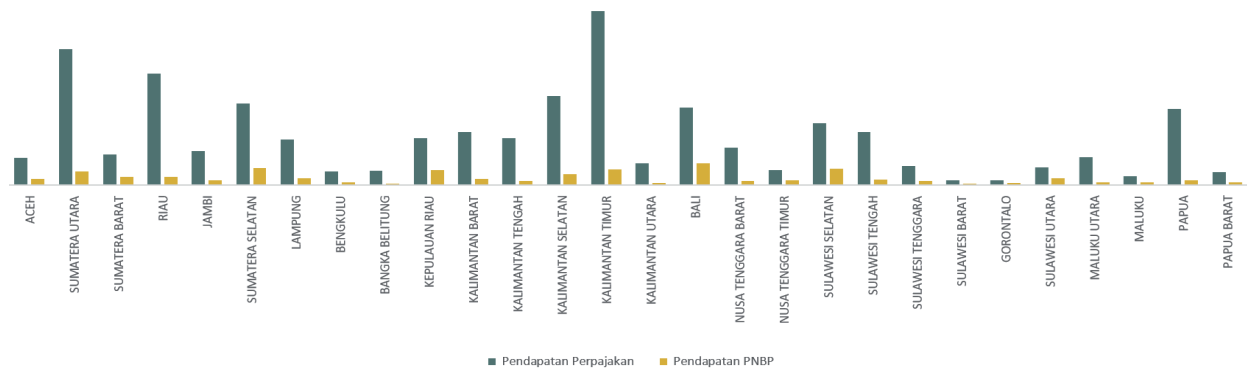
Regional	Pajak (Triliun)	PNBP (Triliun)
Regional Sumatera	121,75	18,45
Regional Jawa	1.929,68	540,12
Regional Kalimantan	86,62	8,46
Regional Sulawesi	36,14	7,82
Regional Bali-Nusa Tenggara	29,30	6,85
Regional Maluku-Papua	28,34	2,68

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited

yaitu di DKI Jakarta. Realisasi penerimaan pajak dan PNBP di regional Jawa pada tahun 2024 berturut-turut, yaitu sebesar 86,46 persen dan 92,43 persen dari total realisasi penerimaan pajak dan PNBP seluruh daerah di Indonesia. Sementara itu, DKI Jakarta merupakan daerah yang mencatatkan realisasi tertinggi di regional Jawa, yaitu penerimaan pajak sebesar Rp1.382,26 triliun atau 61,93 persen, dan realisasi PNBP sebesar Rp132,84 triliun atau 22,73 persen dari total realisasi seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan ekonomi tahun 2024 di regional Jawa, yaitu sebesar 57,02 persen dari total seluruh PDRB di Indonesia. Tingginya tingkat ekonomi di regional Jawa kemungkinan besar sangat mempengaruhi tingginya tingkat penerimaan pajaknya. Selain itu, di DKI Jakarta terdapat Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus yang ruang lingkupnya seluruh wilayah Indonesia. Tingginya tingkat realisasi PNBP di regional Jawa tidak terlepas juga dari kantor pusat Kementerian/Lembaga yang berada di DKI Jakarta dengan ruang lingkup pengelolaan penerimaannya di seluruh wilayah Indonesia.

Penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas di tahun 2024, sementara realisasi PNBP tertinggi terjadi di daerah yang mengalami peningkatan pendapatan BLU. Penerimaan Perpajakan tertinggi selain daerah di Regional Jawa terjadi di daerah Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, realisasi terendah tercatat di daerah Bengkulu, Papua Barat, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Tingginya realisasi penerimaan pajak seiring dengan tingginya aktivitas sektor pertambangan

Grafik 2. 1. Sebaran Pendapatan Negara Tingkat Daerah Selain di Regional Jawa Tahun 2024



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited

dan komoditas unggulan, terutama batubara, minyak dan gas bumi, serta kelapa sawit yang harga dan volume ekspornya relatif meningkat sepanjang tahun 2024, sehingga mendorong penerimaan pajak di daerah penghasil komoditas tersebut. Realisasi PNBPNP tertinggi terjadi di daerah Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Sementara itu, realisasi PNBPNP terendah tercatat di daerah Papua Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Kep. Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Tingginya realisasi PNBPNP seiring dengan peningkatan pendapatan BLU, penguatan regulasi terhadap objek dan tarif PNBPNP, dan optimalisasi pemanfaatan BMN.

II.1.A.2. Belanja Negara

Belanja Negara pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan. Realisasi Belanja Negara pada tahun 2024 tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen dari sebesar Rp3.121,22 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 3.359,77 triliun pada tahun 2024. Realisasi tersebut melampaui alokasi APBN 2024, yakni 100,49 persen dari target sebesar Rp3.343,49 triliun. Realisasi terbesar terdapat pada realisasi Belanja Pemerintah sebesar Rp2.496,22 triliun atau 74,30 persen dari realisasi Belanja Negara tahun 2024. Realisasi Belanja Pemerintah terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp1.321,93 triliun dan Belanja Non K/L sebesar Rp1.174,30 triliun. Realisasi belanja K/L antara lain digunakan untuk penebalan bansos,

percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Sementara belanja non K/L dimanfaatkan untuk pembayaran bunga utang, pembayaran subsidi energi dan pupuk, dan penyaluran bantuan kemasyarakatan.

Realisasi Belanja K/L terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 72,77 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 9,75 persen, wilayah Kalimantan sebesar 6,43 persen, wilayah Sulawesi sebesar 5,04 persen, wilayah Maluku-Papua sebesar 3,31 persen, serta wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,70 persen. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Pencatatan belanja dalam rangka kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di wilayah Jawa;
2. Profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah);
3. Profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program perlindungan sosial;
4. Kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Adapun dari sisi belanja non K/L, peningkatan realisasi tertinggi terdapat pada realisasi pembayaran bunga utang yang mengalami

peningkatan sebesar 9,94 persen dari Rp439,88 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp488,43 triliun pada tahun 2024, serta realisasi belanja subsidi yang juga mengalami peningkatan sebesar 7,89 persen, yaitu dari Rp269,59 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp292,69 triliun pada tahun 2024. Pembayaran bunga utang mengalami peningkatan yang sejalan dengan bertambahnya utang pada tahun 2024 meliputi di dalamnya adalah peningkatan *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN). Pembayaran Bunga Utang yang terealisasi sebesar 98,21 persen dari pagu dimanfaatkan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri meliputi pembayaran bunga SBN serta pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran bunga utang luar negeri karena adanya utang program dan proyek di tahun 2024. Pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri melalui instrumen SBN serta kerja sama pembiayaan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

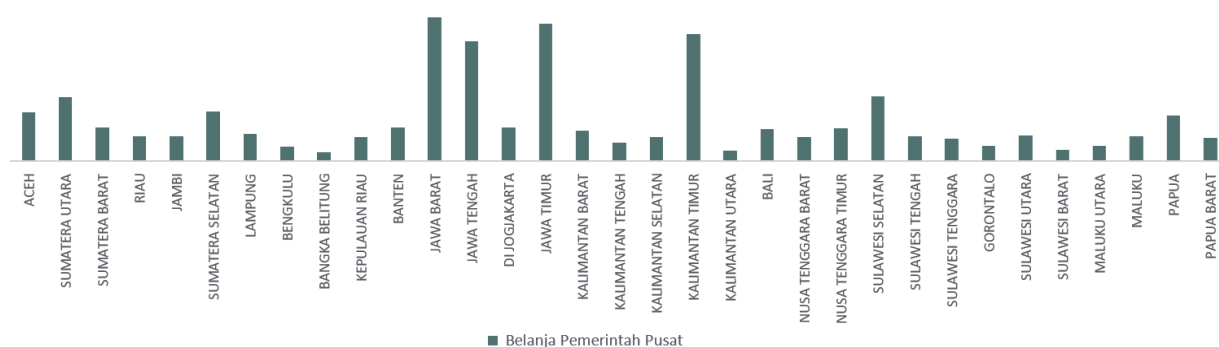
Sementara itu, belanja subsidi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp292,69 triliun, atau 102,35 persen dari pagu. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Subsidi mengalami pertumbuhan sebesar 7,89 persen (y-on-y) dimanfaatkan untuk Subsidi Energi sebesar Rp177,62 triliun dan Subsidi Non Energi sebesar Rp115,08 triliun. Belanja Subsidi Energi direalisasikan untuk subsidi BBM, subsidi LPG Tabung 3 Kg sebanyak 7,87 juta MT, subsidi listrik untuk 68,46 TWh. Selanjutnya, realisasi

Subsidi Non Energi meliputi antara lain penyaluran pupuk bersubsidi, Subsidi PSO yang umumnya dipengaruhi oleh realisasi PSO PT KAI, Subsidi Bunga Kredit Program, serta Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Regional Jawa terutama daerah DKI Jakarta mencatatkan realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat tertinggi dibandingkan daerah lainnya seiring dengan pusat pemerintahan yang berada di DKI Jakarta. Realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat di regional Jawa berturut-turut, yaitu sebesar 71,80 persen dan 85,57 persen dari total realisasi belanja di seluruh Indonesia. Sementara itu, realisasi Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat di daerah DKI Jakarta berturut-turut, yaitu sebesar 58,59 persen dan 77,97 persen dari total realisasi belanja di seluruh Indonesia. Belanja yang hanya dilakukan di DKI Jakarta sehubungan dengan keberadaan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, yaitu belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan belanja hibah. Meskipun belanja subsidi dan belanja hibah tercatat di DKI Jakarta, tetapi manfaatnya didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat juga pembayaran belanja yang dicatatkan di DKI Jakarta tetapi manfaatnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu belanja pegawai untuk pensiunan dan belanja bantuan sosial.

II.1.A.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Grafik 2.2. Sebaran Belanja Pemerintah Pusat Selain di DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,03 persen, yaitu dari Rp881,43 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar 863,54 pada tahun 2024. Penurunan realisasi TKDD terutama dipengaruhi oleh penurunan Dana Bagi Hasil sebesar 25,52 persen, yaitu dari Rp205,67 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp153,17 triliun pada tahun 2024 akibat penurunan penerimaan ekspor dan harga komoditas pertambangan di tahun sebelumnya. Adapun distribusi realisasi TKD tahun 2024 terdiri atas realisasi DBH sebesar Rp153,17 triliun, dengan proporsi terbesar di wilayah Kalimantan sebesar 42,04 persen; realisasi DAU sebesar Rp429,21 triliun, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,59 persen; realisasi DAK mencapai Rp183,54 triliun, dengan realisasi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 39,82 persen (realisasi DAK fisik mencapai Rp50,89 triliun, realisasi DAK nonfisik sebesar Rp130,44 triliun, dan realisasi Hibah kepada Daerah sebesar Rp2,21 triliun; realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp18,27 triliun dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sebesar Rp1,42 triliun; realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp7,00 triliun, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 36,12 persen; dan realisasi Dana Desa sebesar Rp70,93 triliun, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 34,79 persen.

Sebaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2024 masih menunjukkan pola yang relatif konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun Jawa tetap

Tabel 2. 2. Sebaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Tingkat Regional Tahun 2024 (triliun rupiah)

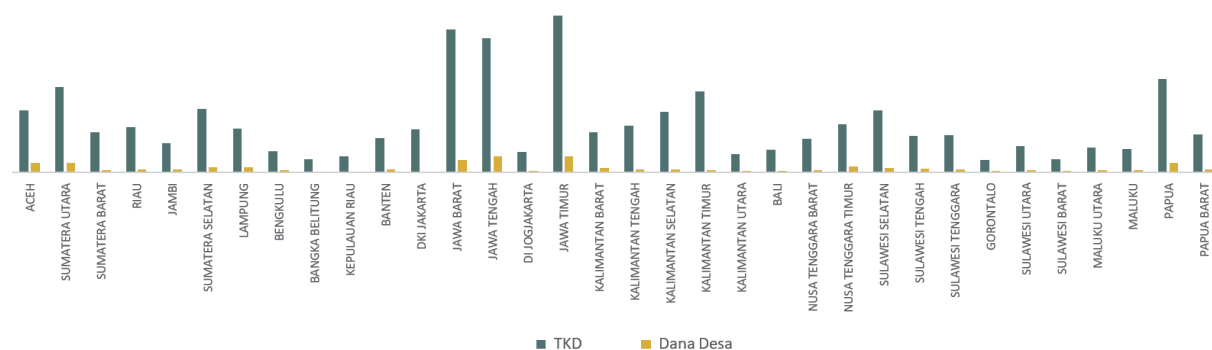
Uraian	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua
TKD	216,40	276,21	127,61	96,41	53,87	93,03
Dana Desa	19,96	24,68	5,94	7,40	4,62	8,33

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited

secara distribusi regional, porsi TKDD justru lebih merata ke luar Jawa, sejalan dengan fungsi pemerataan fiskal untuk mendukung layanan publik di daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Fakta bahwa DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi Dana Desa tidak mengubah posisi Jawa sebagai penerima terbesar, karena besarnya jumlah kabupaten/kota lain di wilayah ini tetap mendominasi penyaluran.

Di sisi lain, kontraksi yang terjadi di sebagian besar regional pada tahun 2024 menandakan adanya penyesuaian kebijakan transfer fiskal, dengan pengecualian Bali-Nusa Tenggara yang justru tumbuh positif. Meskipun menjadi regional dengan alokasi terendah, Bali-Nusa Tenggara menunjukkan tren peningkatan sebesar 2,64 persen (y-on-y), sehingga menegaskan adanya perhatian pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal di wilayah yang relatif kecil namun memiliki kebutuhan khusus pada sektor pembangunan pariwisata dan ketahanan pangan. Sementara itu, penurunan tajam pada regional Kalimantan sebesar 10,89 persen (y-on-y) mengindikasikan adanya pergeseran

Grafik 2. 3. Distribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tingkat Daerah Tahun 2024



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited

prioritas alokasi belanja, khususnya karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah pusat daripada TKDD.

Transfer Ke Daerah tertinggi sebagian besar terjadi di regional Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta terjadi di Papua dan Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi Transfer Ke Daerah terendah terjadi di Gorontalo, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau. Sama halnya dengan Transfer Ke Daerah, daerah dengan Dana Desa tertinggi sebagian besar berada di regional Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta terjadi di Papua dan Aceh. Sementara itu, DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi Dana Desa, dan realisasi Dana Desa terendah terjadi di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.

Secara keseluruhan, meskipun nilai nasional mengalami kontraksi, pola distribusi TKDD tetap memperlihatkan arah kebijakan yang menekankan pada fungsi pemerataan, dengan keseimbangan antara daerah padat penduduk seperti Jawa dan daerah dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang masih tinggi di luar Jawa.

II.1.A.4. Surplus/Defisit APBN

Realisasi defisit APBN 2024 tercatat sebesar Rp509,16 triliun atau setara 2,29 persen dari PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan target defisit dalam Perpres Nomor 206 Tahun 2024 yang dipatok sebesar Rp541,03 triliun (2,37 persen dari PDB). Pencapaian ini tidak terlepas dari kinerja penerimaan perpajakan dan PNBPN yang melampaui target. Secara keseluruhan, capaian positif pelaksanaan APBN 2024 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan defisit terjaga di bawah 3 persen sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2020. Keberhasilan menjaga defisit tersebut didukung oleh penerimaan negara yang solid serta belanja negara yang lebih efisien dan produktif untuk

mendorong agenda pembangunan, sekaligus mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menopang daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Defisit APBN ditutup melalui Pembiayaan Anggaran yang ditargetkan sebesar Rp541,03 triliun sesuai Perpres Nomor 206 Tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi Pembiayaan Anggaran neto mencapai Rp554,89 triliun atau 102,56 persen dari pagu. Rinciannya terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp462,58 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp92,31 triliun. Sumber utama pembiayaan berasal dari Pembiayaan Utang dengan realisasi Rp558,06 triliun atau 98,55 persen dari pagu APBN. Komponen pembiayaan utang ini meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp450,73 triliun, Pinjaman Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp15,02 triliun (yang terdiri atas penerimaan pinjaman Rp20,12 triliun dikurangi cicilan pokok Rp5,10 triliun), serta Pinjaman Luar Negeri (Neto) sebesar Rp92,31 triliun.

Selain itu, realisasi Pembiayaan Investasi mencapai Rp59,33 triliun yang digunakan untuk memperkuat BUMN dan BLU, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendukung penyelesaian proyek strategis dan prioritas. Adapun Pemberian Pinjaman tercatat sebesar Rp0,22 triliun, yang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian pinjaman Rp4,02 triliun dikurangi penyaluran pinjaman Rp4,24 triliun. Sementara itu, realisasi Kewajiban Penjaminan bernilai negatif Rp1,46 triliun sebagai bentuk pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah ke rekening dana cadangan penjaminan tahun 2024. Pembiayaan Lainnya terealisasi sebesar Rp57,84 triliun, bersumber dari penerimaan pembiayaan dalam negeri, hasil privatisasi, dan penjualan aset program restrukturisasi.

Dengan demikian, realisasi defisit APBN tahun 2024 sebesar Rp509,16 triliun dapat tertutupi oleh pembiayaan yang terkumpul Rp554,89 triliun. Selisih dari keduanya menghasilkan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp45,73 triliun, yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas nasional maupun penyelesaian kewajiban pemerintah.

II.1.B. Analisis APBD

II.1.B.1. Gambaran Umum APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah dalam upaya memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa, dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penanganan yang dimaksud meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar; penurunan stunting; pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan investasi. Selain itu untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Secara nasional, target pendapatan APBD 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp123,72 triliun (10,05 persen, y-on-y). Selaras dengan kenaikan target pendapatan, realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp97,39 triliun (7,75 persen, y-on-y). Sementara itu, dari sisi belanja, alokasi pagu mengalami kenaikan sebesar Rp120,61 triliun (9,30 persen, y-on-y), serta peningkatan realisasi belanja sebesar Rp86,53 triliun (6,85 persen, y-on-y) dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 3. I-Account APBD 2024

I-ACCOUNT NASIONAL				
(Dalam Triliun Rupiah)	Pagu (2024)	Real (2024)	% Real	% Growth Real (yoy)
PENDAPATAN DAERAH	1.364,47	1.353,82	99,94%	7,75%
BELANJA DAERAH	1.440,46	1.350,40	95,26%	6,85%
SURPLUS/(DEFISIT)	-63,02	3,42	-5,43%	-145,97%
PEMBIAYAAN	69,85	72.29	103,51%	-26,49%
SILPA	6,82	75.71		

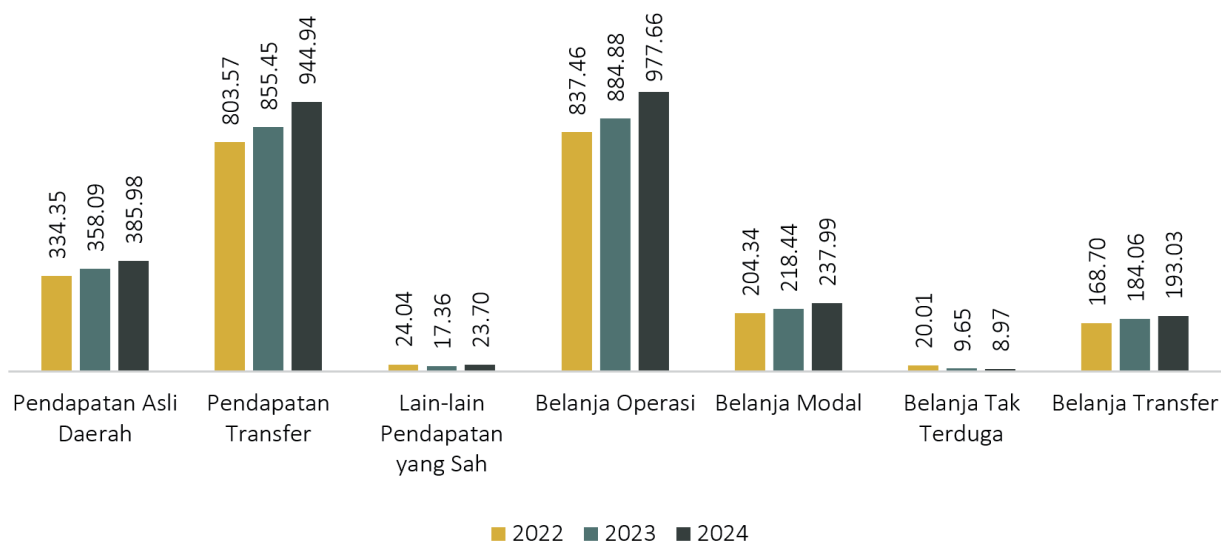
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Dalam kurun waktu 2022 - 2024, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Target pendapatan mengalami peningkatan (y-on-y) baik di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,34 persen dari Rp358,09 triliun menjadi Rp385,98 triliun dan pada komponen Pendapatan Transfer sebesar 11,14 persen dari Rp855,45 triliun menjadi Rp944,94 triliun. Adapun Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan sebesar 26,36 persen dari Rp17,36 triliun menjadi Rp23,70 triliun.

Berdasarkan data alokasi belanja APBD tahun 2024, terlihat bahwa sebagian besar komponen belanja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi tercatat naik dari Rp884,88 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp977,66 triliun pada tahun 2024, atau meningkat sebesar Rp92,78 triliun dengan pertumbuhan 11,08 persen. Kenaikan ini mencerminkan besarnya porsi kebutuhan rutin pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Selanjutnya, Belanja Modal juga mengalami kenaikan dari Rp218,44 triliun menjadi Rp237,99 triliun atau bertambah Rp19,55 triliun dengan pertumbuhan 9,57 persen. Kenaikan belanja modal ini mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian daerah.

Sementara itu, Belanja Transfer meningkat dari Rp184,06 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp193,03 triliun pada tahun 2024, tumbuh sebesar Rp8,97 triliun atau 5,32 persen. Kenaikan ini menggambarkan dukungan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan keuangan baik ke desa maupun ke pemerintah

Grafik 2. 4. Perkembangan Target Komponen APBD 2022 - 2024 (triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

kabupaten/kota guna mendorong pemerataan pembangunan. Berbeda dengan komponen lainnya, Belanja Tak Terduga justru mengalami penurunan dari Rp9,65 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp8,97 triliun pada tahun 2024, atau berkurang Rp0,68 triliun dengan kontraksi -3,41 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya rasionalisasi dalam pengalokasian anggaran yang bersifat darurat, dengan fokus penguatan pada belanja operasional, transfer, dan modal yang lebih produktif serta berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan perkembangan indikator fiskal daerah tahun 2024, kondisi Surplus/Defisit APBD secara nasional menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2023 masih terjadi defisit sebesar Rp7,44 triliun, maka pada tahun 2024 berubah menjadi surplus Rp3,42 triliun, atau mengalami perbaikan sebesar Rp10,86 triliun dengan pertumbuhan -145,92 persen. Perubahan ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan belanja, sehingga terjadi penyempitan defisit dan bahkan bergeser menjadi surplus.

Dari sisi Pembiayaan, terjadi penurunan cukup tajam dari Rp98,35 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp72,29 triliun pada tahun 2024, atau

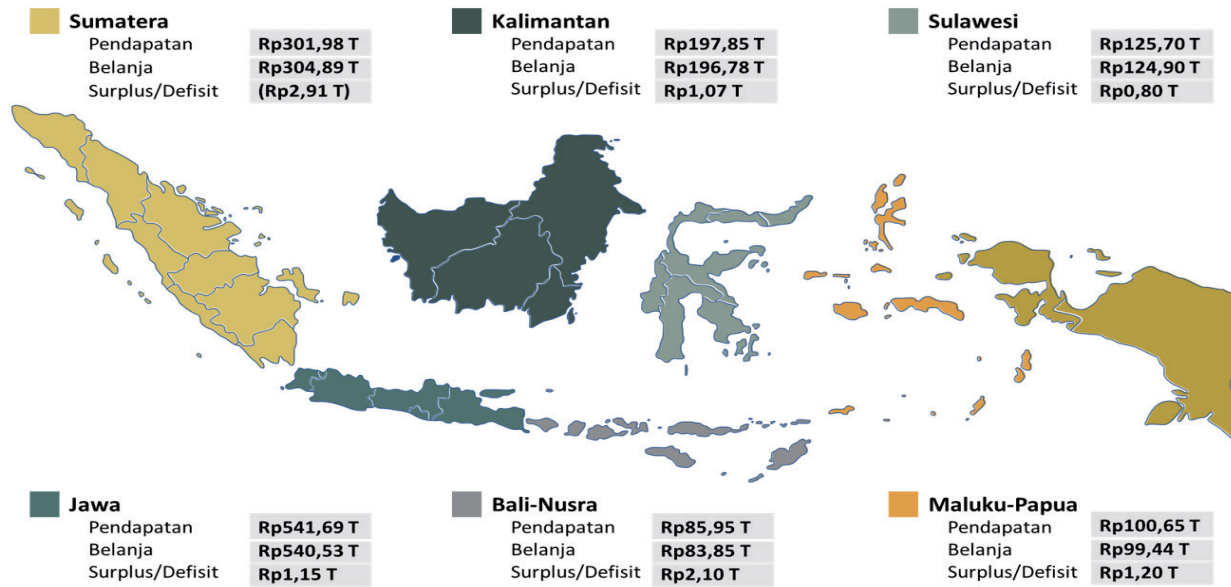
berkurang Rp26,06 triliun dengan kontraksi -26,50 persen. Penurunan ini sejalan dengan membaiknya posisi defisit sehingga kebutuhan pembiayaan untuk menutup selisih belanja menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, SiLPA/SIKPA juga diproyeksikan turun dari Rp90,91 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp75,71 triliun pada tahun 2024, atau berkurang Rp15,20 triliun dengan pertumbuhan negatif -16,72 persen. Penurunan SiLPA ini menggambarkan adanya optimalisasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga dana yang mengendap pada akhir tahun dapat diminimalisir.

Secara keseluruhan, arah kebijakan fiskal daerah tahun 2024 menunjukkan pengelolaan yang lebih sehat dengan defisit yang menyempit menjadi surplus, berkurangnya kebutuhan pembiayaan, serta pemanfaatan anggaran yang lebih optimal untuk mendukung capaian pembangunan daerah.

Pelaksanaan APBD 2024 di tingkat regional menunjukkan bahwa Jawa dan sekitarnya masih menjadi kontributor terbesar pendapatan daerah dengan porsi 40,01 persen dari total nasional. Posisi berikutnya ditempati oleh Sumatera dengan kontribusi 22,31 persen, disusul oleh Kalimantan sebesar 14,61

Gambar 2.1. Pelaksanaan APBD di Tingkat Regional



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

persen, Sulawesi 9,28 persen, Maluku-Papua 7,43 persen, dan Bali-Nusa Tenggara 6,35 persen. Dari sisi pertumbuhan pendapatan, peningkatan tertinggi terjadi di Bali-Nusa Tenggara yang tumbuh 8,87 persen, kemudian Kalimantan sebesar 20,15 persen, Jawa 6,86 persen, Sulawesi 4,66 persen, dan Sumatera 4,99 persen. Sementara itu, Maluku-Papua mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan regional lain, yakni hanya 2,68 persen (y-on-y).

Dari sisi belanja daerah, sebagian besar regional mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Kalimantan sebesar 41,37 persen, diikuti oleh Bali-Nusa Tenggara sebesar 16,07 persen, Sulawesi 11,57 persen, Jawa 10,62 persen, dan Sumatera 5,05 persen. Sebaliknya, Maluku-Papua kembali mencatat penurunan

Grafik 2. 5. Pertumbuhan Realisasi APBD Regional Dibandingkan Nasional



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

signifikan dengan kontraksi belanja mencapai 39,84 persen.

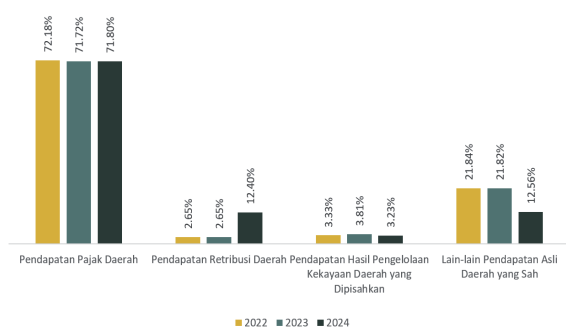
Pada komponen pembiayaan, peningkatan paling tinggi terjadi di Kalimantan yang melonjak hingga 97,61 persen, diikuti oleh Bali-Nusa Tenggara dengan kenaikan 15,60 persen. Sementara itu, empat regional lainnya yakni Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku-Papua mengalami penurunan pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, hampir semua wilayah mencatatkan surplus APBD 2024, kecuali regional Sumatera yang mengalami defisit sebesar Rp2,91 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan fiskal, di mana sebagian besar wilayah berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sementara Sumatera masih menghadapi tantangan dalam menutup gap fiskalnya.

II.1.B.2. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 tercatat Rp1.353,82 triliun atau mencapai 99,94 persen dari target pendapatan kumulatif sampai dengan akhir tahun sebesar Rp1.354,62 triliun, serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7,75 persen. Kinerja positif

Grafik 2. 6. Kontribusi Realisasi Komponen PAD



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan, baik dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, maupun lain-lain PAD yang sah.

Dari komposisinya, Pajak Daerah tetap menjadi kontributor utama PAD dengan porsi 71,80 persen, meningkat menjadi Rp275,84 triliun atau naik Rp16,97 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan ekonomi domestik dan efektivitas kebijakan intensifikasi pajak di berbagai daerah. Selain itu, Pendapatan Retribusi Daerah mencatat lonjakan tertinggi, tumbuh 397,65 persen menjadi Rp47,65 triliun, terutama ditopang oleh peningkatan retribusi pelayanan kesehatan yang mencapai Rp39,42 triliun.

Sementara itu, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkontribusi sekitar 3,23 persen dari total PAD, menunjukkan stabilitas kinerja badan usaha milik daerah. Adapun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan kontribusi menjadi 12,56 persen, seiring dengan normalisasi penerimaan hibah dan penyesuaian kebijakan pendapatan dari BLUD pascapandemi.

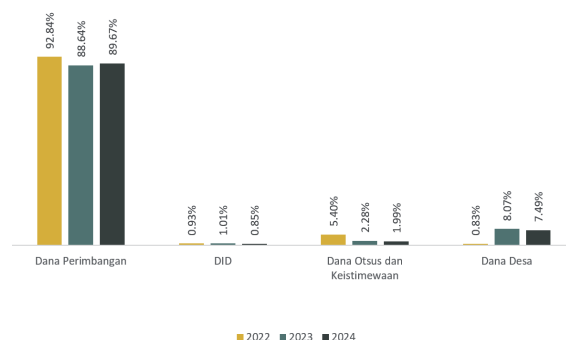
Di samping Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer masih menjadi penopang utama pendapatan daerah pada tahun 2024. Realisasi dana transfer tercatat sebesar Rp882,71 triliun, meningkat Rp69,88 triliun atau 8,60 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp812,83 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah

masih sangat bergantung pada dana transfer ketimbang pendapatannya sendiri dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Dari komposisinya, porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai Rp791,51 triliun dengan pertumbuhan 9,86 persen, menyumbang sekitar 89,67 persen dari total dana transfer. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mendukung penyediaan layanan dasar publik di daerah. Sementara itu, Dana Desa terealisasi sebesar Rp66,09 triliun atau naik tipis 0,77 persen, dengan kontribusi 7,49 persen. Adapun Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan justru mengalami penurunan sebesar Rp0,98 triliun atau -5,26 persen menjadi Rp17,59 triliun, dengan kontribusi 1,99 persen. Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) juga menurun dari Rp8,17 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp7,52 triliun pada 2024, atau turun -7,98 persen, dengan kontribusi relatif kecil hanya 0,85 persen.

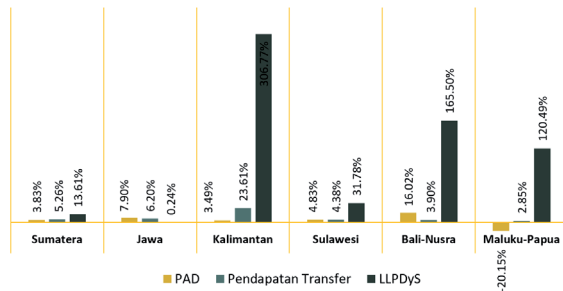
Secara keseluruhan, PAD regional mengalami peningkatan realisasi sebesar 6,44 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan PAD tertinggi terjadi pada Regional Bali-Nusa Tenggara sebesar 16,02 persen. Beberapa pendapatan tertinggi pada Regional Bali-Nusa Tenggara didapat dari pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp2,73 triliun, pajak restoran sebesar Rp2,47 triliun, dan Pajak Hotel sebesar Rp4,99 triliun.

Grafik 2. 7. Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Transfer



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 8. Perkembangan Pendapatan Regional Per Jenis



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Komponen terbesar tetap berasal dari Pendapatan Transfer, yang terealisasi sebesar Rp956,72 triliun atau naik Rp69,44 triliun (7,83 persen) dibandingkan 2023, menegaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sejalan dengan dominasi Dana Perimbangan dalam struktur pendapatan daerah.

Sementara itu, LLPDyS mengalami lonjakan signifikan, dari Rp8,22 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp12,93 triliun pada 2024, atau tumbuh 57,28 persen. Peningkatan ini terutama terjadi di beberapa wilayah seperti Kalimantan yang mencatat pertumbuhan sangat tinggi hingga 306,77 persen, disusul oleh Bali-Nusa Tenggara (165,90 persen) dan Maluku-Papua (120,49 persen). Kondisi ini menunjukkan semakin optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan lain di luar PAD dan transfer, terutama dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil kerja sama daerah, serta penerimaan sah lainnya.

Jika dilihat secara regional, Jawa dan Sumatera masih menjadi penyumbang terbesar PAD dan transfer, sementara Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, serta Maluku-Papua menunjukkan peran penting dari LLPDyS yang meningkat tajam. Dengan demikian, arah pendapatan daerah tahun 2024 tidak hanya ditopang oleh transfer pusat, tetapi juga mulai memperlihatkan kontribusi nyata dari pendapatan alternatif di berbagai wilayah.

II.1.B.3. Belanja Daerah

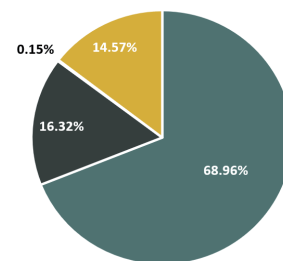
Realisasi belanja daerah Tahun 2024 tercatat Rp1.350,40 triliun atau mencapai 95,26 persen dari target belanja yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Persentase capaian belanja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu (6,85 persen). Peningkatan realisasi belanja tersebut seiring dengan program pemulihan ekonomi daerah, penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari total realisasi belanja APBD, porsi terbesar berasal dari Belanja Operasi dengan nilai Rp931,19 triliun atau sekitar 68,96 persen dari total belanja, mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya, Belanja Modal menempati porsi kedua terbesar dengan realisasi Rp220,42 triliun atau 16,32 persen, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendukung perekonomian daerah. Sementara itu, Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp196,81 triliun atau menyumbang 14,57 persen, yang sebagian besar digunakan untuk mendanai transfer ke desa maupun bantuan keuangan antarpemerintah daerah.

Adapun Belanja Tak Terduga relatif kecil dengan nilai hanya Rp1,98 triliun atau 0,15 persen dari

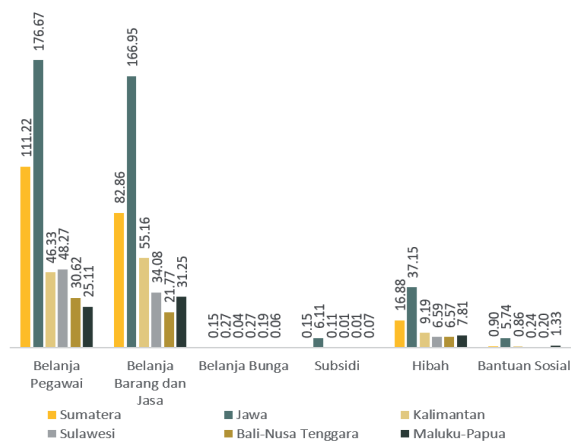
Grafik 2. 9. Komposisi Belanja APBD 2024



■ Belanja Operasi ■ Belanja Modal ■ Belanja Tak Terduga ■ Belanja Transfer

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 10. Realisasi Komponen Belanja Operasi Regional



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

total belanja, mencerminkan pengalokasian anggaran yang lebih terarah pada belanja produktif dan prioritas pembangunan.

Berdasarkan realisasi tahun 2024, belanja operasi APBD di tingkat regional masih didominasi oleh belanja pegawai pada sebagian besar wilayah. Total belanja pegawai secara nasional mencapai Rp438,21 triliun, dengan kontribusi terbesar berada di Regional Jawa sebesar Rp176,67 triliun (40,32 persen dari total nasional). Sebaliknya, Regional Maluku-Papua menempati posisi terendah dengan Rp25,11 triliun (5,73 persen). Menariknya, Regional Kalimantan dan Maluku-Papua menonjol pada belanja barang dan jasa, masing-masing Rp55,16 triliun dan Rp31,25 triliun, yang porsinya melampaui belanja pegawai.

Secara keseluruhan, belanja barang dan jasa nasional mencapai Rp392,07 triliun, dengan porsi terbesar juga berasal dari Jawa (42,58 persen) diikuti Sumatera (21,13 persen). Pada komponen belanja bunga yang relatif kecil (Rp0,99 triliun), kontribusi terbesar kembali berasal dari Jawa (94,68 persen), sedangkan wilayah lain hanya menyumbang kurang dari 3 persen. Untuk belanja subsidi senilai Rp6,45 triliun, dominasi masih dipegang oleh Jawa dengan porsi 44,13 persen, sementara wilayah lainnya relatif kecil.

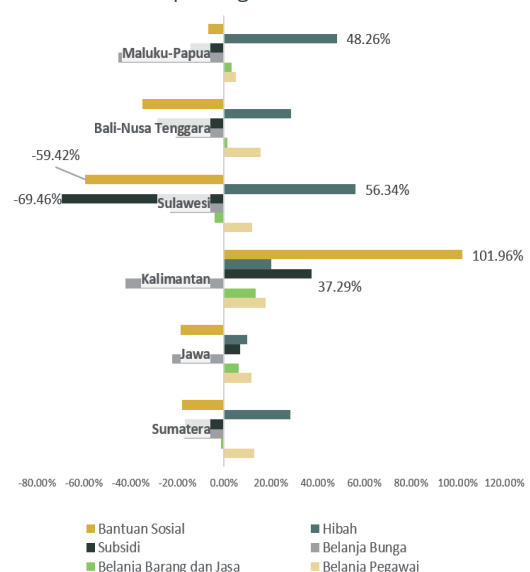
Pada belanja hibah, realisasi nasional tercatat Rp84,20 triliun, dengan kontribusi terbesar

di Jawa (44,13 persen) dan Sumatera (20,05 persen). Sementara itu, belanja bantuan sosial (bansos) nasional sebesar Rp9,28 triliun, di mana wilayah Jawa kembali menjadi penyerap terbesar dengan porsi 61,93 persen, diikuti Sumatera 9,70 persen, dan Maluku-Papua 14,37 persen.

Pertumbuhan belanja operasional tahun 2024 di tingkat regional menunjukkan dinamika yang cukup bervariasi antar jenis belanja. Belanja pegawai secara umum tumbuh positif di semua wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan (17,68 persen) dan Bali-Nusa Tenggara (15,63 persen), sementara Maluku-Papua mencatatkan pertumbuhan paling rendah (5,18 persen). Pada belanja barang dan jasa, pertumbuhan terbesar terjadi di Kalimantan (13,54 persen) dan Jawa (6,24 persen), sedangkan Sulawesi mengalami kontraksi (-4,13 persen) bersama Sumatera (-1,31 persen).

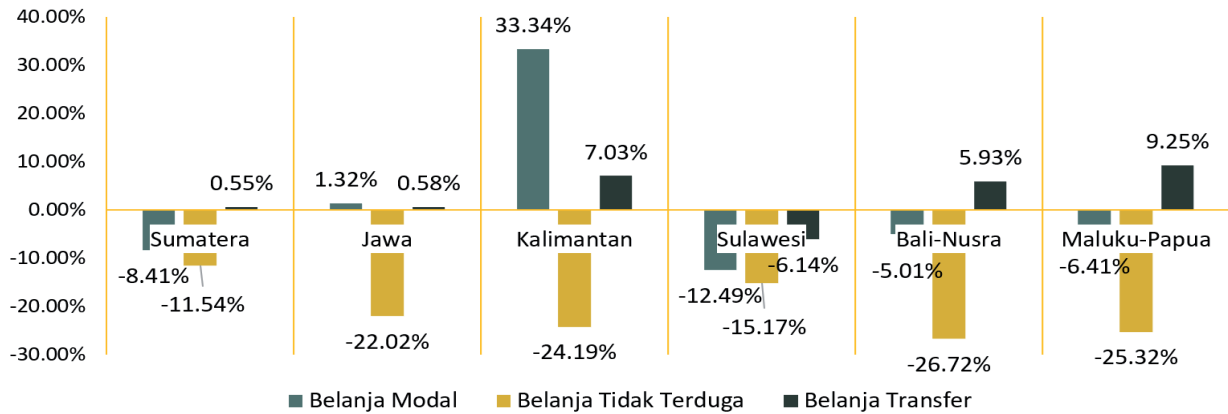
Untuk belanja bunga, seluruh regional justru mengalami penurunan tajam, terutama di Maluku-Papua (-45,10 persen) dan Kalimantan (-42,25 persen), sementara penurunan paling rendah terjadi di Sumatera (-17,12 persen). Pada komponen subsidi, Kalimantan mencatatkan lonjakan signifikan (37,29 persen) dan Jawa (6,89 persen), sedangkan Sulawesi mengalami

Grafik 2. 11. Pertumbuhan Belanja Operasional per Regional Tahun 2024



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 12. Persentase Pertumbuhan Belanja di Luar Operasi Per Regional Tahun 2024



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

penurunan terdalam (-69,46 persen).

Sementara itu, belanja hibah menunjukkan tren peningkatan di semua wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi (56,34 persen) dan Maluku–Papua (48,26 persen). Pada sisi bantuan sosial, terjadi pertumbuhan luar biasa di Kalimantan (101,96 persen), sementara wilayah lain justru mengalami kontraksi, dengan penurunan terbesar di Sulawesi (-59,42 persen) dan Bali–Nusa Tenggara (-34,89 persen).

Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan bahwa pertumbuhan belanja operasional 2024 masih didominasi oleh peningkatan pada belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah, sedangkan komponen bunga dan sebagian besar bansos mengalami kontraksi di sebagian besar wilayah. Kalimantan menjadi regional dengan pertumbuhan paling menonjol pada hampir seluruh komponen, khususnya pada bansos dan subsidi, sedangkan Maluku–Papua relatif tertinggal dengan pertumbuhan yang terbatas dan penurunan cukup tajam di beberapa pos belanja.

Adapun Belanja modal secara nasional tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Regional Kalimantan sebesar 33,34 persen, diikuti oleh Bali–Nusa Tenggara (5,93 persen) dan Maluku–Papua (6,41 persen). Sementara itu, beberapa wilayah justru mengalami kontraksi, seperti Sulawesi (-12,49 persen) dan Sumatera (-8,41 persen).

Pada komponen belanja tidak terduga, tren

kontraksi masih berlanjut di hampir seluruh regional. Penurunan terdalam terjadi di Regional Bali–Nusa Tenggara (-26,72 persen) dan Maluku–Papua (-25,32 persen), disusul Kalimantan (-24,19 persen) dan Jawa (-22,02 persen). Hanya Sumatera dan Sulawesi yang mencatat penurunan relatif lebih moderat masing-masing sebesar -11,54 persen dan -15,17 persen.

Sementara itu, belanja transfer memperlihatkan pertumbuhan positif di sejumlah wilayah, dengan peningkatan tertinggi terjadi di Regional Maluku–Papua (9,25 persen) dan Kalimantan (7,03 persen), diikuti oleh Bali–Nusa Tenggara (5,93 persen). Adapun Sulawesi dan Sumatera mencatatkan kontraksi masing-masing sebesar -6,14 persen dan -0,58 persen.

Secara keseluruhan, pola ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2024 belanja modal menjadi motor penggerak utama di Kalimantan, sementara di sebagian besar wilayah belanja tidak terduga mengalami penurunan seiring dengan membaiknya stabilitas aktivitas perekonomian. Di sisi lain, belanja transfer masih tumbuh positif di beberapa wilayah sebagai instrumen pemerataan fiskal antar daerah, meskipun pertumbuhan tidak merata di seluruh regional.

II.1.B.4. Surplus/Defisit dan Pembiayaan

Berdasarkan perkembangan indikator fiskal, kondisi Surplus/Defisit APBD tahun 2024

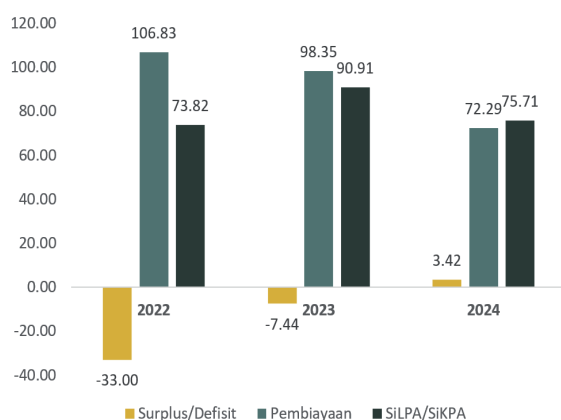
menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jika pada tahun 2023 tercatat defisit sebesar Rp7,44 triliun, maka pada tahun 2024 berhasil berbalik menjadi surplus Rp3,42 triliun, atau terjadi perbaikan fiskal senilai Rp10,86 triliun dengan pertumbuhan mencapai -145,92 persen, menandakan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pendapatan dan belanja daerah di tingkat nasional.

Pada sisi pembiayaan, terjadi penurunan dari Rp98,35 triliun pada 2023 menjadi Rp72,29 triliun pada 2024, atau turun sebesar Rp26,06 triliun dengan kontraksi -26,50 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebutuhan daerah untuk menutup gap fiskal melalui pembiayaan semakin berkurang, sejalan dengan membaiknya posisi defisit yang bertransformasi menjadi surplus.

Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) juga mengalami penurunan, dari Rp90,91 triliun pada 2023 menjadi Rp75,71 triliun pada 2024, atau menurun Rp15,20 triliun dengan laju kontraksi -16,72 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa daerah mulai mengoptimalkan penggunaan anggarannya, sehingga sisa anggaran yang tidak terpakai cenderung berkurang.

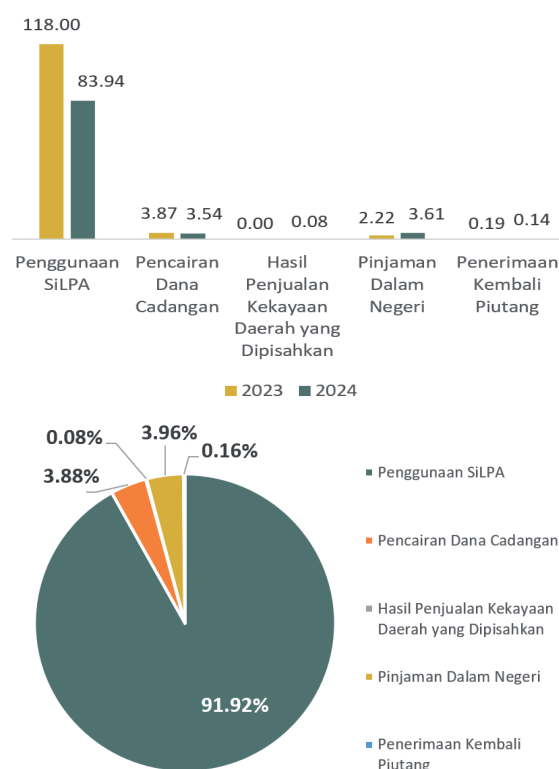
Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan perbaikan kualitas fiskal daerah di tahun 2024, di mana defisit dapat ditekan menjadi surplus,

Grafik 2. 13. Pertumbuhan Komponen Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan SiLPA (2022-2024) (triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 14. Komposisi dan Perkembangan Penerimaan Pembiayaan (2023-2024) (triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

kebutuhan pembiayaan berkurang, dan pemanfaatan anggaran lebih optimal meskipun menyisakan tantangan efisiensi belanja di beberapa sektor.

Adapun penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp91,32 triliun dengan komposisi yang sangat didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari total tersebut, penggunaan SiLPA mencapai Rp83,94 triliun atau sekitar 91,92 persen dari total penerimaan pembiayaan. Meskipun porsinya masih dominan, angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp118,00 triliun.

Selain SiLPA, sumber penerimaan lain berkontribusi dengan porsi lebih kecil. Pencairan Dana Cadangan menyumbang Rp3,54 triliun (3,88 persen), diikuti Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp3,61 triliun (3,96 persen). Sementara itu, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mulai terealisasi di 2024 sebesar Rp0,08 triliun (0,08 persen), dan Penerimaan

Kembali Piutang tercatat Rp0,14 triliun (0,16 persen).

Jika dibandingkan dengan 2023, hampir semua komponen penerimaan pembiayaan mengalami fluktuasi. Penggunaan SiLPA mengalami penurunan cukup besar, sementara Pinjaman Dalam Negeri meningkat dari Rp2,22 triliun menjadi Rp3,61 triliun. Pencairan Dana Cadangan sedikit menurun, sedangkan penjualan aset daerah dan penerimaan kembali piutang masih berkontribusi sangat kecil.

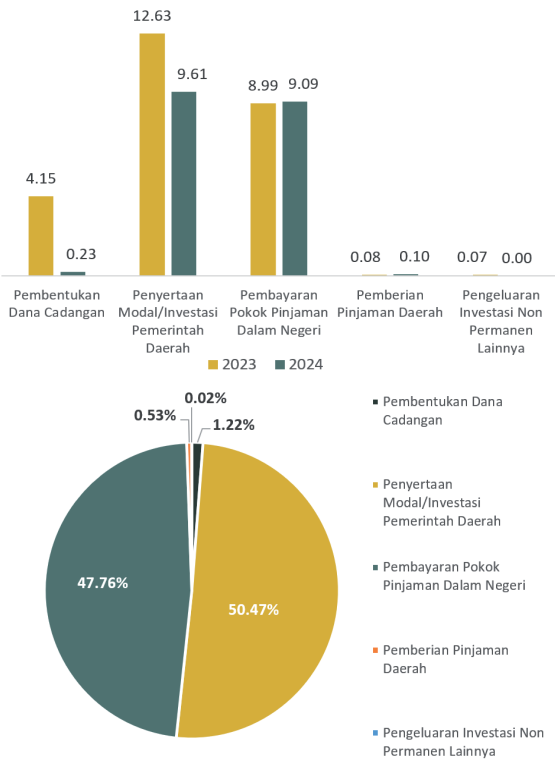
Komposisi pembiayaan tahun 2024 masih sangat bergantung pada SiLPA, meski tren penggunaannya mulai menurun, menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan, sehingga ketergantungan pada SiLPA dapat dikurangi di masa mendatang.

Komponen pengeluaran pembiayaan daerah didominasi oleh dua pos utama, yaitu Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Nilai penyertaan modal tercatat sebesar Rp9,61 triliun atau berkontribusi 50,47 persen dari total pengeluaran pembiayaan, meskipun turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp12,63 triliun. Sementara itu, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri mencapai Rp9,09 triliun atau sekitar 47,76 persen, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya (Rp8,99 triliun).

Selain dua komponen utama tersebut, terdapat beberapa pos pengeluaran lain dengan nilai yang jauh lebih kecil. Pembentukan Dana Cadangan hanya sebesar Rp0,23 triliun (1,22 persen), mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2023 yang mencapai Rp4,15 triliun. Pemberian Pinjaman Daerah tercatat Rp0,10 triliun (0,53 persen), sedikit meningkat dari Rp0,08 triliun pada 2023. Adapun Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya tidak terealisasi pada 2024 setelah sebelumnya masih ada realisasi sebesar Rp0,07 triliun.

Struktur pengeluaran pembiayaan tahun 2024 masih terkonsentrasi pada penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri yang jika digabungkan mencapai hampir 98,2

Grafik 2. 15. Komposisi dan Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan (2023-2024) (triliun rupiah)

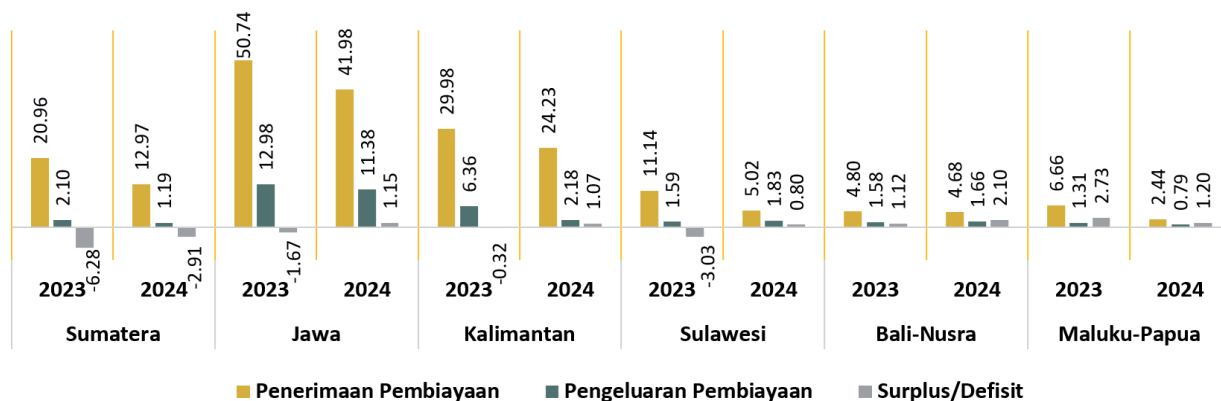


Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

persen dari total pengeluaran, menunjukkan bahwa orientasi pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk memperkuat modal daerah sekaligus menjaga kewajiban pembayaran utang, dengan porsi pengeluaran lainnya relatif sangat kecil.

Perkembangan surplus/defisit tahun 2024 tiap regional menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah. Jika dilihat dari surplus/defisit, perbaikan terjadi di sebagian besar wilayah. Walaupun Sumatera masih mengalami defisit, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya defisit mampu ditekan dari 6,28 miliar pada 2023 menjadi 2,91 miliar pada 2024. Adapun Kalimantan berhasil memperbaiki posisinya dari defisit 0,32 miliar menjadi surplus 1,07 miliar. Sulawesi juga memperbaiki defisit dari 3,03 miliar menjadi 0,20 miliar. Sementara itu, Jawa masih mencatatkan defisit -1,67 miliar, meskipun lebih baik dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, Bali–Nusa Tenggara dan Maluku–Papua berhasil mempertahankan surplus dengan nilai

Grafik 2. 16. Perkembangan Pembiayaan Regional (2023-2024) (miliar rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

masing-masing Rp0,12 miliar dan Rp1,20 miliar.

Dari sisi penerimaan pembiayaan, Regional Jawa mencatatkan angka terbesar yakni Rp41,98 miliar, diikuti oleh Kalimantan Rp24,23 miliar dan Sumatera Rp12,97 miliar. Sementara itu, Bali-Nusa Tenggara serta Maluku-Papua menempati urutan lebih rendah masing-masing sebesar Rp4,80 miliar dan Rp2,74 miliar.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, pola yang serupa juga terlihat, dengan Jawa mencatatkan pengeluaran terbesar Rp11,38 miliar, diikuti Kalimantan Rp11,14 miliar dan Sulawesi Rp11,14 miliar. Sementara Sumatera Rp1,19 miliar, Bali-Nusa Tenggara Rp1,12 miliar, dan Maluku-Papua Rp2,54 miliar relatif lebih rendah.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah di 2024 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jawa dan Kalimantan menjadi pusat aktivitas pembiayaan terbesar, sementara Bali-Nusa Tenggara serta Maluku-Papua relatif lebih stabil dengan kondisi surplus. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam menekan defisit di beberapa wilayah terutama Sumatera dan Sulawesi.

II.2. PERKEMBANGAN KINERJA ANGGARAN REGIONAL

II.2.A. APBN Regional

II.2.A.1. Gambaran Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola keuangan negara selama satu tahun anggaran. APBN berfungsi sebagai rencana keuangan yang memuat proyeksi pendapatan serta rencana belanja negara, sekaligus mencerminkan arah kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah.

Secara umum, APBN terdiri dari dua komponen utama, yakni pendapatan dan belanja. Sumber pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, serta pembiayaan lainnya. Sementara itu, belanja negara dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti belanja pemerintah pusat, belanja modal, transfer ke daerah, hingga belanja sosial.

Alokasi anggaran dalam APBN disusun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan penguatan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah. Selain itu, APBN juga menetapkan target keseimbangan fiskal, baik berupa surplus maupun defisit anggaran. Surplus digunakan untuk memperkuat posisi fiskal, antara lain melalui pembayaran utang dan peningkatan cadangan devisa. Sebaliknya, defisit dibiayai melalui berbagai instrumen pembiayaan, termasuk pinjaman.

Penyusunan APBN dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi,

inflasi, pengangguran, serta kebijakan fiskal dan moneter yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, APBN menjadi fondasi bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, proses perumusan APBN harus disusun secara hati-hati agar benar-benar dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana publik demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

II.2.A.2. Regional Sumatera

Hasil konsolidasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi di regional Sumatera menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir masih berada pada posisi defisit. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah hanya mampu menutup defisit anggaran menghasilkan SIKPA Rp205,29 triliun atau naik 3,95 persen dari tahun sebelumnya.

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara dan hibah di Sumatera tahun 2024 mencapai Rp140,20 triliun, tumbuh 5,16 persen (y-on-y) dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp133,31 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 4,77 persen menjadi Rp121,75 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 7,81 persen menjadi Rp18,45 triliun. Kinerja ini memperlihatkan adanya perbaikan setelah penurunan cukup tajam pada tahun 2023 akibat melemahnya sektor perpajakan, terutama PPh Badan yang terdampak fluktuasi harga komoditas.

Dari sisi belanja, total belanja negara di Regional Sumatera pada tahun 2024 mencapai Rp345,49 triliun, meningkat 4,44 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan terbesar terjadi pada belanja pemerintah yang naik 13,04 persen menjadi Rp129,09 triliun, sedangkan belanja transfer ke daerah dan dana desa relatif

Tabel 2. 4. APBN Regional Sumatera (triliun rupiah)

Uraian	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	145,20	133,31	140,20	5,16%
Penerimaan Perpajakan	131,30	116,20	121,75	4,77%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	13,91	17,11	18,45	7,81%
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	306,70	330,80	345,49	4,44%
Belanja Pemerintah	96,48	114,20	129,09	13,04%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	210,22	216,60	216,40	-0,09%
Surplus/Defisit Anggaran	(161,50)	(197,48)	(205,29)	3,95%
SILPA/SIKPA	(161,50)	(197,48)	(205,29)	3,95%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

stagnan dengan nilai Rp216,40 triliun atau turun tipis 0,09 persen.

Komposisi belanja regional Sumatera tahun 2024 masih didominasi oleh belanja barang dengan porsi 42,80 persen dari total belanja pemerintah. Posisi ini relatif stabil dibandingkan 2023 yang sebesar 42,83 persen. Sementara itu, belanja pegawai menempati urutan kedua dengan proporsi 35,65 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (35,42 persen).

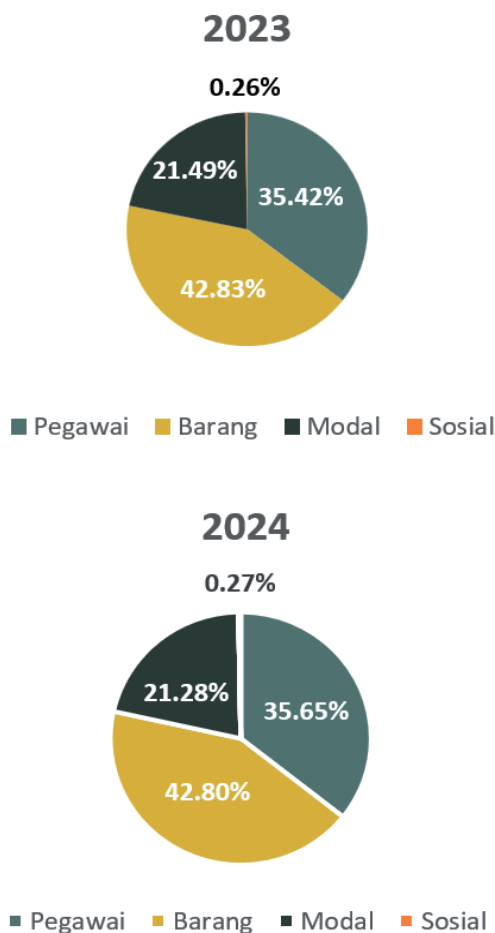
Pada saat yang sama, belanja modal memiliki kontribusi sebesar 21,28 persen pada 2024, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 21,49 persen. Adapun belanja sosial tetap pada level yang relatif kecil dengan porsi 0,27 persen, nyaris tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Perubahan komposisi belanja ini menunjukkan bahwa dominasi belanja barang yang tetap tinggi mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan operasional program serta belanja rutin, khususnya pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi input produksi.

II.2.A.1. Regional Jawa

Hasil Konsolidasi antara laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2024 masih

Grafik 2. 17. Komposisi Belanja Pemerintah Regional Sumatera



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp92,04 triliun. Meskipun demikian, surplus ini menurun cukup tajam dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp261,20 triliun, atau berkurang sebesar 64,76 persen (y-on-y). Tren penurunannya menunjukkan adanya tekanan dari sisi belanja yang lebih ekspansif dibandingkan kenaikan pendapatan.

Pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar Rp2.504,19 triliun, meningkat 1,79 persen dibandingkan 2023. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 3,03 persen menjadi Rp1.929,68 triliun. Sebaliknya, PNPB mengalami penurunan sebesar -5,24 persen, sementara penerimaan hibah justru melonjak signifikan hingga 100,11 persen menjadi Rp34,39 triliun. Penerimaan hibah tersebut utamanya diperuntukkan untuk

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Di sisi belanja, belanja negara di Regional Jawa mencapai Rp2.412,15 triliun, tumbuh 9,69 persen (y-on-y). Pertumbuhan terbesar terjadi pada belanja pemerintah yang naik 10,97 persen menjadi Rp2.135,93 triliun, sedangkan belanja transfer ke daerah dan dana desa hanya meningkat tipis 0,74 persen. Kenaikan belanja pemerintah ini erat kaitannya dengan penambahan dan penguatan Kementerian/ Lembaga (K/L) pada tahun 2024. Pertumbuhan belanja pemerintah di Jawa tidak hanya berasal dari aktivitas rutin, tetapi juga dari ekspansi kelembagaan dan pelaksanaan program prioritas nasional yang ditempatkan di wilayah ini.

Struktur belanja Regional Jawa tahun 2024 memperlihatkan pergeseran komposisi dibandingkan tahun sebelumnya. Pembayaran bunga utang menjadi komponen terbesar dengan porsi 22,87 persen dari total belanja. Peningkatan tersebut digunakan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri meliputi pembayaran bunga SBN serta pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran bunga utang luar negeri karena adanya utang program dan proyek di tahun 2024.

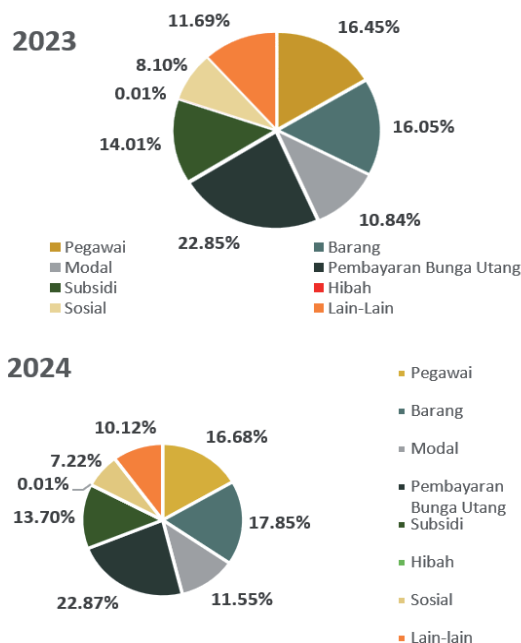
Komponen berikutnya adalah belanja barang dengan kontribusi 17,85 persen, relatif stabil

Tabel 2. 5. APBN Regional Jawa (triliun rupiah)

Uraian	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.328,91	2.460,19	2.504,19	1,79%
Penerimaan Perpajakan	1.759,30	1.873,02	1.929,68	3,03%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	563,92	569,98	540,12	-5,24%
Penerimaan Hibah	5,69	17,18	34,39	100,11%
Belanja Negara	2.279,42	2.198,99	2.412,15	9,69%
Belanja Pemerintah	2.022,17	1.924,82	2.135,93	10,97%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	257,25	274,17	276,21	0,74%
Surplus/Defisit Anggaran	49,49	261,20	92,04	-64,76%
SILPA/SIKPA	640,47	617,86	646,93	4,70%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 18. Komposisi Belanja Pemerintah Regional Jawa



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

dibandingkan tahun 2023 (16,05 persen). Disusul oleh belanja pegawai sebesar 16,68 persen, sedikit meningkat dari 16,45 persen pada tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja modal juga tumbuh dengan proporsi 11,55 persen, naik dari 10,84 persen pada 2023, mencerminkan adanya dorongan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan aset produktif. Adapun belanja sosial menurun menjadi 7,22 persen dari sebelumnya 8,10 persen, sementara belanja lain-lain berada pada level 10,12 persen, turun dari 11,69 persen pada tahun lalu. Hibah masih berkontribusi sangat kecil, yakni 0,01 persen dari total belanja.

II.2.A.3. Regional Kalimantan

Hasil konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah regional Kalimantan menunjukkan bahwa pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pendapatan negara dan hibah menunjukkan peningkatan sebesar 0,98 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang mencapai Rp86,62 triliun

atau naik 1,41 persen, sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi dan perdagangan komoditas utama Kalimantan. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mengalami kontraksi 3,21 persen, turun menjadi Rp8,46 triliun, sehingga menahan laju pertumbuhan total pendapatan.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp212,68 triliun, tumbuh 1,52 persen (y-on-y). Pertumbuhan ini utamanya bersumber dari belanja pemerintah pusat yang melonjak signifikan sebesar 28,35 persen, mencapai Rp85,06 triliun. Kenaikan ini terkait dengan penguatan peran Kementerian/Lembaga dalam mendukung program prioritas nasional di Kalimantan, utamanya pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Sebaliknya, belanja transfer ke daerah dan dana desa justru mengalami kontraksi 10,89 persen, menjadi Rp127,61 triliun, seiring dengan rasionalisasi transfer fiskal dan penyesuaian kebutuhan di daerah.

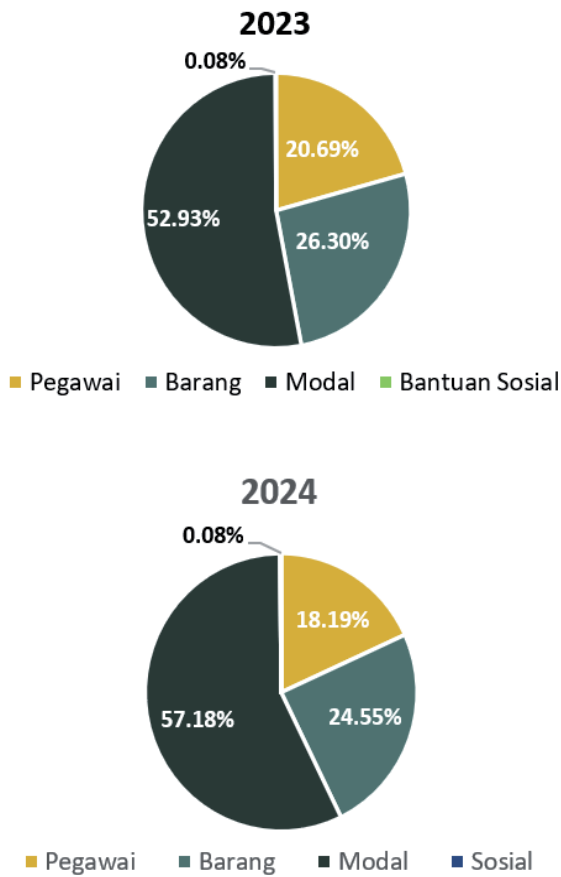
Struktur belanja pemerintah di Kalimantan tahun 2024 memperlihatkan dominasi belanja modal yang mencapai 57,18 persen, naik dibandingkan 52,93 persen pada 2023. Peningkatan ini selaras dengan fokus pembangunan infrastruktur strategis, termasuk dukungan percepatan pembangunan IKN, jalan

Tabel 2. 6. APBN Regional Kalimantan (triliun rupiah)

Uraian	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	78,44	94,16	95,08	0,98%
Penerimaan Perpajakan	73,15	85,42	86,62	1,41%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,29	8,74	8,46	(3,21%)
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	154,72	209,49	212,68	1,52%
Belanja Pemerintah Pusat	41,97	66,27	85,06	28,35%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	112,75	143,22	127,61	(10,89%)
Surplus/Defisit Anggaran	(76,28)	(115,33)	(117,59)	1,96%
SILPA/SIKPA	(76,28)	(115,33)	(117,59)	1,96%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 19. Komposisi Belanja Pemerintah Regional Kalimantan



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

penghubung antarwilayah, serta proyek energi dan sumber daya alam.

Komponen kedua terbesar adalah belanja barang dengan porsi 24,55 persen, sedikit turun dari 26,30 persen pada tahun sebelumnya, yang tetap mencerminkan tingginya kebutuhan operasional dan logistik program pemerintah di wilayah ini. Sementara itu, belanja pegawai berkontribusi sebesar 18,19 persen, menurun dari 20,69 persen di tahun 2023, sejalan dengan upaya efisiensi struktur birokrasi di daerah. Adapun belanja bantuan sosial masih sangat kecil dengan porsi 0,08 persen, menunjukkan bahwa fokus utama belanja di Kalimantan lebih diarahkan pada belanja pembangunan dan penyediaan infrastruktur ketimbang perlindungan sosial.

II.2.A.4. Regional Sulawesi

APBN Regional Sulawesi tahun 2024 mencatat pendapatan negara dan hibah sebesar Rp43,96 triliun, tumbuh 8,59 persen (y-on-y). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang mencapai Rp36,14 triliun atau naik 9,20 persen, sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi daerah, khususnya dari sektor industri pengolahan sektor transportasi dan pergudangan. Selain itu, PNBP juga meningkat sebesar 5,90 persen menjadi Rp7,82 triliun., Penerimaan PNBP Lainnya menjadi pendorong utama peningkatan penerimaan PNBP, seiring dengan upaya pemerintah dan instansi pengelola dalam menggali potensi baru, khususnya melalui perluasan wilayah tambang, pengembangan kawasan industri pengolahan logam, serta peningkatan kualitas layanan publik.

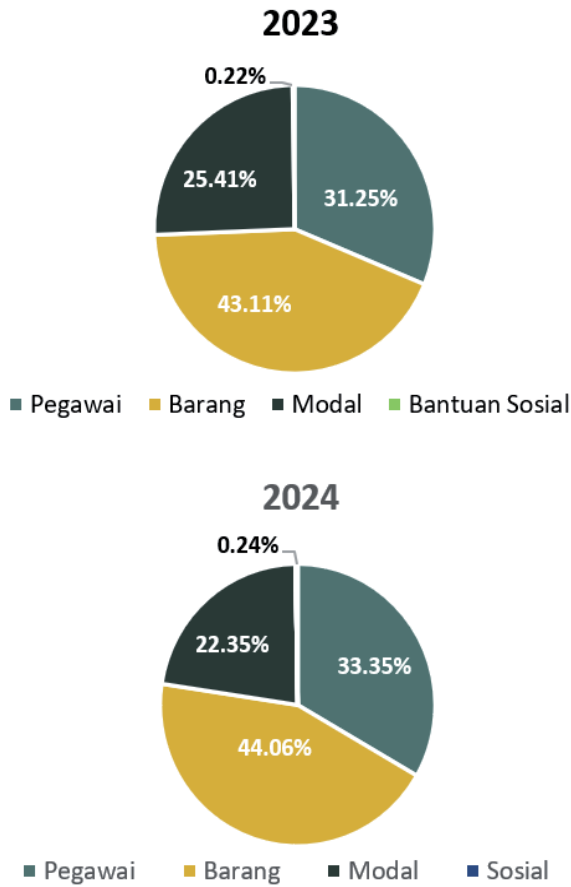
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara Sulawesi tahun 2024 mencapai Rp162,98 triliun, meningkat 2,23 persen (y-on-y). Peningkatan terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang naik 5,84 persen, mencapai Rp66,57 triliun. Sementara itu, belanja transfer ke daerah dan dana desa relatif stagnan dengan sedikit penurunan 0,12 persen, sebesar Rp96,41

Tabel 2. 7. APBN Regional Sulawesi (triliun rupiah)

Uraian	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	37,11	40,48	43,96	8,59%
Penerimaan Perpajakan	31,18	33,10	36,14	9,20%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,93	7,38	7,82	5,90%
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	144,00	159,42	162,98	2,23%
Belanja Pemerintah Pusat	52,79	62,89	66,57	5,84%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	91,21	96,53	96,41	(0,12%)
Surplus/Defisit Anggaran	(106,89)	(118,94)	(119,02)	0,07%
SILPA/SIKPA	(106,89)	(118,94)	(119,02)	0,07%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2. 20. Komposisi Belanja Pemerintah Regional Sulawesi



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

triliun, yang mencerminkan konsistensi alokasi untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah.

Struktur belanja Regional Sulawesi tahun 2024 memperlihatkan dominasi belanja barang dengan porsi 44,06 persen, meningkat dari 43,11 persen pada 2023, menunjukkan masih besarnya kebutuhan untuk mendanai belanja operasional dan program kerja pemerintah di daerah.

Komponen terbesar kedua adalah belanja pegawai sebesar 33,35 persen, naik dari 31,25 persen pada tahun sebelumnya, yang menandakan peningkatan beban belanja terkait kompensasi aparatur negara serta penguatan layanan publik. Sementara itu, belanja modal berkontribusi sebesar 22,35 persen, sedikit menurun dari 25,41 persen di 2023,

mengindikasikan adanya perlambatan dalam alokasi belanja pembangunan infrastruktur.

Adapun belanja bantuan sosial hanya berkontribusi 0,24 persen, relatif stabil dari tahun sebelumnya (0,22 persen).

II.2.A.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

Hasil konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian pada regional Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami defisit. Kendati demikian, defisit tersebut mengalami perbaikan dengan penurunan sebesar 4,58 persen dibandingkan defisit tahun 2023. Penurunan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam keseimbangan fiskal meski tekanan pembiayaan masih cukup tinggi.

Dari sisi pendapatan negara dan hibah terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pendapatan negara dan hibah tahun 2024 mencapai Rp36,15 triliun, tumbuh 20,12 persen (y-on-y). Pertumbuhan ini didorong terutama oleh penerimaan perpajakan yang meningkat signifikan sebesar 24,32 persen, mencapai Rp29,30 triliun. Peningkatan tersebut erat kaitannya dengan penguatan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang kembali pulih pascapandemi. Sementara itu, PNBP juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,95

Tabel 2. 8. APBN Regional Bali-Nusa Tenggara (triliun rupiah)

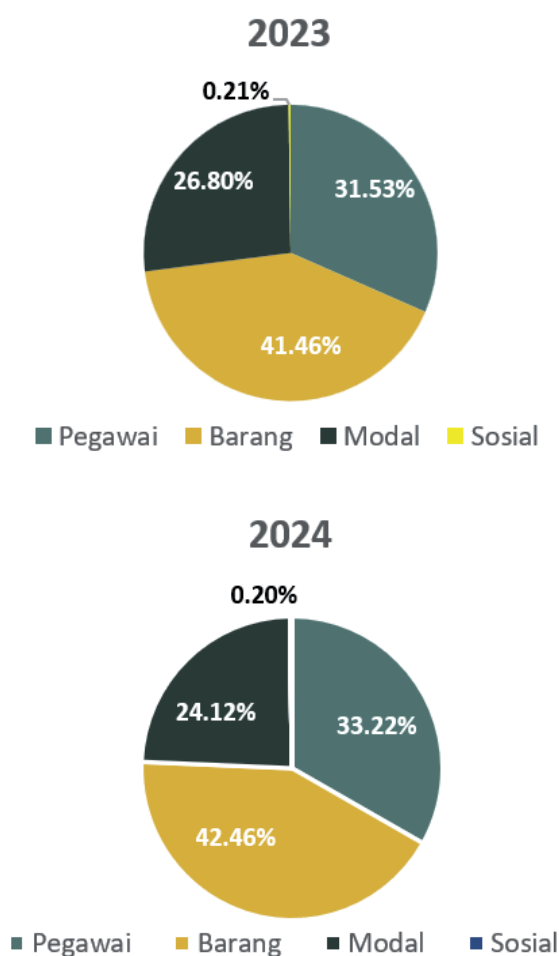
Uraian	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	23,28	30,10	36,15	20,12%
Penerimaan Perpajakan	18,58	23,57	29,30	24,32%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,70	6,53	6,85	4,95%
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	82,61	86,08	89,57	4,05%
Belanja Pemerintah	32,71	33,60	35,70	6,25%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	49,90	52,48	53,87	2,65%
Surplus/Defisit Anggaran	(59,33)	(55,98)	(53,42)	(4,58%)
SILPA/SIKPA	(59,33)	(55,98)	(53,42)	(4,58%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

persen, dengan nilai Rp6,85 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara di Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp89,57 triliun pada tahun 2024, tumbuh 4,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja ditopang oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6,25 persen menjadi Rp35,70 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa yang naik tipis 2,65 persen menjadi Rp53,87 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam optimalisasi alokasi pagu anggaran sebagai wujud peran APBN dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kebijakan ini menegaskan fungsi APBN sebagai *shock absorber* dan *agent of development* di tengah ketidakpastian perekonomian global

Grafik 2. 21. Komposisi Belanja Pemerintah Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

yang masih berlanjut dari tahun sebelumnya.

Struktur belanja Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 didominasi oleh belanja barang dengan porsi 42,46 persen dari total belanja, relatif stabil dibandingkan tahun 2023 (41,46 persen). Pertumbuhan positif pada Belanja Barang sejalan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 pada bulan Februari 2024 serta Tahapan Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berlangsung dari bulan November hingga Desember 2024.

Komponen terbesar berikutnya adalah belanja pegawai dengan kontribusi 33,22 persen, meningkat dari 31,53 persen pada tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi belanja pegawai dipengaruhi oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada bulan Maret dan Gaji ke-13 pada bulan Juni dengan nilai yang lebih besar dibandingkan tahun 2023. Kenaikan tersebut sejalan dengan penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Belanja modal berkontribusi sebesar 24,12 persen, sedikit menurun dibandingkan 26,80 persen pada 2023. Penurunan ini dapat menunjukkan adanya pengurangan investasi dalam pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek pengembangan di wilayah Bali-Nusa Tenggara. Adapun belanja sosial relatif kecil, hanya sebesar 0,20 persen, turun tipis dari 0,21 persen pada 2023.

II.2.A.6. Regional Maluku-Papua

Hasil Konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah regional Maluku dan Papua menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pendapatan negara dan hibah. Pada tahun 2024, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp31,02 triliun, tumbuh 20,77 persen (y-on-y) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan penerimaan perpajakan sebesar

Tabel 2. 9. APBN Regional Maluku-Papua (triliun rupiah)

Uraian	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Negara dan Hibah	22,88	25,69	31,02	20,77%
Penerimaan Perpajakan	21,05	22,89	28,34	23,79%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,83	2,79	2,68	(3,98%)
Penerimaan Hibah	0	0	0	0%
Belanja Negara	128,81	136,44	136,91	0,34%
Belanja Pemerintah	33,90	38,00	43,87	15,44%
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	94,90	98,44	93,03	(5,49%)
Surplus/Defisit Anggaran	(105,92)	(110,75)	(105,88)	(4,40%)
SILPA/SIKPA	(105,92)	(110,75)	(105,88)	(4,40%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

23,79 persen, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga di wilayah timur Indonesia. Kinerja pajak yang kuat ini juga dipengaruhi oleh sektor perdagangan dan jasa yang kembali pulih, serta membaiknya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami sedikit kontraksi sebesar 3,98 persen, yang diperkirakan disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari sektor sumber daya alam, terutama migas dan hasil tambang, akibat penyesuaian harga komoditas global.

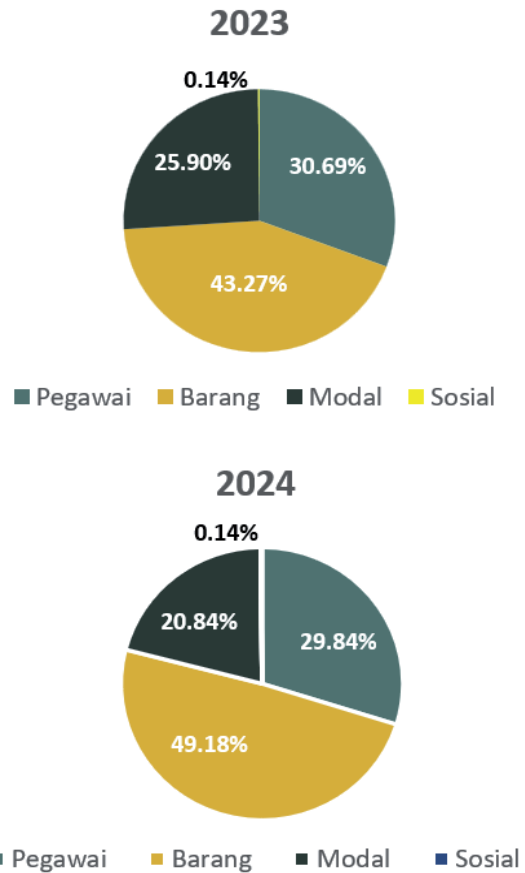
Dari sisi belanja negara, total realisasi mencapai Rp136,91 triliun, meningkat tipis 0,34 persen dibandingkan tahun 2023. Belanja pemerintah pusat mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi sebesar 15,44 persen, menjadi Rp43,87 triliun, seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur, dukungan pendidikan, serta belanja pegawai pada sejumlah satuan kerja di wilayah Maluku dan Papua. Sementara itu, belanja transfer ke daerah dan dana desa justru menurun 5,49 persen, menjadi Rp93,03 triliun. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2024 menjadi faktor utama turunnya total Transfer ke Daerah (TKD). Melemahnya penerimaan dari sektor-sektor sumber daya alam (SDA) seperti minyak dan gas bumi, pertambangan mineral, dan kehutanan, akibat penurunan harga komoditas

global dan menurunnya volume produksi di daerah penghasil, menyebabkan porsi DBH yang disalurkan ke daerah berkurang cukup tajam.

Sementara itu pada keseimbangan anggaran, Maluku-Papua masih mencatatkan defisit sebesar Rp105,88 triliun, sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp110,75 triliun. Defisit yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat, laju belanja pemerintah masih cukup besar untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dan pegunungan Papua.

Struktur belanja pemerintah di Regional Maluku-Papua tahun 2024 didominasi oleh belanja barang dengan porsi 49,18 persen, naik dari 43,27 persen pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan aktivitas operasional

Grafik 2. 22. Komposisi Belanja Pemerintah Regional Maluku-Papua



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

kementerian/lembaga di wilayah ini, terutama untuk mendukung belanja logistik, pengadaan barang layanan publik, serta proyek-proyek percepatan pembangunan Papua.

Selanjutnya, belanja pegawai berkontribusi sebesar 29,84 persen, meningkat dari 30,69 persen pada tahun sebelumnya, seiring dengan penyesuaian tunjangan dan alokasi untuk aparatur negara di daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Belanja modal menempati porsi 20,84 persen, sedikit turun dibandingkan 25,90 persen pada 2023. Meskipun terjadi penurunan pagu anggaran, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran. Dengan berfokus pada proyek-proyek yang memberikan dampak maksimal, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Sementara itu, komposisi belanja sosial relatif kecil yaitu 0,14 persen, dengan fokus pada program bantuan masyarakat berpendapatan rendah.

II.2.B. APBD Regional

II.2.B.1. Gambaran Umum

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah kembali menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang mencerminkan arah dan prioritas pembangunan di masing-masing wilayah. APBD Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional, kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, komposisi APBD Tahun 2024 masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Namun demikian, beberapa wilayah mengalami penurunan realisasi DBH, terutama di wilayah timur Indonesia, akibat penurunan penerimaan dari sektor sumber daya alam seperti migas dan pertambangan. Di sisi lain, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terus menunjukkan tren positif seiring dengan peningkatan optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Pendapatan Lain-lain yang Sah juga menjadi pelengkap sumber pembiayaan kegiatan prioritas daerah.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, APBD 2024 diarahkan untuk memperkuat belanja publik yang produktif, antara lain untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat. Porsi belanja operasional tetap mendominasi struktur pengeluaran daerah, namun pemerintah daerah juga mendorong belanja modal agar lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar pemerintah daerah masih mengalami defisit APBD, di mana belanja daerah melebihi pendapatan. Situasi ini dapat dipahami karena tingginya kebutuhan pembangunan sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah, baik dari SiLPA tahun sebelumnya maupun sumber lain seperti pinjaman yang sesuai regulasi.

Dalam APBD 2024, pembiayaan daerah menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan proyek strategis tetap berjalan. SiLPA/SiKPA 2023 juga dimanfaatkan untuk mendukung belanja prioritas tahun 2024, terutama bagi daerah yang memiliki proyek multiyears atau kebutuhan layanan publik yang mendesak.

Secara umum, penyusunan APBD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berfokus pada pencapaian hasil (*outcome-based budgeting*). Pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dengan optimalisasi belanja publik, sambil memprioritaskan peningkatan mutu layanan masyarakat, pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah agar lebih mandiri.

II.2.B.2. Regional Sumatera

Secara umum, pendapatan daerah di Regional Sumatera tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,99 persen dibandingkan tahun 2023, dari Rp287,62 triliun menjadi Rp301,98 triliun. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi di wilayah Sumatera yang terus berlanjut, seiring dengan meningkatnya penerimaan dari pajak daerah dan dukungan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat pertumbuhan sebesar 3,83 persen, dari Rp62,18 triliun menjadi Rp64,56 triliun. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan domestik, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Optimalisasi sistem pemungutan pajak daerah serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjadi faktor utama peningkatan PAD.

Sementara itu, Pendapatan Transfer yang merupakan komponen terbesar dari pendapatan daerah, mencapai Rp235,63 triliun atau meningkat 5,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp194,64 triliun, yang didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp116,48

triliun sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam pemerataan fiskal antar-daerah. Selain itu, Transfer Pemerintah Pusat – Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tercatat sebesar Rp26,15 triliun, dengan kontribusi utama dari Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus. Adapun Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi sebesar Rp11,62 triliun serta Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp3,23 triliun, mencerminkan adanya sinergi dan dukungan keuangan antardaerah dalam memperkuat pembangunan di wilayah Sumatera.

Dari sisi belanja daerah, realisasi tahun 2024 mencapai Rp304,89 triliun, meningkat 3,74 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan belanja operasi sebesar 7,60 persen, dari Rp197,16 triliun menjadi Rp212,16 triliun, terutama untuk belanja pegawai dan penyelenggaraan layanan publik. Sebaliknya, belanja modal menurun 8,41 persen menjadi Rp45,91 triliun, mencerminkan kebijakan efisiensi dan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah. Belanja tidak terduga juga turun 11,54 persen, sedangkan belanja transfer relatif stabil dengan kenaikan tipis 0,55 persen.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran tahun 2024 sebesar Rp2,91 triliun, turun signifikan dibandingkan defisit tahun 2023 sebesar Rp6,28 triliun (menurun 53,64 persen). Penurunan defisit ini mencerminkan kinerja pengelolaan fiskal yang lebih sehat dan terkendali, di mana peningkatan pendapatan mampu menutupi sebagian besar kebutuhan belanja daerah.

Dari sisi pembiayaan daerah, terjadi penurunan signifikan sebesar 37,53 persen, dari Rp18,86 triliun menjadi Rp11,78 triliun. Penerimaan pembiayaan turun 38,10 persen menjadi Rp12,97 triliun, seiring dengan berkurangnya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan menurun 43,20 persen, menjadi Rp1,19 triliun. Akibatnya, SiLPA/ SiKPA tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp8,87 triliun, atau turun 29,49 persen dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2. 10. APBD Regional Sumatera (triliun rupiah)				
Sumatera	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Daerah	280,23	287,62	301,98	4,99%
Pendapatan Asli Daerah	57,29	62,18	64,56	3,83%
Pendapatan Transfer	220,28	223,87	235,63	5,26%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2,67	1,58	1,79	13,61%
Belanja Daerah	279,76	293,90	304,89	3,74%
Belanja Operasi	185,99	197,16	212,16	7,60%
Belanja Modal	48,03	50,12	45,91	(8,41%)
Belanja Tidak Terduga	0,54	0,32	0,28	(11,54%)
Belanja Transfer	45,21	46,29	46,54	0,55%
Surplus/Defisit	0,47	(6,28)	(2,91)	(53,64%)
Pembiayaan Daerah	23,92	18,86	11,78	(37,53%)
Penerimaan Pembiayaan	26,24	20,96	12,97	(38,10%)
Pengeluaran Pembiayaan	2,32	2,10	1,19	(43,20%)
SiLPA/SiKPA	24,39	12,58	8,87	(29,49%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Secara keseluruhan, kinerja APBD Regional Sumatera Tahun 2024 menunjukkan arah positif dengan peningkatan pendapatan daerah yang lebih tinggi daripada pertumbuhan belanja, penurunan defisit, serta efisiensi dalam pembiayaan. Struktur pendapatan yang didominasi oleh dana transfer pusat sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat ketahanan fiskal daerah di seluruh wilayah Sumatera.

II.2.B.3. Regional Jawa

Secara umum, APBD Regional Jawa tahun 2024 menunjukkan kinerja fiskal yang solid dengan peningkatan pendapatan daerah sebesar 6,86 persen, dari Rp506,92 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp541,69 triliun. Kenaikan ini mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi di wilayah Jawa, baik dari sisi konsumsi, investasi, maupun produksi, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak dan transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Dari sisi pendapatan, APBD Regional Jawa tahun 2024 mencatat total Rp541,69 triliun, tumbuh 6,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi Rp224,59 triliun atau naik 7,90 persen, didominasi oleh Pajak Daerah sebesar Rp167,83 triliun, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan PBBKB, serta didukung Pendapatan Retribusi Rp31,68 triliun dan BLUD Rp14,20 triliun. Sementara itu, Pendapatan Transfer mencapai Rp313,86 triliun atau naik 6,20 persen, dengan porsi terbesar dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp250,39 triliun dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp28,60 triliun. Selain itu, terdapat Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3,24 triliun, terutama dari hibah dan dana darurat. Secara keseluruhan, struktur pendapatan tahun 2024 menunjukkan kinerja fiskal yang kuat dengan kombinasi PAD yang meningkat dan dukungan transfer pusat yang tetap dominan.

Tabel 2. 11. APBD Regional Jawa (triliun rupiah)

Jawa	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Daerah	400,28	506,92	541,69	6,86%
Pendapatan Asli Daerah	179,14	208,15	224,59	7,90%
Pendapatan Transfer	215,95	295,54	313,86	6,20%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5,19	3,23	3,24	0,24%
Belanja Daerah	459,76	508,59	540,53	6,28%
Belanja Operasi	328,45	362,10	392,90	8,51%
Belanja Modal	60,09	65,31	66,18	1,32%
Belanja Tidak Terduga	1,18	0,82	0,64	(22,02%)
Belanja Transfer	70,05	80,36	80,82	0,58%
Surplus/Defisit	(59,49)	(1,67)	1,15	(169,23%)
Pembiayaan Daerah	48,31	37,76	30,60	(18,95%)
Penerimaan Pembiayaan	56,24	50,74	41,98	(17,26%)
Pengeluaran Pembiayaan	7,93	12,98	11,38	(12,34%)
SILPA/SiKPA	(11,18)	36,09	31,76	(12,01%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Dari sisi belanja daerah, alokasi tahun 2024 mencapai Rp540,53 triliun, meningkat 6,28 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja operasi yang naik 8,51 persen menjadi Rp392,90 triliun, seiring dengan kebutuhan pembiayaan pegawai, barang dan jasa, serta pelayanan publik. Sementara itu, belanja modal naik moderat sebesar 1,32 persen menjadi Rp66,18 triliun, mencerminkan kelanjutan pembangunan infrastruktur dan sarana publik di berbagai wilayah Jawa. Di sisi lain, belanja tidak terduga menurun 22,02 persen, sedangkan belanja transfer meningkat tipis sebesar 0,58 persen.

Dari sisi keseimbangan fiskal, APBD Jawa tahun 2024 mencatat surplus sebesar Rp1,15 triliun, membaik dibandingkan defisit tahun 2023 sebesar Rp1,67 triliun, menunjukkan pengelolaan pendapatan dan belanja yang lebih efisien serta kemampuan daerah menjaga stabilitas fiskal.

Untuk pembiayaan daerah, tercatat sebesar Rp30,60 triliun, menurun 18,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan mencapai Rp41,98 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11,38 triliun. Penurunan pembiayaan menunjukkan kecenderungan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan non-reguler dan lebih

mengoptimalkan pendapatan riil. Sementara itu, SiLPA/SiKPA tahun 2024 mencapai Rp31,76 triliun, turun 12,01 persen dibandingkan tahun 2023.

Secara keseluruhan, kinerja APBD Regional Jawa tahun 2024 mencerminkan arah yang positif dengan pertumbuhan pendapatan yang solid, efisiensi belanja, dan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Dominasi PAD yang tinggi memperlihatkan kapasitas ekonomi daerah Jawa yang kuat, sementara dukungan transfer pusat dan sinergi antardaerah tetap menjadi pendorong penting bagi percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah ini.

II.2.B.1. Regional Kalimantan

Secara umum, kinerja APBD Regional Kalimantan tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan fiskal yang kuat dengan peningkatan pendapatan daerah sebesar 20,15 persen, dari Rp164,67 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp197,85 triliun. Kenaikan ini mencerminkan akselerasi ekonomi di wilayah Kalimantan yang ditopang oleh peningkatan aktivitas industri ekstraktif, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek strategis nasional seperti pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah

(PAD) regional Kalimantan mencapai sebesar Rp36,19 triliun tumbuh 3,49 persen, didominasi oleh Pajak Daerah Rp24,26 triliun, khususnya dari PKB, BBNKB, dan PBBKB, serta didukung oleh retribusi, BLUD, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sementara itu, Pendapatan Transfer yang menjadi sumber utama keuangan daerah mencapai Rp159,74 triliun atau naik 23,61 persen, terutama dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat sebesar Rp141,41 triliun dengan kontribusi besar DBH Sumber Daya Alam. Selain itu, terdapat Dana Desa sebesar Rp4,89 triliun serta pendapatan bagi hasil pajak daerah mencapai Rp9,37 triliun. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp1,92 triliun, meningkat signifikan berkat kenaikan hibah dan pendapatan lainnya. Struktur pendapatan Kalimantan menunjukkan ketergantungan pada DBH SDA namun disertai peningkatan PAD dan dukungan transfer yang kuat.

Dari sisi belanja daerah, realisasi tahun 2024 mencapai Rp196,78 triliun, meningkat 19,27 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini terutama disumbang oleh belanja operasi sebesar Rp111,69 triliun (naik 16,12 persen) untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan, serta belanja modal sebesar Rp58,40 triliun (naik 33,34 persen) yang menunjukkan penguatan investasi daerah dalam infrastruktur, transportasi, dan konektivitas antarwilayah. Sementara itu, belanja tidak terduga menurun 24,19 persen, dan belanja transfer meningkat moderat sebesar 7,03 persen menjadi Rp26,51 triliun.

Dengan peningkatan pendapatan yang lebih tinggi daripada belanja, APBD Kalimantan tahun 2024 mencatat surplus sebesar Rp1,07 triliun, berbalik dari defisit Rp0,32 triliun pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan perbaikan keseimbangan fiskal serta peningkatan kapasitas daerah dalam menjaga stabilitas anggaran.

Dari sisi pembiayaan daerah, tercatat sebesar Rp22,05 triliun, menurun 6,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp24,23 triliun mengalami penurunan 19,19 persen, sedangkan

Tabel 2. 12. APBD Regional Kalimantan (triliun rupiah)

Kalimantan	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Daerah	133,06	164,67	197,85	20,15%
Pendapatan Asli Daerah	28,85	34,97	36,19	3,49%
Pendapatan Transfer	103,56	129,23	159,74	23,61%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,65	0,47	1,92	306,77%
Belanja Daerah	116,71	164,99	196,78	19,27%
Belanja Operasi	74,72	96,18	111,69	16,12%
Belanja Modal	22,80	43,80	58,40	33,34%
Belanja Tidak Terduga	0,37	0,25	0,19	(24,19%)
Belanja Transfer	18,82	24,77	26,51	7,03%
Surplus/Defisit	16,35	(0,32)	1,07	(431,57%)
Pembiayaan Daerah	11,95	23,62	22,05	(6,67%)
Penerimaan Pembiayaan	13,83	29,98	24,23	(19,19%)
Pengeluaran Pembiayaan	1,88	6,36	2,18	(65,69%)
SiLPA/SiKPA	28,30	23,30	23,11	(0,80%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,18 triliun turun signifikan 65,69 persen. Adapun SiLPA/ SiKPA tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp23,11 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun 2023.

Secara keseluruhan, kinerja APBD Regional Kalimantan tahun 2024 menunjukkan arah positif dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja yang berimbang, surplus anggaran, serta peningkatan kapasitas fiskal. Ketergantungan terhadap Dana Transfer, khususnya DBH SDA, masih tinggi, namun disertai dengan peningkatan PAD dan efisiensi belanja yang mengindikasikan penguatan struktur ekonomi daerah dan kesiapan fiskal Kalimantan dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, termasuk pemindahan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

II.2.B.2. Regional Sulawesi

Secara umum, APBD Regional Sulawesi tahun 2024 mencatat kinerja yang stabil dengan pendapatan daerah mencapai Rp125,70 triliun, meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp120,11 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan penguatan ekonomi regional di wilayah Sulawesi seiring dengan meningkatnya kontribusi dari pajak daerah, transfer pemerintah pusat, serta hibah dari lembaga swasta dan antardaerah.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat sebesar Rp23,91 triliun atau tumbuh 4,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp15,48 triliun, dengan kontributor utama dari Pajak Kendaraan Bermotor (Rp3,05 triliun), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp2,38 triliun), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp2,63 triliun). Pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame juga memberikan tambahan yang signifikan, menggambarkan pertumbuhan sektor jasa dan konsumsi masyarakat. Sementara itu, Pendapatan Retribusi Daerah tercatat sebesar Rp2,44 triliun, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp0,97 triliun, dan Lain-lain PAD yang

Tabel 2. 13. APBD Regional Sulawesi (triliun rupiah)

Sulawesi	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Daerah	112,53	120,11	125,70	4,66%
Pendapatan Asli Daerah	19,14	22,81	23,91	4,83%
Pendapatan Transfer	91,90	96,46	100,69	4,38%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,49	0,83	1,10	31,78%
Belanja Daerah	110,37	123,14	124,90	1,43%
Belanja Operasi	74,20	83,88	89,46	6,65%
Belanja Modal	21,40	21,93	19,19	(12,49%)
Belanja Tidak Terduga	0,44	0,20	0,17	(15,17%)
Belanja Transfer	14,33	17,13	16,08	(6,14%)
Surplus/Defisit	2,15	(3,03)	0,80	(126,46%)
Pembiayaan Daerah	11,49	9,55	3,20	(66,51%)
Penerimaan Pembiayaan	12,66	11,14	5,02	(54,89%)
Pengeluaran Pembiayaan	1,17	1,59	1,83	14,94%
SiLPA/SiKPA	13,64	6,51	4,00	(38,59%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Sah sebesar Rp5,02 triliun, yang sebagian besar berasal dari BLUD, BPJS, dan layanan publik daerah. Kinerja PAD ini menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah Sulawesi dalam menggali potensi ekonomi lokal, meski kontribusinya terhadap total pendapatan masih relatif kecil dibandingkan dana transfer pusat.

Sementara itu, Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar pendapatan daerah, mencapai Rp100,69 triliun atau meningkat 4,38 persen dibandingkan tahun 2023. Sebagian besar berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp88,85 triliun, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp2,98 triliun, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp9,14 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp56,61 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp20,11 triliun. Selain itu, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya mencapai Rp7,84 triliun, terutama dari Dana Desa Rp7,12 triliun dan Dana Insentif Daerah Rp0,72 triliun. Pendapatan transfer daerah lainnya terdiri dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi sebesar Rp3,72 triliun, serta Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp0,27 triliun. Struktur ini menegaskan pentingnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Sulawesi.

Dari sisi belanja daerah, total pengeluaran

tahun 2024 mencapai Rp124,90 triliun, naik 1,43 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja operasi yang naik 6,65 persen menjadi Rp89,46 triliun, menunjukkan fokus pemerintah daerah pada penguatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, belanja modal turun 12,49 persen menjadi Rp19,19 triliun, mengindikasikan adanya penyesuaian terhadap proyek infrastruktur. Belanja transfer juga menurun 6,14 persen, sedangkan belanja tidak terduga menurun 15,17 persen.

Dari sisi keseimbangan fiskal, APBD Sulawesi tahun 2024 mencatat surplus sebesar Rp0,80 triliun, membaik signifikan dibandingkan defisit Rp3,03 triliun pada tahun 2023. Surplus ini menunjukkan perbaikan manajemen anggaran, efisiensi belanja, dan pertumbuhan pendapatan yang lebih terukur.

Adapun pembiayaan daerah tahun 2024 sebesar Rp3,30 triliun, turun 66,51 persen, dengan penerimaan pembiayaan Rp5,02 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp1,83 triliun. Sementara itu, SiLPA/SiKPA diproyeksikan sebesar Rp4,00 triliun, turun 38,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan adanya penyesuaian terhadap realisasi anggaran tahun berjalan.

Kinerja APBD Regional Sulawesi tahun 2024 menunjukkan arah yang positif dengan pertumbuhan pendapatan yang stabil, perbaikan surplus, dan efisiensi belanja. Meskipun masih bergantung pada dana transfer pusat, Sulawesi menunjukkan peningkatan dalam kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dan kolaborasi antardaerah untuk memperkuat pembangunan ekonomi wilayah.

II.2.B.3. Regional Bali-Nusa Tenggara

Secara umum, APBD Regional Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pendapatan daerah mencapai Rp85,95 triliun, meningkat 8,67 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp79,09 triliun. Peningkatan ini mencerminkan

pemulihan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang semakin kuat, terutama didorong oleh bangkitnya sektor pariwisata, perdagangan, serta dukungan transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat sebesar Rp27,92 triliun atau tumbuh signifikan 16,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp19,99 triliun, dengan kontribusi utama dari Pajak Kendaraan Bermotor (Rp2,73 triliun), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp2,39 triliun), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp1,44 triliun), serta Pajak Hotel dan Restoran yang mencerminkan pemulihan aktivitas wisata di kawasan ini. Selain itu, Pendapatan Retribusi Daerah tercatat sebesar Rp2,75 triliun, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp0,93 triliun, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4,24 triliun, yang mencakup penerimaan dari BLUD, BPJS, dan layanan publik daerah. Peningkatan PAD ini mengindikasikan membaiknya kemandirian fiskal daerah seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal dan pariwisata pascapandemi.

Sementara itu, Pendapatan Transfer tetap menjadi sumber utama penerimaan daerah dengan total Rp56,62 triliun, tumbuh 3,90 persen dibandingkan tahun 2023. Sebagian

Tabel 2. 14. APBD Regional Bali-Nusa Tenggara (triliun rupiah)

Bali-Nusa Tenggara	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Daerah	59,86	79,09	85,95	8,67%
Pendapatan Asli Daerah	15,94	24,06	27,92	16,02%
Pendapatan Transfer	43,54	54,49	56,62	3,90%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,39	0,53	1,41	165,50%
Belanja Daerah	67,17	77,97	83,85	7,55%
Belanja Operasi	43,74	53,60	59,36	10,74%
Belanja Modal	13,73	11,70	11,11	(5,01%)
Belanja Tidak Terduga	0,18	0,12	0,09	(26,72%)
Belanja Transfer	9,51	12,55	13,29	5,93%
Surplus/Defisit	(7,30)	1,12	2,10	86,88%
Pembiayaan Daerah	2,79	3,22	3,01	(6,48%)
Penerimaan Pembiayaan	3,57	4,80	4,68	(2,59%)
Pengeluaran Pembiayaan	0,78	1,58	1,66	5,33%
SiLPA/SiKPA	(4,52)	4,35	5,11	17,66%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

besar bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp47,36 triliun, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp1,31 triliun, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Rp1,16 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp32,80 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp12,09 triliun. Selain itu, Dana Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya mencapai Rp4,97 triliun, terutama dari Dana Desa Rp4,31 triliun dan Dana Insentif Daerah Rp0,66 triliun. Pendapatan transfer daerah lainnya berasal dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi sebesar Rp3,41 triliun, serta Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp0,88 triliun, yang mencerminkan adanya sinergi fiskal antarwilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Struktur transfer ini memperlihatkan peran penting pemerintah pusat dalam menopang belanja publik di Bali dan Nusa Tenggara.

Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp1,41 triliun, melonjak 165,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen ini didominasi oleh Pendapatan Hibah sebesar Rp120,97 miliar dari pemerintah pusat dan lembaga swasta dalam negeri, serta Pendapatan Lain-lain sebesar Rp1,29 triliun, yang menunjukkan peningkatan aktivitas kerja sama lintas sektor di daerah.

Dari sisi belanja daerah, total belanja tahun 2024 mencapai Rp83,85 triliun, meningkat 7,55 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja operasi yang naik 10,74 persen menjadi Rp59,36 triliun, seiring dengan peningkatan kebutuhan belanja pegawai dan layanan publik. Sementara itu, belanja modal turun 5,01 persen menjadi Rp11,11 triliun, mencerminkan penyesuaian terhadap proyek infrastruktur fisik yang telah mencapai tahap penyelesaian. Belanja transfer juga meningkat 5,93 persen, mencerminkan peningkatan dukungan pemerintah daerah terhadap pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Kinerja tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp2,10 triliun, naik signifikan 86,88 persen dibandingkan tahun 2023,

menunjukkan perbaikan keseimbangan fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dari sisi pembiayaan daerah, tercatat sebesar Rp3,01 triliun, menurun 6,48 persen, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp4,68 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp1,66 triliun. Adapun SiLPA/SiKPA tahun 2024 mencapai Rp5,11 triliun, naik 17,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, kinerja APBD Regional Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dari pertumbuhan belanja, serta capaian surplus yang menandakan penguatan stabilitas fiskal daerah. Pemulihan sektor pariwisata menjadi faktor utama peningkatan PAD, sementara dukungan fiskal dari pemerintah pusat dan kolaborasi antardaerah memperkuat ketahanan ekonomi wilayah dalam mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

II.2.B.4. Regional Maluku-Papua

Secara umum, APBD Regional Maluku-Papua tahun 2024 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp100,65 triliun, meningkat 2,68 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp98,02 triliun. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penerimaan dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, meskipun pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan. Secara umum, struktur pendapatan menunjukkan bahwa dukungan fiskal pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pembiayaan daerah di kawasan timur Indonesia ini.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat sebesar Rp7,00 triliun, menurun 20,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan dari beberapa jenis pajak dan retribusi daerah. Komponen terbesar PAD berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp4,32 triliun, dengan kontribusi utama dari Pajak Kendaraan Bermotor (Rp0,52 triliun), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp0,38 triliun), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tabel 2. 15. APBD Regional Maluku-Papua (triliun rupiah)

Maluku-Papua	2022	2023	2024	growth 2024 (% yoy)
Pendapatan Daerah	173,21	98,02	100,65	2,68%
Pendapatan Asli Daerah	9,91	8,76	7,00	(20,15%)
Pendapatan Transfer	162,48	87,69	90,19	2,85%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,82	1,57	3,46	120,49%
Belanja Daerah	158,40	95,29	99,44	4,36%
Belanja Operasi	98,43	61,07	65,63	7,46%
Belanja Modal	36,93	20,98	19,64	(6,41%)
Belanja Tidak Terduga	1,38	0,81	0,61	(25,32%)
Belanja Transfer	21,66	12,42	13,57	9,25%
Surplus/Defisit	14,82	2,73	1,20	(55,96%)
Pembiayaan Daerah	8,37	5,35	1,65	(69,10%)
Penerimaan Pembiayaan	10,70	6,66	2,44	(63,33%)
Pengeluaran Pembiayaan	2,33	1,31	0,79	(39,70%)
SiLPA/SiKPA	23,18	8,08	2,86	(64,66%)

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

(Rp0,95 triliun), serta Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang juga berkontribusi cukup besar. Selain itu, Pendapatan Retribusi Daerah tercatat sebesar Rp0,75 triliun, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp0,44 triliun, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1,48 triliun, yang berasal dari BLUD, BPJS, serta penerimaan layanan publik. Meskipun turun secara agregat, kinerja PAD di beberapa provinsi di kawasan ini masih menunjukkan potensi fiskal yang bisa dikembangkan, terutama dari sektor jasa dan pertambangan.

Sementara itu, Pendapatan Transfer menjadi tulang punggung penerimaan daerah dengan total Rp90,19 triliun, meningkat 2,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen terbesar berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp68,86 triliun, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp3,53 triliun, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Rp11,59 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp42,06 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp11,68 triliun. Selain itu, Transfer Pemerintah Pusat – Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mencapai Rp18,98 triliun, dengan kontributor terbesar dari Dana Otonomi Khusus Rp11,92 triliun dan Dana Desa Rp6,62 triliun, yang menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan di Papua dan Maluku. Pendapatan transfer lainnya berasal dari Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya/Provinsi sebesar Rp1,43 triliun dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp0,92 triliun. Struktur transfer ini menunjukkan fokus pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan melalui skema dana otonomi khusus dan dana desa yang besar di wilayah timur Indonesia.

Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat signifikan sebesar 120,49 persen, menjadi Rp3,46 triliun pada tahun 2024. Komponen ini didominasi oleh Pendapatan Hibah sebesar Rp3,06 triliun, yang berasal dari hibah pemerintah pusat, lembaga swasta dalam negeri, serta dukungan masyarakat dan organisasi nonpemerintah. Selain itu, Pendapatan Lain-lain tercatat sebesar Rp0,40 triliun, mencerminkan adanya partisipasi aktif berbagai pihak dalam mendukung program pembangunan daerah.

Dari sisi belanja daerah, total pengeluaran tahun 2024 mencapai Rp99,44 triliun, meningkat 4,36 persen dibandingkan tahun 2023. Belanja operasi menjadi komponen terbesar, mencapai Rp65,63 triliun (naik 7,46 persen), mencerminkan peningkatan biaya pelayanan publik dan belanja pegawai. Sementara itu, belanja modal sebesar Rp19,64 triliun turun 6,41 persen, menunjukkan adanya efisiensi terhadap proyek fisik dan penyesuaian prioritas pembangunan. Belanja transfer juga meningkat 9,25 persen, sejalan dengan peningkatan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di kawasan ini.

Kinerja tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp1,20 triliun, meskipun lebih rendah 55,96 persen dibandingkan tahun 2023. Penurunan surplus ini mengindikasikan peningkatan belanja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan.

Dari sisi pembiayaan daerah, tercatat sebesar Rp1,65 triliun, menurun tajam 69,10 persen, dengan penerimaan pembiayaan Rp2,44 triliun (turun 63,33 persen) dan pengeluaran pembiayaan Rp0,79 triliun (turun 39,70 persen). SiLPA/SiKPA diperkirakan mencapai Rp2,86 triliun, turun 64,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

APBD Regional Maluku–Papua tahun 2024 menunjukkan arah fiskal yang terkendali dengan pertumbuhan pendapatan yang positif meskipun masih moderat, didukung oleh dominasi dana transfer terutama dari dana otonomi khusus dan dana desa. Tantangan utama masih terletak pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, namun efisiensi belanja dan dukungan fiskal pemerintah pusat tetap menjadi pondasi penting dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

II.3. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGRERAT

II.3.A. Pendahuluan

Secara garis besar, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan belanja negara untuk mencapai tujuan pemerintah seperti penurunan ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan. Umumnya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*) dan kebijakan fiskal kontraksi (*contractionary fiscal policy*). Perbedaan keduanya terletak pada pendirian pemerintah mengenai penerimaan dan belanjanya.

Kebijakan fiskal yang ekspansif terjadi ketika pemerintah meningkatkan belanjanya serta menurunkan penerimaan pajak. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi ekspansif adalah mendorong perekonomian. Sebaliknya, suatu kebijakan fiskal dapat dikategorikan kontraksioner ketika pemerintah menurunkan pengeluarannya dan meningkatkan tarif pajak. Kebijakan fiskal kontraksioner bertujuan untuk meredakan tekanan inflasi yang terjadi ketika perekonomian mengalami *overheating*.

Selanjutnya, berdasarkan polanya terhadap siklus bisnis (*business cycle*) kebijakan fiskal dapat dikategorikan menjadi prosiklikal (*pro-cyclical fiscal policy*) dan kontrasiklikal (*counter-cyclical fiscal policy*). Kebijakan fiskal prosiklikal bersifat mengikuti pola siklus bisnis, apabila perekonomian sedang berada dalam resesi

maka pengeluaran pemerintah juga ikut rendah. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontrasiklikal bersifat bertentangan dengan siklus bisnis, sehingga ketika perekonomian sedang dalam kondisi resesi maka pengeluaran pemerintah justru meningkat.

Peningkatan tensi geopolitik memicu fragmentasi geoekonomi, volatilitas harga komoditas, serta pelemahan pertumbuhan produktivitas. Selain itu, perekonomian global yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian juga memberikan tantangan pada pembangunan dan pengelolaan fiskal di Indonesia pada tahun 2024. Berkenaan dengan berbagai tantangan tersebut, kebijakan makro fiskal terus diarahkan untuk merespons dinamika perekonomian, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan, kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara umum, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

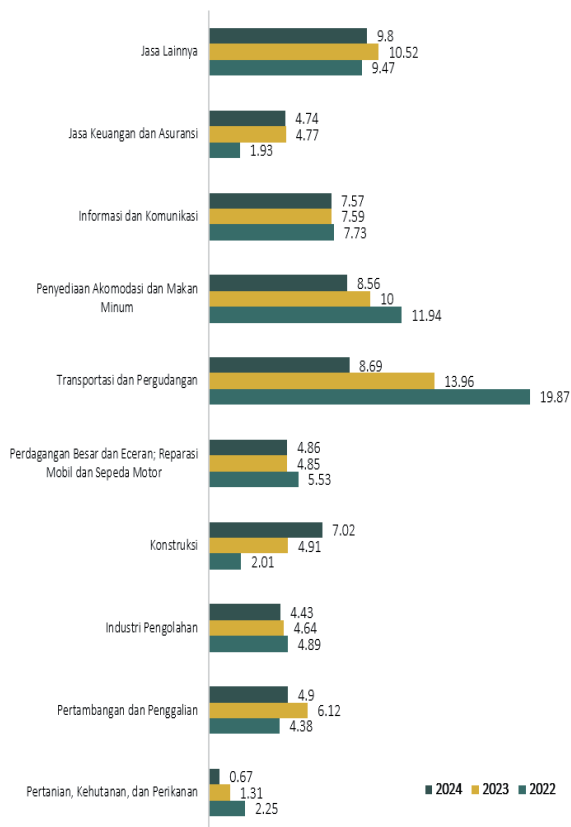
- a. Pengoptimalan fungsi distribusi dan stabilisasi APBN yang difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi;
- b. Pengoptimalan fungsi alokasi APBN yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), mengakselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*) dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), serta penguatan reformasi kelembagaan

dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*); dan

- c. Melanjutkan reformasi fiskal secara holistik, meliputi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global (*fiscal buffer*), serta menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan pembiayaan non utang.

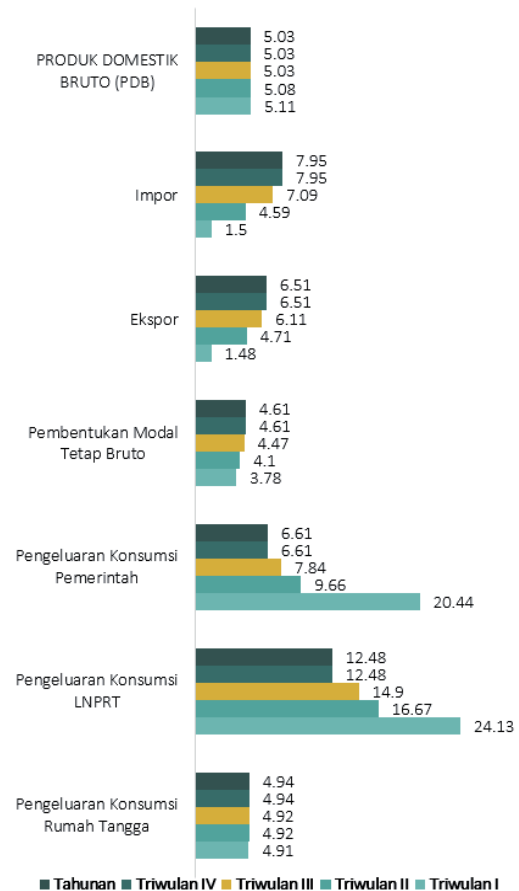
Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia tetap tumbuh stabil dengan laju 5,03% (c-to-c), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 5,05%, namun masih berada di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang

Grafik 2. 23. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 (c-to-c) Menurut Lapangan Usaha



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

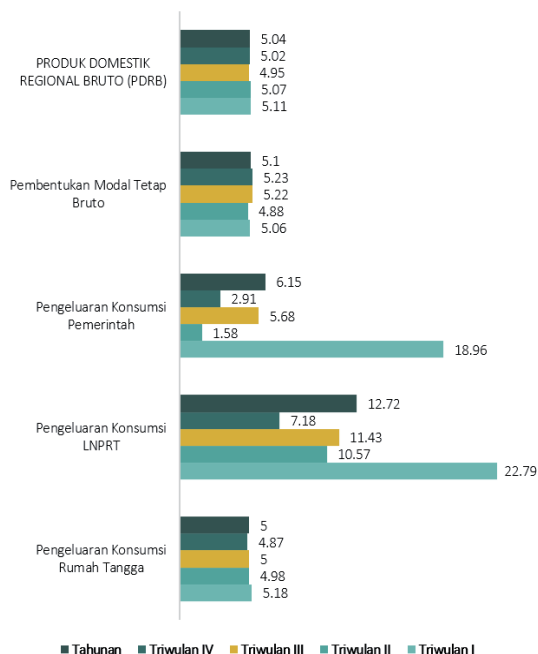
Grafik 2. 24. Pertumbuhan Ekonomi PDB Tahun 2024 (c-to-c) Menurut Pengeluaran



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,8 persen seiring dengan peningkatan aktivitas rekreasi, peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, serta berbagai *event* olahraga dan hiburan, diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, logistik, angkutan penumpang, dan pengiriman barang; kemudian Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,43 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kontruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 0,67 persen, 7,02 persen, dan 4,86 persen.

Grafik 2. 25. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2024 (c-to-c) Menurut Pengeluaran



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi output nasional, laju PDB tahun 2024 menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan pada semua komponen. Lonjakan terbesar terjadi pada konsumsi LNPR yang naik 12,48% seiring meningkatnya aktivitas Pemilu dan Pilkada 2024. Adapun pertumbuhan tertinggi selanjutnya terdapat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,61 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,94 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,61 persen.

Dari sisi output regional, laju pertumbuhan PDRB seluruh provinsi tahun 2024 juga mengalami pertumbuhan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai berturut-turut sebesar 5,11 persen; 5,07 persen; 4,95 persen; dan 5,02 persen sehingga pertumbuhan tahunan naik sebesar 5,04 persen.

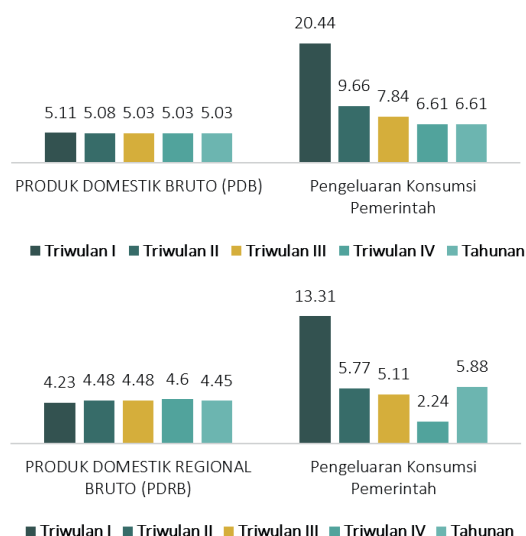
II.3.B. Kontribusi Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB (PK-P)

II.3.B.1. Gambaran Umum

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi

nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in kind-purchased market production*). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dicerminkan dari nilai yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi

Grafik 2. 26. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 16. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sumatera

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
ACEH	4,82	21,10	4,54	6,89	5,17	5,36	4,15	12,44	4,66	10,44
SUMATERA UTARA	4,88	2,04	4,95	1,61	5,20	4,67	5,10	7,53	5,03	4,01
SUMATERA BARAT	4,40	7,01	4,71	-0,31	4,33	1,37	4,04	-0,33	4,36	1,44
RIAU	3,39	19,33	3,70	11,59	3,46	2,60	3,52	-1,17	3,52	6,99
JAMBI	3,84	20,04	4,14	16,88	4,01	11,81	6,00	-14,06	4,51	4,54
SUMATERA SELATAN	5,06	15,89	4,96	8,85	5,03	9,51	5,07	3,37	5,03	8,38
BENGKULU	4,64	18,78	4,70	4,41	4,57	6,13	4,55	5,47	4,62	8,05
LAMPUNG	3,30	15,67	4,80	2,39	4,81	2,81	5,32	2,16	4,57	4,85
KEP. BANGKA BELITUNG	1,01	17,32	1,02	3,23	0,13	2,96	0,94	-0,38	0,77	4,31
KEP. RIAU	5,00	28,99	4,90	7,95	5,01	5,39	5,14	-7,08	5,02	4,25
REGIONAL SUMATERA	4,23	13,31	4,48	5,77	4,48	5,11	4,60	2,24	4,45	5,88

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

penjualan barang dan jasa.

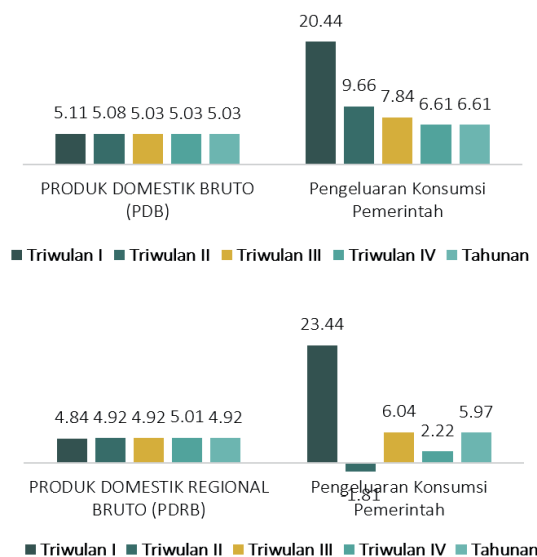
II.3.B.2. Regional Sumatera

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Sumatera mengalami pertumbuhan setiap triwulannya, dengan nilai berturut-turut sebesar 13,31 persen; 5,77 persen; 5,11 persen; dan 2,24 persen sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 5,888 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 6,48 persen pada tahun 2024.

II.3.B.3. Regional Jawa

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Jawa menjadi salah satu komponen penyusun PDRB yang mengalami kontraksi penurunan dengan nilai sebesar -1,81 persen (*y-on-y*) pada triwulan II 2024. Meskipun begitu, secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah di Regional Jawa pada akhir tahun 2024 tumbuh positif sebesar 5,97 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun

Grafik 2. 27. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 17. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Jawa

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
DKI JAKARTA	4,78	31,01	4,90	-5,48	4,93	11,85	5,01	5,20	4,90	8,72
JAWA BARAT	4,93	32,86	4,95	-7,02	4,91	-1,54	5,02	-3,24	4,95	1,39
JAWA TENGAH	4,97	11,49	4,93	7,78	4,93	-0,49	4,96	-1,96	4,95	3,01
DI YOGYAKARTA	5,04	9,93	4,95	5,53	5,05	5,05	5,07	4,62	5,03	6,09
JAWA TIMUR	4,81	10,23	4,98	5,67	4,91	4,07	5,03	2,47	4,93	5,24
BANTEN	4,51	6,44	4,70	2,58	4,93	4,17	5,02	4,55	4,79	4,39
REGIONAL JAWA	4,84	23,44	4,92	-1,81	4,92	6,04	5,01	2,22	4,92	5,97

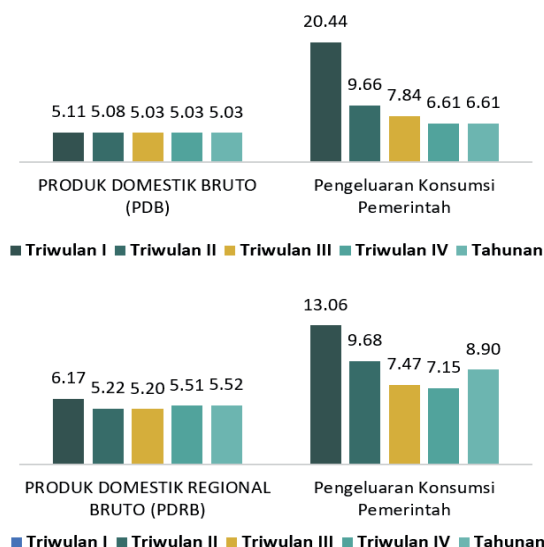
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 7,20 persen pada tahun 2024.

II.3.B.4. Regional Kalimantan

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Kalimantan mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,06 persen (*y-on-y*) pada triwulan I 2024, 9,68 persen (*y-on-y*) pada triwulan II 2024, 7,47 persen (*y-on-y*) pada triwulan III 2024, dan 7,15 persen pada triwulan IV 2024, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah.

Grafik 2. 28. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Kalimantan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 18. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Kalimantan

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
KALIMANTAN BARAT	4,98	5,98	4,76	4,53	4,87	8,79	4,98	9,90	4,90	7,28
KALIMANTAN TENGAH	5,01	15,86	3,80	4,12	4,64	10,63	4,43	12,07	4,46	10,30
KALIMANTAN SELATAN	4,98	9,36	4,81	4,50	5,23	4,42	5,15	2,57	5,05	4,76
KALIMANTAN TIMUR	7,26	24,25	5,85	22,63	5,52	5,93	6,12	5,29	6,17	11,78
KALIMANTAN UTARA	4,74	8,64	4,60	7,50	4,29	9,53	4,66	9,70	4,57	8,89
REGIONAL KALIMANTAN	6,17	13,06	5,22	9,68	5,20	7,47	5,51	7,15	5,52	8,90

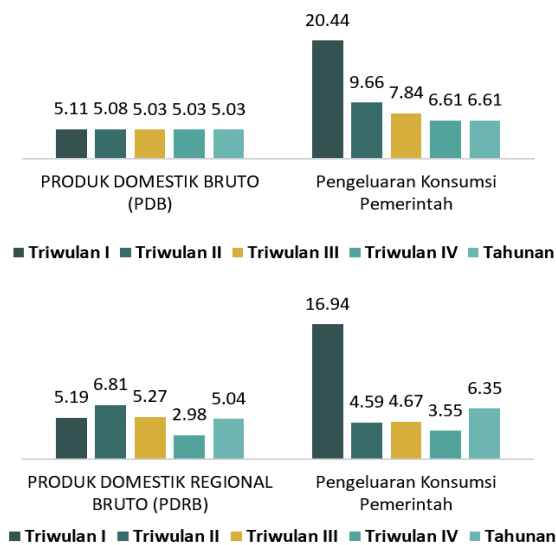
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

tumbuh positif sebesar 8,90 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Kalimantan telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 8,41 persen pada tahun 2024.

II.3.B.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Bali-Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,94 persen (*y-on-y*) pada triwulan I 2024, 4,59 persen (*y-on-y*) pada triwulan II 2024, 4,67 persen (*y-on-y*) pada triwulan III 2024, dan 3,55 persen pada triwulan IV 2024, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 6,35 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran

Grafik 2. 29. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 19. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Bali-Nusa Tenggara

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
BALI	5,98	19,69	5,36	2,41	5,43	5,66	5,19	4,36	5,48	6,37
NUSA TENGGARA BARAT	4,75	13,21	11,06	2,94	6,22	1,08	-0,50	4,43	5,30	5,17
NUSA TENGGARA TIMUR	4,16	18,94	4,19	8,63	3,61	6,63	3,03	2,23	3,73	7,32
REGIONAL BALI NUSA TENGGARA	5,19	16,94	6,81	4,59	5,27	4,67	2,98	3,55	5,04	6,35

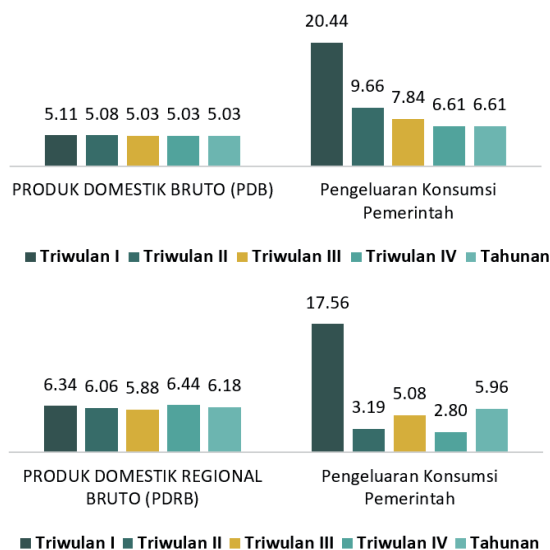
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Bali-Nusa Tenggara telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 13,74 persen pada tahun 2024.

II.3.B.6. Regional Sulawesi

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Sulawesi mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,56 persen (*y-on-y*) pada triwulan I 2024, 3,19 persen (*y-on-y*) pada triwulan II 2024, 5,08 persen (*y-on-y*)

Grafik 2. 30. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Sulawesi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 20. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Sulawesi

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
SULAWESI UTARA	5,64	20,12	5,13	3,10	5,21	4,14	5,59	1,39	5,39	6,33
SULAWESI TENGAH	10,49	5,59	9,75	6,69	9,08	13,08	10,29	12,38	9,89	9,97
SULAWESI SELATAN	4,82	21,97	4,98	2,84	5,08	2,80	5,18	-1,72	5,02	3,90
SULAWESI TENGGARA	5,78	19,60	5,54	5,08	5,24	7,42	5,08	7,32	5,40	9,02
GORONTALO	4,38	10,49	3,78	-5,94	3,91	-3,24	4,44	1,57	4,13	0,37
SULAWESI BARAT	6,02	19,77	4,11	1,79	2,39	5,72	6,65	1,66	4,76	5,47
REGIONAL SULAWESI	6,34	17,56	6,06	3,19	5,88	5,08	6,44	2,80	6,18	5,96

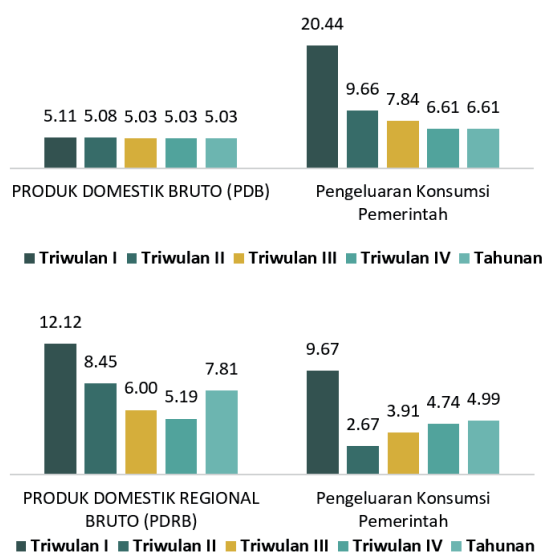
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

pada triwulan III 2024, dan 2,80 persen pada triwulan IV 2024, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 5,96 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 9,46 persen pada tahun 2024.

II.3.B.7. Regional Maluku-Papua

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Regional Maluku-Papua mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,67 persen (*y-on-y*) pada triwulan I 2024, 2,67 persen (*y-on-y*) pada triwulan II 2024, 3,91 persen (*y-on-y*) pada triwulan III 2024, dan 4,74 persen pada triwulan IV 2024, sehingga secara keseluruhan tahun, konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 4,99 persen (*y-on-y*). Berdasarkan hal tersebut, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDRB yang merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah relatif seimbang dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi PDB yang murni dari APBN. Artinya kontribusi pendongkrak perekonomian dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah berasal dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Adapun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada regional Maluku-Papua telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 18,10 persen pada tahun 2024.

Grafik 2. 31. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Nasional dan Regional Maluku-Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 21. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) pada Provinsi di Regional Maluku-Papua

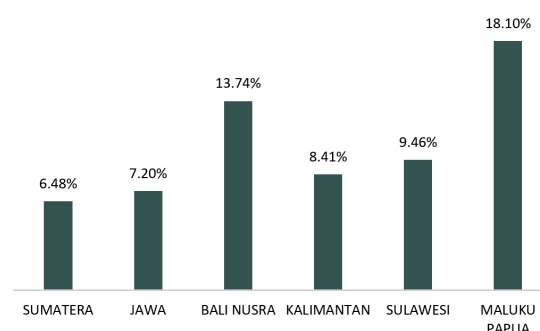
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P	PDRB	PK-P
MALUKU	5,45	9,70	3,13	3,86	6,24	0,91	6,52	2,40	5,34	3,55
MALUKU UTARA	11,74	7,47	10,75	8,50	4,42	14,56	27,27	24,21	13,73	14,97
PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	22,11	-2,07	20,80	0,06
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	2,49	-11,68	3,60	-3,95
PAPUA	-	-	-	-	-	-	2,73	-0,52	4,11	1,86
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	1,89	4,14	4,55	7,38
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-8,98	4,14	4,36	7,38
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	2,66	13,05	4,75	8,34
REGIONAL MALUKU PAPUA	12,12	9,67	8,45	2,67	6,00	3,91	5,19	4,74	7,81	4,99

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

II.3.B.8. Kesimpulan

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2024 di tiap regional berkisar antara 6,48 persen – 18,10 persen. Dengan gap sebesar 11,62 persen, Regional Maluku-Papua menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB terbesar, sejalan dengan aktivitas ekonomi pada regional Maluku-Papua yang masih sangat bergantung pada belanja pemerintah (APBN, Transfer ke Daerah

Grafik 2. 32. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Tiap Regional Terhadap PDRB 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

dan Dana Desa termasuk Dana Otonomi Khusus Papua) dalam rangka pembangunan infrastruktur, pemerataan wilayah, pelayanan publik, serta peningkatan daya beli masyarakat. Adapun Regional Sumatera menjadi kawasan dengan nilai kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB terendah, sejalan dengan daya beli masyarakat yang lebih tinggi serta aktivitas ekonomi yang lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

II.3.C. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto

II.3.C.1. Gambaran Umum

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

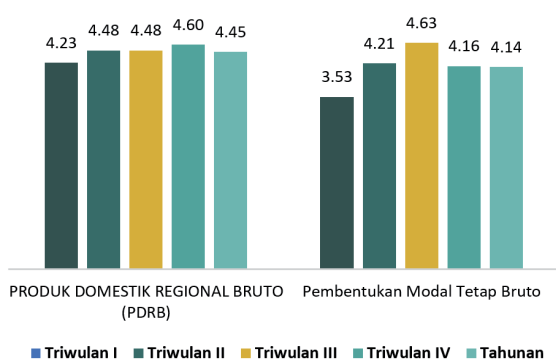
Berdasarkan sistem informasi rujukan statistik di Badan Pusat Statistik (BPS), secara garis besar Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan

barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu.

II.3.C.2. Regional Sumatera

Pada tahun 2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,53 persen; 4,21 persen; 4,63 persen; dan 4,16 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 4,14 persen (y-o-y). Provinsi Jambi menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran PMTB dengan nilai

Grafik 2. 33. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 22. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sumatera

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
ACEH	4,82	0,77	4,54	6,36	5,17	5,95	4,15	5,49	4,66	4,68
SUMATERA UTARA	4,88	4,38	4,95	4,40	5,20	5,23	5,10	5,73	5,03	4,95
SUMATERA BARAT	4,40	-0,65	4,71	2,90	4,33	3,06	4,04	8,55	4,36	3,56
RIAU	3,39	3,69	3,70	3,24	3,46	5,55	3,52	0,55	3,52	3,25
JAMBI	3,84	-0,05	4,14	4,19	4,01	10,92	6,00	11,86	4,51	6,78
SUMATERA SELATAN	5,06	4,82	4,96	3,97	5,03	4,63	5,07	4,20	5,03	4,41
BENGKULU	4,64	0,89	4,70	1,86	4,57	4,61	4,55	3,93	4,62	2,87
LAMPUNG	3,30	2,31	4,80	3,33	4,81	1,30	5,32	0,34	4,57	1,78
KEP. BANGKA BELITUNG	1,01	-0,27	1,02	0,25	0,13	-1,79	0,94	-1,25	0,77	-0,78
KEP. RIAU	5,00	8,45	4,90	8,04	5,01	3,22	5,14	5,63	5,02	6,26
REGIONAL SUMATERA	4,23	3,53	4,48	4,21	4,48	4,63	4,60	4,16	4,45	4,14

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

sebesar 6,78 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah, yaitu berkontraksi sebesar 0,78 persen (y-o-y).

Kontraksi pertumbuhan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh penurunan investasi dan belanja modal dalam bentuk bangunan seperti pembangunan **Kontribusi Konsumsi Pengeluaran** perekonomian nasional disamping pelaku ekonomi lain yang telah dikenal seperti rumah tangga, pemerintah, dan korporasi.

II.3.C.3. Regional Jawa

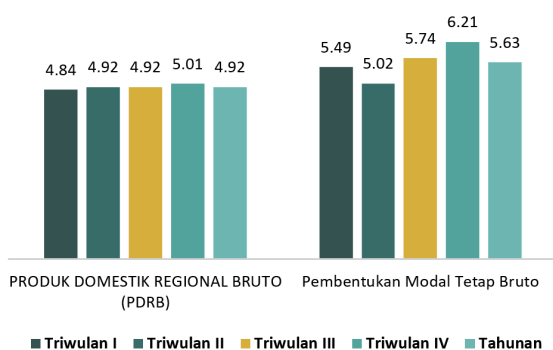
Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 19,65 persen; 10,90 persen; 11,26 persen; dan 7,43 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Jawa tumbuh sebesar 12,10 persen (y-o-y). Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 16,38 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 7,89 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 1,44 persen pada tahun 2024.

Tabel 2. 23. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Jawa

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
DKI JAKARTA	4,78	4,25	4,90	4,61	4,93	4,27	5,01	7,54	4,90	5,20
JAWA BARAT	4,93	9,72	4,95	6,13	4,91	6,83	5,02	5,35	4,95	6,96
JAWA TENGAH	4,97	5,89	4,93	5,40	4,93	8,42	4,96	6,41	4,95	6,55
DI YOGYAKARTA	5,04	6,05	4,95	8,11	5,05	8,97	5,07	8,35	5,03	7,90
JAWA TIMUR	4,81	5,42	4,98	5,06	4,91	5,40	5,03	6,05	4,93	5,49
BANTEN	4,51	0,79	4,70	2,88	4,93	5,35	5,02	1,61	4,79	2,63
REGIONAL JAWA	4,84	5,49	4,92	5,02	4,92	5,74	5,01	6,21	4,92	5,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 2. 34. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Jawa



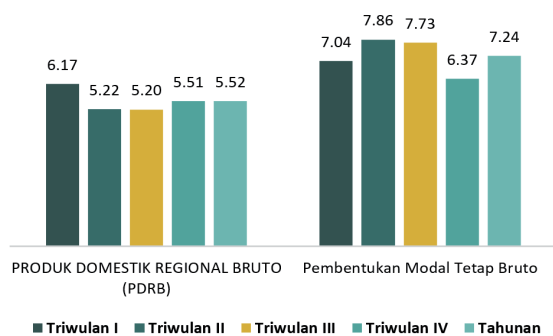
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

gedung, jalan, dan sejenisnya, maupun nonbangunan seperti pengadaan mesin dan perlengkapan, serta penurunan pembelian kendaraan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 30,98 persen pada tahun 2024.

II.3.C.4. Regional Kalimantan

Pada tahun 2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 7,04 persen; 7,86 persen; 7,73 persen; dan 6,37 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 7,24 persen (y-o-y). Provinsi Kalimantan Timur

Grafik 2. 35. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Kalimantan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 24. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Kalimantan

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
KALIMANTAN BARAT	4,98	10,01	4,76	6,23	4,87	9,10	4,98	4,18	4,90	7,31
KALIMANTAN TENGAH	5,01	2,91	3,80	3,77	4,64	5,31	4,43	8,41	4,46	5,22
KALIMANTAN SELATAN	4,98	4,33	4,81	6,63	5,23	4,62	5,15	4,41	5,05	4,97
KALIMANTAN TIMUR	7,26	7,35	5,85	9,72	5,52	9,11	6,12	7,04	6,17	8,29
KALIMANTAN UTARA	4,74	10,80	4,60	7,41	4,29	4,31	4,66	5,18	4,57	6,84
REGIONAL KALIMANTAN	6,17	7,04	5,22	7,86	5,20	7,73	5,51	6,37	5,52	7,24

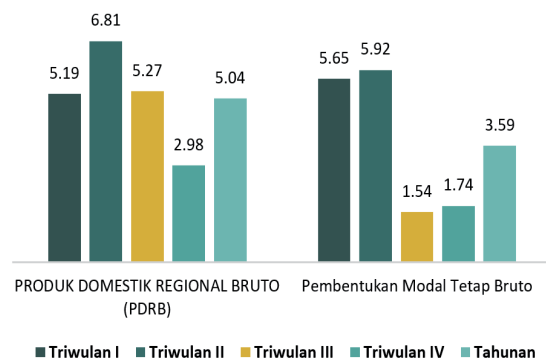
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 8,29 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 4,97 persen (y-o-y). Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Kalimantan telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 32,66 persen pada tahun 2024.

II.3.C.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

Pada tahun 2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Bali-Nusa Tenggara mengalami tren positif pada triwulan I, II, dan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,65 persen; 5,92 persen; 1,54 persen; dan 1,74 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Bali-Nusa Tenggara tumbuh sebesar 3,59 persen (y-o-y). Provinsi Bali menjadi provinsi

Grafik 2. 36. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 25. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Bali-Nusa Tenggara

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
BALI	5,98	8,23	5,36	8,55	5,43	1,92	5,19	4,19	5,48	5,56
NUSA TENGGERA BARAT	4,75	7,79	11,06	2,32	6,22	-0,11	-0,50	2,78	5,30	3,11
NUSA TENGGERA TIMUR	4,16	-0,14	4,19	5,88	3,61	2,69	3,03	-2,33	3,73	1,35
REGIONAL BALI NUSA TENGGERA	5,19	5,65	6,81	5,92	5,27	1,54	2,98	1,74	5,04	3,59

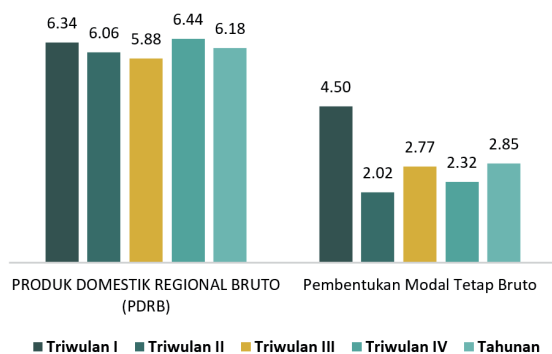
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 5,56 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 1,35 persen (y-o-y). Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Bali-Nusa Tenggara telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 33,62 persen pada tahun 2024.

II.3.C.6. Regional Sulawesi

Pada tahun 2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Sulawesi mengalami tren positif pada triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,50 persen; 2,02 persen; 2,77 persen; dan 2,32 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 2,85 persen (y-o-y). Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi

Grafik 2. 37. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Sulawesi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 26. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Sulawesi

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
SULAWESI UTARA	5,64	3,20	5,13	0,75	5,21	5,43	5,59	5,48	5,39	3,88
SULAWESI TENGAH	10,49	11,36	9,75	-1,41	9,08	3,75	10,29	0,82	9,89	3,40
SULAWESI SELATAN	4,82	1,39	4,98	3,18	5,08	2,31	5,18	2,48	5,02	2,36
SULAWESI TENGGERA	5,78	2,57	5,54	4,73	5,24	0,40	5,08	1,19	5,40	2,09
GORONTALO	4,38	0,43	3,78	3,38	3,91	5,19	4,44	5,20	4,13	3,58
SULAWESI BARAT	6,02	5,66	4,11	7,65	2,39	-0,55	6,65	4,46	4,76	4,18
REGIONAL SULAWESI	6,34	4,50	6,06	2,02	5,88	2,77	6,44	2,32	6,18	2,85

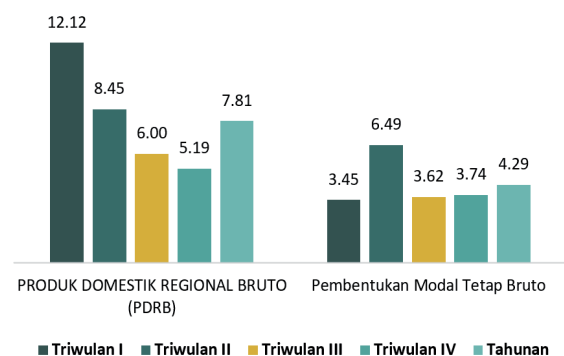
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai sebesar 4,18 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 2,09 persen (y-o-y). Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 36,43 persen pada tahun 2024.

II.3.C.7. Regional Maluku-Papua

Pada tahun 2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Regional Maluku-Papua mengalami tren positif pada triwulan I sampai dengan triwulan IV berturut-turut sebesar 3,45 persen; 6,49 persen; 3,62 persen; dan 3,74 persen, sehingga nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto secara tahunan pada Regional Maluku-Papua tumbuh sebesar 4,29 persen (y-o-y). Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap

Grafik 2. 38. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pada Regional Maluku-Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 27. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Regional Maluku-Papua

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB	PDRB	PMTB
MALUKU	5,45	1,88	3,13	2,86	6,24	0,68	6,52	2,72	5,34	2,03
MALUKU UTARA	11,74	11,99	10,75	13,99	4,42	5,30	27,27	9,94	13,73	10,10
PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	22,11	0,08	20,80	-2,56
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	2,49	-0,37	3,60	0,08
PAPUA	-	-	-	-	-	-	2,73	-1,17	4,11	2,20
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	1,89	3,07	4,55	5,48
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-8,98	1,53	4,36	2,08
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	2,66	5,96	4,75	5,27
REGIONAL MALUKU PAPUA	12,12	3,45	8,45	6,49	6,00	3,62	5,19	3,74	7,81	4,29

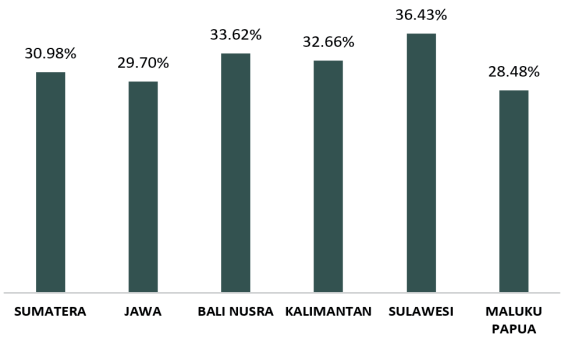
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Bruto dengan nilai sebesar 10,10 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Papua Barat menjadi provinsi yang mengalami kontraksi tahunan tertinggi sebesar 2,56 persen (y-o-y). Kontraksi pertumbuhan pada Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama investasi bangunan dan perlambatan aktivitas konstruksi. Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto pada regional Maluku-Papua telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 28,48 persen pada tahun 2024.

II.3.C.8. Kesimpulan

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB tahun 2024 di tiap regional berkisar antara 28,48 persen – 36,43 persen. Dengan gap sebesar 7,94 persen, Regional Sulawesi menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB terbesar, utamanya dikarenakan adanya peningkatan realisasi investasi hilirisasi pengolahan nikel di Sulawesi Tengah (Kawasan Industri Morowali) dan Sulawesi Tenggara (Kawasan Industri Konawe), serta pembangunan berbagai proyek kawasan industri baru di regional Sulawesi sepanjang tahun 2024. Adapun Regional Maluku-Papua menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah, sejalan dengan masih rendahnya investasi yang masuk ke Regional Maluku-Papua.

Grafik 2. 39. Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tiap Regional Terhadap PDRB 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

II.3.D. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Terhadap PDRB

II.3.D.1. Gambaran Umum

Lembaga non-profit (LNP) atau yang dikenal sebagai lembaga non-pemerintah memiliki peran penting di Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. LNP bergerak di bidang jasa sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kegiatan LNP memberdayakan masyarakat ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Perkumpulan Budi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1912), dan Organisasi Taman Siswa (1926) adalah LNP yang berpartisipasi meningkatkan sumber daya manusia Indonesia saat itu.

UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. LNP merupakan lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan, masyarakat, pemerintah, atau kalangan usaha dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota atau masyarakat tanpa ada motivasi meraih keuntungan. Salah satu jenis LNP adalah lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT)

yaitu LNP yang tidak dikendalikan pemerintah, dibentuk dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga tidak signifikan secara ekonomi pada anggotanya/ rumah tangga/kelompok masyarakat.

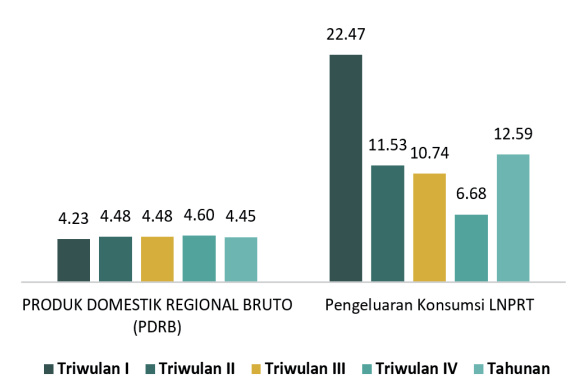
Menurut *System of National Accounts (SNA)* 2008, aktivitas LNPRT dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi. Aktivitas tersebut mencakup produksi, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa LNPRT merupakan salah satu pelaku dalam

perekonomian nasional disamping pelaku ekonomi lain yang telah dikenal seperti rumah tangga, pemerintah, dan korporasi.

II.3.D.2. Regional Sumatera

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 22,47 persen; 11,53 persen; 10,74 persen; dan 6,68 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 12,59 persen (y-o-y). Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 16,13 persen (y-o-y),

Grafik 2. 40. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 28. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sumatera

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
ACEH	4,82	29,34	4,54	10,67	5,17	18,95	4,15	7,51	4,66	16,13
SUMATERA UTARA	4,88	17,69	4,95	8,20	5,20	11,25	5,10	10,37	5,03	11,79
SUMATERA BARAT	4,40	20,56	4,71	4,66	4,33	-1,89	4,04	0,21	4,36	5,61
RIAU	3,39	37,26	3,70	11,45	3,46	5,19	3,52	2,34	3,52	13,01
JAMBI	3,84	29,10	4,14	7,99	4,01	9,98	6,00	4,91	4,51	12,42
SUMATERA SELATAN	5,06	20,99	4,96	17,99	5,03	16,32	5,07	7,42	5,03	15,53
BENGKULU	4,64	18,43	4,70	12,03	4,57	10,64	4,55	7,75	4,62	12,05
LAMPUNG	3,30	19,13	4,80	13,55	4,81	9,32	5,32	6,58	4,57	11,91
KEP. BANGKA BELITUNG	1,01	17,00	1,02	8,35	0,13	-0,56	0,94	6,42	0,77	7,73
KEP. RIAU	5,00	17,76	4,90	7,02	5,01	10,20	5,14	2,03	5,02	9,02
REGIONAL SUMATERA	4,23	22,47	4,48	11,53	4,48	10,74	4,60	6,68	4,45	12,59

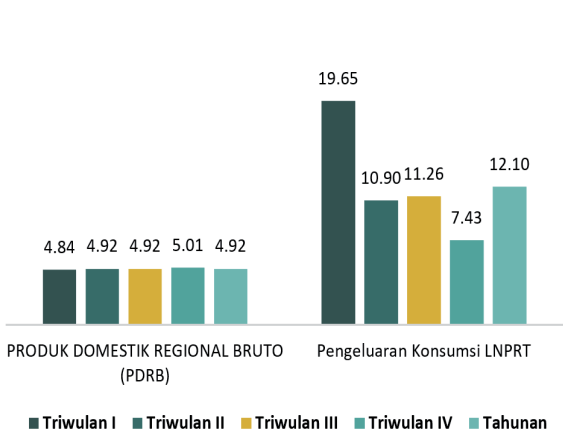
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

sedangkan Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 5,61 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 1,05 persen pada tahun 2024.

II.3.D.3. Regional Jawa

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 19,65 persen; 10,90 persen; 11,26 persen; dan 7,43 persen;

Grafik 2. 41. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 29. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Jawa

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
DKI JAKARTA	4,78	19,70	4,90	9,69	4,93	11,99	5,01	6,84	4,90	11,82
JAWA BARAT	4,93	20,28	4,95	4,77	4,91	4,23	5,02	4,06	4,95	7,89
JAWA TENGAH	4,97	21,31	4,93	18,76	4,93	16,29	4,96	9,83	4,95	16,38
DI YOGYAKARTA	5,04	20,29	4,95	10,05	5,05	7,96	5,07	6,59	5,03	11,06
JAWA TIMUR	4,81	18,06	4,98	12,01	4,91	10,95	5,03	9,53	4,93	12,49
BANTEN	4,51	20,27	4,70	17,93	4,93	12,31	5,02	5,55	4,79	13,82
REGIONAL JAWA	4,84	19,65	4,92	10,90	4,92	11,26	5,01	7,43	4,92	12,10

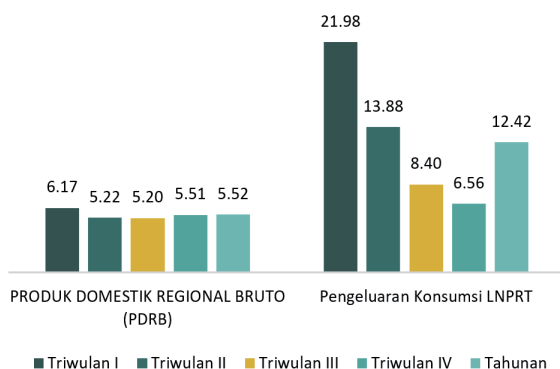
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

7,43 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Jawa tumbuh sebesar 12,10 persen (y-o-y). Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 16,38 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 7,89 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 1,44 persen pada tahun 2024.

II.3.D.4. Regional Kalimantan

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan

Grafik 2. 43. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Kalimantan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 30. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Kalimantan

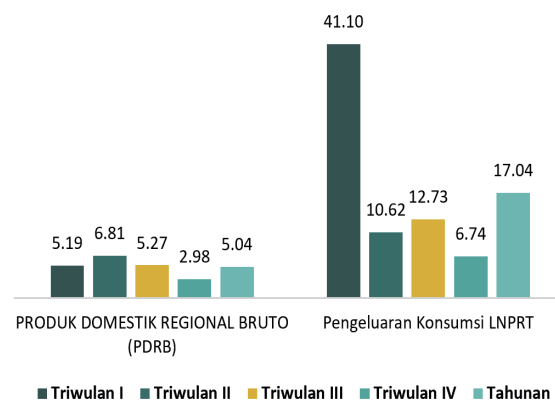
Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
KALIMANTAN BARAT	4,98	29,63	4,76	7,97	4,87	3,33	4,98	0,25	4,90	9,55
KALIMANTAN TENGAH	5,01	21,06	3,80	19,84	4,64	13,84	4,43	12,16	4,46	16,54
KALIMANTAN SELATAN	4,98	20,32	4,81	13,77	5,23	14,38	5,15	6,91	5,05	13,61
KALIMANTAN TIMUR	7,26	18,12	5,85	14,85	5,52	4,97	6,12	7,63	6,17	11,26
KALIMANTAN UTARA	4,74	19,79	4,60	12,87	4,29	7,78	4,66	6,94	4,57	11,60
REGIONAL KALIMANTAN	6,17	21,98	5,22	13,88	5,20	8,40	5,51	6,56	5,52	12,42

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 21,98 persen; 13,88 persen; 8,40 persen; dan 6,56 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 12,42 persen (y-o-y). Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 16,54 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 9,55 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Kalimantan telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 0,90 persen pada tahun 2024.

II.3.D.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

Grafik 2. 42. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 31. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
BALI	5,98	80,93	5,36	10,67	5,43	14,53	5,19	10,44	5,48	27,04
NUSA TENGGARA BARAT	4,75	18,79	11,06	13,69	6,22	12,84	-0,50	1,03	5,30	11,26
NUSA TENGGARA TIMUR	4,16	20,05	4,19	8,75	3,61	11,06	3,03	6,25	3,73	11,29
REGIONAL BALI NUSA TENGGARA	5,19	41,10	6,81	10,62	5,27	12,73	2,98	6,74	5,04	17,04

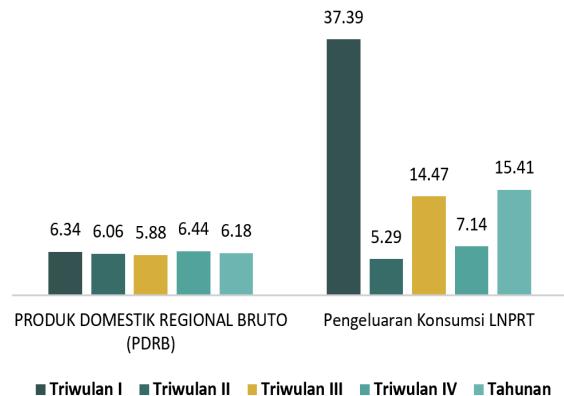
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Bali-Nusa Tenggara mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 41,10 persen; 10,62 persen; 12,73 persen; dan 6,74 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Bali-Nusa Tenggara tumbuh sebesar 17,04 persen (y-o-y). Provinsi Bali menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 27,04 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 11,26 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Bali-Nusa Tenggara telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 2,23 persen pada tahun 2024.

II.3.D.6. Regional Sulawesi

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Sulawesi mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 37,39 persen; 5,29 persen; 14,47 persen; dan 7,14 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 15,41 persen (y-o-y). Provinsi

Grafik 2. 44. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sulawesi



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 32. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Sulawesi

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT	PDRB	LNPRT
SULAWESI UTARA	5,64	29,11	5,13	1,45	5,21	9,41	5,59	4,09	5,39	10,35
SULAWESI TENGAH	10,49	33,92	9,75	5,12	9,08	9,92	10,29	7,00	9,89	13,13
SULAWESI SELATAN	4,82	47,87	4,98	4,27	5,08	19,27	5,18	9,30	5,02	19,52
SULAWESI TENGGARA	5,78	19,04	5,54	14,98	5,24	12,59	5,08	4,02	5,40	12,42
GORONTALO	4,38	12,67	3,78	8,42	3,91	9,55	4,44	6,57	4,13	9,24
SULAWESI BARAT	6,02	25,30	4,11	14,11	2,39	11,68	6,65	8,46	4,76	14,56
REGIONAL SULAWESI	6,34	37,39	6,06	5,29	5,88	14,47	6,44	7,14	6,18	15,41

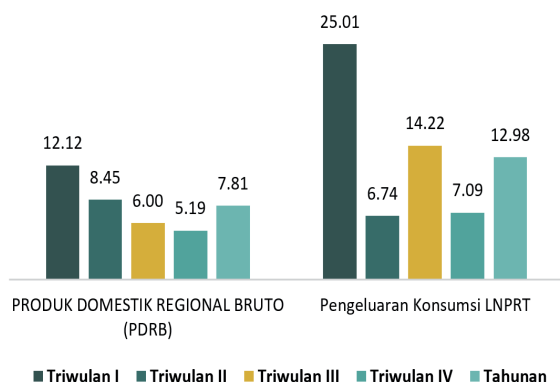
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 19,52 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 9,24 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 1,65 persen pada tahun 2024.

II.3.D.7. Regional Maluku-Papua

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada Regional Maluku-Papua mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar

Grafik 2. 45. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Maluku-Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 33. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) pada Regional Maluku-Papua

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	LNPR	PDRB	LNPR	PDRB	LNPR	PDRB	LNPR	PDRB	LNPR
MALUKU	5,45	20,30	3,13	9,72	6,24	11,10	6,52	12,61	5,34	13,37
MALUKU UTARA	11,74	19,75	10,75	9,61	4,42	9,10	27,27	0,32	13,73	9,27
PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	22,11	3,98	20,80	9,84
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	2,49	5,89	3,60	13,08
PAPUA	-	-	-	-	-	-	2,73	7,83	4,11	13,96
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	1,89	9,42	4,55	15,49
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-8,98	0,72	4,36	10,73
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	2,66	6,59	4,75	14,20
REGIONAL MALUKU PAPUA	12,12	25,01	8,45	6,74	6,00	14,22	5,19	7,09	7,81	12,98

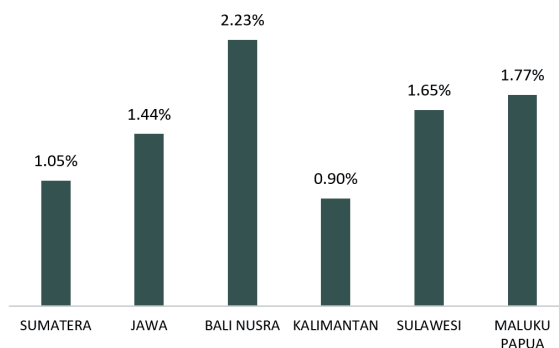
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

25,01 persen; 6,74 persen; 14,22 persen; dan 7,09 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Maluku-Papua tumbuh sebesar 12,98 persen (y-o-y). Provinsi Papua Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan nilai sebesar 15,49 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 9,27 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga pada regional Maluku-Papua telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 1,77 persen pada tahun 2024.

II.3.D.8. Kesimpulan

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) terhadap PDRB tahun 2024 di tiap regional berkisar antara 0,90 persen – 2,23 persen. Dengan gap sebesar 1,33 persen, Regional Bali-Nusa Tenggara menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar, sejalan dengan karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pariwisata, sehingga mendorong tingginya aktivitas lembaga non-profit dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan, adat dan budaya, serta berbagai aktivitas pariwisata di Regional Bali-Nusa Tenggara. Adapun Regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah, sejalan dengan karakteristik perekonomian yang lebih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan, serta industri pengolahan, sehingga peran lembaga non-profit relatif kecil.

Grafik 2. 46. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) Tiap Regional terhadap PDRB 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

II.3.E. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) Terhadap PDRB

II.3.E.1. Gambaran Umum

Menurut Badan Pusat Statistik Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal, mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaannya, serta mengonsumsi barang dan jasa secara kolektif, utamanya makanan dan

perumahan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir.

Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mencakup:

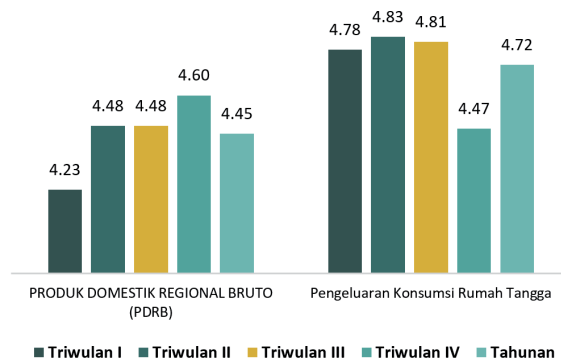
- Nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian;
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter;
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja;
- Perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga. Dalam keadaan ini rumah tangga berperan selaku konsumen akhir dari bermacam-macam jenis barang dan jasa yang sudah ada di dalam perekonomian (Badan Pusat Statistik, 2020). Konsumsi rumah tangga butuh mendapatkan perhatian secara lebih mendalam karena beberapa alasan. Alasan pertama, pendapatan nasional menerima sumbangan yang amat besar dari konsumsi rumah tangga. Di sebagian besar negara, pengeluaran konsumsi mencakup sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasan kedua, konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang sangat fundamental dalam menentukan perubahan kegiatan ekonomi dari suatu masa ke masa yang lain (Sukirno, 2016).

II.3.E.2. Regional Sumatera

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Sumatera mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,78 persen; 4,83 persen; 4,81 persen; dan 4,47 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sumatera tumbuh sebesar 4,72 persen (y-o-y). Provinsi

Grafik 2. 47. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 34. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sumatera

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
ACEH	4,82	4,93	4,54	4,24	5,17	3,85	4,15	4,32	4,66	4,33
SUMATERA UTARA	4,88	5,54	4,95	5,45	5,20	5,47	5,10	5,26	5,03	5,43
SUMATERA BARAT	4,40	4,23	4,71	4,29	4,33	4,62	4,04	1,52	4,36	3,66
RIAU	3,39	4,91	3,70	4,74	3,46	4,63	3,52	4,84	3,52	4,78
JAMBI	3,84	3,59	4,14	4,61	4,01	4,86	6,00	4,56	4,51	4,41
SUMATERA SELATAN	5,06	4,19	4,96	4,79	5,03	4,77	5,07	4,95	5,03	4,68
BENGKULU	4,64	5,52	4,70	5,16	4,57	5,06	4,55	4,79	4,62	5,13
LAMPUNG	3,30	4,67	4,80	4,69	4,81	4,95	5,32	5,05	4,57	4,84
KEP. BANGKA BELITUNG	1,01	4,25	1,02	2,82	0,13	1,26	0,94	0,61	0,77	2,21
KEP. RIAU	5,00	4,85	4,90	5,16	5,01	5,10	5,14	2,97	5,02	4,51
REGIONAL SUMATERA	4,23	4,78	4,48	4,83	4,48	4,81	4,60	4,47	4,45	4,72

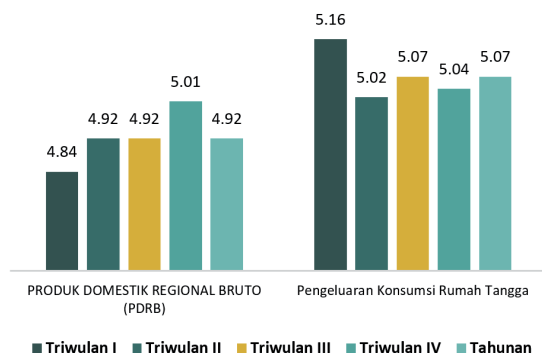
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sumatera Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,43 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 2,21 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Sumatera telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 49,10 persen pada tahun 2024.

II.3.E.2. Regional Jawa

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Jawa mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,16 persen; 5,02 persen; 5,07 persen; dan 5,04 persen, sehingga nilai Pengeluaran

Grafik 2. 48. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 35. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Jawa

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
DKI JAKARTA	4,78	5,25	4,90	5,28	4,93	5,26	5,01	5,14	4,90	5,23
JAWA BARAT	4,93	4,97	4,95	5,02	4,91	4,98	5,02	5,05	4,95	5,01
JAWA TENGAH	4,97	5,14	4,93	5,12	4,93	5,09	4,96	5,26	4,95	5,15
DI YOGYAKARTA	5,04	4,58	4,95	4,72	5,05	4,64	5,07	4,61	5,03	4,64
JAWA TIMUR	4,81	5,20	4,98	4,80	4,91	5,08	5,03	4,91	4,93	4,99
BANTEN	4,51	5,46	4,70	4,62	4,93	4,61	5,02	4,68	4,79	4,83
REGIONAL JAWA	4,84	5,16	4,92	5,02	4,92	5,07	5,01	5,04	4,92	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Jawa tumbuh sebesar 5,07 persen (y-o-y). Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,23 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 4,64 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Jawa telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 62,11 persen pada tahun 2024.

II.3.E.4. Regional Kalimantan

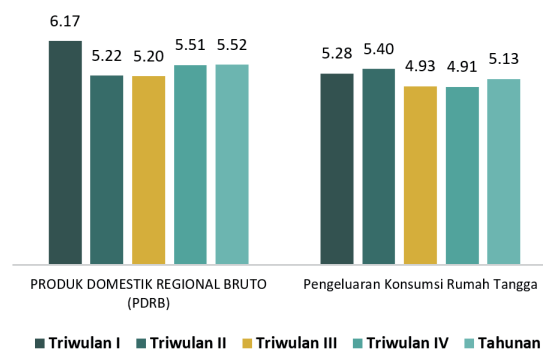
Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Kalimantan mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,28 persen; 5,40 persen; 4,93 persen; dan 4,91 persen, sehingga nilai Pengeluaran

Tabel 2. 36. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Kalimantan

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
KALIMANTAN BARAT	4,98	5,20	4,76	5,11	4,87	5,08	4,98	5,11	4,90	5,12
KALIMANTAN TENGAH	5,01	4,85	3,80	5,98	4,64	4,86	4,43	4,95	4,46	5,16
KALIMANTAN SELATAN	4,98	5,57	4,81	5,59	5,23	5,18	5,15	5,13	5,05	5,37
KALIMANTAN TIMUR	7,26	5,27	5,85	5,16	5,52	4,48	6,12	4,36	6,17	4,81
KALIMANTAN UTARA	4,74	5,67	4,60	5,77	4,29	5,61	4,66	5,87	4,57	5,73
REGIONAL KALIMANTAN	6,17	5,28	5,22	5,40	5,20	4,93	5,51	4,91	5,52	5,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 2. 49. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Kalimantan



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Kalimantan tumbuh sebesar 5,13 persen (y-o-y). Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 5,73 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 4,81 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Kalimantan telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 28,75 persen pada tahun 2024.

II.3.E.5. Regional Bali-Nusa Tenggara

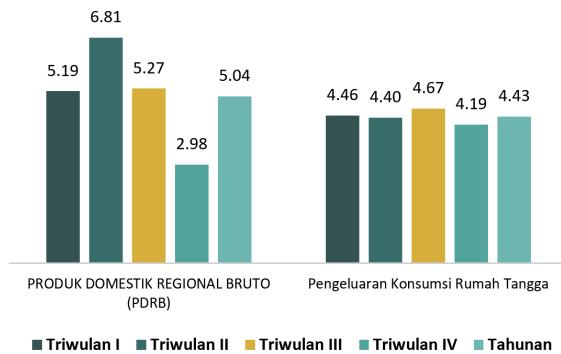
Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Bali-Nusa Tenggara mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,46 persen; 4,40 persen;

Tabel 2. 37. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
BALI	5,98	4,33	5,36	4,09	5,43	5,46	5,19	4,73	5,48	4,65
NUSA TENGGARA BARAT	4,75	5,14	11,06	5,05	6,22	4,41	-0,50	3,25	5,30	4,45
NUSA TENGGARA TIMUR	4,16	3,90	4,19	4,18	3,61	3,71	3,03	4,38	3,73	4,05
REGIONAL BALI NUSA TENGGARA	5,19	4,46	6,81	4,40	5,27	4,67	2,98	4,19	5,04	4,43

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 2. 50. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Bali-Nusa Tenggara



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

4,67 persen; dan 4,19 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Bali-Nusa Tenggara tumbuh sebesar 4,43 persen (y-o-y). Provinsi Bali menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 4,65 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 4,05 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Bali-Nusa Tenggara telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 57,25 persen pada tahun 2024.

II.3.E.6. Regional Sulawesi

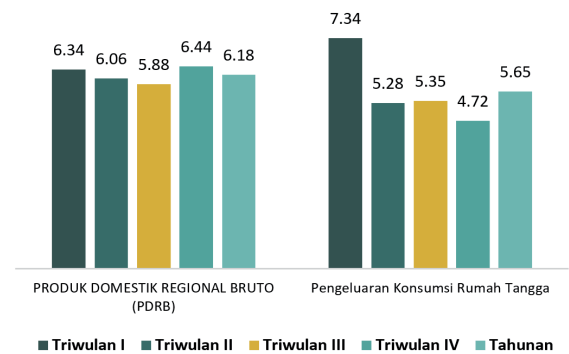
Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Sulawesi mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 7,34 persen; 5,28 persen; 5,35 persen;

Tabel 2. 38. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sulawesi

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
SULAWESI UTARA	5,64	6,43	5,13	4,50	5,21	4,53	5,59	5,60	5,39	5,25
SULAWESI TENGAH	10,49	5,31	9,75	5,03	9,08	5,15	10,29	4,85	9,89	5,08
SULAWESI SELATAN	4,82	8,98	4,98	5,83	5,08	5,81	5,18	4,50	5,02	6,26
SULAWESI TENGGARA	5,78	5,78	5,54	4,62	5,24	4,93	5,08	5,17	5,40	5,12
GORONTALO	4,38	5,05	3,78	3,97	3,91	4,02	4,44	3,39	4,13	4,10
SULAWESI BARAT	6,02	5,16	4,11	5,39	2,39	5,82	6,65	4,43	4,76	5,20
REGIONAL SULAWESI	6,34	7,34	6,06	5,28	5,88	5,35	6,44	4,72	6,18	5,65

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 2. 51. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Sulawesi



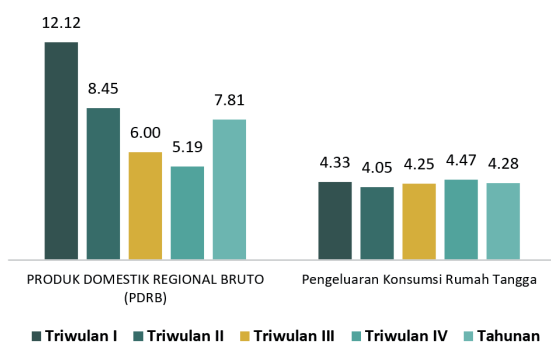
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

dan 4,72 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Sulawesi tumbuh sebesar 5,65 persen (y-o-y). Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 6,26 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 4,10 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Sulawesi telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 46,06 persen pada tahun 2024.

II.3.E.7. Regional Maluku-Papua

Pada tahun 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Regional Maluku-Papua mengalami tren positif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan nilai pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,33 persen; 4,05

Grafik 2. 52. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Maluku-Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 39. Laju Pertumbuhan Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada Regional Maluku-Papua

Provinsi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Tahunan	
	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT	PDRB	PKRT
MALUKU	5,45	4,60	3,13	3,82	6,24	3,54	6,52	4,12	5,34	4,02
MALUKU UTARA	11,74	4,05	10,75	4,94	4,42	4,43	27,27	6,21	13,73	4,92
PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	22,11	4,80	20,80	3,91
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	2,49	6,14	3,60	4,63
PAPUA	-	-	-	-	-	-	2,73	4,08	4,11	4,22
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	1,89	3,85	4,55	4,53
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-8,98	3,51	4,36	3,78
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	2,66	4,29	4,75	4,53
REGIONAL MALUKU PAPUA	12,12	4,33	8,45	4,05	6,00	4,25	5,19	4,47	7,81	4,28

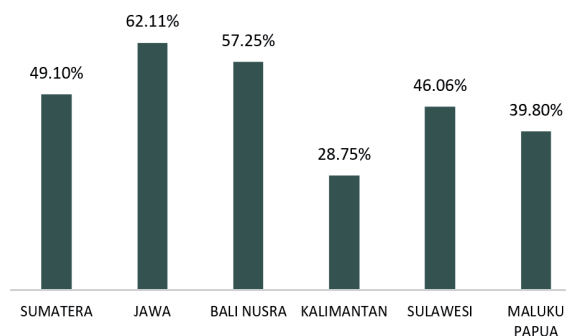
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

persen; 4,25 persen; dan 4,47 persen, sehingga nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan pada Regional Maluku-Papua tumbuh sebesar 4,28 persen (y-o-y). Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan tertinggi berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar 4,92 persen (y-o-y), sedangkan Provinsi Papua Tengah menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tahunan terendah sebesar 3,78 persen (y-o-y). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada regional Maluku-Papua telah memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 39,80 persen pada tahun 2024.

II.3.E.8. Kesimpulan

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) terhadap PDRB tahun 2024

Grafik 2. 53. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tiap Regional terhadap PDRB 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

di tiap regional berkisar antara 28,75 persen – 62,11 persen. Dengan gap sebesar 33,35 persen, Regional Jawa menjadi kawasan yang memiliki kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB terbesar, sejalan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada pulau Jawa, tingginya daya beli dan konsumsi masyarakat, tingginya jumlah wisatawan yang datang, serta masifnya pelaksanaan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) dan event konser musik dan pameran di Regional Jawa sepanjang tahun 2024, terutama pada Provinsi DKI Jakarta. Adapun Regional Kalimantan menjadi kawasan dengan nilai kontribusi terendah, sejalan dengan karakteristik perekonomian yang lebih didominasi oleh investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang digunakan untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara), pembangunan berbagai infrastruktur di Kalimantan, serta pengembangan kawasan industri pengolahan SDA (sawit, mineral, gas).

II.4. PERKEMBANGAN CAPAIAN OUTPUT BELANJA STRATEGIS (K/L & TKDD)

II.4.A. Gambaran Umum Capaian Output Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa anggaran negara memiliki tiga fungsi utama: alat akuntabilitas, alat manajemen, dan alat kebijakan ekonomi.

Sebagai alat akuntabilitas, anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil atau keluaran belanja; sebagai alat manajemen, anggaran menjadi sarana meningkatkan efektivitas dan efisiensi program; dan sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran berkontribusi pada pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi.

Untuk melaksanakan prinsip tersebut, Pemerintah menetapkan PP 21 Tahun 2004 dengan pendekatan penyusunan anggaran: Unified Budgeting, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)—dengan fokus utama pada ABK yang menghubungkan pendanaan dengan output dan outcome sesuai tujuan organisasi.

Dalam mendukung implementasi ABK, sejak 2019 seluruh Satker K/L melaporkan capaian output, dengan tingkat partisipasi mencapai 99,89% pada 2024. Tingginya pelaporan ini menjadi dasar terbentuknya big data kinerja anggaran yang bermanfaat untuk identifikasi masalah, analisis kinerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan. Untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan data, telah dilakukan pengelompokan output strategis berdasarkan sektor prioritas sebagaimana tercantum dalam Informasi APBN 2024, sehingga analisis capaian dapat dilakukan secara lebih makro melalui data agregat.

Pada Laporan Khatulistiwa ini, akan disajikan 5 (lima) bidang/sektor prioritas belanja K/L antara lain:

1. Sektor Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi, serta peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah);
2. Sektor Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, antara lain berupa penguatan layanan

kesehatan primer terutama dalam upaya promotif dan preventif, percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan, serta peningkatan ketahanan kesehatan, terutama melalui peningkatan ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan;

3. Sektor Infrastruktur, diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di sektor pariwisata, transportasi, dan industri, yang berdampak terhadap penurunan indeks kemahalan logistik, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru;
4. Sektor Perlindungan Sosial, diarahkan untuk upaya percepatan pemulihan sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin serta menjamin akses kesehatan dan pendidikan;
5. Sektor Ketahanan Pangan, diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan, menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia, serta peningkatan daya saing petani dan nelayan.

Dalam rangka mendukung ketercapaian output tersebut, pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga telah merealisasikan belanja K/L pada tahun 2024 mencapai Rp1.321,93 triliun yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan) serta operasional penyelenggaraan pemerintah, dengan realisasi beberapa output strategis pada sektor prioritas sebagaimana Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2. 40. Realisasi Output Strategis Tahun 2024

No	Sektor	Output	Jumlah	Realisasi (Miliar Rp)
1	Pendidikan	a. KIP Kuliah	1.156.926 Orang	14.784,15
		b. Program Indonesia Pintar	21.093.339 Orang	14.977,41
		c. Bantuan Operasional Sekolah	10.115.628 Orang	10.777,09
		d. Tunjangan Profesi Guru Non PNS	730.000 Orang	13.880,56
		e. BOPTN	4.822 Lembaga	4.394,98
		f. Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	945.510 Orang	3.179,52
		g. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	89.055 Orang	2.772,65
		h. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarpras Pendidikan Tinggi	45 Unit	1.548,91
		i. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah		
		j. Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi	610 Unit	1.547,45
		k. Bantuan Operasional Pendidikan Paud	30 Unit	1.235,29
		l. Tunjangan Khusus Guru	1.353.594 Orang	812,16
			39.521 Orang	648,91
2	Kesehatan	a. PBI/JKN	96.762.367 Orang	46.337,34
		b. Obat-Obat dan BMHP	881 Paket	5.143,34
		c. Operasional dan Pemeliharaan UPT	655 Paket	3.918,10
		d. Layanan Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUP) dan Bukan Pekerja (BP)	50.517.073 Orang	2.816,12
		e. RS UPT Vertikal	1.326 Paket	1.751,42
		f. Pengadaan Alkes	10.250 Unit	899,35
		g. Fasilitas Rujukan di Kawasan Indonesia Timur	1 Paket	790,32
		h. Penyediaan Alokasi	21.460 Lembaga	518,86
		i. Gedung Layanan Kesehatan	30 Unit	213,46
		j. Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	20 Paket	203,24
		k. Pelatihan Penurunan Stunting	614.566 Orang	174,82
		l. Alat Laboratorium Sesuai Good Laboratory Practice	73 Paket	123,91
		m. Desa Pangan Aman	1.117 Lembaga	36,71
		n. Pengujian Obat, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	59.060 produk	38,67
		o. Fasilitas dan Pembinaan 1 Hpk	8.132.090 Keluarga	21,27
		p. Makanan Tambahan Ibu Hamil	45.000 Orang	11,50
		q. Kegiatan Bangga Kencana	508 Kab/Kota	10,63
		r. Makanan Tambahan Balita Kurus	100.000 Orang	10,37
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Jalan	953,51 km	30.635,67
		b. Pembangunan Bendungan	18 Unit	10.842,79
		c. Pembangunan Jembatan	12.051,29 m	3.937,89
		d. Pembangunan dan Peningkatan SPAM	2.260,02 Liter/detik	3.231,85
		e. Rehabilitasi Jaringan dan Daerah Irigasi	584,76 km	2.910,65
		f. Sistem Pengelolaan Air Limbah	110.077 KK	2.724,36
		g. Peningkatan Jalur Perkeretaapian	133,51 km	1.194,65
		h. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	130.532 Unit	2.852,34
		i. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	217 Unit	1.877,57
		j. Rumah Susun Hunian dan Asrama Pendidikan	3.190 Unit	1.584,48

		k. Layanan Angkutan Laut Perintis	106 Layanan	1.524,95
		l. Pembagunan dan Peningkatan Infrastruktur Kereta Api	9,2 km	467,98
		m. Layanan Angkutan Darat Perintis	349 Layanan	1.138,38
		n. Sistem Pengelolaan Persampahan	349.334 KK	486,37
		o. Layanan Angkutan Udara Perintis	12.734 Layanan	700,44
		p. Pemeliharaan Bendungan	797 Unit	705,80
		q. Infrastruktur Air Minum	171.520 SR	541,10
		r. Kapal Laut	155 Unit	302,91
		s. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	8 Unit	173,53
		t. Bantuan PSU Perumahan	20.706 Unit	151,79
4	Perlindungan Sosial	a. Kartu Sembako	16.544.000 Keluarga	40.324,18
		b. Program Keluarga Harapan	20.000.000 Keluarga	28.259,22
		c. Subsidi Uang Muka dan Bunga Kredit Perumahan	932.886 Unit	5.462,48
		d. Program Kartu Prakerja	1.334.399 Peserta	6.346,07
		e. Bantuan Logistik Korban Bencana Alam	579.816 Paket	4.593,48
		f. Bantuan Rehabilitasi Sosial Lansia	150.846 Orang	1.127,33
		g. Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	315.321 Orang	798,58
		h. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	105.412 Orang	589,45
		i. Bantuan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan HIV	16.835 Orang	38,11
		j. Pembiayaan Umi Bagi Usaha Mikro	2.208.840 Usaha Mikro	23,12
5	Ketahanan Pangan	a. Subsidi Pupuk	6.808.295 Ton	47.387,40
		b. Optimasi Lahan	3.597 km ²	1.983,21
		c. Alsintan	91.098 Unit	1.723,48
		d. Sarana Tanaman Pangan	77.995 Unit	695,83
		e. Penyaluran Benih Jagung	893.950 Hektar	767,55
		f. Rehabilitasi Kawasan Mangrove	10.306 Hektar	406,61
		g. Penyaluran Benih Padi	1.987.624 Hektar	695,64
		h. Kawasan Padi	977.471 Hektar	492,63
		i. Irigasi Perpipaan dan Perpompaan	5.053 Unit	415,78
		j. Kawasan Jagung	197.000 Hektar	173,43
		k. Penyaluran Sarana Produksi Kelautan dan Perikanan	1.071 Unit	115,14
		l. Sarana Prasarana Hortikultura	1.026 Unit	80,00
		m. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	44 Unit	39,74
		n. Bibit Ternak	5.455.733 produk	61,09
		o. Penyaluran Benih Ikan, Kepiting, dan Udang	87.795.324 Ekor	29,21
		p. Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak	4.800 Ekor	2,83

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Realisasi belanja K/L tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 72,8 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 9,7 persen, wilayah Kalimantan sebesar 6,4 persen, wilayah Sulawesi sebesar 5,0 persen, wilayah Maluku-Papua sebesar 3,3 persen, serta wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,7 persen.

II.4.B. Capaian Output 2024 Per Regional

II.4.B.1. Regional Sumatera

Pada tahun 2024, Belanja K/L di Wilayah Sumatera terealisasi sebesar Rp128.853,3 miliar atau 9,7 persen dari total realisasi secara nasional. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) serta; (3) jumlah provinsi yang paling banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dari realisasi belanja K/L tersebut, terdapat realisasi dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan sebesar Rp2.006,4 miliar.

Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.351,6 miliar, antara lain untuk pengelolaan air irigasi untuk pertanian, penyuluhan pertanian, penyediaan lahan pertanian, produksi sereal tanaman pangan, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp307,8 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana serta preservasi dan peningkatan jalan nasional. Selanjutnya realisasi sebagian output strategis pada tahun 2024 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2. 41. Realisasi Output Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2024

No	Sektor	Output	Jumlah	Realisasi (Miliar Rp)
1	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non PNS	51.156 Orang	907,65
		b. Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	240.973 Orang	786,93
		c. Bantuan Operasional Sekolah	641.881 Orang	698,72
		d. BOPTN	188 Lembaga	710,18
		e. Rehabilitasi Dan Renovasi Sekolah	236 Unit	538,96
		f. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	25.682 Orang	590,70
		g. Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi	12 Unit	345,91
		h. KIP Kuliah	32.523 Orang	335,72
		i. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarpras Pendidikan Tinggi	12 Unit	170,62
		j. Tunjangan Khusus Guru	179 Orang	2,94
		k. Program Indonesia Pintar	2.881 Orang	2,02
2	Kesehatan	a. Obat-Obat dan BMHP	21 Paket	783,13
		b. Operasional Dan Pemeliharaan UPT	5 Paket	714,43
		c. Pengadaan Alkes	992 Unit	153,08
		d. Penyediaan Alokon	5.355 Lembaga	78,78
		e. Gedung Layanan Kesehatan	1 Unit	27,82
		f. Pelatihan Penurunan Stunting	133.456 Orang	37,97
		g. Alat Laboratorium Sesuai Good Laboratory Practice	24 Paket	34,90
		h. Desa Pangan Aman		
		i. Pengujian Obat, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	350 Lembaga 18.477 produk	11,54 10,80
		j. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat-Obatan		
		k. Fasilitasi Dan Pembinaan 1 HPK	11.279 Lembaga	11,30
		l. Kegiatan Bangga Kencana	1.545.896 Keluarga	3,96
		m. Pemeriksaan Sampel Makanan Oleh Upt	154 Kab/Kota	3,40
		n. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	6.972 produk	6,25
		o. Pembinaan Pelayanan Kelompok Bina Keluarga Lansia	156 Lembaga 2.468 Kel. Masyarakat	3,00 2,95

3	Infrastruktur	a. Pembangunan Jalan	623,38 km	3.680,87
		b. Pembangunan Bendungan	1 Unit	2.862,01
		c. Pembangunan Jembatan	2.619,05 m	500,13
		d. Pembangunan dan Peningkatan Spam	625 Liter/detik	425,31
		e. Rehabilitasi Jaringan dan Daerah Irigasi	88,78 km	496,74
		f. Sistem Pengelolaan Air Limbah	20.929 KK	664,35
		g. Peningkatan Jalur Perkeretaapian	5 km	293,29
		h. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	34.669 Unit	747,83
		i. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	76 Unit	116,36
		j. Rumah Susun Hunian dan Asrama Pendidikan		
		k. Layanan Angkutan Laut Perintis	784 Unit	299,82
		l. Pembagunan Dan Peningkatan Infrastruktur Kereta Api	4 Layanan 1,1 km	48,99 31,54
		m. Layanan Angkutan Darat Perintis		
		n. Sistem Pengelolaan Persampahan	63 Layanan	133,08
		o. Layanan Angkutan Udara Perintis	5.611 KK	59,46
		p. Pemeliharaan Bendungan	32 Layanan	77,70
		q. Infrastruktur Air Minum	110 Unit	103,82
		r. Kapal Laut	55.999 SR	160,23
		s. Bantuan PSU Perumahan	33 Unit	75,83
4	Perlindungan Sosial		2.009 Unit	18,50
		a. Bantuan Rehabilitasi Sosial Lansia	5.745 Orang	13,49
		b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	2.679 Orang	5,72
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	9.142 Orang	31,13
5	Ketahanan Pangan	d. Bantuan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan HIV	2.498 Orang	5,59
		a. Optimasi Lahan	1.655 km ²	937,14
		b. Penyaluran Benih Jagung	24.000 Hektar	21,47
		c. Rehabilitasi Kawasan Mangrove	401 Hektar	7,61
		d. Penyaluran Benih Padi	55.035 Hektar	18,02
		e. Kawasan Padi	11.285 Hektar	17,23
		f. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan	376 Unit	37,07
		g. Penyaluran Sarana Produksi Kelautan dan Perikanan	122 Unit	22,20
		h. Sarana Prasarana Hortikultura		
		i. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	81 Unit	9,40
		j. Bibit Ternak	5 Unit	2,47
		k. Penyaluran Benih Ikan, Kepiting, dan Udang	415.993 produk	5,10
		l. Sarpras Pembibitan Ternak	15.131.099 Ekor	9,61
		m. Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak	4 Unit	2,49
			200 Ekor	0,55

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di wilayah Sumatera, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Dukungan fiskal dialokasikan pada sektor pendidikan antara lain untuk Tunjangan

Profesi Guru (TPG) dan dosen non PNS, layanan pendidikan tinggi pada sejumlah universitas diantaranya Universitas Jambi, Universitas Malikussaleh dan Universitas Sriwijaya serta rehabilitasi dan renovasi sekolah. Pada sektor kesehatan antara lain berupa operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum antara lain

RSU Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, RSU Dr. M Jamil Padang, dan RSU H. Adam Malik Medan, pengadaan obat-obatan dan bahan medis, serta pengadaan alat kesehatan. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan tol lintas Sumatera, bendungan Tiga Dihaji di Provinsi Sumatera Selatan, bendungan Rukoh dan Keureuto di Provinsi Aceh, bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan jalan trans di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) Regional Sumatera, dan peningkatan jalur lintas kereta api lintas Kisaran-Rantauprapat tahap II di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk menguatkan wilayah Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri.

II.4.B.1. Regional Jawa

Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa pada tahun 2024 mencapai Rp961.997,5 miliar atau 72,8 persen dari total realisasi secara nasional. Tingginya porsi realisasi Belanja K/L di wilayah

Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 86 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak. Dari realisasi belanja K/L tersebut, terdapat realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencapai Rp2.126,1 miliar.

Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.325,3 miliar, antara lain untuk pengelolaan air irigasi untuk pertanian, penyuluhan pertanian, penyediaan lahan pertanian, produksi sereal tanaman pangan, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp385,1 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana serta preservasi dan peningkatan jalan nasional. Selanjutnya realisasi sebagian output strategis pada tahun 2024 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2. 42. Realisasi Output Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2024

No	Sektor	Output	Jumlah	Realisasi (Miliar Rp)
1	Pendidikan	a. KIP Kuliah	1.097.273 Orang	14.159,37
		b. Program Indonesia Pintar	21.070.647 Orang	14.930,85
		c. Bantuan Operasional Sekolah	9.052.171 Orang	9.570,94
		d. Tunjangan Profesi Guru Non PNS	631.925 Orang	12.172,77
		e. BOPTN	1.687 Lembaga	2.464,02
		f. Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	233.227 Orang	935,93
		g. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	46.564 Orang	1.672,68
		h. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarpras Pendidikan Tinggi	16 Unit	676,24
		i. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah	105 Unit	371,00
		j. Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi	7 Unit	573,83
		k. Bantuan Operasional Pendidikan PAUD	1.353.594 Orang	812,16
2	Kesehatan	l. Tunjangan Khusus Guru	37.955 Orang	629,34
		a. PBI/JKN	96.762.367 Orang	46.337,34
		b. Obat-Obat dan BMHP	749 Paket	3.562,17
		c. Operasional dan Pemeliharaan UPT	621 Paket	2.481,77
		d. Layanan Kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPUP) dan Bukan Pekerja (BP)	50.517.073 Orang	2.816,12

		e. RS UPT Vertikal	1.326 Paket	1.751,42
		f. Pengadaan Alkes	8.015 Unit	620,03
		g. Fasilitas Rujukan di Kawasan Indonesia Timur	1 Paket	790,32
		h. Penyediaan Alokon	9.011 Lembaga	327,22
		i. Gedung Layanan Kesehatan	18 Unit	129,90
		j. Sarana Dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	20 Paket	203,24
		k. Pelatihan Penurunan Stunting		
		l. Alat Laboratorium Sesuai Good Laboratory Practice	327.585 Orang 13 Paket	83,40 41,69
		m. Desa Pangan Aman		
		n. Pengujian Obat, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	244 Lembaga 13.992 produk	8,01 10,34
		o. Fasilitasi dan Pembinaan 1 HPK		
		p. Makanan Tambahan Ibu Hamil	5.176.784 Keluarga	13,76
		q. Kegiatan Bangga Kencana	45.000 Orang	11,50
		r. Makanan Tambahan Balita Kurus	113 Kab/Kota 100.000 Orang	2,04 10,37
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Jalan	33,9 km	6.492,61
		b. Pembangunan Bendungan	8 Unit	4.263,95
		c. Pembangunan Jembatan	5.166,03 m	1.394,51
		d. Pembangunan dan Peningkatan SPAM	1.201,02 Liter/detik	1.108,34
		e. Rehabilitasi Jaringan dan Daerah Irigasi	394,04 km	2.098,93
		f. Sistem Pengelolaan Air Limbah	55.595 KK	1.396,27
		g. Peningkatan Jalur Perkeretaapian	128,51 km	901,36
		h. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	54.076 Unit	1.164,56
		i. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	16 Unit	1.170,26
		j. Rumah Susun Hunian dan Asrama Pendidikan		
		k. Layanan Angkutan Laut Perintis	1.197 Unit 32 Layanan	526,69 511,18
		l. Pembagunan dan Peningkatan Infrastruktur Kereta Api	7,1 km	426,19
		m. Layanan Angkutan Darat Perintis	26 Layanan	502,52
		n. Sistem Pengelolaan Persampahan	321.102 KK	339,67
		o. Layanan Angkutan Udara Perintis	474 Layanan	15,49
		p. Pemeliharaan Bendungan	254 Unit	304,03
		q. Infrastruktur Air Minum	57.441 SR	174,03
		r. Kapal Laut	50 Unit	125,70
		s. Bantuan PSU Perumahan	6.363 Unit	33,88
4	Perlindungan Sosial	a. Kartu Sembako	16.544.000 Keluarga	40.324,18
		b. Program Keluarga Harapan	20.000.000 Keluarga	28.259,22
		c. Subsidi Uang Muka dan Bunga Kredit Perumahan	932.886 Unit	5.462,48
		d. Program Kartu Prakerja	1.334.399 Peserta	6.346,07
		e. Bantuan Logistik Korban Bencana Alam	579.816 Paket	4.593,48
		f. Bantuan Rehabilitasi Sosial Lansia	132.079 Orang	1.089,98
		g. Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	307.696 Orang	782,99
		h. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	77.846 Orang	511,08
		i. Bantuan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan HIV	9.668 Orang	23,93
		j. Pembiayaan UMI Bagi Usaha Mikro	2.208.840 Usaha Mikro	23,12

5	Ketahanan Pangan	a. Subsidi Pupuk	6.808.295 Ton	47.387,40
		b. Alsintan	91.098 Unit	1.723,48
		c. Sarana Tanaman Pangan	77.995 Unit	695,83
		d. Penyaluran Benih Jagung	844.150 Hektar	722,62
		e. Rehabilitasi Kawasan Mangrove	8.704 Hektar	384,63
		f. Penyaluran Benih Padi	1.859.216 Hektar	651,88
		g. Kawasan Padi	942.940 Hektar	439,20
		h. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan	3.368 Unit	257,67
		i. Kawasan Jagung	197.000 Hektar	173,43
		j. Penyaluran Sarana Produksi Kelautan dan Perikanan	738 Unit	50,70
		k. Sarana Prasarana Hortikultura		
		l. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	807 Unit	54,57
		m. Bibit Ternak	28 Unit	30,87
		n. Penyaluran Benih Ikan, Kepiting, dan Udang	4.869.770 produk	49,77
		o. Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak	30.099.298 Ekor	8,26
			4.300 Ekor	1,45

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Implementasi dukungan fiskal turut memberikan andil dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Jawa khususnya pengembangan wilayah Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk KIP Kuliah, program PIP, penyaluran BOS, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, bantuan pendanaan PTN BH, serta bantuan pendanaan competitive fund (BOPTN Penelitian). Di bidang kesehatan dukungan fiskal diberikan antara lain berupa bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), vaksin dan imunisasi, operasionalisasi, dan pemeliharaan RS UPT pada 25 RS, obat-obatan dan bahan medis, pengadaan alat kesehatan, pembangunan dan pengembangan RS UPT vertikal Surabaya, serta bantuan pendidikan program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS).

Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak, dan Serang-Panimbang, pembangunan Pelabuhan Patimban, pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Manggarai – Jatinegara, peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi lintas Cirebon - Semarang segmen Tegal – Pekalongan,

peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap 1, pembangunan bendungan seperti Bendungan Cijurey dan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat, Bendungan Bener dan Bendungan Jragung di Provinsi Jawa Tengah, pembangunan pengendali banjir Kali Bekasi, pengendali banjir sungai Loji Banger dan Bogowonto di Provinsi Jawa Tengah, sungai Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta, sungai Cidurian Hulu di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

II.4.B.3. Regional Bali-Nusa Tenggara

Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 mencapai Rp35.699,1 miliar atau 2,7 persen dari total realisasi secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp367,9 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp196,9 miliar, antara lain untuk pengelolaan air irigasi untuk pertanian, penyuluhan pertanian, penyediaan lahan pertanian, produksi sereal tanaman

pangan, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp69,2 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dan

penanggulangan darurat akibat bencana serta preservasi pemeliharaan jalan. Selanjutnya sebagian realisasi output strategis pada tahun 2024 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2. 43. Realisasi Output Strategis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2024

No	Sektor	Output	Jumlah	Realisasi (Miliar Rp)
1	Pendidikan	a. Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	9. 116.085 Orang	510,61
		b. Tunjangan Profesi Guru Non PNS	20.153 Orang	381,34
		c. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarpras Pendidikan Tinggi	4 Unit	245,99
		d. BOPTN	35 Lembaga	219,41
		e. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	4.272 Orang	160,51
		f. Bantuan Operasional Sekolah	88.533 Orang	103,87
		g. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah	69 Unit	94,04
		h. Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi	1 Unit	40,46
		i. Program Indonesia Pintar	10.978 Orang	33,00
		j. KIP Kuliah	3.142 Orang	32,30
		k. Tunjangan Khusus Guru	1.010 Orang	11,69
2	Kesehatan	a. Obat-Obat dan BMHP	22 Paket	294,32
		b. Operasional Dan Pemeliharaan UPT	5 Paket	194,69
		c. Pengadaan Alkes	426 Unit	69,10
		d. Penyediaan Alokasi	1.646 Lembaga	32,60
		e. Gedung Layanan Kesehatan	9 Unit	52,58
		f. Pelatihan Penurunan Stunting	36.497 Orang	12,03
		g. Alat Laboratorium Sesuai Good Laboratory Practice	7 Paket	11,40
		h. Desa Pangan Aman	94 Lembaga	3,36
		i. Pengujian Obat, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan		
		j. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan dan Makanan	6.054 produk 26 Perkara	3,51 2,69
		k. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	34 Lembaga	1,09
		l. Fasilitasi Dan Pembinaan 1 HPK	359.493 Keluarga	0,97
		m. Kegiatan Bangga Kencana	41 Kab/Kota	0,84
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Jalan	11,49 km	358,05
		b. Pembangunan Bendungan	5 Unit	1.820,33
		c. Pembangunan Jembatan	483,29 m	167,63
		d. Pembangunan dan Peningkatan SPAM	235 Liter/detik	185,31
		e. Rehabilitasi Jaringan dan Daerah Irigasi	6,62 km	48,73
		f. Sistem Pengelolaan Air Limbah	7.571 KK	120,36
		g. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	2.563 Unit	57,48
		h. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	11 Unit	122,86
		i. Rumah Susun Hunian dan Asrama Pendidikan	344 Unit	217,91
		j. Layanan Angkutan Laut Perintis	12 Layanan	183,22
		k. Layanan Angkutan Darat Perintis	46 Layanan	76,71
		l. Sistem Pengelolaan Persampahan	8.618 KK	46,20
		m. Layanan Angkutan Udara Perintis	5 Layanan	15,61
		n. Pemeliharaan Bendungan	265 Unit	129,86
		o. Infrastruktur Air Minum	12.640 SR	35,53
		p. Kapal Laut	10 Unit	22,57
		q. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	3 Unit	26,81
		r. Bantuan PSU Perumahan	1.094 Unit	7,87

4	Perlindungan Sosial	a. Bantuan Rehabilitasi Sosial Lansia	8143.797 Orang	6,95
		b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	2.042 Orang	3,52
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	5.537 Orang	15,07
		d. Bantuan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan HIV	1.563 Orang	3,17
5	Ketahanan Pangan	a. Penyaluran Benih Jagung	4.000 Hektar	3,60
		b. Rehabilitasi Kawasan Mangrove	50 Hektar	1,30
		c. Penyaluran Benih Padi	12.500 Hektar	4,25
		d. Kawasan Padi	8.400 Hektar	12,23
		e. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan	368 Unit	36,60
		f. Penyaluran Sarana Produksi Kelautan dan Perikanan	56 Unit	11,10
		g. Sarana Prasarana Hortikultura	30 Unit	3,48
		h. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	2 Unit	1,35
		i. Bibit Ternak	320 produk	1,67
		j. Penyaluran Benih Ikan, Kepiting, dan Udang	16.466.998 Ekor	3,54
		k. Sarana Prasarana Tanaman Perkebunan	2 Unit	0,75
		l. Sarpras Pembibitan Ternak	1 Unit	0,01

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Bali-Nusa Tenggara dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan untuk tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, penyediaan layanan pendidikan tinggi pada Universitas Udayana, Pendidikan Ganesha, dan Institut Seni Indonesia Denpasar di Provinsi Bali, Universitas Mataram di Provinsi NTB, serta Universitas Nusa Cendana dan Timor di Provinsi NTT, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta pelaksanaan program KIP Kuliah dan PIP. Selanjutnya, pada sektor kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, pelatihan penurunan stunting, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah di Provinsi Bali serta RS Umum Pusat Dr. Ben Mboi Kupang di Provinsi NTT.

Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan Sidan di Provinsi Bali, bendungan Temef, Mbay, dan Manikin Meninting di Provinsi NTT, pembangunan daerah irigasi Beringin Sila di Provinsi NTB, pembangunan jalan akses simpul transportasi di Provinsi NTT dan penataan kawasan destinasi wisata Labuan Bajo. Pembangunan tersebut dilaksanakan

antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

II.4.B.4. Regional Kalimantan

Pada tahun 2024, realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan mencapai Rp85.061,1 miliar atau 6,4 persen dari total realisasi Belanja K/L secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai Rp1.235,2 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp972,5 miliar, antara lain untuk pengelolaan air irigasi untuk pertanian, penyuluhan pertanian, penyediaan lahan pertanian, produksi sereal tanaman pangan, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp116,2 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana serta preservasi dan peningkatan jalan nasional.

Selanjutnya realisasi output strategis pada tahun 2024 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada tabel 2.44.

Tabel 2. 44. Realisasi Output Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2024

No	Sektor	Output	Jumlah	Realisasi (Miliar Rp)
1	Pendidikan	a. Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	9117.896 Orang	347,22
		b. BOPTN	62 Lembaga	321,45
		c. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah	81 Unit	264,27
		d. Bantuan Operasional Sekolah	161.485 Orang	189,27
		e. Tunjangan Profesi Guru Non Pns	10.198 Orang	185,97
		f. Tunjangan Profesi Dosen Non Pns	2.293 Orang	74,70
		g. KIP Kuliah	5.279 Orang	58,39
		h. Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi	2 Unit	51,87
		i. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarpras Pendidikan Tinggi	3 Unit	36,92
		j. Program Indonesia Pintar		
		k. Tunjangan Khusus Guru	1.757 Orang	6,26
			4 Orang	0,07
2	Kesehatan	a. Penyediaan Alokon	1.728 Lembaga	12,27
		b. Pelatihan Penurunan Stunting	36.725 Orang	12,62
		c. Alat Laboratorium Sesuai Good Laboratory Practice	10 Paket	11,39
		d. Desa Pangan Aman	134 Lembaga	3,95
		e. Pengujian Obat, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	7.677 produk	5,34
		f. Kegiatan Bangga Kencana	56 Kab/Kota	1,31
		g. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat-Obatan	3.828 Lembaga	4,06
		h. Pemeriksaan Sampel Makanan Oleh UPT	2.983 produk	3,10
		i. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	50 Lembaga	0,80
		j. Fasilitasi Dan Pembinaan 1 HPK	338.471 Keluarga	0,67
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Jalan	138,56 km	18.857,06
		b. Pembangunan Bendungan	1 Unit	175,17
		c. Pembangunan Jembatan	2.214,61 m	1.367,31
		d. Pembangunan dan Peningkatan SPAM	112 Liter/detik	1.132,05
		e. Rehabilitasi Jaringan dan Daerah Irigasi	44,12 km	100,59
		f. Sistem Pengelolaan Air Limbah	5.443 KK	81,13
		g. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	12.442 Unit	266,59
		h. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	10 Unit	105,18
		i. Rumah Susun Hunian dan Asrama Pendidikan	330 Unit	139,09
		j. Layanan Angkutan Laut Perintis	4 Layanan	53,61
		k. Layanan Angkutan Darat Perintis	32 Layanan	60,08
		l. Sistem Pengelolaan Persampahan	2.202 KK	13,72
		m. Layanan Angkutan Udara Perintis	2.003 Layanan	78,15
		n. Pemeliharaan Bendungan	27 Unit	43,26
		o. Infrastruktur Air Minum	18.240 SR	56,45
		p. Kapal Laut	18 Unit	30,31
		q. Bantuan PSU Perumahan	2.201 Unit	27,46
4	Perlindungan Sosial	a. Bantuan Rehabilitasi Sosial Lansia	1.371 Orang	1,92
		b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	363 Orang	0,82
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1.679 Orang	4,10
		d. Bantuan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan HIV	319 Orang	0,60

5	Ketahanan Pangan	a. Optimasi Lahan	1.406 km2	716,67
		b. Penyaluran Benih Jagung	6.900 Hektar	5,94
		c. Rehabilitasi Kawasan Mangrove	125 Hektar	3,37
		d. Penyaluran Benih Padi	17.001 Hektar	6,46
		e. Kawasan Padi	2.996 Hektar	6,43
		f. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan	222 Unit	20,94
		g. Penyaluran Sarana Produksi Kelautan dan Perikanan	55 Unit	11,44
		h. Sarana Prasarana Hortikultura	36 Unit	4,17
		i. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	2 Unit	1,77
		j. Bibit Ternak	169.650 produk	4,54
		k. Penyaluran Benih Ikan, Kepiting, dan Udang	4.275.800 Ekor	1,52
		l. Sarana Prasarana Tanaman Perkebunan	4 Unit	0,32

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk layanan pendidikan tinggi pada Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman, Universitas Palangkaraya, Universitas Borneo Tarakan, dan Institut Teknologi Kalimantan, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan gedung pada UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, serta tunjangan profesi guru dan dosen Non-PNS. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana Poltekkes Kalimantan Timur, Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya, penyediaan alat laboratorium sesuai standar, pelatihan penurunan stunting, hingga Komunikasi Informasi Edukasi terhadap obat dan pangan aman.

Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp40.034,7 miliar termasuk di dalamnya untuk dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp19.333,4 miliar. Output infrastruktur strategis lainnya adalah pembangunan jalan strategis, pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III, Malinau, Kalimantan Utara, dan pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian,

perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

II.4.B.5. Regional Sulawesi

Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi pada tahun 2024 mencapai Rp66.568,7 miliar atau 5,0 persen dari total realisasi secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp901,5 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp460,5 miliar, antara lain untuk pengelolaan air irigasi untuk pertanian, penyuluhan pertanian, penyediaan lahan pertanian, produksi sereal tanaman pangan, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp210,7 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana serta preservasi dan peningkatan jalan nasional. Selanjutnya realisasi sebagian output strategis pada tahun 2024 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2. 45. Realisasi Output Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2024

No	Sektor	Output	Jumlah	Realisasi (Miliar Rp)
1	Pendidikan	a. Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	179.082 Orang	457,76
		b. BOPTN	2.810 Lembaga	469,60
		c. Pembangunan, Rehabilitasi, Dan Renovasi Sarpras Pendidikan Tinggi	8 Unit	359,97
		d. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah	107 Unit	227,38
		e. Tunjangan Profesi Guru Non Pns	15.524 Orang	217,38
		f. Tunjangan Profesi Dosen Non Pns	9.154 Orang	232,29
		g. Bantuan Operasional Sekolah	127.774 Orang	155,33
		h. KIP Kuliah	13.657 Orang	143,92
		i. Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi	6 Unit	141,94
		j. Program Indonesia Pintar	1.469 Orang	1,04
2	Kesehatan	a. Obat-Obat dan BMHP	59 Paket	479,47
		b. Operasional Dan Pemeliharaan UPT	23 Paket	504,04
		c. Pengadaan Alkes	788 Unit	57,08
		d. Penyediaan Alokasi	2.440 Lembaga	59,75
		e. Pelatihan Penurunan Stunting	49.262 Orang	15,44
		f. Alat Laboratorium Sesuai Good Laboratory Practice	10 Paket	15,66
		g. Desa Pangan Aman	190 Lembaga	5,91
		h. Pengujian Obat, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	8.444 produk	5,51
		i. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan dan Makanan	55 Perkara	4,88
			2 Unit	3,16
		j. Gedung Layanan Kesehatan	592.510 Keluarga	1,60
		k. Fasilitas Dan Pembinaan 1 HPK	81 Kab/Kota	1,83
		l. Kegiatan Bangga Kencana	70 Lembaga	1,36
		m. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya		
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Jalan	23,93 km	363,05
		b. Pembangunan Bendungan	3 Unit	1.249,39
		c. Pembangunan Jembatan	677,42 m	174,58
		d. Pembangunan dan Peningkatan SPAM	62 Liter/detik	321,78
		e. Rehabilitasi Jaringan dan Daerah Irigasi	46,2 km	145,94
		f. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	19.414 Unit	418,42
		g. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	28 Unit	142,44
		h. Rumah Susun Hunian dan Asrama Pendidikan	338 Unit	182,57
		i. Layanan Angkutan Laut Perintis	18 Layanan	292,50
		j. Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Kereta Api	1 km	10,25
		k. Layanan Angkutan Darat Perintis		
		l. Layanan Angkutan Udara Perintis	64 Layanan	137,92
		m. Pemeliharaan Bendungan	1.260 Layanan	37,30
		n. Infrastruktur Air Minum	98 Unit	95,44
		o. Kapal Laut	16.640 SR	73,32
		p. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	22 Unit	16,35
		q. Bantuan PSU Perumahan	3 Unit	98,25
			8.201 Unit	52,59
4	Perlindungan Sosial	a. Bantuan Rehabilitasi Sosial Lansia	7.303 Orang	13,45
		b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	2.341 Orang	4,95
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	10.215 Orang	23,82
			2.406 Orang	4,32

d. Bantuan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan HIV				
5	Ketahanan Pangan	a. Optimasi Lahan	136 km2	78,73
		b. Penyaluran Benih Jagung	13.000 Hektar	12,23
		c. Rehabilitasi Kawasan Mangrove	275 Hektar	7,98
		d. Penyaluran Benih Padi	40.900 Hektar	13,92
		e. Kawasan Padi	9.250 Hektar	13,75
		f. Irigasi Perpipa dan Perpompaaan	717 Unit	63,30
		g. Penyaluran Sarana Produksi Kelautan dan Perikanan	52 Unit	10,22
		h. Sarana Prasarana Hortikultura	57 Unit	6,63
		i. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	4 Unit	1,77
		j. Penyaluran Benih Ikan, Kepiting, dan Udang	21.272.399 Ekor	3,21
		k. Ternak Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak	300 Ekor	0,83

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan pada 24 perguruan tinggi di seluruh provinsi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, pembangunan gedung pendidikan tinggi di IAIN Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan, IAIN Manado Provinsi Sulawesi Utara, STAIN Majene Provinsi Sulawesi Barat, IAIN Gorontalo, IAIN Palopo, dan STAIN Kendari serta program KIP kuliah dan PIP. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, serta operasional dan pemeliharaan RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, RS Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar, RS Mata Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, RS Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan RS Umum Pusat Makassar, serta pembangunan gedung layanan kesehatan ibu dan anak di RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan pada 24 perguruan tinggi di seluruh provinsi, rehabilitasi

dan renovasi sekolah, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, pembangunan gedung pendidikan tinggi di IAIN Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan, IAIN Manado Provinsi Sulawesi Utara, STAIN Majene Provinsi Sulawesi Barat, IAIN Gorontalo, IAIN Palopo, dan STAIN Kendari serta program KIP kuliah dan PIP. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, serta operasional dan pemeliharaan RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, RS Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar, RS Mata Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, RS Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan RS Umum Pusat Makassar, serta pembangunan gedung layanan kesehatan ibu dan anak di RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar.

II.4.B.6. Regional Maluku-Papua

Pada tahun 2024, realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp43.748,6 miliar atau 3,3 persen dari realisasi Belanja K/L secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp490,2 miliar. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp311,7 miliar, antara lain untuk membiayai sarana dan prasarana pengembangan kawasan, bantuan hewan, sarana dan prasarana di bidang pertanian,

kehutanan, dan lingkungan hidup, serta lainnya. Selain itu, terdapat juga kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp43,8 miliar, untuk membiayai operasionalisasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sumber daya air. Selanjutnya sebagian realisasi output strategis pada tahun

2024 untuk wilayah Maluku-Papua dapat dilihat pada tabel 2.46.

Tabel 2. 46. Realisasi Output Strategis pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2024

No	Sektor	Output	Jumlah	Realisasi (Miliar Rp)
1	Pendidikan	a. BOPTN	40 Lembaga	210,31
		b. Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	58.247 Orang	141,06
		c. Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi	2 Unit	81,28
		d. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarpras Pendidikan Tinggi	2 Unit	59,17
		e. Bantuan Operasional Sekolah	43.784 Orang	58,95
		f. KIP Kuliah	5.052 Orang	54,46
		g. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah	12 Unit	51,80
		h. Tunjangan Profesi Dosen Non Pns	1.090 Orang	41,77
		i. Tunjangan Profesi Guru Non Pns	1.044 Orang	15,45
		j. Tunjangan Khusus Guru	373 Orang	4,88
		k. Program Indonesia Pintar	5.607 Orang	4,25
2	Kesehatan	a. Obat-Obat dan BMHP	30 Paket	24,25
		b. Operasional dan Pemeliharaan UPT	1 Paket	23,16
		c. Pengadaan Alkes	29 Unit	0,06
		d. Penyediaan Alokon	1.280 Lembaga	8,23
		e. Pelatihan Penurunan Stunting	31.041 Orang	13,35
		f. Alat Laboratorium Sesuai Good Laboratory Practice	9 Paket	8,87
		g. Desa Pangan Aman	105 Lembaga	3,95
		h. Pengujian Obat, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan	4.416 produk	3,17
		i. Kegiatan Bangga Kencana	63 Kab/Kota	1,21
		j. Penyidikan Perkara Bidang Obat-Obatan Dan Makanan	16 Perkara	2,95
		k. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	62 Lembaga	1,43
		l. Fasilitasi Dan Pembinaan 1 HPK	118.936 Keluarga	0,32
3	Infrastruktur	a. Pembangunan Jalan	122,25 km	884,04
		b. Pembangunan Bendungan	1 Unit	471,94
		c. Pembangunan Jembatan	890,89 m	333,72
		d. Pembangunan dan Peningkatan SPAM	25 Liter/detik	59,06
		e. Rehabilitasi Jaringan dan Daerah Irigasi	5 km	19,73
		f. Sistem Pengelolaan Air Limbah	1.547 KK	70,11
		g. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	7.368 Unit	197,46
		h. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	76 Unit	220,47
		i. Rumah Susun Hunian dan Asrama Pendidikan	197 Unit	218,39
		j. Layanan Angkutan Laut Perintis	36 Layanan	435,45
		k. Layanan Angkutan Darat Perintis	118 Layanan	228,07
		l. Sistem Pengelolaan Persampahan	1 KK	5,06
		m. Layanan Angkutan Udara Perintis	8.960 Layanan	476,19
		n. Pemeliharaan Bendungan	43 Unit	29,39
		o. Infrastruktur Air Minum	10.560 SR	41,53
		p. Kapal Laut	22 Unit	32,16
		q. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	2 Unit	48,47
		r. Bantuan PSU Perumahan	838 Unit	11,48

4	Perlindungan Sosial	a. Bantuan Rehabilitasi Sosial Lansia	551 Orang	1,54
		b. Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus	200 Orang 993 Orang	0,58 4,25
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas		
		d. Bantuan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan HIV	381 Orang	0,50
5	Ketahanan Pangan	a. Optimasi Lahan	400 km2	234,74
		b. Penyaluran Benih Jagung	1.900 Hektar	1,70
		c. Rehabilitasi Kawasan Mangrove	751 Hektar	1,72
		d. Penyaluran Benih Padi	2.972 Hektar	1,12
		e. Kawasan Padi	2.600 Hektar	3,80
		f. Irigasi Perpipaan dan Perpompaaan	2 Unit	0,20
		g. Penyaluran Sarana Produksi Kelautan dan Perikanan	48 Unit	9,48
		h. Sarana Prasarana Hortikultura	15 Unit	1,75
		i. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	3 Unit	1,51
		j. Penyaluran Benih Ikan, Kepting, dan Udang	549.730 Ekor	3,07

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Maluku-Papua dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi Universitas Pattimura, Universitas Khairun, Universitas Papua, Universitas Cendrawasih, Universitas Musamus, dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, pembangunan gedung pendidikan tinggi IAIN Fattahul Muluk Papua, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS. Bidang kesehatan antara lain berupa peningkatan sarana dan prasarana Poltekkes Sorong, Poltekkes Ternate, dan Poltekkes Jayapura, Poltekkes Maluku penyediaan obat-obatan dan bahan medis, pelatihan penurunan stunting, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Dr. J. Leimina Ambon.

Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan trans Papua Merauke-Sorong serta jalan di wilayah 3T Maluku-Papua, pembangunan bendungan Way Apu, pembangunan pasar sentral Sanggeng di Manokwari, pengembangan bandar udara Rendani Manokwari, Mozes-Kilangin Timika, Domine Edward Osok Sorong, Sultan Babullah Ternate, Utarom Kaimana,

Namrole Buru Selatan, Babo, Buli Maba, Kuabong Kao Halmahera Utara, Morotai, serta pembangunan bandar udara Siboru Fak-Fak. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah untuk membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah. Pembangunan tersebut dilaksanakan khususnya antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri dan konektivitas antardaerah yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

*Halaman ini
sengaja dikosongkan*



III. ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

HARMONISASI BELANJA
K/L DAN DAK FISIK



III. ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK

III.1. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KANWIL DJPB

Pada tahun 2023, Menteri Keuangan telah menetapkan SOP Link 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Money) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Menteri Keuangan memberikan amanah kepada Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sebagai Unit in Charge (UIC) dalam proses money tersebut. DJA dan DJPK melakukan money dari sisi perencanaan dan penganggaran pada belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) sedangkan DJPb melakukan money pada sisi pelaksanaan anggaran. Sinergi ketiga unit di Kementerian Keuangan ini menjadi sangat penting dalam mengawal harmonisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Secara khusus, peran DJPb dhi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dalam mengawal pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui aktivitas sebagai berikut.

- 1). Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis
- 2). Analisis permasalahan sinkronisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik di masing-masing wilayah.
- 3). Identifikasi upaya sinkronisasi belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan utama aktivitas di atas dalam rangka memperoleh gambaran kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan, sekaligus memotret upaya yang dilakukan oleh Pemda maupun Satker dalam sinkronisasi belanja K/L dan DAK Fisik. Selain itu, diharapkan adanya rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja K/L yang mendukung DAK Fisik.

Ruang lingkup money belanja K/L yang mendukung DAK Fisik yang dilakukan Kanwil DJPb berfokus pada spasial/kewilayahan. Money sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik dilakukan terhadap 6 (enam) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu:

1. Bidang Air Minum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);

2. Bidang Jalan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
3. Bidang Kesehatan dan KB (Kementerian Kesehatan);
4. Bidang Pendidikan (Kemendikbud Ristek dan Kementerian PUPR);
5. Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian);
6. Bidang Sanitasi (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

III.2. PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L SECARA NASIONAL

III.2.A. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Secara nasional, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik pada 6 bidang tersebut di atas dialokasikan pada K/L antara lain, Kementerian PUPR, Kemendikbud Ristek, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian. Total pagu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik pada keempat K/L tersebut sebesar Rp97.518,2 miliar atau 24,3% dari total anggaran Rp401.760,1 miliar yang dialokasikan untuk 4 K/L terkait.

Dari sisi porsi anggaran, Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi terbesar dalam mendukung DAK Fisik, yaitu sebesar Rp69.612,6 miliar atau 38,3% dari total anggaran K/L tersebut. Alokasi ini terutama digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya dukungan untuk infrastruktur Ibukota Negara (IKN). Sementara itu, Kemendikbudristek memiliki anggaran terbesar kedua dalam mendukung DAK Fisik, yakni sebesar Rp24.739,6

miliar, yang mencakup 23,6% dari total pagu Kemendikbudristek. Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik, yaitu Rp144,1 miliar, atau 0,1% dari total anggaran Kemenkes sebesar Rp99.866,9 miliar. Pagu tersebut digunakan untuk kegiatan perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran Kemenkes difokuskan pada program non-fisik seperti layanan kesehatan dan pengadaan alat medis. Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) juga memiliki alokasi untuk DAK Fisik sebesar Rp3.022,0 miliar, yang mencakup 19,4% dari total anggaran Kementan sebesar Rp15.615,6 miliar. Anggaran ini kemungkinan besar digunakan untuk mendukung infrastruktur pertanian dan irigasi.

Berdasarkan provinsi, alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik secara nominal terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp26.680,7 miliar. Besarnya alokasi di Jakarta dikarenakan terdapat program nasional yang dibayarkan secara terpusat dari Jakarta, namun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Siswa SD/Paket A mencapai Rp4,2 Triliun dengan jumlah penerima 10,36 juta siswa, alokasi sebesar Rp3,31 triliun untuk Siswa SMK, sebesar Rp3,23 Triliun dengan jumlah penerima 1,936 juta Siswa SMA/Paket C, dan sebesar Rp2,73 Triliun untuk 4,36 juta siswa SMP/

Tabel 3. 1. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar (miliar rupiah)

KODE BA	NAMA K/L	PAGU YANG MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL K/L	PORSI PAGU (%)	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
018	Kementan	3.022,0	15.615,6	19,4%	289	56
023	Kemendikbudristek	24.739,6	104.655,2	23,6%	105	40
024	Kemenkes	144,1	99.866,9	0,1%	44	39
033	Kemen PUPR	69.612,6	181.622,4	38,3%	333	102
TOTAL		97.518,2	401.760,1	24,3%	771	237

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Paket B. Selain itu, pagu sebesar Rp2,01 Triliun ditargetkan kepada 75.020 kepada Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, Rp1,79 Triliun untuk 68.427 Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi, dan Rp1,61 Triliun untuk 51.428 Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi.

Berdasarkan bidang, secara porsi sebagian besar anggaran belanja K/L yang mendukung

DAK Fisik terkonsentrasi pada Bidang Jalan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp56.941,1 miliar dan realisasi sebesar Rp55.853,5 miliar atau 98,1%. Tingginya realisasi anggaran ini mencerminkan optimalisasi penggunaan dana dalam pembangunan infrastruktur jalan. Bidang Pendidikan menjadi sektor kedua dengan alokasi yang cukup besar, yaitu Rp18.833,0 miliar dengan realisasi mencapai

Tabel 3. 2. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi (miliar rupiah)

KD LOKASI	PROVINSI	PAGU YANG MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL K/L	PORSI PAGU (%)	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
01	DKI Jakarta	26.680,7	175.919,8	15,2%	39	122
02	Jawa Barat	3.808,5	18.375,5	20,7%	48	97
03	Jawa Tengah	5.631,8	20.067,5	28,1%	30	83
04	DI Yogyakarta	1.407,1	8.185,6	17,2%	18	70
05	Jawa Timur	3.234,6	14.601,6	22,2%	31	80
06	Aceh	1.266,4	7.308,8	17,3%	22	70
07	Sumatera Utara	2.181,0	8.266,5	26,4%	24	77
08	Sumatera Barat	1.444,3	5.084,3	28,4%	20	68
09	Riau	942,9	3.502,6	30,9%	20	63
10	Jambi	2.029,7	4.667,5	43,5%	21	70
11	Sumatera Selatan	2.751,0	9.448,7	29,1%	24	76
12	Lampung	523,5	3.347,9	15,6%	18	63
13	Kalimantan Barat	1.663,0	4.502,6	36,9%	21	74
14	Kalimantan Tengah	738,2	2.257,9	32,7%	20	61
15	Kalimantan Selatan	642,1	3.014,0	21,3%	20	68
16	Kalimantan Timur	23.121,2	46.389,4	49,8%	24	67
17	Sulawesi Utara	649,5	4.171,9	15,6%	21	74
18	Sulawesi Tengah	1.572,2	4.547,6	34,6%	20	67
19	Sulawesi Selatan	2.156,7	9.614,7	22,4%	27	78
20	Sulawesi Tenggara	747,3	3.139,6	23,8%	19	63
21	Maluku	1.064,8	3.392,3	31,4%	21	69
22	Bali	472,1	5.696,4	8,3%	23	64
23	Nusa Tenggara Barat	696,3	3.349,7	20,8%	21	76
24	Nusa Tenggara Timur	1.554,6	5.946,4	26,1%	24	72
25	Papua	1.784,5	4.706,3	37,9%	29	67
26	Bengkulu	842,8	2.179,0	38,7%	18	59
27	Maluku Utara	637,7	1.602,6	39,8%	19	63
28	Banten	3.081,0	5.695,4	53,4%	20	64
29	Kepulauan Bangka Belitung	243,5	998,2	24,4%	18	61
30	Gorontalo	856,5	3.694,6	23,2%	19	70
31	Kepulauan Riau	631,5	1.928,8	32,7%	15	54
32	Papua Barat	924,4	2.507,3	36,9%	18	57
33	Sulawesi Barat	741,9	2.151,5	34,5%	16	55
34	Kalimantan Utara	586,0	1.140,2	51,4%	16	50
35	Papua Selatan	2,0	248,0	0,8%	2	21
36	Papua Tengah	3,7	10,4	35,8%	2	24
37	Papua Pegunungan	1,8	11,4	15,7%	2	9
38	Papua Barat Daya	201,2	221,1	91,0%	3	24
TOTAL		97.518,2	401.515,7	24,3%	771	237

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 3. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang (miliar rupiah)

No	BIDANG DAK	SUB BIDANG DAK FISIK	NAMA KL	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
1	Air Minum	Air Minum	Kemen PUPR	7.417,5	7.114,0	95,9%	169	32
2	Jalan	Jalan	Kemen PUPR	56.941,1	55.853,5	98,1%	158	58
3	Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kemenkes	75,2	47,1	62,7%	39	14
		Penguatan Sistem Kesehatan		68,8	53,9	78,3%	44	25
4	Pendidikan	PAUD	Kemendik budristek	1.833,0	1.763,8	96,2%	36	9
		SD		6.926,8	6.836,9	98,7%	2	9
		SD/SMP/SMA/S MK		4.483,6	4.215,4	94,0%	100	8
		SMA		3.234,9	3.234,9	100,0%	1	1
		SMA/SMK		2.101,8	2.050,6	97,6%	2	9
		SMK		3.434,4	3.432,2	99,9%	2	3
		SMP		2.726,1	2.726,0	100,0%	1	1
		(Belum tertagging DJA)	Kemen PUPR	1.031,7	1.020,9	99,0%	25	1
5	Pertanian	Pertanian – Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	Kementan	3.022,0	2.863,6	94,8%	289	56
6	Sanitasi	Sanitasi	Kemen PUPR	4.222,3	2.733,9	64,7%	65	11
TOTAL				97.518,2	93.945,8	96,3%	771	237

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Rp17.636,8 miliar atau 93,6%. Dana ini terutama digunakan untuk mendukung berbagai jenjang pendidikan, seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, dengan tingkat realisasi yang relatif tinggi, bahkan mencapai 100% untuk beberapa sub-bidang seperti SMP dan SMA.

Di sisi lain, Bidang Kesehatan dan KB mendapatkan alokasi Rp143,3 miliar, dengan realisasi sebesar Rp100,4 miliar atau 70%. Anggaran ini digunakan untuk penguatan sistem kesehatan serta penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting. Bidang Air Minum juga mendapatkan porsi yang signifikan dengan pagu sebesar Rp7.417,5 miliar dan realisasi Rp7.114,0 miliar atau 95,9%. Hal ini menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung akses masyarakat terhadap air bersih.

Untuk Bidang Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp3.022,0 miliar dengan tingkat realisasi Rp2.863,6 miliar atau 94,8%, digunakan untuk program penguatan kawasan sentra produksi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Bidang Sanitasi mendapatkan pagu sebesar Rp4.222,3 miliar, dengan realisasi Rp2.733,9 miliar atau 64,7%. Secara keseluruhan, total anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik mencapai Rp97.518,2 miliar, dengan realisasi sebesar Rp93.945,8 miliar atau 96,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terserap dengan baik di berbagai sektor.

Tabel 3. 4. Pagu Realisasi K/L Bidang Jalan Tahun 2024 (miliar rupiah)

No.	NAMA RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	%REAL	VOL. RO	REAL. RO
1	Dukungan Infrastruktur IKN	Km	18.174,6	18.174,4	100,0%	78,2	78,2
2	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Km	7.746,3	7.402,0	95,6%	28,2	28,2
3	Jalan Strategis (ProPN)	Km	7.464,8	7.293,9	97,7%	1.414,6	541.374,2
4	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	4.158,8	4.152,6	99,8%	790,5	32.816,0
5	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	1.983,8	1.980,4	99,8%	22.027,8	22.016,0
6	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Km	1.502,0	1.499,4	99,8%	23.483,6	2.702.017,5
7	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	Km	1.425,6	1.354,5	95,0%	100,5	127,7
8	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	m	1.034,5	1.030,4	99,6%	4.413,2	4.370,8
9	Dukungan Infrastruktur IKN	m	1.010,6	1.010,6	100,0%	468,8	468,8
10	Preservasi Jembatan	m	943,6	942,8	99,9%	82.973,3	3.234.990,5
11	Lainnya		11.496,4	11.012,4	95,8%		
TOTAL			56.941,1	55.853,5	98,1		

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

III.3. PAGU DAN REALISASI BELANJA K/L PER BIDANG

III.3.A. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki alokasi belanja paling besar, yaitu sebesar Rp56.941,1 miliar, dengan realisasi mencapai Rp55.853,5 miliar atau 98,1%. Tingginya tingkat realisasi

Tabel 3. 5. Alokasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB (miliar rupiah)

NO.	NAMA RO	SATUAN	PAGU	REALI SASI	% REAL	VOL RO	REAL RO
1	Provinsi/Kab/kota yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita (LP-4)	Daerah (Prov/Kab /Kota)	18,8	4,2	22,2%	395,0	380,0
2	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status	Orang	18,5	15,9	86,1%	1.790,0	1.729,0
3	Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan fasilitas/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP-7)	Daerah (Prov/Kab /Kota)	9,4	4,3	46,1%	135,0	130,0
4	Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23)	Orang	8,8	6,8	76,9%	970,0	904,0
5	Tenaga Kesehatan di FKTP yang dilatih TOT Penanggulangan TBC bagi petugas kesehatan (SDM-23)	Orang	8,0	5,3	66,7%	1.374,0	1.301,0
6	Tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita (LP-4)	Orang	7,7	6,7	86,5%	13.041,0	13.041,0
7	Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT Pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23)	Orang	7,7	6,2	80,4%	1.057,0	1.050,0
8	Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Revitalisasi Posyandu (LP-1)	Daerah (Prov/Kab /Kota)	7,1	6,2	86,2%	482,0	470,0
9	Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans gizi dan KIA (LP-7)	Orang	5,6	3,7	66,0%	425,0	400,0
10	Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Germas di Berbagai Tatanan (LP-3)	Daerah (Prov/Kab /Kota)	4,5	4,1	90,0%	453,0	537,0
11	Lainnya	—	47,9	37,7	78,8%	—	—
TOTAL			144,1	101,0	70,1%		

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran untuk pembangunan bidang jalan telah terserap dengan baik hingga saat ini.

Berdasarkan rincian output, Dukungan Infrastruktur IKN merupakan rincian output dengan pagu tertinggi sebesar Rp18.174,6 miliar dengan tingkat realisasi mendekati 100%. Pagu tertinggi selanjutnya adalah pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan strategis. Beberapa program memiliki tingkat realisasi yang hampir mencapai 100% yang menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan.

III.3.B. Bidang Kesehatan dan KB

Alokasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB mencapai Rp144,1 miliar, dengan realisasi sebesar Rp101,0 miliar, atau 70,1%. Meskipun realisasi anggaran ini sudah cukup tinggi, terdapat beberapa rincian output yang masih menunjukkan tingkat penyerapan yang beragam. Beberapa RO dengan realisasi yang tinggi di atas 90,0%, menunjukkan efektivitas tinggi dalam pelaksanaannya.

Namun, terdapat RO dengan realisasi terendah sebesar 22,2%, yang memerlukan perhatian lebih dalam percepatan penyerapan anggaran.

III.3.C. Bidang Pendidikan

Kinerja realisasi anggaran Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan total alokasi anggaran sebesar Rp25.771,3 miliar dan realisasi sebesar Rp25.279,8 miliar, atau 98,1% dari total pagu. Tingginya realisasi ini mencerminkan efektivitas dalam penyaluran dana untuk mendukung berbagai program pendidikan.

Beberapa Rincian Output (RO) utama dalam Bidang Pendidikan memiliki tingkat realisasi yang hampir sempurna, menunjukkan bahwa program-program terkait telah berjalan dengan baik. Namun, penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Tabel 3. 6. Pagu Realisasi K/L Bidang Pendidikan (miliar rupiah)

NO.	NAMA RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REAL	VOL. RO	REAL. RO
1	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	4.223,4	4.222,1	100,0%	10.360.614	10.360.614
2	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	3.308,5	3.308,4	100,0%	1.928.271	2.125.512
3	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	3.234,0	3.234,0	100,0%	1.935.774	2.043.463
4	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	2.726,1	2.726,0	100,0%	4.369.968	4.369.968
5	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	2.440,1	2.273,6	93,2%	128.104	145.463
6	Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	2.018,0	1.987,4	98,5%	75.020	78.499
7	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1.797,3	1.763,5	98,1%	68.427	74.231
8	Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1.613,7	1.560,5	96,7%	51.428	52.011
9	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	unit	1.031,7	1.020,9	99,0%	448	436
10	Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi	Orang	845,4	842,1	99,6%	625.343	640.953
11	Lainnya		2.533,2	2.341,2	92,4%		
TOTAL			25.771,3	25.279,8	98,1%		

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 7. Pagu Realisasi K/L Bidang Pertanian (miliar rupiah)

NO.	NAMA RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REAL	VOL. RO	REAL. RO
1	Area penyaluran benih jagung	Hektar	777,1	767,6	98,8%	896.150	893.950
2	Area penyaluran benih padi	Hektar	704,4	695,6	98,8%	1.988.718	1.987.624
3	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	unit	602,0	585,4	97,2%	1.407	1.407
4	Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi	Kelompok Masyarakat	150,0	89,7	59,8%	21	19
5	Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi	unit	127,4	127,3	99,9%	1.663	1.663
6	Layanan Kesehatan Hewan	layanan	113,1	113,1	100,0%	4.219.557	4.496.784
7	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Hektar	96,9	95,9	99,0%	50.000	50.004
8	Prasarana Pascapanen Hortikultura	unit	44,4	43,6	98,2%	185	185
9	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	unit	34,2	21,4	62,6%	50	37
10	Sarana Pascapanen Hortikultura	unit	31,4	21,1	67,3%	635	734
11	Lainnya		341,1	302,9	88,8%		
TOTAL			3.022,0	2.863,6	94,8%		

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

III.3.D. Bidang Pertanian

Kinerja realisasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan total alokasi anggaran sebesar Rp3.022,0 miliar dan realisasi sebesar Rp2.863,6 miliar, atau 94,8% dari total pagu. Tingginya realisasi ini mencerminkan efektivitas dalam penyaluran dana untuk mendukung sektor pertanian. Beberapa rincian output menunjukkan penyerapan yang optimal bahkan mendekati 100% antara lain Area penyaluran benih jagung, Area penyaluran benih padi, Jaringan Irigasi Tersier Yang Direhabilitasi, Layanan Kesehatan Hewan, dan rincian output lainnya.

Di sisi lain, masih terdapat rincian output tingkat penyerapan di bawah 70%. Dengan demikian, tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa program pertanian ini benar-benar memberikan dampak nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani.

III.3.E. Bidang Sanitasi

Total alokasi anggaran untuk Bidang Sanitasi dalam DAK Fisik tahun ini mencapai Rp4.222,3 miliar, dengan realisasi sebesar Rp2.733,9 miliar, atau 64,7% dari total pagu. Meskipun angka realisasi ini menunjukkan capaian yang cukup baik, masih terdapat ruang untuk optimalisasi dalam eksekusi program guna mencapai target secara maksimal. Dari sisi

volume output (RO), terdapat perbedaan antara target dan realisasi yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan program sanitasi di berbagai daerah. Namun, pencapaian 64,7% ini dapat menjadi indikator bahwa proyek-proyek sanitasi telah berjalan dengan progres yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, realisasi yang telah mencapai lebih dari setengah alokasi anggaran menunjukkan bahwa program sanitasi berjalan cukup baik tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai penyerapan anggaran yang optimal serta memastikan bahwa hasilnya memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

III.3.F. Bidang Air Minum

Berdasarkan tabel di atas, total alokasi anggaran untuk Bidang Air Minum dalam DAK Fisik tahun ini mencapai Rp7.417,5 miliar, dengan realisasi sebesar Rp7.114,0 miliar, atau 95,9% dari total pagu yang dialokasikan. Tingkat realisasi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyerapan anggaran untuk proyek-proyek penyediaan akses air minum. Capaian realisasi rincian output menunjukkan bahwa beberapa realisasi hampir sempurna, dengan capaian di atas 99%, mencerminkan efektivitas eksekusi program dalam distribusi air minum. Secara keseluruhan, pencapaian ini menunjukkan bahwa program DAK Fisik Bidang Air Minum telah berjalan dengan

Tabel 3. 8. Pagu Realisasi K/L Bidang Sanitasi (miliar rupiah)

NO.	NAMA RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REAL	VOL. RO	REAL. RO
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KK	1.697,4	1.235,0	72,8%	2.090	21.080
2	Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN	KK	1.053,5	836,3	79,4%	20.000	11.000
3	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	KK	662,6	220,0	33,2%	444.401	301.301
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	252,6	228,8	90,6%	512	497
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	KK	219,0	0,0	0,0%	22.458	-
6	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	KK	203,8	151,1	74,2%	15.076	15.028
7	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	KK	55,4	44,2	79,8%	13.431	13.395
8	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	KK	46,9	0,0	0,0%	16.800	-
9	Pembinaan Teknis Bidang Sanitasi	Orang	12,1	11,3	92,9%	400	581
10	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal	KK	11,3	0,0	0,0%	1	-
11	Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Sanitasi	layanan	7,7	7,1	92,6%	37	37
TOTAL			4.222,3	2.733,9	64,7%		

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

sangat baik, dengan hanya sedikit penyisihan anggaran yang belum terealisasi. Dengan realisasi 95,9%, Bidang Air Minum termasuk dalam kategori dengan penyerapan anggaran yang optimal dibandingkan sektor lainnya.

permasalahan atau tantangan atas belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Permasalahan atau tantangan tersebut meliputi: (1) tantangan penganggaran, (2) tantangan pengadaan barang dan jasa (PBJ), (3) tantangan eksekusi

Tabel 3. 9. Pagu Realisasi K/L Bidang Air Minum (miliar rupiah)

NO.	NAMA RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REAL	VOL. RO	REAL. RO
1	Pembangunan SPAM Regional	Liter/detik	1.551,7	1.430,8	92,2%	1801,0001	1.301
2	Pembangunan SPAM IKN	Liter/detik	1.058,0	1.044,3	98,7%	301	1
3	Perluasan SPAM Regional	unit	987,4	980,1	99,3%	17163	42.889
4	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	538,1	535,4	99,5%	187041	169.280
5	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter/detik	481,9	458,8	95,2%	508,01	444
6	Prasarana air baku IKN yang dibangun	unit	471,3	423,0	89,8%	14	-
7	Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan	Km	429,1	407,7	95,0%	82,5602	64
8	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR	346,5	332,3	95,9%	16710,0001	16.200
9	Prasarana bidang air tanah dan air baku yang dibangun	unit	319,6	317,2	99,2%	226	223
10	Prasarana air baku yang direhabilitasi	unit	171,4	171,4	100,0%	12	10
11	Lainnya		1.062,5	1.013,0	95,3%		
TOTAL			7.417,5	7.114,0	95,9%		

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

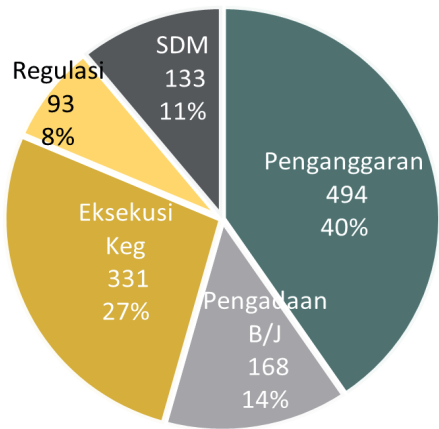
III.4. KENDALA DAN TANTANGAN SECARA NASIONAL

Secara nasional, terdapat 5 kluster

kegiatan, (4) tantangan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan (5) tantangan SDM. Berdasarkan hasil identifikasi Kanwil DJPb

yang telah dikompilasi dalam aplikasi SINTESA, diperoleh hasil sebagaimana grafik berikut.

Grafik 3. 1. Permasalahan/Tantangan Atas Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik Tahun 2024



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tantangan terbesar dalam penganggaran berasal dari perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada tingginya deviasi Halaman III DIPA, yang mencakup 41% dari total tantangan dalam kluster ini. Halaman III DIPA berisi rincian anggaran yang masih memerlukan justifikasi lebih lanjut atau revisi sehingga dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program. Keterlambatan dalam proses revisi dan persetujuan dapat berdampak pada realisasi anggaran yang tidak optimal. Secara

Tabel 3. 10. Kluster Tantangan Penganggaran

Kluster	Sub Kluster	%
Tantangan Penganggaran	Halaman III DIPA	41%
	Revisi Anggaran	24%
	Blokir Anggaran	17%
	Automatic Adjustment	15%
	Sumber Dana SBSN	2%
	Lainnya	0%
Total		100%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

keseluruhan, tantangan penganggaran ini berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya percepatan dalam penyelesaian revisi DIPA, mitigasi terhadap blokir anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan dana SBSN diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran

Tabel 3. 11. Kluster Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa

Kluster	Sub Kluster	%
Tantangan Pengadaan Barang Dan Jasa	Keterbatasan Penyedia	33%
	Proses Lelang	32%
	E-catalog	21%
	Kegagalan Lelang	6%
	Lelang Dini	5%
	TKDN	2%
	Lainnya	0%
Total		100%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tantangan utama dalam pengadaan barang dan jasa berasal dari keterbatasan penyedia. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat daerah atau sektor tertentu yang memiliki jumlah penyedia barang/jasa yang terbatas, sehingga menghambat proses pengadaan yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Faktor ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan serta kurangnya persaingan yang sehat dalam proses lelang. Tantangan berikutnya adalah proses lelang yang menjadi salah satu kontributor tingginya tantangan dalam pengadaan barang dan jasa. Tantangan lainnya adalah pengadaan melalui e-katalog yang biasanya disebabkan oleh fluktuasi harga, ketersediaan barang yang terbatas, serta perbedaan harga yang ditetapkan dalam e-katalog dengan Satuan Harga Standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau instansi tertentu. Hal ini dapat menjadi menghambat satuan kerja dalam menentukan harga yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Tabel 3. 12. Kluster Tantangan Eksekusi Kegiatan

Kluster	Sub Kluster	%
Tantangan Eksekusi Kegiatan	Kesiapan Pedum, Juknis, Dokumen Pelaksanaan Lain	44%
	Faktor Luar (Cuaca, Lokasi, Keamanan, Dll)	35%
	Kekurangan Prasyarat (Ijin, AMDAL, Dokumen Lain, Prasyarat Lain)	13%
	Prasyarat Ketersediaan Lahan	5%
	Proses Penetapan Penerima Bantuan	2%
	Kenaikan harga bahan	1%
	Proses Pembagian Bantuan	0%
	Lainnya	0%
	Total	100%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tantangan utama dalam eksekusi kegiatan berasal dari kesiapan pedoman, petunjuk teknis (juknis), dan dokumen pelaksanaan lain dari KL teknis. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kegiatan mengalami kendala akibat belum tersedianya atau belum finalnya dokumen-dokumen panduan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program. Ketidaksiapan ini dapat menghambat proses eksekusi, menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan, serta berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam implementasi di lapangan.

Tabel 3. 13. Klaster Tantangan Regulasi Pelaksanaan Anggaran

Klaster	Sub Klaster	%
Tantangan Regulasi Dalam Pelaksanaan Anggaran	Regulasi K/L	49%
	Regulasi Kementerian Keuangan	26%
	Regulasi Pemda	25%
	Lainnya	0%
Total		100%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tantangan regulasi di tingkat K/L mendominasi permasalahan yang dihadapi dalam tantangan regulasi pelaksanaan anggaran. Tantangan regulasi berikutnya adalah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi di tingkat daerah juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan anggaran. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan evaluasi serta penyelarasan regulasi antara berbagaitingkatpemerintahanagar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Tantangan terbesar dalam aspek SDM adalah kurangnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Kekurangan SDM dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta memperlambat proses operasional. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman SDM terhadap aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tenaga kerja tersedia, masih ada kendala dalam penggunaan sistem atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses kerja. Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan dalam

Tabel 3. 14. Klaster Tantangan SDM

Klaster	Sub Klaster	%
Tantangan SDM	Kekurangan SDM	65%
	Pergantian pejabat perbendaharaan	18%
	Pemahaman terhadap aplikasi	17%
	Lainnya	0%
Total		100%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

SDM, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi peningkatan jumlah tenaga kerja melalui rekrutmen atau redistribusi SDM, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan terkait penggunaan aplikasi yang relevan dalam pekerjaan.

III.5. UPAYA SINKRONISASI DI DAERAH OLEH SATKER DAN PEMDA

Sinkronisasi antara belanja K/L DAK Fisik dilakukan di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Salah satu langkah sinkronisasi ini diterapkan di Provinsi Aceh melalui rapat koordinasi yang mempertemukan Satker dan Pemda guna menyamakan pemahaman dalam pembangunan daerah. Namun, hingga kini Pemda belum membentuk forum khusus yang membahas sinkronisasi belanja K/L dengan DAK Fisik. Proses koordinasi yang ada masih berlangsung secara parsial dan lebih banyak terjadi pada tahap perencanaan, dimana inisiatif utama datang dari Satker K/L.

Sebagai contoh dalam sektor infrastruktur jalan dan pertanian, koordinasi dengan Pemda biasanya terkait dengan perencanaan desain proyek seperti pembangunan jalan daerah dan sistem irigasi. Pemda mengajukan desain kepada Satker Balai Penyelenggara Jalan Provinsi agar proyek dapat selaras dengan kebijakan daerah. Di Provinsi Aceh, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I berfokus pada pelaksanaan konstruksi fisik, sementara proses pengawasan berada di bawah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Upaya sinkronisasi belanja K/L dan DAK Fisik

juga dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Pada semester pertama tahun 2024, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi terkait penganggaran dan belanja Satker lingkup Provinsi Jawa Barat. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta pertemuan berupa *One on One Meeting* dengan Satker yang memiliki anggaran terbesar serta program prioritas.

Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan Implementasi Opsen Pajak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan belanja APBN dan APBD. Dalam kesempatan ini, penghargaan diberikan kepada pemda yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pengelolaan DAK Fisik guna mendukung prioritas nasional, mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kanwil DJPb Jawa Barat juga mengadakan monitoring dan evaluasi bersama untuk menilai efektivitas belanja daerah dan penyaluran TKD bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Kegiatan ini dilaksanakan di BPKAD Provinsi Jawa Barat dengan fokus pada mekanisme perencanaan, pengadaan barang dan jasa, sistem informasi serta teknologi yang digunakan, serta tantangan

dalam implementasi belanja daerah dan TKD. Pelaksanaan monev bersama antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dengan DJPK dilakukan di beberapa kabupaten/kota terpilih di Jawa Barat yang memiliki tingkat realisasi belanja daerah dan TKD terendah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta tantangan dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam implementasi DAK Fisik.

III.5.A. Regional Sumatera

III.5.B.2. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik di Sumatera sebesar Rp12.856,73 miliar atau 27,8% dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Kementerian PUPR memiliki porsi terbesar di antara pengampu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik. Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa distribusi alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.751,03 miliar atau 29,1% dari total pagu. Porsi pagu yang mendukung DAK Fisik terbesar ada pada Provinsi Jambi yaitu sebesar 43,5% atau Rp2.029,76 miliar yang melampaui porsi pada Provinsi Sumatera Selatan. Porsi terendah ada pada Provinsi Lampung dengan nilai Rp523,45 miliar atau 15,6%. Sedangkan nilai terkecil ada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp243,46 miliar. Berdasarkan bidang, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Jalan yakni sebesar Rp10.017,09 miliar atau 77,91% dari total

Tabel 3. 15. Alokasi Pagu Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Provinsi Regional Sumatera (dalam miliar)

KD. LOKASI	PROVINSI	PAGU YANG MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL K/L	PORSI PAGU (%)	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
6	ACEH	1.266.429.247.000	7.308.813.621.000	17,30%	22	70
7	SUMATERA UTARA	2.180.964.589.000	8.266.492.152.000	26,40%	24	77
8	SUMATERA BARAT	1.444.344.388.000	5.084.333.510.000	28,40%	20	68
9	RIAU	942.938.348.000	3.051.985.286.000	30,90%	20	63
10	JAMBI	2.029.735.127.000	4.667.503.836.000	43,50%	21	70
11	SUMATERA SELATAN	2.751.028.433.000	9.448.710.977.000	29,10%	24	76
12	LAMPUNG	523.450.182.000	3.347.926.920.000	15,60%	18	63
26	BENGKULU	842.844.243.000	2.179.048.834.000	38,70%	18	59
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	243.462.905.000	998.162.191.000	24,40%	18	61
32	KEPULAUAN RIAU	631.530.393.000	1.928.752.110.000	32,70%	15	54
Grand Total		12.856.727.855.000	46.281.729.437.000	27,80%	200	112

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 16. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Sumatera (dalam miliar)

BIDANG DAK	SUB BIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU (Miliar Rp)	REALISASI (Miliar Rp)	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
Air Minum	Air Minum	Kemen PUPR	1.055,8	1.026,8	97,2%	45	16
Jalan	Jalan	Kemen PUPR	10.017,1	9.900,6	98,8%	37	31
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kemenkes	9,7	9,0	92,0%	10	7
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kemenkes	18,0	15,3	85,2%	12	20
	Total		27,7	24,3	87,6%	22	27
Pendidikan	PAUD	Kemendikbudristek	2,5	2,3	91,4%	10	1
	SD/SMP/SMA/SMK	Kemendikbudristek	883,2	804,1	91,0%	30	6
	–	Kemen PUPR	354,0	352,9	99,7%	30	6
	Total		1.239,7	1.159,3	93,5%	70	13
Pertanian	Pertanian – Tematik Kawasan Sentra Produksi Pangan	Kementan	118,8	109,9	92,5%	76	25
Sanitasi	Sanitasi	Kemen PUPR	397,6	257,0	64,6%	17	5
TOTAL			12.856,7	12.477,9	97,1%	200	112

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

anggaran belanja K/L pendukung DAK Fisik.

III.5.B.3. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Air Minum

Kendala atau tantangan pencapaian RO pada bidang air minum ini yaitu:

1. Tantangan penganggaran: (1) pembukaan blokir *automatic adjustment* baru dilakukan pada pertengahan tahun; (2) terdapat blokir sebagai akibat belum terdapat SK penetapan lokasi sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
2. Tantangan Pengadaan Barang/Jasa: (1) Sebelum melaksanakan tender harus terlebih dahulu melaksanakan reviu desain namun mengalami keterlambatan sehingga berdampak keterlambatan pelaksanaan tender. Selain itu di Humbang Hasundutan juga mengalami keterlambatan dalam lelang karena menunggu kelengkapan dokumen lelang; (2) Terjadi keterlambatan lelang karena curah hujan yang tinggi sehingga lokasi konstruksi terendam

dan tidak dimungkinkan dilakukan pekerjaan konstruksi. Kontrak Pekerjaan Peningkatan Intake dan Pipa Transmisi Air baku Simpang Longpon Kab. Tebo baru difiksasi pada 17 April 2024; (3) terdapat gangguan pada server PBJ yang mengakibatkan kendala proses lelang.

3. Tantangan eksekusi kegiatan: (1) SK Penetapan Lokasi Kab/Kota penerima Program Pamsimas baru terbit pada bulan Juli 2024; (2) Terdapat 2 kontrak pada RO Konsultan supervisi dan pekerjaan konstruksi untuk Peningkatan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Simpang logpon di Kab. Tebo yang sudah dimulai di bulan Februari akan tetapi dikarenakan curah hujan yang tinggi, lokasi konstruksi terendam dan tidak dimungkinkan dilakukan pekerjaan konstruksi. Kontrak untuk konstruksinya baru dilaksanakan pada bulan April dan s.d. Juni baru terdapat realisasi uang muka; Kendala teknis di lapangan lainnya berupa pelaksanaan pekerjaan yang menyesuaikan muka air sungai Batanghari; (3) Kegiatan dilaksanakan secara swakelola,

berupa pembangunan Pamsimas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Akan tetapi pada persiapannya memerlukan proses yang panjang seperti koordinasi dengan pusat, penentuan dan survei lokasi, kesiapan pekerja, pembuatan RAB, dan pembuatan SPK sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan di bulan Juni. Realisasi diperkirakan akan rutin setiap bulan sesuai progress pekerjaan di lapangan.

4. Tantangan regulasi pelaksanaan anggaran: Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan setelah SK Menteri dan SK KPA terbit terkait penetapan lokasi.

B. Bidang Jalan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang jalan meliputi:

1. Tantangan penganggaran: (1) terjadi deviasi penganggaran karena masih terdapat kontrak tambahan yang tidak diakomodasi pada perencanaan awal; (2) perlu pelaksanaan revisi ke Kanwil DJPb terkait penambahan target RO serta penambahan pagu atas kondisi putus kontrak di tahun sebelumnya; (3) terdapat belanja pemeliharaan yang telah diserahkan ke pemerintah daerah; (4) banyaknya persyaratan administrasi yang perlu diperhatikan.
2. Tantangan pengadaan barang dan jasa: (1) sulit mendapatkan pekerja karena upah yang ditawarkan sebesar Rp100.000 lebih kecil dari upah pekerjaan di lahan sawit Rp130.000; (2) atas penambahan pagu Rp15 miliar baru dilakukan lelang pada e-katalog pada bulan November sehingga pekerjaan dimungkinkan tidak dapat terselesaikan pada akhir tahun; (3) lelang baru dapat dilaksanakan di pertengahan tahun karena permasalahan lahan; (4) kontrak pengadaan bahan/material sebagian besar baru dilaksanakan pada triwulan III sehingga beberapa pekerjaan diperkirakan menumpuk di triwulan IV.
3. Tantangan eksekusi kegiatan: (1) Kesulitan

dalam pembebasan lahan karena bukan pemda yang menyediakan lahan. Terdapat 4 bidang yang belum selesai yaitu 3 bidang swasta dan 1 bidang Kantor Imigrasi; (2) pada kontrak Pekerjaan Marka Jalan Thermoplastik Preservasi Jalan Bts. Prov Sumsel - Tempino - Pal Sepuluh - Lingkar Timur - Sp. Sijenjang - Pel. Talang Duku (SBSN) bersinggungan dengan pekerjaan jalan bebas hambatan sehingga pekerjaan tidak dapat di akselerasi di triwulan III lalu; (3) Terdapat beberapa titik longsor yang menambah target output pekerjaan; (4) Pada proyek pembangunan jalan Simpang Niam - Lubuk Kambing terdapat titik lokasi proyek yang melalui area hutan lindung sehingga pekerjaan penggalian tidak dapat dilakukan. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya perjanjian kerjasama dengan KLHK untuk pelaksanaan pekerjaannya; (5) kendala pada proses pengadaan lahan yang memerlukan proses mediasi ke warga dan pendampingan dari BPN; (6) Pembebasan lahan dilaksanakan oleh Satker Pembebasan Jalan Tol Wilayah II Jakarta yang baru selesai di bulan April 2024 dan kegiatan pembangunan bergantung pada faktor cuaca; (7) Penyesuaian item pekerjaan kontrak sesuai kondisi di lapangan yang memerlukan adendum kontrak; (8) Pekerjaan swakelola sehingga terkendala terkait pekerja di lapangan yang mempersyaratkan harus warga lokal.

4. Tantangan regulasi dalam pelaksanaan anggaran: (1) Perlu koordinasi lanjutan dengan pemda terkait lahan dan rekayasa lalu lintas. Terkait pembebasan lahan, DJKN telah membantu melakukan mediasi ke pihak pemilik lahan yang belum bersedia melepaskan kepemilikan lahan; (2) Perubahan penentuan lokasi untuk persimpangan jalan tak sebidang dengan koordinasi dari pemda setempat (penyesuaian).

C. Bidang Kesehatan dan KB

Kendala yang dihadapi pada pencapaian

RO bidang kesehatan dan KB, yaitu:

1. Tantangan penganggaran: (1) terdapat automatic adjustment atas kebijakan pembatasan belanja perjalanan dinas; (2) pembukaan blokir baru dilakukan pada pertengahan tahun; (3) terdapat pagu yang baru dibuka blokir di bulan September; (4) terdapat pagu yang masih diblokir karena kekurangan berkas administrasi seperti penyelesaian penyusunan modul pelatihan.
2. Tantangan pengadaan barang dan jasa: (1) kegiatan berupa paket meeting fullboard/fullday dan tidak tersedia pada e-katalog karena mayoritas kegiatan berupa pelatihan dan pembinaan.
3. Tantangan eksekusi kegiatan: (1) masih terdapat anggaran yang diblokir akibat dari belum siapnya modul pembelajaran sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda dan sebagian besar dilaksanakan pada triwulan IV; (2) Kegiatan yang dilakukan pada bulan Juli dari sebelumnya yang direncanakan di Juli dan Agustus. Satker menilai pelatihan bisa efektif apabila akan memasuki musim pancaroba sehingga saat dilakukan sosialisasi lebih menarik minat masyarakat; (3) Setelah dilakukan pembukaan blokir, proses selanjutnya adalah pengajuan akreditasi pelatihan. Hal ini memakan waktu yg lama dari pusat sehingga menghambat pelaksanaan. Mitigasi dari satker sudah mengajukan H-1 bulan dari jadwal pelatihan terkait akreditasi; (4) penerbitan juknis dari eselon I baru terbit di triwulan II.
4. Tantangan SDM: (1) Penunjukan Plt sebagai KPA dan penunjukan PPK baru dilakukan di bulan Juni; (2) Kepala Dinas sejak bulan Maret kosong dan sebagai Plt nya adalah Sekretaris Dinas; (3) Pada setiap RO yang berkaitan dengan pelatihan kesulitan satker adalah keterbatasan SDM dimana peserta harus lulus kualifikasi agar dapat mengikuti pelatihan. Beberapa pelatihan memerlukan peserta yang sama sehingga tidak dapat diadakan secara bersamaan

karena padatnya kegiatan; (4) Narasumber spesialis sebagai ahli yang menjadi fasilitator banyak merasa biaya honor yang diberikan terlalu sedikit karena masih terdapat tim narasumber. Hal ini juga yang menyebabkan beberapa pelatihan tidak terlaksana karena kesulitan memperoleh narasumber. Satker berharap kantor pusat/unit eselon 1 memilih peserta pelatihan yang berkomitmen sehingga narasumber masih melaksanakan tanggung jawab setelah mengikuti pelatihan/membuat pakta integritas; (5) Keterbatasan SDM, dimana harus menyelenggarakan pelatihan dalam satu waktu menyulitkan satker sehingga dibagi waktunya sesuai prioritas. Terdapat beberapa kabupaten kota ada yang tidak mengirimkan peserta karena peserta yang memenuhi kriteria digantikan oleh orang lain.

D. Bidang Pendidikan

Kendala yang dihadapi pada pencapaian RO bidang pendidikan, yaitu:

1. Tantangan penganggaran: (1) blokir anggaran menjadi beban pada realisasi anggaran dan tidak pasti apakah dibuka blokir atau diambil eselon I pada akhir tahun; (2) kegiatan yang sudah terjadwal dan masuk dalam pengusulan Halaman III DIPA menjadi sulit direalisasikan karena harus membuat kegiatan/inovasi lain agar realisasi anggaran tidak terlalu jauh dari target nasional; (3) perubahan jadwal mobilisasi personil menyesuaikan kebutuhan lapangan sehingga diperlukan penyesuaian rencana penarikan; (4) pelaksanaan kegiatan berdasarkan juknis kantor pusat dan timeline juga diatur oleh kantor pusat; (5) adanya penambahan/perubahan kegiatan atas arahan pusat sehingga Halaman III DIPA belum disesuaikan dengan timeline pembayaran.
2. Tantangan pengadaan barang dan jasa: (1) Jumlah penyedia yang memiliki barang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan terbatas; (2) lokasi berjauhan sehingga sangat sulit untuk mengukur kualitas barang sebelum sampai

di tempat; (3) Satker kesulitan koordinasi karena PPK diberdayakan juga oleh pusat utk pengadaan barang dan jasa di skala nasional; (3) Kendala SPSE tidak update dan tidak sinkron dengan RKA sehingga tidak bisa membuat RUP yang menyebabkan pengadaan yang memerlukan RUP terkendala; (4) Ketersediaan barang berupa videotron yang perlu izin dalam pemenuhan unsur TKDN; (5) belanja modal sudah terealisasi 100% sampai bulan Juli namun sempat terkendala gangguan PDN karena LPSE Kemendikbudristek tidak bisa diakses.

3. Tantangan eksekusi kegiatan: (1) juknis kegiatan untuk beberapa kegiatan belum ada di awal tahun dan jadwal kegiatan menunggu dari pusat. Hal ini membuat penumpukan kegiatan di triwulan IV; (2) ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya harus berurutan sedangkan juknis dari pusat yang baru keluar di bulan April/ Mei sehingga menyebabkan mundurnya jadwal kegiatan dari semula yang sudah dijadwalkan; (3) adanya perubahan strategi/ bentuk kegiatan untuk beberapa kegiatan optimalisasi pelaksanaan program kerja/ kegiatan/PDM yang menyebabkan jadwal pelaksanaan mundur dari jadwal semula.
4. Tantangan regulasi dalam pelaksanaan anggaran: (1) beberapa kegiatan dijadwalkan dari pusat; (2) terdapat beberapa kegiatan sudah diblokir dan terdapat instruksi dari pusat bahwa masih menunggu juknis kegiatan yang sedang dalam proses; (3) terdapat ketentuan baru bahwa honor- honor kegiatan yang tidak melibatkan pihak ketiga tidak boleh dibayarkan dan ada kegiatan yang direncanakan dari luring menjadi daring; (4) Jadwal kegiatan yang banyak diagendakan di akhir periode tahun anggaran.
5. Tantangan SDM: (1) perlu peningkatan pemahaman terkait ilmu perbendaharaan bagi bendahara penerima, bendahara pengeluaran, dan PPSPM; (2) mutasi dan rotasi pegawai sehingga menyebabkan

pergantian pejabat perbendaharaan; (3) keterbatasan SDM sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan secara paralel. Satker memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi sebagai admin kegiatan; (4) banyaknya kegiatan yang dilaksanakan satker Balai Guru Penggerak namun jumlah SDM terbatas.

E. Bidang Pertanian

Kendala yang dihadapi pada pencapaian RO bidang pertanian, yaitu:

1. Tantangan penganggaran: (1) Perlu revisi DIPA untuk penyesuaian volume dan harga satuan serta penambahan pada pengawalan dan pendampingan sehingga kegiatan baru dimulai pada bulan Mei dan pelaksanaan kegiatan diproyeksikan akan selesai pada minggu ke 3 bulan Agustus; (2) Terdapat penambahan pagu di bulan Agustus untuk program baru optimalisasi lahan sehingga eksekusi kegiatan menunggu selesainya revisi dimaksud; (3) masih terdapat blokir sebesar Rp100 juta (50% dari pagu) sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan Fasilitasi atau Revitalisasi Bangunan Pengolahan Daging dan Hasil Ternak; (4) Proses revisi untuk blokir dari pusat yang tidak segera dilakukan sehingga menghambat pekerjaan; (5) Banyak kegiatan yang belum sesuai mata anggaran kegiatannya sehingga harus direvisi.
2. Tantangan pengadaan barang dan jasa: (1) Kegiatan dilaksanakan secara swakelola akan tetapi para pekerja (kelompok tani) masih belum dibentuk di Semester I. Pembentukan tim swakelola baru akan dilaksanakan mulai akhir Juli; (2) Pekerjaan berupa Fasilitasi atau Revitalisasi Bangunan Pengolahan Daging dan Hasil Ternak yang dikerjakan secara swakelola saat ini masih dalam proses persiapan koordinasi awal dengan calon pelaksana kegiatan (Pemda dan Peternak); (3) adanya keterlambatan proses lelang karena pemenuhan persyaratan administrasi.
3. Tantangan eksekusi kegiatan: (1) dokumen

pedum, juknis/juklak baru selesai di bulan Mei 2024; (2) perlu waktu proses identifikasi oleh petugas untuk penetapan kebun sumber benih. Petugas UPTD harus mengidentifikasi lahan yang menjadi sumber benih, yaitu untuk kebun pinang sumber lokasi Aceh Besar dan kebun kopi Bener Meriah; (3) sulitnya koordinasi antara PPK satker dan Pemda terkait untuk persiapan pembebasan lahan untuk dibangun bangsal pascapanen; (4) penyaluran ke Kab. Pesisir Barat dan Kab. Way Kanan sempat mengalami kendala karena lokasi yang cukup jauh dari ibukota provinsi.

4. Tantangan regulasi dalam pelaksanaan anggaran: (1) Proses penetapan SK THL membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan karena memerlukan rekomendasi dari dinas Kabupaten/Kota. Usulan ke Pemerintah Provinsi selanjutnya diteruskan ke Ditjen BUN untuk ditetapkan; (2) adanya program baru/regulasi baru di tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan program optimalisasi lahan, perpipaan, dan perpompaan memerlukan persiapan yang lebih lama; (3) adanya ketentuan bahwa penyesuaian rincian POK untuk THLPP, dimana SK nya ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan yang harus dilakukan di tingkat pusat.
5. Tantangan SDM: (1) Keterbatasan SDM pelaksana kegiatan serta ketergantungan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain (Dinas Kab/Kota); (2) SK Pejabat Perbendaharaan termasuk PPK tidak segera terbit, sehingga proses kontrak tidak segera dilaksanakan di semester I dan baru dapat dilaksanakan pada awal Juli 2024; (3) terbatasnya pengawas benih tanaman dan SDM untuk pelaksanaan kegiatan.

F. Sanitasi

Kendala yang dihadapi pada pencapaian RO bidang sanitasi, yaitu:

1. Tantangan penganggaran: (1) Realisasi di bawah Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA disebabkan oleh progres fisik yang mengalami keterlambatan; (2) Kegiatan

direncanakan akan ditarik ke pusat melalui revisi terpusat (direalokasi) sehingga tidak terdapat realisasi pada RO; (3) Terdapat perubahan rencana dari Kantor Pusat K/L sehingga dilakukan revisi pergeseran alokasi anggaran dan saat ini untuk kegiatan tersebut tidak terdapat pada DIPA satker. Kegiatan direncanakan akan dilakukan pada tahun 2025; (4) Blokir anggaran pekerjaan eskalasi IPAL yang saat ini menunggu verifikasi BPKP diperkirakan akan dilakukan pembukaan blokir pada Triwulan IV 2024; (5) blokir AA mempengaruhi kegiatan yang semestinya sudah dilaksanakan.

2. Tantangan pengadaan barang dan jasa: (1) Pada tahun 2023 tidak terserap 100% dikarenakan gagal tender sebanyak 1 kali sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan pekerjaan berkurang 1,5 bulan. Rencana kontrak awal bulan Agustus menjadi 24 Oktober 2023 sehingga dampaknya pada tahun 2024 terjadi kekurangan anggaran untuk memenuhi nilai kontrak; (2) terdapat gangguan pada server PBj yang mengakibatkan kendala proses lelang.
3. Tantangan eksekusi kegiatan: (1) Lahan pada 2 lokasi lahan yang salah satunya diserahkan oleh Pemda kepada BPPW Sumut pada bulan Mei 2024; (2) Curah Hujan cukup tinggi (hujan ringan 114 hari, hujan sedang 17 hari, hujan lebat dan sangat lebat 3 hari); (3) Tingkat keamanan kurang kondusif karena seluruh pekerja, alat, dan material diwajibkan melalui penghibah lahan; (4) Dikarenakan material dan alat melalui penghibah lahan maka harga ditentukan oleh mereka sehingga negosiasi harga membutuhkan waktu yang lama antara penyedia jasa dan penghibah lahan akses.
4. Tantangan regulasi dalam pelaksanaan anggaran: (1) Terdapat arahan dari Ditjen Cipta Karya (Unit Eselon I) bahwa alokasi anggaran untuk RO ini akan ditarik ke pusat (realokasi) sehingga satker tidak dapat merealisasikan belanja.
5. Tantangan SDM: (1) Pada awal tahun

satker mengakui bahwa SDM di satker belum memahami terkait pekerjaan IPL dan memerlukan ahli khusus dalam pelaksanaannya sehingga baru dilakukan 2 paket kontrak, yaitu berupa studi perencanaan dan penyusunan DED Optimalisasi IPL TPA Talang Gulo Kota Jambi.

III.5.A.3. Upaya Sinkronisasi DAK Fisik dan Belanja K/L di Sumatera

1. Sinkronisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran antara belanja K/L dengan alokasi pada belanja DAK Fisik. Beberapa upaya sinkronisasi yang dilakukan antara lain:
2. Rapat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program pembangunan yang bertujuan menyatukan persepsi terkait pembangunan daerah namun belum ada forum khusus yang membahas sinkronisasi belanja K/L terhadap DAK Fisik di daerah yang langsung diinisiasi oleh pemerintah daerah. Saat ini koordinasi dilakukan secara parsial pada tahap perencanaan dengan inisiatif datang dari satuan kerja K/L dan belum ada upaya sinkronisasi pada tahap pelaksanaan di mana tiap-tiap organisasi berjalan masing-masing;
3. Melaksanakan koordinasi pengendalian pembangunan daerah atas fasilitasi pemerintah daerah, melaksanakan kegiatan executive meeting, serta meningkatkan koordinasi antara Kanwil DJPb dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Kanwil DJPb bersama-sama dengan KPPN melakukan upaya peningkatan efektivitas sosialisasi proses bisnis penyaluran DAK Fisik serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah;
5. Satuan kerja K/L melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam penentuan lokasi yang akan dilakukan pembangunan infrastruktur dan penentuan peserta guru yang akan ditugaskan dalam proses pelaksanaan bidang pendidikan;
6. Menyebarluaskan dan mengkomunikasikan

hasil monev belanja harmonis kepada seluruh stakeholder baik satker K/L maupun pemerintah daerah pada saat pelaksanaan diseminasi KFR secara teratur setiap triwulan;

7. Melaksanakan sinkronisasi pada tahap perencanaan untuk menghindari tumpang tindih antara APBN dan APBD, melaksanakan evaluasi secara rutin untuk memantau pelaksanaan anggaran, dan satuan kerja dan pemda berkoordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb dalam mengatasi hambatan pelaksanaan anggaran dengan tujuan mencari solusi atas permasalahan yang mungkin muncul sehingga pelaksanaan anggaran tidak terhambat oleh kendala administratif atau teknis;
8. Pelaksanaan dialog pada kegalalutan Musrenbangnas antara pemerintah daerah dengan K/L terkait dengan tujuan pembagian lokasi dan fokus pembangunan antara satuan kerja K/L dengan pemerintah daerah.

III.5.B. Regional Jawa

III.5.B.1. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Di regional Jawa, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp43.843,8 miliar atau 18,0 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik di regional Jawa. Anggaran tersebut berada di 4 K/L dan dilaksanakan oleh 185 Satker dengan total jumlah output 203 RO. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp22.648,7 miliar atau mencapai 30,3 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu di regional Jawa. Alokasi anggaran tersebut Sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik 60,9 persen terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp26.680,7 miliar yang sebagian besar digunakan untuk bidang pendidikan. Meski secara nominal, alokasi pagu

Tabel 3. 17. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Jawa (miliar rupiah)

KD. LOKASI	PROVINSI	PAGU YANG MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL K/L	PORSI PAGU (%)	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
1	DKI JAKARTA	26.680.662.050.000	175.919.837.612.000	15,2%	39	92
2	JAWA BARAT	3.808.487.250.000	18.375.549.260.000	20,7%	48	90
3	JAWA TENGAH	5.631.824.806.000	20.067.513.434.000	28,1%	30	78
4	DI YOGYAKARTA	1.407.146.233.000	8.185.587.489.000	17,2%	18	65
5	JAWA TIMUR	3.234.643.417.000	14.600.986.066.000	22,2%	31	79
29	BANTEN	3.081.003.678.000	5.768.624.400.000	53,4%	20	59
Grand Total		43.843.767.434.000	242.918.098.261.000	18,0%	185	168

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

yang mendukung DAK Fisik paling besar terdapat di DKI Jakarta, namun jika dilihat berdasarkan porsi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terhadap total pagu K/L justru paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain di regional Jawa. Sedangkan Provinsi Banten memiliki porsi paling tinggi (53,4 persen) meskipun secara nominal paling kecil hanya 5.768,6 miliar.

Berdasarkan bidang, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada bidang Pendidikan yakni sebesar Rp22.888,6 miliar atau 52,2 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik yang sebagian besar digunakan untuk mendanai Sub bidang SD. Pada bidang Kesehatan dan KB, dukungan belanja K/L lebih banyak digunakan untuk sub bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting. Sedangkan pada Bidang Air Minum, Jalan, Pertanian dan Sanitasi masing-masing difokuskan hanya pada satu sub bidang. Kinerja penyerapan anggaran pada seluruh bidang di regional Jawa secara umum mencapai 95,1 persen per 31 Desember 2024 dengan tingkat penyerapan tertinggi pada bidang Pendidikan. Sedangkan bidang Kesehatan dan KB serta bidang Sanitasi menunjukkan kinerja yang kurang optimal dengan tingkat penyerapan anggaran masing-masing 58,0 persen dan 58,2 persen.

III.5.B.2. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Air Minum

Meskipun kinerja anggaran dan kinerja output menunjukkan capaian yang optimal namun dalam pelaksanaan anggaran masih ditemui permasalahan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun. Permasalahan tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: (1) adanya penambahan pagu anggaran di semester II untuk mengakomodasi Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik; (2) terdapat blokir automatic adjustment; dan (3) revisi anggaran akibat perizinan penggunaan kawasan hutan untuk pemasangan pipa JDU SPAM Regional Wosusokas belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Pengadaan barang dan jasa, yaitu terjadi lelang ulang dikarenakan tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi sehingga mengakibatkan proses tanda tangan kontrak menjadi mundur.
3. Eksekusi Kegiatan, yang terdiri dari: (1) Ada penolakan dari pemilik lahan untuk kegiatan rehabilitasi sumur; (2) kegiatan pada Satker OPSDA Serayu Opak berupa kegiatan swakelola yang memerlukan keterlibatan banyak pihak dan dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, sehingga progres capaian output tidak sesuai dengan target yang ditetapkan; dan (3)

Tabel 3. 18. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Jawa (miliar rupiah)

BIDANG DAK	SUB BIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
Air Minum	Air Minum	Kemen PUPR	2.904.846.210.000	2.872.007.667.290	98,9%	41	23
Jalan	Jalan	Kemen PUPR	12.756.021.617.000	12.164.745.439.024	95,4%	39	43
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kemenkes	47.283.903.000	23.707.409.986	50,1%	7	13
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kemenkes	15.749.714.000	12.878.928.877	81,8%	9	23
	Total		63.033.617.000	36.586.338.863	58,0%	16	36
Pendidikan	PAUD	Kemendikbudristek	1.825.859.704.000	1.757.022.067.400	96,2%	8	9
	SD	Kemendikbudristek	6.926.779.491.000	6.836.883.400.910	98,7%	2	9
	SD/SMP/SMA/SMK	Kemendikbudristek	2.399.848.958.000	2.296.227.071.377	95,7%	19	8
	SMA	Kemendikbudristek	3.234.005.885.000	3.233.989.199.350	100,0%	1	1
	SMA/SMK	Kemendikbudristek	2.101.788.499.000	2.050.562.367.838	97,6%	2	9
	SMK	Kemendikbudristek	3.434.356.094.000	3.432.227.496.504	99,9%	2	3
	SMP	Kemendikbudristek	2.726.050.674.000	2.726.031.365.425	100,0%	1	1
	-	Kemen PUPR	239.906.359.000	232.897.675.132	97,1%	5	1
	Total		22.888.595.664.000	22.565.840.643.936	98,6%	40	41
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Kementan	2.707.957.172.000	2.569.194.434.277	94,9%	69	36
Sanitasi	Sanitasi	Kemen PUPR	2.523.313.154.000	1.467.448.315.697	58,2%	18	10
Grand Total			43.843.767.434.000	41.675.822.839.087	95,1%	185	168

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

masalah teknis dalam pelaksanaan proyek seperti cuaca dan pembebasan lahan.

4. Tantangan regulasi yaitu regulasi yang terlalu kompleks atau tidak jelas dapat menghambat pelaksanaan program, terutama dalam hal perizinan dan kepatuhan terhadap standar teknis.

B. Bidang Jalan

Beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain: 1) kesulitan dalam sinkronisasi antara perencanaan keuangan dengan progres fisik di lapangan yang memiliki banyak variabel yang mempengaruhi yaitu cuaca, pembebasan lahan, dan kebijakan pusat; dan 2) terdapat pekerjaan yang mengalami gagal lelang.

Sedangkan penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta antara lain: 1) terdapat kendala

pembebasan lahan pada Peningkatan Ruas Jalan Pasar Plono-Kebun Teh Nglinggo; dan 2) terdapat kendala izin penggunaan lahan pada Pembangunan Jembatan BOB (berdasarkan Perpres 46/2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, hak pengelolaan yang diberikan kepada BOB paling banyak adalah 50 Ha).

C. Bidang Kesehatan dan KB

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Kesehatan dan KB di Regional Jawa secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penganggaran, yang disebabkan adanya anggaran yang terkena blokir penghematan di Kementerian Kesehatan sehingga tidak dapat dilaksanakan;
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: (1) pelatihan pada beberapa aktivitas peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan harus diselenggarakan di

Bapelkes Provinsi Jawa Tengah, sedangkan banyak kegiatan pelatihan yang harus dilaksanakan baik pelatihan provinsi maupun pelatihan kabupaten/kota; dan (2) pelatihan TOT untuk tenaga kesehatan tidak hanya terselenggara sebagian.

3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: (1) beberapa kegiatan pelatihan dijadwalkan dilakukan di triwulan III; (2) lokasi pelatihan yang harus dilakukan di Balai Pendidikan Kesehatan Provinsi yang juga melayani pelatihan dari anggaran APBD dan juga permintaan pelatihan dari luar provinsi menyebabkan antrian panjang karena pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan pengajar dan ketersediaan ruangan pelatihan; (3) Mayoritas kegiatan saling berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang anggarannya terblokir. Oleh karena itu perlu menunggu buka blokir dilakukan baru kegiatan ini dapat dilaksanakan.
4. Tantangan regulasi yaitu regulasi seperti Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Juknis Eselon I terlambat diterbitkan.

D. Bidang Pendidikan

Dalam pelaksanaan anggaran masih ditemui permasalahan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun. Permasalahan tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: (1) blokir anggaran automatic adjustment pada beberapa kegiatan yang pembukaan blokirnya baru dilakukan pada Triwulan III dan IV; dan (2) terdapat arahan dari kantor pusat Kemendikbudristek bahwa terdapat anggaran yang diminta untuk di hold penggunaannya dan rencananya akan dilakukan realokasi pagu ke Kantor Pusat untuk kegiatan lain.
2. Eksekusi Kegiatan yang terdiri dari: (1) jadwal pelatihan/kegiatan yang diundur menyebabkan kegiatan lain mundur, kegiatan mundur merupakan efek dari

perangkat kegiatan belum disiapkan seperti instrumen kegiatan yang disediakan oleh pusat; dan (2) kegiatan diagendakan dan dijadwalkan dari pusat.

3. Tantangan regulasi yaitu regulasi dalam pelaksanaan anggaran berupa pedoman dan petunjuk teknis yang terlambat ditetapkan.
4. Tantangan SDM yaitu: (1) kurangnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki kemampuan sebagai trainer mata pelajaran; (2) keterbatasan SDM yang menangani UKBI Adaptif Merdeka; dan (3) terjadi rangkap jabatan pada banyak posisi dan beberapa pegawai merangkap hingga 4 pekerjaan.

E. Bidang Pertanian

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pertanian di regional Jawa secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: (1) adanya blokir automatic adjustment yang baru dibuka pada pertengahan tahun anggaran; (2) keterbatasan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan teknis (penyediaan bahan-bahan dan sarana pengujian laboratorium, penyediaan sarana, ATK dan pencetakan form sertifikasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan di lapangan); (3) penambahan anggaran pada awal tahun yang menyebabkan realisasi menjadi rendah dan terlalu sering dilakukan revisi anggaran; dan (4) terdapat kegiatan Upland Project yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri yang telah dilakukan secara rutin sejak 5 tahun yang lalu yang kinerja anggarannya rendah.
2. Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari: (1) terbatasnya penyedia/supplier benih padi biofortifikasi; (2) Sempat terkendala musibah banjir; dan (3) pembahasan struktur harga barang dari penyedia yang baru upload ke e-katalog (sesuai rekomendasi BPK dan Itjen) di Semester II.
3. Eksekusi Kegiatan yang terdiri atas: (1) kendala eksekusi karena harus menyediakan tanah 100m² untuk bangunan yang

tidak boleh dialihfungsikan selama 10 tahun; (2) lambatnya proses penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sehingga pekerjaan yang sudah selesai belum dapat dilakukan pembayaran; (3) alokasi anggaran BOP pada RO Layanan Kesehatan Hewan tidak sesuai dengan jumlah vaksin yang didistribusikan sehingga pelaksanaan vaksinasi PMK yang tidak dibiayai dengan biaya operasional; (4) faktor cuaca menjadi kekhawatiran utama untuk tanaman pangan di DIY; (5) pengadaan bibit tanaman yang tidak dapat langsung diperoleh dikarenakan ketersediaan pasokan di Provinsi DIY sangat terbatas sehingga harus mencari dari luar daerah yang membutuhkan waktu lebih lama; dan (6) kegiatan Sarana Pengolahan Hortikultura baru dapat dilaksanakan setelah Sarana Pascapanen Hortikultura selesai.

4. Tantangan regulasi yaitu terlambatnya penetapan Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Tantangan SDM yaitu (1) dihapusnya jabatan PPK di setiap kabupaten dan terbatasnya jumlah SDM pengelola keuangan sehingga harus merangkap tugas dan cukup menghambat penyusunan SPJ; (2) terbatasnya pemahaman SDM terkait pengelolaan APBN karena sebagian besar fokus pada pengelolaan APBD; dan (3) pergantian pejabat perbendaharaan tanpa disertai *transfer knowledge*.

F. Bidang Sanitasi

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Sanitasi di Regional Jawa secara umum diklasifikasi sebagai berikut:

1. Penganggaran berupa blokir anggaran karena belum adanya Loan Agreement dari negara donatur.
2. Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari: (1) ketersediaan lahan dan bangunan yang belum siap dikarenakan pembangunan sanitasi menunggu pekerjaan fisik selesai; (2) kegagalan lelang dikarenakan tidak ada penawaran serta perubahan metode lelang menjadi tahun

jamak yang sedang diusulkan perubahan ke Kementerian PUPR serta bangunan yang akan direnovasi merupakan bangunan cagar budaya sehingga memerlukan izin dari pemerintah daerah; dan (3) penyedia barang dan jasa di kabupaten terbatas sehingga kesulitan mencari rekanan lokal.

3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: (1) ketersediaan lahan dan bangunan yang belum siap dikarenakan pembangunan sanitasi menunggu pekerjaan fisik selesai; (2) vendor yang terbatas pada pengadaan peralatan TPST yang membutuhkan kapasitas 100 ton/hari; 3) penyusunan review DED TPST Regional Magelang terdapat keterlambatan dan terdapat addendum kontrak sehingga penarikan uang muka 40 persen dilakukan bulan Agustus; dan (4) desain pada output Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan banyak dilakukan penyesuaian karena harus mengikuti aturan dari Monumen Cagar Budaya (MCB) Borobudur karena lokasinya masih masuk di Kawasan Pariwisata Borobudur.
4. Tantangan regulasi yaitu: (1) kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam rangka keberfungsian infrastruktur Persampahan senilai 500 juta pada RO Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi di Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan atas arahan dari kantor pusat; dan (2) kegiatan pada RO Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah dipindahkan ke satker lain

III.5.B.3. Upaya Sinkronisasi DAK Fisik dan Belanja K/L di Daerah

Provinsi Banten

Sejak awal pengajuan usulan DAK Fisik, sinkronisasi telah dilakukan agar tidak terjadi duplikasi penganggaran. Beberapa upaya sinkronisasi yang dilakukan oleh pemdada satker

di Provinsi Banten antara lain sebagai berikut:

- Saat usulan pengajuan anggaran DAK Fisik bidang pendidikan, Dinas Pendidikan melakukan upload ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atas pengisian formulir penilaian kondisi sekolah yang diperoleh dari Dinas PU setempat. Berdasarkan form tersebut, Kementerian Pendidikan melakukan evaluasi atas status kondisi sekolah untuk ditindaklanjuti perbaikannya dengan pembiayaan yang berasal dari DAK Fisik melalui aplikasi Krisna DAK. Dapodik inilah yang digunakan sebagai basis data oleh Kementerian Pendidikan untuk menentukan sekolah mana saja yang akan diperbaiki/dibangun, serta pendanaannya melalui belanja KL atau DAK Fisik, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih.
- Di bidang kesehatan, pada saat akan memberikan bantuan alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan sinkronisasi dengan DAK Fisik. Kemenkes memiliki database Puskesmas mana saja yang telah menerima bantuan dan data tersebut juga disinkronkan dengan data Puskesmas yang akan mendapatkan bantuan dari DAK Fisik.

Provinsi DKI Jakarta

Harmonisasi belanja antara K/L dan DAK Fisik di Provinsi DKI Jakarta memerlukan upaya kolaboratif dan koordinasi yang baik antara seluruh satuan kerja K/L di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui.

- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan sejak penyusunan perencanaan program/kegiatan, penyusunan alokasi anggaran, dan tahap pelaksanaan anggaran.
- Pada tahap pelaksanaan anggaran, melalui hasil monev perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, masih diperlukan adanya peningkatan kapasitas SDM, simplifikasi regulasi, pengawasan dan evaluasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Provinsi Jawa Barat

Upaya sinkronisasi yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat bersama satker dan pemda dalam upaya sinkronisasi belanja pusat dan TKD adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Menko PMK, dihadiri oleh Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat.
- FGD Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan Implementasi Opsen Pajak untuk Pemda Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyelarasan langkah pemerintah pusat dan daerah melalui belanja APBN dan APBD.
- Monev bersama dalam rangka evaluasi Belanja Daerah dan penyaluran TKD bersama DJPK di pemda kabupaten/kota terpilih lingkup Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Tengah

Di Provinsi Jawa Tengah, Satker melakukan identifikasi kebutuhan dana melalui Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK KL) dan usulan DAK Fisik untuk menghindari duplikasi. Selain itu, Satker juga telah berkoordinasi dengan Kantor Pusat untuk mendapatkan tambahan alokasi belanja Kementerian/Lembaga, terutama karena alokasi DAK Fisik yang ada belum mencukupi.

Provinsi DI Yogyakarta

Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta melakukan upaya sinkronisasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan forum Diskusi “Kamis Pon” bersama satker yang dilaksanakan

setiap hari Kamis Pon di setiap bulannya. Forum diskusi ini berfokus pada kendala-kendala pelaksanaan anggaran termasuk sinkronisasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik seperti pelaksanaan RO Harmonis Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Pertanian.

- Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pelaksanaan anggaran transfer ke daerah seperti DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Rapat ini digunakan juga sebagai penghubung sinkronisasi pelaksanaan RO Harmonis dengan program-program DAK Fisik sehingga tepat sasaran serta tidak menimbulkan duplikasi.
- *One On One Meeting* Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) secara triwulanan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan pelaksanaan anggaran setiap satker termasuk satker yang menangani RO Harmonis Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Pertanian.
- Sebagai sarana untuk menjembatani kebutuhan satker dalam pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb Provinsi DIY memiliki inovasi LAKON yang merupakan sebuah sarana komunikasi, edukasi, dan informasi

yang ditujukan bagi seluruh satuan kerja dalam wilayah Kanwil DJPb Provinsi DIY.

Provinsi Jawa Timur

Upaya sinkronisasi telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait alokasi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik di Jawa Timur dilakukan dalam bentuk beberapa kegiatan yaitu:

- Rapat Koordinasi Persiapan Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2024 yang melibatkan Pemda dan K/L terkait.
- Pemerintah Provinsi bersama Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur melakukan Desk Evaluasi Percepatan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Percepatan Pelaksanaan Anggaran Satker DK/TP yang mendapatkan alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik.

III.5.C.Regional Sulawesi

III.5.C.1. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp6,72 Triliun yang tersebar pada Kementerian Pertanian, Kemendikbud Ristek, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PUPR. Alokasi tersebut merepresentasikan 24,61 persen dari seluruh alokasi belanja pada 4 K/L dimaksud. Kementerian PUPR merupakan

Tabel 3. 19. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Sulawesi (miliar rupiah)

KD LOKASI	NMLOKASI	PAGU MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU BELANJA K/L	PORSI (%)	JUMLAH SATKER
17	Sulawesi Utara	649.507.822.000	10.861.370.955.000	5,98%	21
18	Sulawesi Tengah	1.572.180.421.000	10.427.290.594.000	15,08%	20
19	Sulawesi Selatan	2.156.700.697.000	27.621.390.943.000	7,81%	27
20	Sulawesi Tenggara	747.276.084.000	9.328.954.899.000	8,01%	19
31	Gorontalo	856.454.565.000	6.666.598.063.000	12,85%	19
34	Sulawesi Barat	741.898.039.000	4.961.857.548.000	14,95%	16
Grand Total		6.724.017.628.000	69.867.463.002.000	9,62%	122

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 20. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Sulawesi (miliar rupiah)

BIDANG DAK	SUBBIDANG DAK	K/L	PAGU	REAL	% REAL	JML SATKER	JML RO
Air Minum	Air Minum	Kemen. PUPR	847.678.383.000	688.496.191.277	81,22%	26	16
	Subtotal		847.678.383.000	688.496.191.277	81,22%	26	16
Jalan	Jalan	Kemen. PUPR	5.188.457.702.000	4.996.415.093.640	96,30%	21	38
	Subtotal		5.188.457.702.000	4.996.415.093.640	96,30%	21	38
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kemenkes	5.726.478.000	5.352.509.771	93,47%	6	7
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kemenkes	9.079.696.000	8.040.112.765	88,55%	7	20
	Subtotal		14.806.174.000	13.392.622.536	90,45%	13	27
Pendidikan	PAUD	Kemendikbud Ristek	1.379.154.000	1.332.411.000	96,61%	4	1
	SD/SMP/SMA/SMK	Kemendikbud Ristek	363.975.447.000	345.921.391.101	95,04%	6	1
	tanpa tagging	Kemen. PUPR	116.254.383.000	116.203.795.019	99,96%	17	6
	Subtotal		481.608.984.000	463.457.597.120	96,23%	27	8
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Kementan	87.422.959.000	84.020.225.780	96,11%	50	24
	Subtotal		87.422.959.000	84.020.225.780	96,11%	50	24
Sanitasi	Sanitasi	Kemen. PUPR	104.043.426.000	102.829.980.323	98,83%	10	4
	Subtotal		104.043.426.000	102.829.980.323	98,83%	10	4
Grand Total			6.724.017.628.000	6.348.611.710.676	94,42%	122	117

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

K/L yang memiliki porsi dan nominal anggaran terbesar dalam alokasi pendukung DAK Fisik terbesar di regional Sulawesi, disusul Kemendikbud Ristek, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan. Adapun penyerapan anggaran atas kegiatan K/L yang mendukung DAK Fisik pada keempat K/L tersebut melebihi 90 persen dari alokasi pagunya.

Berdasarkan perspektif kewilayahan di regional Sulawesi, distribusi belanja K/L yang mendukung DAK fisik berada pada kisaran 5 persen hingga 15 persen pagu belanja K/L di wilayah tersebut. Provinsi Sulawesi Selatan secara nominal memperoleh distribusi pagu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terbesar yakni Rp2.156,7 Miliar, atau 7,81 persen dari pagu belanja K/L.

Berdasarkan perspektif bidang, alokasi pagu yang mendukung DAK Fisik terbesar ditujukan untuk dukungan pada Bidang Jalan (Rp5,18 Triliun), disusul Bidang Air Minum (Rp847,68 Miliar), dan Bidang Pendidikan (Rp481,61 Miliar). Alokasi terbesar pada Bidang Jalan selaras dengan tren alokasi di tingkat provinsi, di mana seluruh provinsi di regional Sulawesi juga mendapatkan alokasi belanja harmonis terbesar pada bidang tersebut. Adapun alokasi tersebut

ditujukan utamanya untuk pencapaian Output Jalan Strategis (ProPN) sepanjang 20 Km (Rp2,99 Triliun) dan Output Preservasi Rekonstruksi, dan Rehabilitasi Jalan sepanjang 188 Km (Rp591,58 Miliar). Selanjutnya, alokasi untuk bidang Air Minum paling besar ditujukan untuk pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM Regional maupun Kab/Kota yang secara total alokasinya mencapai Rp566,8 Miliar.

Penyerapan anggaran bidang dan subbidang menunjukkan capaian yang positif, meskipun masih terdapat beberapa bidang maupun subbidang yang penyerapan anggarannya di bawah 90 persen. Secara agregatif, penyerapan anggaran di seluruh bidang mencapai 94,42 persen yang secara signifikan berkontribusi oleh tingginya penyerapan anggaran pada Bidang Jalan (96,30 persen). Lain halnya pada Bidang Air Minum yang penyerapan anggarannya sebesar 81,22 persen. Penyerapan anggaran yang rendah juga teridentifikasi pada Bidang Kesehatan dan KB – Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan dengan tingkat penyerapan penyerapan anggaran.

III.5.C.2. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Air Minum

Terdapat tiga kategori permasalahan umum dalam pelaksanaan belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum yaitu tantangan yang berkaitan dengan aspek penganggaran, eksekusi kegiatan, serta SDM.

Permasalahan penganggaran yang paling banyak terjadi berupa kesalahan penggunaan akun yang tidak sesuai dengan jenis aset. Permasalahan tersebut mengakibatkan penundaan kegiatan dan belanja karena perlu dilakukan revisi anggaran dan/atau adendum kontrak. Permasalahan penganggaran lainnya berkaitan dengan keterlambatan proses pembukaan blokir anggaran sehingga pekerjaan tertunda. Permasalahan buka blokir tersebut terjadi pada Output Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat yang secara agregat capaian outputnya dilaporkan sebesar 14.400 sambungan rumah (SR) dari target 24.320 SR.

Permasalahan eksekusi kegiatan berkaitan dengan kendala teknis penyedia barang/jasa, cuaca, serta kendala koordinasi. Kendala teknis penyedia barang/jasa berkaitan dengan ketidakcukupan modal dari penyedia barang/jasa sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sebelum mendapatkan pembayaran atas progress yang telah selesai. Permasalahan terkait cuaca berkaitan dengan cuaca ekstrem yang menghambat proses pengeringan lahan. Kendala tersebut terjadi pada Output Prasarana Air Baku yang Direhabilitasi pada Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II Gorontalo.

Permasalahan SDM berkaitan dengan keterbatasan personil yang memenuhi kualifikasi sebagai penjaga arboretum sungai. Arboretum sungai berfungsi sebagai kawasan konservasi yang berfungsi sebagai penyangga penyediaan sumber air. Terbatasnya personil yang memiliki standar kualifikasi sebagai penjaga arboretum dapat berdampak pada menurunnya kualitas konservasi. Secara spesifik, permasalahan tersebut terjadi pada Satker Operasi dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi II.

B. Bidang Jalan

Pelaksanaan belanja dan eksekusi kegiatan pada output harmonis Bidang Jalan tidak terlepas dari beberapa tantangan di antaranya permasalahan terkait dengan eksekusi kegiatan, permasalahan terkait SDM, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan eksekusi kegiatan paling banyak berupa terhambatnya penyelesaian pekerjaan akibat faktor cuaca. Pembangunan jalan yang umumnya melibatkan material seperti aspal dan beton yang memerlukan kondisi cuaca tertentu untuk mencapai kualitas yang optimal. Permasalahan ini terjadi pada berbagai output Bidang Jalan seperti (1) preservasi, (2) pemeliharaan rutin, (3) penanganan drainase, trotoar dan, (4) jalan strategis. Permasalahan ini teridentifikasi terjadi di antaranya pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Gorontalo, Satker PJN Wilayah II Gorontalo, Satker PJN Wilayah I Sulbar, dan Satker PJN Wilayah II Sulbar.

Di samping permasalahan eksekusi kegiatan, permasalahan lain yang bersifat minor terkait dengan administrasi pembayaran dan penganggaran. Permasalahan administrasi pembayaran berupa keterlambatan tagihan akibat data dukung belum lengkap. Sementara itu permasalahan penganggaran terkait dengan keterlambatan pekerjaan karena adanya rekomposisi anggaran yang bersifat multiyears.

C. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sejalan dengan capaian positif penyerapan anggaran dan output, tidak banyak isu terkait dengan pelaksanaan anggaran pada Bidang Kesehatan dan KB. Adapun isu terkait pelaksanaan belanja output Bidang Kesehatan dan KB paling umumnya berkaitan dengan aspek eksekusi kegiatan. Di antaranya terkait dengan adanya penambahan pagu anggaran untuk kegiatan pendampingan audit. Selain itu, terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat menunggu jadwal kegiatan dan pelatihan dari instansi pusat. Sementara itu, isu terkait aspek

penganggaran yakni adanya revisi buka blokir.

D. Bidang Pendidikan

Beberapa isu dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan Bidang Pendidikan. Isu paling banyak terkait dengan aspek eksekusi kegiatan, antara lain terkait dengan belum optimalnya penjadwalan kegiatan dari pusat, kurangnya komitmen dari Pemda sebagai mitra kegiatan, hingga masih terdapat guru yang tidak berminat mendaftar kegiatan pengembangan kapasitas.

E. Bidang Pertanian

Isu terkait pelaksanaan belanja output harmonis Bidang Pertanian didominasi oleh permasalahan terkait eksekusi kegiatan, disusul penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Pada prinsipnya, isu penganggaran dan eksekusi kegiatan memiliki substansi yang sama karena berkaitan dengan proses koordinasi penyaluran fasilitasi bantuan sarana pascapanen atas blokir anggaran. Lebih spesifik, isu tersebut berkaitan dengan proses koordinasi penyaluran anggaran fasilitasi bantuan ke masyarakat untuk salah satu item sarana pengolahan pasca panen. Salah satu item bantuan tersebut diblokir, sedangkan seluruh item (tiga item) berupa fasilitasi bantuan berupa sarana pascapanen, sarana pengolahan, maupun bangsal baru penyalurannya bersifat simultan. Sehingga eksekusi penyaluran bantuan tersebut baru terlaksana di akhir tahun. Permasalahan eksekusi kegiatan lainnya berkaitan dengan cuaca ekstrim dan ketersediaan penyedia.

F. Bidang Sanitasi

Isu terkait pelaksanaan belanja output harmonis Bidang Sanitasi terkait dengan aspek penganggaran, eksekusi kegiatan, dan regulasi dalam pelaksanaan anggaran. Isu di aspek penganggaran berkaitan dengan adanya penambahan pagu anggaran untuk pendampingan audit BPKP. Meski demikian, revisi penambahan pagu terbit di akhir agustus 2024 namun secara prinsip tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, isu pada aspek eksekusi kegiatan yakni kendala pendataan keberfungsian infrastruktur

sanitasi, dan pelaksanaan kegiatan DAK Sanitasi dan HALS terkendala pada pelaksanaan fisik pekerjaan di pemda tidak sesuai dengan timeline

III.5.C.3. Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

Secara keseluruhan, upaya sinkronisasi antara Satker dan Pemda melibatkan koordinasi rutin, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan anggaran yang terintegrasi, serta evaluasi dan monitoring untuk memastikan keberhasilan implementasi DAK Fisik dan harmonisasi belanja K/L. Berikut adalah rangkuman umum upaya sinkronisasi antara satker dan Pemda di beberapa daerah Regional Sulawesi:

Sulawesi Selatan

- Fokus pada penyelarasan prioritas program antara satker dan Pemda melalui rapat koordinasi rutin.
- Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan dan workshop.
- Koordinasi antar instansi dilakukan melalui tim koordinasi yang memonitor dan mengevaluasi anggaran.
- Penyederhanaan proses pengadaan melalui sistem eprocurement yang transparan.
- Penyusunan rencana anggaran terintegrasi yang mencakup DAK Fisik dan belanja K/L, dengan evaluasi dan monitoring berkala.

Sulawesi Barat

- Verifikasi dan validasi usulan DAK Fisik di bidang pendidikan.
- Koordinasi di bidang air minum dan jalan, termasuk evaluasi kesesuaian pekerjaan fisik di lapangan.
- Koordinasi di bidang sanitasi dan kesehatan, serta pendampingan dalam penyusunan dan verifikasi kesiapan kegiatan DAK Fisik.

Sulawesi Tengah

- Pengawasan melalui evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) dan partisipasi dalam Musrenbang untuk

perencanaan pembangunan daerah.

- Konsolidasi internal dan koordinasi dengan Pemda untuk mengoptimalkan penyaluran DAK Fisik dan TKD.
- Kegiatan pembinaan pelaksanaan anggaran di daerah melalui FGD dan kunjungan lapangan.

Sulawesi Tenggara

- Rutin melakukan koordinasi dengan Pemda terkait penyaluran TKD, termasuk audiensi dengan pimpinan daerah.
- Diskusi bulanan mengenai progres penyaluran DAK Fisik dan TKD, serta strategi mitigasi deviasi anggaran.
- Peningkatan kualitas belanja K/L dengan mengakselerasi belanja dan memperbaharui data supplier secara periodik.

Gorontalo

- Koordinasi rutin antara Pemerintah Daerah dan Satker terkait proyek fisik dan sinkronisasi belanja K/L dengan DAK Fisik.
- Pemda dan Satker mengadakan rapat koordinasi untuk meminimalkan kesenjangan data antara pusat dan daerah.

Sulawesi Utara

- Kerjasama antara satker K/L dan Pemda sangat diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang saling mendukung.
- Koordinasi dilakukan baik sebelum maupun selama pelaksanaan pekerjaan

jalan antara Satker PJN dan Pemda.

- Tantangan terkait koordinasi anggaran dan sinkronisasi alokasi anggaran antara Satker dan Pemda, yang perlu diperbaiki untuk menghindari inefisiensi.

III.5.D. Regional Kalimantan

III.5.D.1. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Di Regional Kalimantan, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik adalah sebesar Rp26.750,5 miliar atau 46,7 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Anggaran tersebut berada di 4 (empat) K/L dan dilaksanakan oleh 101 Satker dengan total jumlah output 408 RO. Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp26.419,4 miliar atau mencapai 97,4 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik 86,43 persen terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp23.121,2 miliar yang sebagian besar digunakan untuk dukungan infrastruktur IKN. Jika dilihat porsi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terhadap total pagu, Kalimantan Utara memiliki porsi paling tinggi (51,4 persen) sedangkan di Kalimantan Selatan porsinya hanya sebesar 21,3 persen.

Berdasarkan bidang, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Jalan yakni sebesar Rp23.326,9 miliar atau 87,2 persen dari total anggaran belanja K/L

Tabel 3. 21. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Kalimantan (miliar rupiah)

KD KANWIL	NAMA KANWIL	PAGU YANG MENDUKUNG DAK FISIK	TOTAL PAGU K/L YANG MENDUKUNG DAK FISIK	PORSI (%)	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
16	Kalimantan Barat	1.662.983.840.000	4.502.558.802.000	36,90%	21	103
17	Kalimantan Tengah	738.208.800.000	2.257.860.656.000	32,70%	20	82
18	Kalimantan Selatan	642.118.211.000	3.014.019.486.000	21,30%	20	79
19	Kalimantan Timur	23.121.215.004.000	46.389.428.809.000	49,80%	24	90
34	Kalimantan Utara	585.996.709.000	1.140.156.569.000	51,40%	16	54
Grand Total		26.750.522.564.000	57.304.024.322.000	46,70%	101	408

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 22. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Kalimantan (miliar rupiah)

BIDANG DAK FISIK	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
Air Minum	Air Minum	Kementerian PUPR	1.831.612.190.000	1.762.622.755.229	96,20%	21	37
	Total		1.831.612.190.000	1.762.622.755.229	96,20%	21	37
Jalan	Jalan	Kementerian PUPR	23.326.994.966.000	23.253.608.744.263	99,70%	23	146
	Total		23.326.994.966.000	23.253.608.744.263	99,70%	23	146
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kementerian Kesehatan	4.830.980.000	3.577.715.910	74,10%	5	30
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kementerian Kesehatan	7.899.884.000	5.936.214.388	75,10%	5	76
	Total		12.730.864.000	9.513.930.298	74,70%	10	106
Pendidikan	PAUD	Kemendikbudristek	966.878.000	916.767.979	94,80%	5	5
	SD/SMP/SMA/SMK	Kemendikbudristek	281.252.896.000	268.678.061.241	95,50%	14	28
	SD/SMP/SMA/SMK	Kementerian PUPR	197.359.392.000	197.370.832.583	100,00%	2	2
	Total		479.579.166.000	461.345.029.803	97,40%	21	35
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Kementerian Pertanian	36.188.077.000	33.921.941.419	93,70%	37	76
	Total		36.188.077.000	33.921.941.419	93,70%	37	76
Sanitasi	Sanitasi	Kementerian PUPR	1.063.417.301.000	845.594.501.480	79,50%	8	8
	Total		1.063.417.301.000	845.594.501.480	79,50%	8	8
Total			26.750.522.564.000	26.372.227.534.492	98,60%	101	408

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

pengampu DAK Fisik. Pada Bidang Pendidikan, dukungan belanja K/L lebih banyak digunakan untuk Subbidang SD/SMP/SMA/SMK. Sedangkan pada Bidang Kesehatan dan KB, dukungan belanja K/L lebih banyak digunakan untuk Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan.

Kinerja penyerapan anggaran pada seluruh bidang di Regional Kalimantan secara umum telah tercapai 98,6 persen hingga akhir 2024. Namun demikian, masih terdapat 2 bidang, yaitu Kesehatan dan KB, serta Bidang Sanitasi dengan realisasi anggaran yang rendah, masing-masing sebesar 74,7 persen dan 79,5 persen. Perlu ada perhatian khusus pada peningkatan efisiensi dalam penyerapan anggaran agar program-program yang direncanakan dapat memberikan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat langsung.

III.5.D.2. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Jalan

Bidang Jalan pada regional Kalimantan terdiri atas satu Subbidang, yaitu Subbidang Jalan. Belanja K/L pada Subbidang Jalan difokuskan pada dukungan infrastruktur IKN di Kalimantan Timur, pembangunan jalan strategis, serta pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan di seluruh Wilayah Kalimantan. Pembangunan dan preservasi jalan pada Wilayah Kalimantan diharapkan dapat memperluas akses jalur transportasi, meningkatkan produktivitas dan kemudahan jalur distribusi, serta aktivitas impor dan ekspor, terutama pada daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Secara agregat, meskipun realisasi anggaran Bidang Jalan mencapai 99,7 persen pada akhir tahun 2024, namun tren realisasi anggaran menunjukkan bahwa masih terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran, yaitu 49,0 persen anggaran Bidang Jalan baru direalisasikan pada Triwulan IV 2024. Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang

mendukung Bidang Jalan di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) blokir anggaran yang baru dibuka pada pertengahan tahun serta keterlambatan juknis dari pusat, sehingga kontrak terlambat didaftarkan; 2) beberapa paket pekerjaan memerlukan revisi Eselon I yang memerlukan waktu lama; 3) terjadi perubahan design atau kebijakan yang menyebabkan eksekusi kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun; dan 4) kurang akuratnya perencanaan serapan dana oleh pejabat perbendaharaan menyebabkan devisiasi pada hal III DIPA.
2. Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari: 1) proses lelang, persiapan dokumen persyaratan tender, seperti Detail Engineering Design (DED) serta penyiapan Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) dan (Owner Estimate) yang memerlukan waktu relatif lama, terutama apabila terdapat sanggah, lelang ulang, dan gagal lelang karena tidak ada penawaran; 2) terbatasnya penyedia/supplier; 3) banyak proyek yang baru selesai proses tender dan kontraknya pada pertengahan tahun; 4) kendala persyaratan sertifikasi SNI dan identifikasi TKDN terhadap suatu barang; serta 5) adanya serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional (PDN) sehingga menyebabkan LPSE beberapa K/L tidak dapat diakses.
3. Eksekusi Kegiatan yang terdiri atas: 1) pelaksanaan kegiatan terkendala masalah pembebasan lahan dan ganti rugi; 2) kurang optimalnya pekerjaan fisik disebabkan keterlambatan mobilisasi peralatan dan material ke lokasi, peralatan yang mengalami kerusakan, serta curah hujan yang tinggi di akhir tahun anggaran; 3) kelangkaan ketersediaan bahan baku sehingga memerlukan pengiriman dari luar pulau serta lokasi dan kondisi geografis yang sulit dijangkau; 4) satker kesulitan mendapatkan penyedia lokal yang

mampu memenuhi spek yang diinginkan untuk barang tertentu; 5) keterlambatan mobilisasi peralatan dan material ke lokasi pekerjaan yang dilakukan memiliki akses yang kurang baik; 6) pemutusan kontrak beberapa paket pekerjaan serta terdapat kegiatan pekerjaan yang terhambat akibat kurangnya jumlah tenaga kerja di lapangan; 7) pekerjaan lapangan sangat dipengaruhi kondisi cuaca, sering terjadi banjir; dan 8) keterlambatan/kekurangan syarat pencairan oleh penyedia barang.

B. Bidang Air Minum

Bidang Air Minum pada regional Kalimantan terdiri atas Subbidang Air Minum. Belanja K/L pada Subbidang air minum difokuskan pada pembangunan air baku dan air minum untuk IKN di Kalimantan Timur, serta pembangunan infrastruktur, prasarana, dan jaringan air tanah, air baku, dan air minum di seluruh wilayah Kalimantan. Ketersediaan sarana dan prasarana air tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses air bersih, terutama air minum yang berkualitas bagi masyarakat.

Secara agregat, meskipun realisasi anggaran Bidang Air Minum mencapai 96,2 persen pada akhir tahun 2024, namun tren realisasi anggaran menunjukkan bahwa masih terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran, yaitu 45,9 persen anggaran Bidang Air Minum baru direalisasikan pada Triwulan IV 2024. Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung Bidang Air Minum di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) blokir anggaran yang baru dibuka pada pertengahan tahun serta keterlambatan juknis dari pusat, sehingga kontrak terlambat didaftarkan; 2) pelaksanaan revisi secara terpusat yang membutuhkan waktu yang cukup lama menyebabkan pelaksanaan kegiatan Satker menjadi tertunda; serta 3) perubahan kondisi lapangan yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2. Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari: 1) proses lelang, persiapan dokumen persyaratan tender yang memerlukan waktu relatif lama, terutama apabila terdapat sanggah, lelang ulang, dan gagal lelang karena tidak ada penawaran; 2) terbatasnya penyedia/supplier; serta 3) tidak adanya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
3. Eksekusi Kegiatan yang terdiri atas: 1) infrastruktur air sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan kesiapan tanah untuk diolah serta belum seluruh lahan dapat dibebaskan; 2) beberapa item material berasal dari lokasi lain sehingga memerlukan waktu tambahan hingga material tiba di lokasi proyek; 3) lokasi dan kondisi geografis yang sulit dijangkau; 4) Pemasangan Jembatan Pipa pada Sungai Kayan terkendala karena adanya arus sungai yang sangat berpengaruh terhadap pekerjaan tersebut; serta 5) Faktor cuaca yang tidak menentu di beberapa lokasi proyek pekerjaan.

C. Bidang Sanitasi

Bidang Sanitasi pada regional Kalimantan terdiri atas satu Subbidang, yaitu Subbidang Sanitasi. Belanja K/L pada Subbidang Sanitasi difokuskan pada pengelolaan sanitasi untuk IKNDi Kalimantan Timur, serta pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi di seluruh wilayah Kalimantan. Pengembangan sanitasi tersebut bertujuan untuk menyediakan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Secara agregat, tren realisasi anggaran menunjukkan bahwa masih terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran, yaitu 47,3 persen anggaran Bidang Sanitasi baru direalisasikan pada Triwulan IV 2024. Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung Bidang Sanitasi di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) blokir anggaran yang baru dibuka pada pertengahan tahun serta keterlambatan

juknis dari pusat, sehingga kontrak terlambat didaftarkan; 2) pelaksanaan revisi secara terpusat yang membutuhkan waktu yang cukup lama menyebabkan pelaksanaan kegiatan Satker menjadi tertunda; serta 3) perubahan kondisi lapangan yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2. Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari: 1) proses lelang, persiapan dokumen persyaratan tender yang memerlukan waktu relatif lama, terutama apabila terdapat sanggah, lelang ulang, dan gagal lelang karena tidak ada penawaran; serta 2) terbatasnya penyedia/supplier.
3. Eksekusi Kegiatan, yang terdiri atas: 1) faktor cuaca yg tidak menentu di beberapa lokasi; 2) beberapa item material berasal dari lokasi lain sehingga memerlukan waktu tambahan hingga material tiba di lokasi proyek; serta 3) juknis pelaksanaan kegiatan yang baru terbit di penghujung semester I.
4. Sumber Daya Manusia, yang terdiri atas: 1) kapasitas SDM dari pihak desa masih membutuhkan pendampingan intens untuk pelaksanaan kegiatan; serta 2) kurangnya pengalaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam proyek.

D. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan pada regional Kalimantan terdiri atas dua Subbidang, yaitu Subbidang PAUD dan Subbidang SD/SMP/SMA/SMK. Belanja K/L pada Subbidang PAUD terdapat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sementara belanja K/L pada Subbidang SD/SMP/SMA/SMK terdapat pada Kemendikbudristek dan Kementerian PUPR. Alokasi anggaran Bidang Pendidikan difokuskan untuk Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah, Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Penjaminan Mutu PAUD dan Satuan Dikmas di seluruh Wilayah Kalimantan.

Secara agregat, meskipun realisasi anggaran Bidang Pendidikan mencapai 97,4 persen

pada akhir tahun 2024, namun tren realisasi anggaran menunjukkan bahwa masih terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran, yaitu 32,2 persen anggaran Bidang Pendidikan baru direalisasikan pada Triwulan IV 2024. Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pendidikan di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran, yang terdiri dari: 1) blokir anggaran baru dibuka pada pertengahan tahun; 2) adanya perubahan jadwal kegiatan dan penambahan kegiatan di pertengahan tahun yang berakibat pada pergeseran rencana penarikan dana dan revisi anggaran; 3) revisi anggaran terkait revisi Eselon I yang membutuhkan waktu relatif lama.
2. Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari: 1) peralatan dan mesin yang dibutuhkan mayoritas berasal dari luar negeri, namun adanya kebijakan terkait TKDN yang membatasi penggunaan barang impor, menyebabkan Satker belum bisa melaksanakan pengadaan peralatan tersebut.
3. Eksekusi Kegiatan, yaitu terdapat kegiatan yang sudah terjadwal oleh Kantor Pusat, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat di akselerasi.
4. Regulasi, yaitu: 1) keterlambatan juknis dari kantor pusat; serta 2) pelaksanaan kegiatan menunggu arahan Eselon I.
5. Sumber Daya Manusia, yaitu keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bagian teknis.

E. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian pada regional Kalimantan terdiri atas satu Subbidang, yaitu - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani). Belanja K/L pada bidang ini seluruhnya terdapat pada Kementerian Pertanian. Alokasi anggaran Bidang Pertanian difokuskan untuk penyaluran benih padi dan jagung, pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) pada Tanaman Pangan, bibit ternak, serta penyediaan prasarana

pasca panen di seluruh Wilayah Kalimantan.

Secara agregat, meskipun realisasi anggaran Bidang Pertanian mencapai 93,7 persen pada akhir tahun 2024, namun tren realisasi anggaran menunjukkan bahwa masih terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran, yaitu 37,9 persen anggaran Bidang Pertanian baru direalisasikan pada Triwulan IV 2024. Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pertanian di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) adanya blokir automatic adjustment pada DIPA Satker; 2) deviasi halaman III cukup tinggi karena jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan; serta 3) Pemeliharaan Kebun Entres Karet Kabupaten Sintang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak cukupnya anggaran penunjang untuk pengawalan sampai ke lokasi kegiatan.
2. Pengadaan barang dan jasa, yaitu: 1) beberapa peralatan pertanian tidak tersedia dan harus didatangkan dari luar pulau; serta 2) kesulitan mencari rekanan/penyedia yang dapat memenuhi kriteria/spesifikasi tertentu.
3. Eksekusi Kegiatan yang terdiri atas: 1) terbatasnya akses ke lokasi di daerah menyebabkan penyaluran benih terhambat; 2) kegiatan di lapangan menyesuaikan dengan jadwal tanam petani; serta 3) kegiatan baru dapat terealisasi pada triwulan III dan IV karena menunggu masa pasca panen.

F. Bidang Kesehatan dan KB

Bidang Kesehatan dan KB pada regional Kalimantan terdiri atas dua Subbidang, yaitu Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting dan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan. Keseluruhan belanja K/L pada Bidang Kesehatan dan KB terdapat pada Kementerian Kesehatan. Alokasi anggaran Bidang Kesehatan dan KB difokuskan untuk pelatihan dan peningkatan

kapasitas Tenaga Kesehatan, pembinaan revitalisasi Posyandu, pembinaan Germas (Gerakan Masyarakat Sehat), dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas dan Klinik Pratama di seluruh Wilayah Kalimantan.

Secara agregat, kinerja realisasi anggaran pada Bidang Kesehatan dan KB masih rendah, yaitu hanya mencapai 74,7 persen pada akhir tahun 2024, serta tren realisasi anggaran menunjukkan bahwa masih terjadi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran, yaitu 37,2 persen anggaran Bidang Kesehatan dan KB baru direalisasikan pada Triwulan IV 2024. Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Kesehatan dan KB di Regional Kalimantan secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) alokasi anggaran bersifat top down tanpa memperhatikan kondisi di daerah sehingga sering tidak sinkron antara rencana kegiatan dengan eksekusi belanja karena adanya arahan atau kebijakan tertentu; 2) dan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan tidak didukung oleh anggaran; 3) pelaksanaan kegiatan Dekon/TP menunggu juknis dari Kementerian Pusat; 4) Terdapat beberapa kegiatan sejenis yang telah dibiayai APBD; serta 4) blokir anggaran karena adanya kebijakan Presiden terkait penghematan belanja perjalanan dinas sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) beberapa barang tidak tersedia di e-katalog; dan 2) pengadaan barang TKDN/P3DN yang memakan waktu karena pemesanan indent serta lokasi toko di luar pulau dan kesulitan mendapatkan info nilai TKDN, terkait keharusan pembelian barang dengan nilai TKDN diatas 40%.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) Keterlambatan penerbitan juknis oleh Kementerian Pusat; 2) Perencanaan kegiatan berbarengan dengan kegiatan sejenis yang dibiayai APBD; 3) keterlambatan/

kekurangan syarat pencairan oleh penyedia Barang; dan 4) sebagian besar RO dilaksanakan di Triwulan IV.

4. Tantangan SDM yaitu kegiatan berupa pelatihan/diklat menunggu ketersediaan waktu narasumber dikarenakan narasumber berasal dari wilayah/provinsi lain.

III.5.D.3. Upaya Sinkronisasi di Daerah Oleh Satker dan Pemda

Kalimantan Barat,

upaya sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi dari sisi Kementerian/Lembaga pada Output Infrastruktur Fisik. Sinkronisasi dilakukan melalui KPIJ (Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan) dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya diusulkan ke Eselon I. Pertimbangan yang menjadi dasar penentuan lokasi proyek adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada provinsi tersebut.

Kalimantan Tengah

1. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda), baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai sarana sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di setiap daerah dan sekaligus menjadi sarana informasi dan konfirmasi tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diselaraskan dengan dengan RPJMD, RKP, dan RPJMN. Pada kegiatan ini, Satker Kementerian/Lembaga (K/L) akan menyelaraskan sejumlah program kerja yang telah ditetapkan dari K/L Pusat dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Daerah.
2. Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan setiap triwulan. Pelaksanaan tersebut menjadi sarana sinkronisasi terkait capaian pembangunan daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Rakordalev merupakan salah satu kegiatan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah agar target-target indikator yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat terkendali ketercapaiannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota serta para perwakilan K/L di daerah untuk menyelaraskan perspektif seluruh lapisan terkait dengan pembangunan daerah.

3. Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dilakukan dalam rangka evaluasi dan pengawasan APBN maupun APBD yang dikelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Rapat TEPRA menjadi alat evaluasi dan pengawasan untuk memastikan APBN/ APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan, alat identifikasi permasalahan realisasi anggaran yang terjadi di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta solusi atas permasalahan yang terjadi sehingga pembangunan di daerah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan Pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP dalam rangka mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan kinerja APBN Regional Kalimantan Tengah, baik Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Transfer ke Daerah, maupun arah kebijakan Belanja Negara dan Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran, serta dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi atas permasalahan yang terjadi sehingga pembangunan di daerah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
5. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan kewenangan telah dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: 1)

menyelaraskan lokasi pembangunan antara Jalan Nasional dan Jalan Provinsi/Kabupaten/ Kota sehingga terbentuk link konektivitas antara proyek tersebut; 2) melakukan upgrade status pada ruas jalan tertentu agar pengelolaan jalan dapat ditangani oleh level pemerintah yang lebih tinggi.

6. Koordinasi pelaksanaan kegiatan antara Satker K/L dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pencapaian output kegiatan. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional memerlukan proses pembebasan lahan dan pendekatan sosial kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Proses pembebasan lahan dan pendekatan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat dan memperlancar proses pembangunan jalan dan jembatan.

III.5.E. Regional Bali-Nusa Tenggara

III.5.E.1. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Di Regional Bali-Nusa Tenggara, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik adalah sebesar Rp2.723,06 miliar atau 18,2 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Anggaran tersebut berada di 4 (empat) K/L dan dilaksanakan oleh 68 Satker dengan total jumlah output 99 RO. Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp2.371,64 miliar atau mencapai 28,2 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu. Alokasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik bidang jalan. Ini mencerminkan fokus pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di regional Bali-Nusa Tenggara.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik cukup merata, tertinggi 26,10 persen terkonsentrasi di Provinsi NTT yaitu sebesar Rp5.946,41 miliar yang sebagian besar digunakan

Tabel 3. 23. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Bali - Nusa Tenggara (miliar rupiah)

KD. LOKASI	PROVINSI	PAGU YANG MENDUKUNG DAK FISIK	PAGU TOTAL K/L	PORSI PAGU (%)	JUMLAH SATKER	JUMLAH OUTPUT
22	BALI	472.117.010.000	5.696.368.459.000	8,30%	23	64
23	NUSA TENGGARA BARAT	696.319.276.000	3.349.701.377.000	20,80%	21	76
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1.554.626.549.000	5.946.413.186.000	26,10%	24	72
Grand Total		2.723.062.835.000	14.992.483.022.000	18,20%	68	99

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 24. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Bali - Nusa Tenggara (miliar rupiah)

BIDANG DAK	SUB BIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
Air Minum	Air Minum	Kemen PUPR	406.170.186.000	404.844.461.846	99,67%	17	14
Jalan	Jalan	Kemen PUPR	1.763.797.446.000	1.763.623.769.220	99,99%	13	24
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kemenkes	2.926.610.000	2.785.500.084	95,18%	3	6
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kemenkes	4.686.539.000	4.418.890.965	94,29%	3	17
	Total		7.613.149.000	7.204.391.049	94,63%	6	23
Pendidikan	PAUD	Kemendikbudristek	767.916.000	762.214.860	99,26%	3	1
	SD/SMP/SMA/SMK	Kemendikbudristek	298.596.315.000	279.948.377.258	93,75%	9	6
	-	Kemen PUPR	95.013.369.000	92.347.175.182	97,19%	3	1
	Total		394.377.600.000	373.057.767.300	94,59%	15	8
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Kementan	44.436.118.000	41.845.784.126	94,17%	26	25
Sanitasi	Sanitasi	Kemen PUPR	106.668.336.000	52.906.766.179	49,60%	6	5
Grand Total			2.723.062.835.000	2.643.482.939.720	97,08%	68	99

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

untuk Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan.

Berdasarkan bidang DAK Fisik, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Jalan yakni sebesar Rp1.763,79 miliar atau 64,77 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Anggaran pada bidang jalan, sebagian besar dukungan belanja K/L untuk mendanai Subbidang Jalan. Pada Bidang Kesehatan dan KB, dukungan belanja K/L lebih banyak digunakan untuk Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan dengan porsi mencapai sebesar 61,6 persen. Pada Bidang Pendidikan, belanja K/L lebih difokuskan pada dukungan

pada Subbidang SD/SMP/SMA/SMK dengan porsi 75,7 persen. Sedangkan pada Bidang Air Minum, Pertanian dan Bidang Sanitasi masing-masing difokuskan hanya pada satu Subbidang.

Kinerja penyerapan anggaran belanja K/L pada seluruh bidang secara umum telah tercapai 97,08 persen per 23 Januari 2025. Bidang Jalan dan Air Minum menunjukkan kinerja yang paling baik dengan tingkat penyerapan anggaran masing-masing 99,99 persen dan 99,67 persen. Sedangkan belanja K/L yang mendukung Bidang Pendidikan dan Sanitasi berada di urutan terakhir dengan tingkat realisasi masing-

masing 94,59 persen dan 49,60 persen. Pada beberapa satker Kementerian PUPR, terdapat dukungan anggaran belanja untuk lebih dari satu bidang DAK Fisik. Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan per bidang DAK Fisik, jumlah total satker Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat paling banyak Bidang Pertanian mencapai 26 satker dengan jumlah RO 25.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran DAK Fisik di regional Bali-Nusa Tenggara, sementara sektor-sektor penting lainnya seperti air minum, pertanian, pendidikan, sanitasi, dan kesehatan juga mendapatkan alokasi yang signifikan meski dengan porsi yang lebih kecil. Dari sisi ketercapaian penyerapan anggaran, secara total keseluruhan cukup optimal, namun beberapa sektor seperti Pendidikan dan Sanitasi menunjukkan kinerja yang kurang baik dibanding sektor lainnya.

III.5.E.2. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Air Minum

Beberapa tantangan pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Air Minum di Regional Bali-Nusa Tenggara diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yaitu proses revisi anggaran yang memakan waktu lama dan lemahnya koordinasi di internal satker serta pemahaman satker terkait kewenangan revisi
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri atas: 1) pengadaan terpusat; 2) pembebasan lahan; 3) cuaca buruk; 4) PBJ dilakukan dengan TUP sehingga memerlukan waktu mengumpulkan bukti.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) tidak ada penyedia yang memenuhi sehingga harus menunggu persetujuan kementerian teknis; 2) integrasi penanganan kawasan perumahan dengan sektor infrastruktur sehingga perlu pembagian kerja; 3) lokasi jalur

pipa yang tidak diizinkan oleh masyarakat sehingga perlu lokasi alternatif lain; dan 4) kegiatan dilakukan dengan mekanisme swakelola dan tersebar di beberapa lokasi menjadi tantangan tersendiri.

4. SDMyaitukurangnyatenagakerjadilapangan.

B. Bidang Jalan

Beberapa tantangan pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Jalan di Regional Bali-Nusa Tenggara diklaster sebagai berikut:

1. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam kontrak; 2) Asphalt Mixing Plant tidak dirawat dengan baik sehingga kapasitas produksi menurun; 3) Pasokan material batu, pasangan batu mortar, dan pasangan batu lepas belum mencukupi; dan 4) Penyediaan material terlambat.
2. SDMyaitukurangnyatenagakerjadilapangan.

C. Bidang Kesehatan dan KB

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Bali-Nusa Tenggara mencapai 94,63 persen dari total pagu sebesar Rp7,61 miliar. Secara umum penyerapan dan capaian output sudah baik sehingga tidak terdapat kendala berarti.

D. Bidang Pendidikan

Beberapa tantangan pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pendidikan di Regional Bali-Nusa Tenggara diklaster sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari: 1) munculnya nomenklatur terbaru atas pengadaan barang dan jasa sehingga beberapa subbidang perlu addendum atas kontrak yang sudah ada; 2) Satuan kerja tidak melakukan update data revisi RKAKL ke aplikasi Sistem Pereyancanaan Pengadaan Barang dan Jasa (SIRENBAJA) milik Kementerian teknis.

2. Eksekusi Kegiatan yang terdiri dari: 1) Sejumlah kegiatan menyesuaikan petunjuk teknis dan jadwal dari Pusat; 2) Akses ke lokus kegiatan yang tersebar pada 13 sekolah di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka relatif sulit untuk mobilisasi alat dan bahan; 3) Bahan material harus didatangkan dari Pulau Jawa sehingga perlu waktu untuk mobilisasi; 4) Sejumlah kegiatan menyesuaikan petunjuk teknis dan jadwal dari Pusat yang baru akan dilaksanakan pada periode triwulan III dan triwulan IV.
3. Tantangan SDM yang terdiri dari: 1) mutasi; 2) kekurangan tenaga kerja pada masing-masing lokus kegiatan; 3) kurangnya tenaga kerja terampil; 4) SDM dari kepakaran berbeda yang telah dilatih oleh tim UKBI.

E. Bidang Pertanian

Beberapa tantangan pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pertanian di Regional Bali-Nusa Tenggara diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) blokir anggaran; 2) Perubahan nomenklatur kegiatan untuk menunjang aspirasi Komisi IV DPR RI dalam agenda Rakernas tanggal 28 Mei 2024;
2. Pengadaan barang dan jasa, yakni penetapan calon petani dan calon lokasi dari Tenaga Ahli DPR RI.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) Terhambatnya pembayaran honor petugas OPT karena usulan nama petugas dari kabupaten terlambat; 2) Eksekusi kegiatan harus menunggu informasi serangan hama dari kabupaten; 3) penundaan jadwal sesuai agenda Es I.
4. Tantangan SDM yakni pergantian pejabat PPK dan KPA

F. Bidang Sanitasi

Beberapa tantangan pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Sanitasi di Regional Bali-Nusa Tenggara diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yakni terdapat sisa alokasi pagu tahun 2024.
2. Eksekusi kegiatan yakni proses eksekusi kegiatan terlambat.

III.5.E.3. Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

Secara keseluruhan, upaya sinkronisasi antara Satker dan Pemda melibatkan koordinasi rutin, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan anggaran yang terintegrasi, serta evaluasi dan monitoring untuk memastikan keberhasilan implementasi DAK Fisik dan harmonisasi belanja K/L. Berikut adalah rangkuman umum upaya sinkronisasi antara satker dan Pemda di beberapa daerah Regional Bali-Nusa Tenggara:

Provinsi Bali

Kanwil DJPb Provinsi Bali melakukan berbagai upaya untuk sinkronisasi antara belanja K/L yang mendukung DAK Fisik dengan TKD DAK Fisik. Upaya tersebut meliputi:

- Sinkronisasi penyaluran DAK Fisik sejak perencanaan dan penganggaran untuk menghindari duplikasi anggaran.
- Penerbitan juknis penyaluran DAK Fisik yang dijadikan pedoman oleh Pemda dalam penyusunan kontrak.
- Pelaksanaan Monev TKD yang melibatkan KPPN dan Pemda.
- Pelaksanaan FGD TKD dengan narasumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan.
- Pemutakhiran MoU dengan tiga Pemda (Badung, Jembrana, dan Buleleng).
- Monitoring intensif atas kontrak terdaftar oleh Kanwil DJPb Provinsi Bali.

Provinsi NTB

Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan, antara lain:

- Penurunan Prevalensi Stunting: Belanja pemerintah pusat difokuskan pada program kesehatan, agama, dan ekonomi.

Pemerintah daerah melalui Dana Desa juga mendanai program pencegahan stunting.

- Pengendalian Inflasi: Pemerintah pusat melaksanakan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) untuk mengendalikan inflasi. Pemda berperan dalam program ini dengan penguatan sistem kesehatan, pembangunan irigasi, serta sektor pertanian dan kelautan.
- Penurunan Kemiskinan: Pemerintah pusat melalui berbagai program perlindungan sosial (BPNT, PKH, Kartu Prakerja, dll.) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Pemda juga menysar keluarga miskin di desa dengan BLT Desa.
- Ketahanan Pangan: Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan produksi pangan domestik, infrastruktur, serta komoditas pangan, sementara Pemda mendanai ketahanan pangan melalui DAK Nonfisik.

Provinsi NTT

Sinkronisasi antar pemerintah pusat dan daerah di NTT dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Evaluasi dan Harmonisasi Kegiatan: Desk evaluasi oleh kementerian teknis untuk memeriksa kesiapan daerah, serta harmonisasi rencana kegiatan antara kementerian dan Pemda untuk menghindari tumpang tindih program.
- Kegiatan Kolaborasi di Daerah: Pemerintah

daerah mengadakan rapat dan FGD untuk membahas sinkronisasi rencana kegiatan, serta melakukan survei lapangan bersama perangkat desa untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal.

- Musrenbang: Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten menjadi platform penting untuk menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan prioritas daerah.

III.5.F. Regional Maluku Papua

III.5.F.1. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Di Regional Maluku Papua, anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik adalah sebesar Rp4.620,13 miliar atau 36,44 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Anggaran tersebut berada di 4 (empat) K/L dan dilaksanakan oleh 95 Satker dengan total jumlah output 477 RO. Kementerian PUPR merupakan K/L yang memiliki alokasi paling besar dalam mendukung belanja DAK Fisik yaitu sebesar Rp4.316,59 miliar atau mencapai 93,43 persen dari seluruh anggaran K/L pengampu. Alokasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung DAK Fisik bidang jalan. Ini mencerminkan fokus pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di regional Maluku Papua. Adapun dilihat porsi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik paling kecil pada Kemenkes yakni hanya 3,29 persen dengan 8 satker dan 150 RO.

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa

Tabel 3. 25. Alokasi Pagu K/L Pendukung DAK Fisik Terbesar Regional Maluku - Papua (miliar rupiah)

KD KANWIL	NAMA KANWIL	PAGU YANG MENDUKUNG DAK FISIK	TOTAL PAGU K/L YANG MENDUKUNG DAK FISIK	PORSI (%)	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
28	MALUKU UTARA	637,726,840,000	1,602,645,597,000	39.79%	19	90
29	MALUKU	1,064,787,959,000	3,370,095,936,000	31.60%	21	80
30	PAPUA	1,792,007,092,000	4,976,036,951,000	36.01%	35	201
33	PAPUA BARAT	1,125,610,222,000	2,728,447,767,000	41.25%	20	106
Grand Total		4,620,132,113,000	12,677,226,251,000	36.44%	95	477

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 3. 26. Pagu Realisasi K/L Pendukung DAK Fisik Berdasarkan Bidang Regional Maluku - Papua (miliar rupiah)

BIDANG DAK FISIK	SUB BIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU	REALISASI	% REAL *)	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
Air Minum	Air Minum	Kemen PUPR	371,314,486,000	359,273,985,358	96.76%	19	39
	Total		371,314,486,000	359,273,985,358	96.76%	19	39
Jalan	Jalan	Kemen PUPR	3,888,754,941,000	3,774,466,799,495	97.06%	25	191
	Total		3,888,754,941,000	3,774,466,799,495	97.06%	25	191
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kemenkes	4,734,605,000	2,764,681,519	58.39%	8	45
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kemenkes	13,419,913,000	7,299,876,152	54.40%	8	105
	Total		18,154,518,000	10,064,557,671	55.44%	16	150
Pendidikan	PAUD	Kemendikbudristek	1,546,768,000	1,482,740,720	95.86%	3	3
	SD/SMP/SMA/SMK	Kemendikbudristek	256,721,458,000	226,178,740,097	88.10%	4	4
		Kemen PUPR	29,223,991,000	29,170,299,643	99.82%	11	22
	Total		287,492,217,000	256,831,780,460	89.34%	18	29
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Kementan	27,116,951,000	24,728,383,341	91.19%	31	60
	Total		27,116,951,000	24,728,383,341	91.19%	31	60
Sanitasi	Sanitasi	Kemen PUPR	27,299,000,000	8,048,869,611	29.48%	6	8
	Total		27,299,000,000	8,048,869,611	29.48%	6	8
TOTAL			4,620,132,113,000	4,433,414,375,936	95.96%	115	477

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Ket: *) Realisasi anggaran cut off 23 Januari 2025

alokasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik 38,79 persen terkonsentrasi di Provinsi Papua yaitu sebesar Rp1.792,01 miliar yang sebagian besar digunakan untuk Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong. Jika dilihat porsi belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terhadap total pagu, Papua Barat dan Maluku Utara memiliki porsi paling tinggi yakni masing-masing 41,25 persen dan 39,79 persen. Sedangkan di Papua dan Maluku, porsi anggaran K/L yang mendukung DAK Fisik masing-masing 36,01 persen dan 31,60 persen.

Berdasarkan bidang DAK Fisik, sebagian besar anggaran belanja K/L terkonsentrasi pada Bidang Jalan yakni sebesar Rp3.888,75 miliar atau 84,17 persen dari total anggaran belanja K/L pengampu DAK Fisik. Sedangkan sisanya, untuk mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum (8,04 persen), Pendidikan (6,22 persen), Pertanian (0,59 persen), Sanitasi (0,59 persen), dan Kesehatan dan KB (0,39 persen). Pada Bidang Jalan, sebagian besar dukungan

belanja K/L untuk mendanai Subbidang Jalan. Pada Bidang Kesehatan dan KB, dukungan belanja K/L lebih banyak digunakan untuk Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan dengan porsi mencapai sebesar 73,92 persen. Sedangkan pada Bidang Pendidikan, belanja K/L lebih difokuskan pada dukungan pada Subbidang SD, SMP, SMA, SMK dengan porsi 99,46 persen. Sedangkan pada Bidang Air Minum, Pertanian dan Bidang Sanitasi masing-masing difokuskan hanya pada satu Subbidang.

Kinerja penyerapan anggaran belanja K/L pada seluruh bidang secara umum telah tercapai 95,96 persen per 23 Januari 2025. Bidang Jalan dan Air Minum menunjukkan kinerja yang paling baik dengan tingkat penyerapan anggaran masing-masing 97,06 persen dan 96,76 persen. Sedangkan belanja K/L yang mendukung Bidang Kesehatan dan KB dan Bidang Sanitasi berada di urutan terakhir dengan tingkat realisasi masing-masing 55,44 persen dan 29,48 persen. Pada beberapa satker Kementerian

PUPR, terdapat dukungan anggaran belanja untuk lebih dari satu bidang DAK Fisik. Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan per bidang DAK Fisik, jumlah total satker Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai 115 satker.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran DAK Fisik di regional Maluku Papua, sementara sektor-sektor penting lainnya seperti Air Minum, Pertanian, Pendidikan, Sanitasi, dan Kesehatan juga mendapatkan alokasi yang signifikan meski dengan porsi yang lebih kecil. Dari sisi ketercapaian penyerapan anggaran, secara total keseluruhan cukup optimal mencapai 95,96 persen, namun beberapa sektor seperti Kesehatan dan KB dan Sanitasi menunjukkan kinerja yang kurang baik dibanding sektor lainnya. Perlu ada perhatian khusus pada peningkatan efisiensi dalam penyerapan anggaran supaya program-program yang direncanakan dapat memberikan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat langsung.

III.5.F.2. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Per Bidang

A. Bidang Air Minum

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum di Regional Maluku Papua mencapai alokasi pagu tertinggi kedua dibanding bidang lainnya dengan capaian 96,76 persen dengan realisasi sebesar Rp359,27 miliar per 23 Januari 2025. Alokasi RO Dukungan Air Minum didominasi pada Provinsi Maluku sebesar Rp184,29 miliar, diikuti Provinsi Maluku Utara sebesar Rp79,18 miliar, lalu Provinsi Papua sebesar Rp55,25 miliar, dan terendah di Provinsi Papua Barat sebesar Rp52,57 miliar. Jika dilihat dari penyerapan anggaran, realisasi tertinggi berada di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp78,35 miliar atau mencapai 98,94 persen. Adapun realisasi terendah berada di Provinsi Maluku sebesar Rp175,92 miliar atau mencapai 95,45 persen.

Secara agregat, lambatnya penyerapan

anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Air Minum di Regional Maluku Papua secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yaitu proses revisi anggaran yang memakan waktu lama dan adanya isu optimalisasi anggaran di awal tahun sehingga lelang dilakukan di pertengahan tahun.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri atas: 1) adanya isu optimalisasi anggaran di awal tahun sehingga lelang dilakukan di pertengahan tahun; 2) nilai/harga di e-catalog sangat tinggi dengan HPS yang dibuat; 3) satker di Papua menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet yang tidak stabil sering kali menghambat akses ke e-catalog.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) lahan yang belum dapat dieksekusi akibat permasalahan hak ulayat; dan 2) keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan menunggu proses penyusunan rencana kerja oleh fasilitator/pihak ketiga; 3) Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan disebabkan kurangnya koordinasi antara satuan kerja dan pemda serta kerusakan fisik yang parah yang mengakibatkan pemeliharaan berubah menjadi pembangunan fisik.

B. Bidang Jalan

Belanja K/L yang mendukung Bidang Jalan memiliki alokasi belanja paling besar, dengan kinerja realisasi anggaran pada bidang ini paling tinggi dibandingkan bidang lainnya yakni mencapai 97,06 persen atau sebesar Rp3.774,47 miliar dari total alokasi Rp3.888,75 miliar dengan progres capaian output rata-rata 100 persen. Bidang Jalan regional Maluku Papua hanya terdiri atas satu Subbidang yakni Subbidang Jalan, yang difokuskan untuk mendanai Major Project yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong di Provinsi Papua dan Papua Barat, Pembangunan Jalan dan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan di Provinsi Maluku, serta Jalan Kawasan Prioritas (ProRN) di Provinsi Maluku Utara. Selain itu, belanja

K/L tersebut juga digunakan untuk Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan, serta Jalan Strategis.

Tantangan pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Jalan di Regional Maluku Papua secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) proses revisi di Eselon I yang lama; dan 2) terdapat penambahan paket pekerjaan yang menambah jumlah pagu pada Semester II; 3) adanya blokir automatic adjustment pada beberapa paket pembangunan jalan.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) untuk RO terkait Dukungan Penanganan Jalan Daerah, paket pekerjaan baru terkontrak pada pertengahan tahun dikarenakan baru terpenuhinya anggaran di tengah tahun anggaran; 2) Barang/Bahan material terbatas dan perlu dilakukan impor dari luar wilayah regional Maluku Papua; 3) lambatnya proses pengadaan barang dan jasa berupa pendaftaran kontrak melalui e-catalog.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) faktor kondisi eksternal, yaitu kondisi keamanan, sosial, dan cuaca seperti curah hujan yang tinggi, yang tidak dapat diprediksi, lokasi pekerjaan fisik yang cukup jauh sering menghambat pelaksanaan kegiatan dengan jangka waktu yang lama dan dapat mengakibatkan biaya yang tinggi terutama dalam distribusi material, disamping itu penyerapan terbesar dalam pembangunan jalan berada di akhir pekerjaan yaitu pengaspalan yang dikerjakan di triwulan IV; 2) terdapat keterbatasan waktu penyelesaian yang disebabkan oleh paket pekerjaan terkadang diterima di Semester II atau bahkan Triwulan IV, sehingga satker tidak dapat melaksanakan kegiatan lebih awal; dan 3) kesulitan dalam mendapatkan hak ulayat atau biaya adat yang seringkali sulit ditemukan jalan keluar; 4) terdapat kendala izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang belum terbit menyebabkan eksekusi proyek

terlambat; 5) kenaikan harga bahan baku yang tidak terduga dikarenakan fluktuasi atau inflasi harga bahan baku yang tiba-tiba dapat mengganggu rencana anggaran yang telah disusun.

4. Tantangan regulasi yaitu belum dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait.

C. Bidang Kesehatan dan KB

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB di Regional Maluku Papua berada pada posisi terendah kedua dibandingkan bidang lainnya yakni mencapai 55,44 persen dari total pagu sebesar Rp18,15 miliar. Terdapat RO yang kinerjanya masih rendah yakni RO Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Manajemen dan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP-2) yang baru terserap 23,01 persen dengan progres capaian output mencapai 35,77 persen dari target yang ditetapkan 123 orang per 23 Januari 2025. RO tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Tantangan pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Kesehatan dan KB di Regional Maluku Papua secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) revisi anggaran terpusat dari K/L dan memerlukan waktu yang lama; 2) adanya blokir anggaran yang baru dibuka pada pertengahan tahun.
2. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) Waktu pelaksanaan kegiatan belum dapat direncanakan secara matang oleh satuan kerjakarenabelumadanyaMoUantaraSatker dengan Balai Besar Kesehatan untuk jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan kesehatan;
3. Pengadaan barang dan jasa yaitu proses pengadaan yang terhambat oleh keterbatasan penyedia dan barang di e-catalog, serta himbauan penggunaan barang dalam negeri atau pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

untuk alat kesehatan dan obat-obatan.

4. Tantangan SDM yang terdiri atas: 1) Kegiatan terkendala dikarenakan penetapan Pejabat Perbendaharaan baru dilaksanakan pada pertengahan tahun dan memerlukan waktu dalam proses pergantian spesimen tandatangan baik ke KPPN maupun pihak bank; 2) Pengelola keuangan tidak memahami juknis pelaksanaan kegiatan dan mekanisme dalam pencairan APBN, pemahaman untuk mekanisme pembayaran LS dan pertanggungjawaban UP/TUP tidak dapat dipahami dengan baik oleh operator/pengelola keuangan.

D. Bidang Pendidikan

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Maluku Papua mencapai 89,34 persen dari total pagu sebesar Rp287,49 miliar. Salah satu RO yang memiliki kinerja anggaran rendah yaitu RO Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi pada satker Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang baru tercapai 76,66 persen realisasi anggaran dari total pagu Rp14,37 miliar, namun demikian capaian RO ini telah melebihi target tahunan sebanyak 3.904 orang dari target volume RO sebanyak 3.496 orang. Rendahnya serapan anggaran pada RO tersebut disebabkan beberapa hal yaitu: 1) adanya blokir anggaran yang baru dibuka pada pertengahan tahun/mendekati akhir tahun; 2) Penyebaran sekolah yang tidak merata dengan area yang luas, sehingga mempengaruhi jadwal kegiatan; 3) terbatasnya kompetensi SDM pengelola keuangan pada satker BGP.

Secara umum, pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung Bidang Pendidikan di Regional Maluku Papua secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) revisi anggaran di Eselon I yang memakan waktu lama; dan 2) adanya blokir anggaran yang baru dibuka pada pertengahan tahun/mendekati akhir tahun dikarenakan menyesuaikan

kebutuhan program dan jadwal kegiatan yang dilakukan pada triwulan IV.

2. Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari: 1) lamanya proses perencanaan dan pengadaan disebabkan belum ditandatanganinya kontrak dengan vendor/pihak ketiga; 2) menunggu kebijakan dari pusat.
3. Eksekusi Kegiatan yang terdiri dari: 1) jadwal kegiatan menyesuaikan libur fakultatif, libur hari besar, dan libur sekolah di regional Papua; 2) cuaca kurang baik mempengaruhi transportasi peserta kegiatan yang mayoritas berada di kepulauan; 3) terkait RO Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru, jadwal pesawat dan kenaikan harga tiket pesawat menyebabkan satker kekurangan anggaran untuk melakukan pembinaan di daerah; 4) Meskipun Plant of Actions (POA) telah disusun, perubahan jadwal kegiatan tidak dapat dihindari, menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan perencanaan.
4. Tantangan SDM yang terdiri dari: 1) kurangnya trainers bersertifikat di Papua Barat; 2) konflik internal pemangku kepentingan serta SDM yang kurang maksimal.

E. Bidang Pertanian

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian di Regional Maluku Papua cukup tinggi dibandingkan kinerja anggaran pada bidang lainnya yakni mencapai 91,19 persen per 23 Januari 2025. Adapun RO yang memiliki kinerja anggaran rendah adalah RO Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan. Kinerja penyerapan anggaran pada RO Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan baru tercapai 32,59 persen dengan realisasi sebesar Rp485,22 juta. RO tersebut dilaksanakan oleh Satker Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon. Rendahnya realisasi dan capaian RO disebabkan oleh kendala teknis dalam internal satuan kerja.

Tantangan pelaksanaan anggaran belanja

K/L yang mendukung pada Bidang Pertanian di Regional Maluku Papua secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) blokir anggaran; 2) revisi anggaran yang memperlambat pelaksanaan anggaran.
2. Pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: 1) Negosiasi harga dengan kontraktor yang alot mengingat aksesibilitas yang sulit; dan 2) Ketertundaan proses PBJ yang menunggu koordinasi dan kebijakan pusat.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri atas: 1) faktor cuaca dan iklim turut berpengaruh dalam perkembangan pelaksanaan anggaran; 2) lokasi pelaksanaan yang jauh dari kantor dan berada di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman menyebabkan terdapatnya kendala dalam monitoring pelaksanaan kegiatan; dan 3) Banyaknya lahan-lahan yang berurusan dengan masyarakat sekitar/ hukum adat.
4. Tantangan SDM yang terdiri atas 1) terdapat keterbatasan jumlah SDM sehingga melakukan perangkapan selain sebagai pengelola keuangan juga menyelesaikan pekerjaan teknis, dan juga perlu peningkatan kompetensi.; 2) Sebagian besar satker pada Kementerian Pertanian lingkup regional Maluku Papua merupakan satker dekon/TP dinas di Pemda setempat. Awareness pegawai terhadap kinerja pelaksanaan anggaran masih rendah.

F. Bidang Sanitasi

Kinerja Pelaksanaan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik Bidang Sanitasi di Regional Maluku Papua paling rendah dibandingkan kinerja anggaran pada bidang lainnya yakni hanya mencapai 29,48 persen dengan capaian realisasi sebesar Rp8,05 miliar per 23 Januari 2025. Beberapa RO yang memiliki kinerja anggaran rendah adalah Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota. Belum adanya realisasi penyerapan anggaran pada RO Sistem

Pengelolaan Persampahan Skala Kota maupun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota dengan total pagu kedua RO tersebut sebesar Rp18,82 miliar. Rendahnya serapan anggaran pada RO tersebut disebabkan beberapa hal yaitu: 1) adanya blokir anggaran dari awal tahun hingga mendekati akhir tahun; 2) terkendala oleh hal ulayat kepala adat.

Lambatnya penyerapan anggaran belanja K/L yang mendukung pada Bidang Pertanian di Regional Maluku Papua secara umum diklaster sebagai berikut:

1. Penganggaran yang terdiri dari: 1) adanya blokir anggaran dari awal tahun hingga mendekatiakhir tahun; dan 2) revisi anggaran yang memperlambat pelaksanaan anggaran.
2. Pengadaan barang dan jasa, yaitu: 1) kesulitan dalam penyesuaian spesifikasi kebutuhan dengan pilihan barang/jasa yang tersedia karena keterbatasan penyedia atau spesifikasi kebutuhan yang tinggi karena kondisi lokasi. Di Papua, penerapan TKDN sering terkendala oleh keterbatasan produk lokal yang memadai untuk memenuhi persyaratan standar TKDN.
3. Eksekusi kegiatan yang terdiri dari: 1) faktor cuaca dan iklim turut berpengaruh dalam perkembangan pelaksanaan anggaran; 2) terkendala oleh hal ulayat kepala adat; 3) waktu pelaksanaan kegiatan rata-rata dimulai pada akhir triwulan III.

III.5.F.3. Upaya Sinkronisasi Daerah Oleh Satker dan Pemda

Upaya sinkronisasi oleh Satker K/L di daerah dengan Pemda lingkup regional Maluku Papua dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi program pembangunan untuk menyatukan kesadaran pembangunan daerah. Adapun pada Bidang Air Minum, koordinasi satuan kerja dengan Pemda dilaksanakan melalui koordinasi pencarian sumber air oleh Pemda dan pembangunan SPAM dilaksanakan oleh satuan kerja. Pada Bidang Pendidikan, Satker BPMP Provinsi Maluku melakukan

identifikasi atas data-data anomali dan disesuaikan dengan hasil assessment literasi dan numerasi di kota/kota yang masih rendah. Atas hasil identifikasi tersebut maka BPMP Provinsi Maluku melakukan pendampingan dan asistensi dengan menggandeng PU dan PR untuk DAK Fisik pada dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah daerah tersebut untuk kelengkapan dan anomali data tersebut.

Namun demikian, belum ada forum khusus yang membahas sinkronisasi belanja K/L dengan DAK Fisik dalam suatu daerah yang diprakarsai oleh Pemda dan Satker K/L mengingat pentingnya pemahaman dan pendekatan yang mendalam terhadap kebutuhan pembangunan di regional Maluku Papua. Transfer ke daerah tidak hanya tentang jumlah dana yang dialokasikan tetapi juga tentang adaptabilitas kebijakan agar sesuai dengan kearifan lokal. Perlu dilakukan pembentukan forum rutin konsultasi dan dialog publik yang membahas proses harmonisasi antara DAK Fisik dan belanja K/L dan pendampingan oleh K/L dalam perencanaan anggaran pemda terutama pada RO Harmonis untuk memastikan bahwa harmonisasi belanja pusat dan daerah telah dijadikan pedoman sejak awal.

Beberapa Satker mengonfirmasi bahwa tidak terdapat sinkronisasi langsung antara belanja K/L dengan DAK Fisik walaupun dengan bidang yang sama dan pada Satker yang sama, seperti pada Satker Dinas Pekerjaan Umum belanja pada Bidang Jalan tidak memiliki keterhubungan dengan DAK Fisik yang dikelolanya. Hal ini disebabkan karena belanja RO Bidang Jalan hanya untuk pemeliharaan Jalan Nasional di dalam pulau, sementara DAK Fisik yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum berada di luar pulau.



IV.

ANALISIS TEMATIK

SINERGI PUSAT-DAERAH
DALAM MEMPERKUAT
KETAHANAN PANGAN



IV. ANALISIS TEMATIK: SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN

IV.1. OVERVIEW SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengukur capaian tersebut, salah satu indikator yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas konsumsi masyarakatnya. Kerangka ketahanan pangan tersebut kemudian diwujudkan dalam pengukuran Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yang disusun berdasarkan sembilan indikator utama, meliputi:

- 1). Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih;
- 2). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
- 3). Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran;
- 4). Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
- 5). Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
- 6). Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
- 7). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
- 8). Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); dan
- 9). Angka harapan hidup pada saat lahir. Adapun metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)* dalam penyusunan *Global Food Security Index (GFSI)*.

Berdasarkan data terbaru, rata-rata IKP nasional mencapai sekitar 76,6, dengan ketimpangan antarprovinsi yang cukup lebar. Provinsi dengan ketahanan pangan tertinggi adalah Bali (88,23), diikuti oleh Jawa Tengah (85,34), DKI Jakarta (85,13), dan DI Yogyakarta (84,15). Sebaliknya, ketahanan pangan masih relatif rendah di beberapa wilayah timur Indonesia seperti Papua (40,21), Papua Barat (51,36), serta Maluku dan Maluku Utara yang berada di kisaran 61–63 poin.

Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas tingkatan pemerintahan. Di wilayah dengan nilai IKP tinggi, strategi ketahanan pangan cenderung ditopang oleh akses infrastruktur, sistem distribusi pangan yang baik, serta diversifikasi ekonomi. Sementara itu, provinsi dengan nilai IKP rendah masih menghadapi tantangan pada aspek konektivitas logistik, ketergantungan pada komoditas tunggal, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, diperlukan langkah kolaboratif antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat dapat memperkuat perencanaan berbasis data melalui sistem pemantauan pangan terintegrasi, serta memperluas dukungan fiskal dan teknis bagi daerah dengan indeks rendah. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi lokal seperti pengembangan lumbung pangan desa, pertanian adaptif, dan peningkatan kapasitas petani melalui digitalisasi dan penyuluhan.

Selama periode 2018–2024, capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional menunjukkan tren peningkatan di hampir seluruh wilayah, meskipun dengan laju yang berbeda antarpulau. Secara umum, peningkatan indeks mencerminkan perbaikan ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta kualitas konsumsi yang semakin membaik di berbagai daerah.

Wilayah Jawa secara konsisten mencatat nilai IKP tertinggi dibandingkan wilayah lain. Pada tahun 2018, Jawa memiliki IKP sebesar 76,3,

dan terus meningkat hingga 83,9 pada tahun 2024, dengan rata-rata 80,1 selama tujuh tahun terakhir. Kinerja ini didorong oleh infrastruktur logistik yang kuat, produktivitas pertanian yang tinggi, serta efektivitas kebijakan pangan daerah yang selaras dengan program nasional.

Wilayah Sumatera menunjukkan peningkatan bertahap dari 68,9 pada tahun 2018 menjadi 76,1 di tahun 2024, dengan rata-rata 72,3. Tren ini mencerminkan keberhasilan penguatan produksi dan distribusi pangan di wilayah barat Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan ketimpangan antarprovinsi, terutama antara provinsi pesisir dan pedalaman.

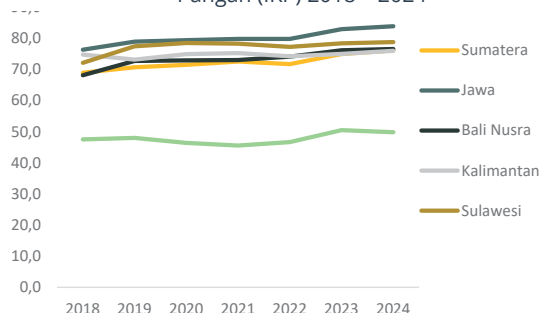
Di kawasan Bali–Nusa Tenggara, peningkatan indeks juga cukup stabil, dari 68,1 pada 2018 menjadi 76,5 pada 2024, dengan rata-rata 73,4. Upaya pengembangan pertanian adaptif dan diversifikasi pangan lokal berkontribusi terhadap peningkatan ini, meski masih rentan terhadap risiko kekeringan dan ketergantungan impor bahan pangan tertentu.

Wilayah Kalimantan relatif stabil dengan rata-rata 74,7, meningkat dari 74,8 pada 2018 menjadi 76,0 pada 2024. Kinerja yang moderat ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya alam dan lahan pertanian cukup luas, ketergantungan pada komoditas perkebunan ekspor dan keterbatasan infrastruktur pangan masih menjadi tantangan utama.

Sulawesi mencatat pertumbuhan yang signifikan dari 72,1 (2018) menjadi 78,8 (2024), dengan rata-rata 77,2. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam integrasi antara produksi pertanian, sistem distribusi, serta pengembangan kawasan sentra pangan yang didorong oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Maluku dan Papua masih menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan. Nilai IKP meningkat perlahan dari 47,5 pada 2018 menjadi 49,8 pada 2024, dengan rata-rata hanya 47,8. Faktor utama yang mempengaruhi adalah keterbatasan akses transportasi, distribusi pangan yang mahal, serta ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah.

Grafik 4.1. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2018 – 2024



Sumber : BPS 2024, diolah

Secara keseluruhan, tren 2018–2024 menunjukkan peningkatan ketahanan pangan nasional yang positif, dengan kesenjangan antarwilayah yang masih perlu diatasi melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur logistik pangan, serta pemanfaatan data dan inovasi teknologi pertanian untuk menjangkau daerah-daerah dengan ketahanan pangan rendah.

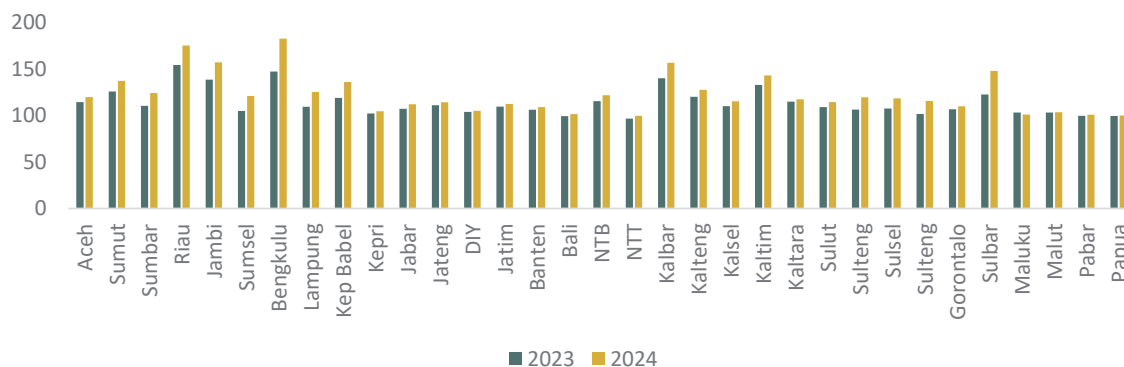
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan petani melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Peningkatan NTP menunjukkan perbaikan daya beli dan kesejahteraan petani, sedangkan penurunan NTP mengindikasikan tekanan pada pendapatan riil petani akibat kenaikan biaya produksi atau turunnya harga hasil pertanian. Terdapat 3 (tiga) kondisi nilai NTP, antara lain (1) pertama, jika $NTP > 100$ berarti petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan, yaitu ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan lebih cepat dibandingkan dengan tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar, atau ketika penurunan harga yang diterima lebih lambat dibandingkan penurunan harga yang dibayarkan. (2) Kedua, jika $NTP = 100$ berarti petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan rata-rata harga yang diterima sama dengan perubahan rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. (3) Ketiga, jika

$NTP < 100$ berarti petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan, yaitu ketika tingkat rata-rata harga yang dibayarkan mengalami kenaikan lebih cepat dibandingkan dengan harga yang diterima, atau ketika penurunan harga yang dibayarkan lebih lambat dibandingkan dengan penurunan harga yang diterima terhadap tahun dasar.

Secara nasional, NTP tanpa perikanan menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Sebagian besar provinsi mengalami kenaikan, mencerminkan membaiknya harga komoditas pertanian dan efisiensi produksi di tingkat petani. Kenaikan NTP ini juga didorong oleh perbaikan infrastruktur distribusi serta stabilitas harga pangan nasional yang dapat menjaga keseimbangan harga jual dari hasil produksi dengan biaya konsumsi rumah tangga petani. Tren ini menjadi indikator bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi kesejahteraan petani maupun seluruh program pertanian secara umum. Kenaikan NTP yang didorong oleh efisiensi produksi dan perbaikan distribusi akan meningkatkan kesejahteraan petani tanpa harus melakukan peningkatan harga jual sehingga akan menguntungkan konsumen yang dapat merasakan stabilitas harga pangan.

Provinsi dengan kenaikan tertinggi antara 2023 dan 2024 adalah Bengkulu (dari 147,42 menjadi 182,86), Riau (154,55 menjadi 175,54), Jambi (138,80 menjadi 157,36), dan Sulawesi Barat (122,81 menjadi 148,18). Hal ini

Grafik 4.2. Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional



Sumber : BPS 2024, diolah

menunjukkan penguatan posisi tawar petani di wilayah tersebut, kemungkinan didukung oleh peningkatan harga hasil perkebunan utama seperti sawit, karet, dan kopi.

Di sisi lain, beberapa provinsi menunjukkan kenaikan yang relatif moderat, seperti Jawa Barat (107,35 ke 112,17), Jawa Timur (109,7 ke 112,59), dan DIY (103,99 ke 105,25). Stabilitas ini menandakan pasar pertanian di wilayah tersebut relatif seimbang antara harga jual dan biaya produksi, meskipun belum menunjukkan lonjakan signifikan pada nilai tambah petani.

Beberapa wilayah menunjukkan NTP yang stagnan atau menurun, seperti Maluku (103,3 turun ke 101,2) dan Papua Barat (99,76 ke 101,0) yang peningkatannya sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan struktural seperti akses pasar, biaya logistik tinggi, dan terbatasnya diversifikasi usaha tani masih menjadi faktor pembatas kesejahteraan petani.

Secara regional, wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi kontributor utama peningkatan NTP nasional, seiring dengan pulihnya harga komoditas perkebunan ekspor dan penguatan rantai pasok hasil pertanian. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur masih memerlukan dukungan lebih kuat dalam bentuk subsidi input pertanian, infrastruktur irigasi, serta penguatan kelembagaan petani.

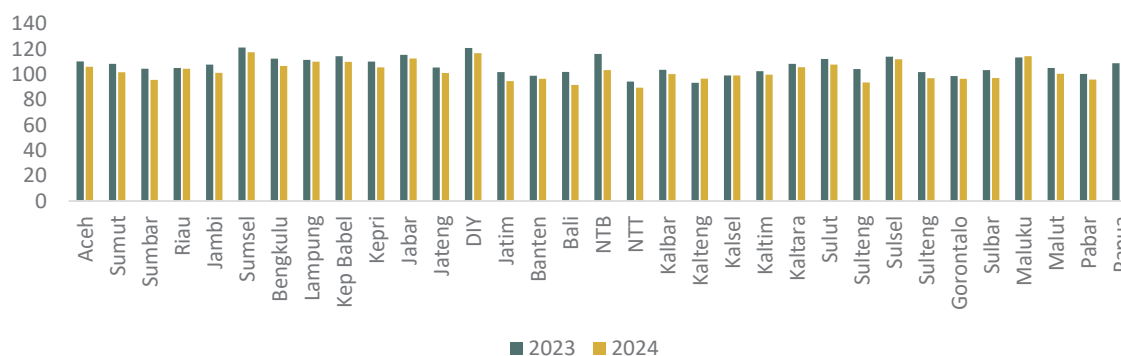
Dengan tren positif ini, tahun 2024 dapat dikatakan sebagai periode penguatan kesejahteraan petani, namun tantangan utama ke depan adalah memastikan peningkatan

NTP juga diikuti oleh keberlanjutan produksi, diversifikasi komoditas, dan stabilitas harga input agar kesejahteraan petani dapat terjaga secara berkelanjutan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator kesejahteraan nelayan yang menggambarkan kemampuan pendapatan dari hasil tangkapan ikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya operasional. Peningkatan NTN menunjukkan perbaikan daya beli dan kesejahteraan nelayan, sedangkan penurunan NTN mengindikasikan tekanan ekonomi akibat penurunan harga ikan, meningkatnya biaya melaut, atau gangguan rantai pasok hasil perikanan. NTN menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan nelayan. Pengukuran melalui NTN dapat mengidentifikasi sejauh mana nelayan tangkap sejahtera serta untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil mendukung kesejahteraan nelayan.

Dalam pengukurannya, jika $NTN > 100$ berarti kondisi daya beli nelayan lebih baik dibandingkan tahun dasar 2018 karena kenaikan harga hasil tangkapan relatif lebih besar dibandingkan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi, sehingga pendapatan nelayan berpotensi meningkat lebih tinggi dari pengeluarannya. Sebaliknya, apabila $NTN = 100$, maka kondisi nelayan setara dengan tahun dasar, di mana persentase kenaikan atau penurunan harga produksi seimbang dengan kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi, sehingga tingkat

Grafik 4.3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nasional



Sumber : BPS 2024, diolah

kemampuan tukar nelayan tidak berubah. Namun, jika $NTN < 100$, maka kondisi nelayan lebih rendah dibandingkan tahun dasar, karena kenaikan harga hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi, yang berarti kemampuan tukar nelayan melemah dibandingkan periode tahun dasar 2018 (BPS, 2024).

Secara nasional, tahun 2024 menunjukkan penurunan rata-rata NTN dibandingkan tahun 2023. Sebagian besar provinsi mengalami penurunan nilai, menandakan adanya tekanan pada sektor perikanan tangkap, terutama akibat fluktuasi harga ikan di pasar domestik, kenaikan biaya bahan bakar (BBM) untuk melaut, serta cuaca ekstrem yang memengaruhi frekuensi dan volume tangkapan.

Beberapa provinsi yang mengalami penurunan signifikan antara 2023 dan 2024 diantaranya Bali (dari 101,81 menjadi 91,70), NTB (116,07 menjadi 103,30), NTT (94,26 menjadi 89,50), Jawa Timur (101,70 menjadi 94,60), dan Sumatera Barat (104,40 menjadi 95,70). Penurunan di wilayah ini umumnya disebabkan oleh penurunan harga ikan konsumsi lokal dan meningkatnya biaya operasional melaut, terutama untuk kapal kecil yang sangat bergantung pada cuaca.

Beberapa wilayah pesisir besar seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku masih mencatat NTN di atas 107 pada tahun 2024, menandakan daya tahan ekonomi nelayan yang relatif baik, didukung oleh penguatan sentra pelabuhan perikanan, pasar ikan lokal, serta konektivitas logistik hasil laut. Khusus Maluku, NTN meningkat tipis dari 113,29 menjadi 114,20 — satu dari sedikit provinsi yang berhasil mencatatkan kenaikan di tengah tren penurunan nasional.

Sementara itu, provinsi dengan NTN di bawah 100 seperti Bali, NTT, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat menunjukkan bahwa pendapatan nelayan belum mampu menutupi biaya operasional dan kebutuhan rumah tangga, sehingga diperlukan intervensi kebijakan lebih kuat pada sektor perikanan rakyat, seperti

efisiensi bahan bakar, dukungan asuransi nelayan, dan fasilitas rantai dingin.

Secara keseluruhan, perbandingan NTN 2023–2024 memperlihatkan bahwa kesejahteraan nelayan mengalami tekanan, meskipun sebagian wilayah tetap stabil. Diperlukan langkah terpadu antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keseimbangan harga ikan di tingkat nelayan, memperluas akses pasar ekspor dan domestik, serta memperkuat ketahanan ekonomi pesisir melalui inovasi pembiayaan dan modernisasi alat tangkap yang ramah lingkungan.

IV.2. KOMPOSISI REALISASI DAN ANALISIS BELANJA KETAHANAN PANGAN PER KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tahun 2024 dilaksanakan melalui berbagai program lintas kementerian/lembaga yang tidak hanya menargetkan peningkatan produksi tetapi juga mempertajam, distribusi, konsumsi, dan tata kelola pangan. Berdasarkan data realisasi anggaran di tahun 2024, total alokasi anggaran untuk program-program ketahanan pangan mencapai Rp52,77 triliun, dengan realisasi sebesar Rp43,51 triliun atau 82,45% persen dari pagu nasional.

Kementerian PUPR mencatat kontribusi terbesar dengan pagu Rp29,64 triliun dan realisasi 76,5 persen, yang dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta infrastruktur air. Kementerian Pertanian memiliki pagu Rp15,62 triliun dan realisasi 91,54 persen, dengan kinerja tertinggi pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (98,06 persen) yang mencerminkan percepatan kegiatan hilirisasi pangan dari sisi penguatan SDM. Kementerian Kelautan dan Perikanan merealisasikan 86,57 persen dari total pagu Rp7,25 triliun, dengan capaian tertinggi pada Program Kualitas Lingkungan Hidup (92,25 persen) dan Program pendidikan dan pelatihan vokasi (89,37 persen) di luar dukungan manajemen. Kementerian Perdagangan menunjukkan kinerja terbaik

Tabel 4. 1. Komposisi Kinerja Program Ketahanan Pangan per Kementerian/Lembaga Tahun 2024

NAMA K/L	NMPROGRAM	PAGU (Miliar Rp)	REAL (Miliar Rp)	%REAL
BADAN PANGAN NASIONAL	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	29,1	29,0	99,43%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Dukungan Manajemen	3.991,7	3.815,9	95,60%
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	131,5	121,3	92,25%
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	214,5	172,6	80,45%
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	380,7	340,2	89,37%
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.529,9	1.825,0	72,14%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Ketahanan Sumber Daya Air	29.636,6	22.670,8	76,50%
KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Program Perdagangan Dalam Negeri	241,1	239,4	99,31%
KEMENTERIAN PERTANIAN	Program Dukungan Manajemen	3.518,7	3.072,4	87,32%
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.760,5	9.033,5	92,55%
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.456,5	1.327,0	91,11%
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	883,3	866,2	98,06%
TOTAL		52.774,1	43.513,4	82,45%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

secara persentase dengan realisasi 99,31 persen dari pagu Rp241,1 miliar, menandakan efektivitas intervensi stabilisasi harga dan distribusi pangan. Sementara itu, Badan Pangan Nasional walaupun masih dalam tahap awal pelaksanaan dapat mencapai realisasi 99,43 persen dari pagu Rp29,1 miliar, seiring proses penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.

Pada level KRO dengan pagu yang cukup signifikan pada setiap K/L, KRO terbesar ada pada Prasarana Bidang SDA dan Irigasi yang memiliki pagu Rp18,75 triliun dengan realisasi 74,32 persen di Kementerian PUPR dan menjadi motor utama pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi nasional. Di Kementerian Pertanian, KRO Sarana Pengembangan Kawasan mencatat kinerja tertinggi dengan realisasi 95,15 persen dari pagu Rp2,83 triliun, menunjukkan percepatan kegiatan pengembangan sentra produksi pangan. Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Layanan Dukungan Manajemen Internal menjadi KRO dominan dengan pagu Rp3,26 triliun dan realisasi 97,55 persen, disusul

Operasi Pengawasan SDA (Rp544,3 miliar, 85,28 persen) dan Prasarana Bidang Kemaritiman (Rp564,5 miliar, 48,69 persen) yang mendukung keberlanjutan sumber daya laut. Sementara itu, Kementerian Perdagangan melalui Pemantauan Produk dengan realisasi 99,89 persen dari pagu Rp227,3 miliar dan Badan Pangan Nasional melalui penyaluran Bantuan Masyarakat dengan realisasi 99,43 persen dari pagu Rp29,1 miliar, yang menunjukkan kinerja realisasi anggaran yang baik sampai dengan akhir tahun.

IV.3. KESENJANGAN ANTARA ALOKASI ANGGARAN DENGAN PRIORITAS MASALAH

Isu mengenai pangan telah menjadi perhatian global setidaknya dalam satu dekade terakhir. Bahkan, Menurut data *The Global Food Security Index (GFSI)* indeks ketahanan pangan rata-rata negara di dunia menurun, dimana pada tahun 2019 berada di indeks 62,89 sedangkan pada tahun 2022 menjadi 62,16 dari indeks maksimal sebesar 100. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya perubahan

Tabel 4. 2. Komposisi Kinerja Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan per Kementerian/Lembaga Tahun 2024

NAMA K/L	NAMA KRO	PAGU (Miliar Rp)	REAL (Miliar Rp)	%REAL
BADAN PANGAN NASIONAL	Bantuan Masyarakat	29,1	29,0	99,43%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.258,3	3.178,5	97,55%
	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	544,3	464,2	85,28%
	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	564,5	274,8	48,69%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	4.194,4	4.149,7	98,93%
	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	18.749,8	13.935,1	74,32%
	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	5.769,4	3.748,2	64,97%
KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Data dan Informasi Publik	5,4	5,2	97,00%
	Koordinasi	6,4	5,5	85,92%
	Pemantauan produk	227,3	227,1	99,89%
KEMENTERIAN PERTANIAN	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.862,4	2.670,7	93,30%
	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.844,2	2.657,1	93,42%
	Sarana Pengembangan Kawasan	2.826,0	2.688,8	95,15%

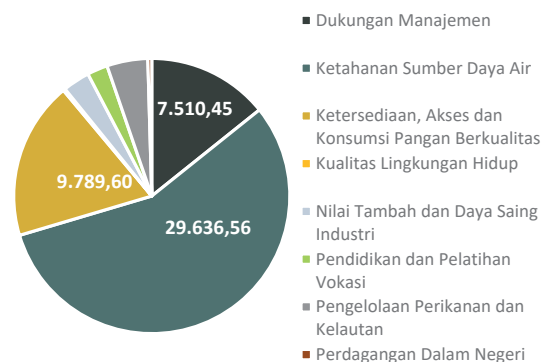
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

iklim, konflik dan peperangan, serta pandemi Covid-19. Indonesia juga mengalami hal serupa, dimana pada tahun 2019 Indeks GFSI berada di angka 62,6 dan pada tahun 2022 turun menjadi 60,2 dari skor maksimal 100. Pada Tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi ke empat atau dibawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Fakta diatas menjadi sebuah ironi mengingat Indonesia menjadi negara dengan lahan pertanian terluas di kawasan ASEAN dan seharusnya menjadi modal berharga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah ataupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut, APBN harus selalu berkontribusi aktif. Pada tahun 2024 anggaran ketahanan pangan mencapai Rp114,3 Triliun atau meningkat 9,69 persen dibandingkan tahun anggaran 2023. Sejatinnya, anggaran ketahanan pangan

selalu meningkat dalam 4 tahun terakhir, dengan peningkatan berkisar 15,33 persen apabila dibandingkan anggaran tahun 2021. Anggaran dimaksud difokuskan pada sejumlah tugas prioritas, yakni meningkatkan produksi domestik, memperkuat kelembagaan petani, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan (irigasi, bendungan, jaringan distribusi), serta pengembangan cadangan pangan nasional (stock pangan/*buffer*). Berbagai aktivitas prioritas dimaksud diharapkan mampu meningkatkan tidak hanya indeks ketahanan pangan namun juga indikator lain yang berkaitan dengan pangan seperti penurunan angka stunting, nilai tukar petani, dsb.

Grafik 4.4. Alokasi Ketahanan Pangan Tahun 2024



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Anggaran Belanja K/L yang mendukung ketahanan pangan tahun 2024 berkisar Rp52,77 Triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar digunakan untuk program ketahanan sumber daya air (sekitar 56 persen), program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (sekitar 18 persen), serta program dukungan manajemen (sekitar 14 persen).

Program Ketahanan Sumber Daya Air sebagian besar berupa Pembangunan bendungan, embung, serta irigasi dan jaringan pendukungnya. Adapun program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebagian besar berupa pemberian alat mesin pertanian (alsintan), sarana produksi, pengembangan kawasan, serta pemberian bibit dan benih. Dilihat dari sebaran dimaksud, terlihat salah satu tantangan yang belum dapat sepenuhnya di support dari belanja K/L yakni tantangan dalam hal pengelolaan pasca panen baik dari segi transportasi, distribusi, hingga penyimpanan. Tantangan tersebut merupakan salah satu kondisi yang lazim dialami oleh

Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 telah dicanangkan berbagai sasaran dalam ketahanan pangan yang berfokus pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sektor pangan. sebagai berikut:

Sasaran pertama mengenai *Global Food Security Index (GFSI)* yang tidak tercapai diantaranya disebabkan oleh adanya ketergantungan impor pada beberapa komoditas yakni kedelai, daging, dan gula. Selain itu, adanya perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang melanda hampir di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan pola tanam terganggu dan petani mengalami gagal panen. Pada skor pola pangan harapan konsumsi, Indonesia mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi sayur dan buah serta konsumsi pangan hewani. Semakin besar skor ini maka konsumsi pangan Masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang. Konsumsi ikan pada tahun 2024 tidak mencapai target disebabkan antara lain

Tabel 4. 3. Sasaran Ketahanan Pangan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Sasaran	Target RPJMN 2020- 2024	Capaian 2024	Sumber
<i>Global Food Security Index</i>	69,8	62,6	<i>Impact.economist.com</i>
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	95,2	98,2	Bapanas
Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	62	58,76	Kemen KKP
Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/tahun)	316,3	244,6	Bapanas
Prosentase Pangan Segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	85-95	92,52	Bapanas
Ketersediaan Beras (juta ton)	46,8	38,88	Bapanas
Nilai tukar petani	105	122,78	BPS

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

negara berkembang (*food safety.institute, 2024*). Oleh karenanya, diperlukan peran aktif swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bersinergi dan ikut andil melengkapi kesenjangan yang dihadapi dari anggaran belanja pemerintah pusat sehingga target ketahanan pangan Indonesia dapat segera terwujud.

Capaian & Evaluasi Target Ketahanan Pangan

keterbatasan distribusi sehingga pada daerah tertentu *supply* masih relatif kurang. Konsumsi sayur dan buah pada tahun 2024 juga belum mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran, ketersediaan, dan pengaruh gaya hidup seperti konsumsi makanan cepat saji. Prosentase Pangan Segar yang memenuhi syarat keamanan pangan tahun 2024 termasuk kategori sangat baik yang dipengaruhi oleh dukungan sarana prasarana mobile

untuk menunjang keamanan pangan dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan serta pengembangan pengujian keamanan melalui *rapid test kit*. Adapun untuk capaian Ketersediaan Beras masih dibawah target dikarenakan dampak dari fenomena iklim ekstrim yakni El Nino yang terjadi pada tahun 2023 sehingga menyebabkan adanya kekeringan pada lahan produksi. Nilai tukar petani pada tahun 2024 berfluktuasi dari Januari dan puncaknya naik di akhir Desember yang mencapai angka 122,78 seiring dengan kenaikan harga gabah kering panen.

Dari beberapa capaian diatas, sebagian besar masih berada dibawah target yang ditetapkan. Oleh karenanya dapat direkomendasikan beberapa hal diantaranya:

1. Memperluas intervensi anggaran pemerintah ke aksesibilitas dan pemanfaatan pangan, bukan hanya fokus terhadap produksi dan infrastruktur pendukung produksi.
2. Penguatan kelembagaan distribusi dan rantai pasok yang optimal sehingga harga semakin murah dan mudah dijangkau masyarakat.
3. Pemberdayaan petani melalui koperasi berbasis komoditas unggulan lokal termasuk memberikan insentif untuk petani muda dan UMKM pangan.
4. Memperbaiki sistem pemberian subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu pemberian.

IV.4. PERBANDINGAN KOMPONEN PENDUKUNG DAN UTAMA ATAS RINCIAN OUTPUT STRATEGIS DALAM BELANJA KETAHANAN PANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 yang terakhir direvisi menjadi PMK Nomor 140 tahun 2021, menetapkan pedoman standar struktur biaya untuk setiap program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam peraturan tersebut, ditentukan

batasan persentase maksimal biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (Rincian Output) sebagai berikut:

1. Jasa Regulasi: maksimum 7 persen
2. Barang Infrastruktur: maksimum 6 persen
3. Barang Noninfrastruktur: maksimum 7 persen
4. Jasa Layanan Nonregulasi: maksimum 9 persen.

Ketentuan ini disusun dengan tujuan untuk menjaga efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Dengan adanya standar tersebut, setiap K/L diharapkan dapat mengalokasikan biaya pendukung secara proporsional, tidak berlebihan, dan benar-benar mendukung pencapaian output program.

Berdasarkan hasil *assessment* terbaru, ditemukan bahwa sejumlah K/L, khususnya dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan yang masih memiliki alokasi biaya pendukung yang melampaui batas ketentuan. Kondisi ini menimbulkan indikasi adanya potensi ketidakefisienan atau bahkan kesalahan dalam klasifikasi anggaran. Berikut merupakan daftar Rincian Output dalam Kementerian/Lembaga yang memiliki biaya pendukung melebihi batas berdasarkan klasifikasinya, antara lain:

- a. Kementerian/Lembaga dengan RO Regulasi yang Belum Sesuai
- 1). Kementerian Pertanian tercatat memiliki 7 RO yang melampaui ambang batas. RO dengan nilai pagu pendukung tertinggi mencapai 100 persen, antara lain:
 - a). Program WA – Dukungan Manajemen, RO 502 – Layanan Bersama, dengan pagu pendukung Rp15,65 miliar dari total pagu Rp15,65 miliar.
 - b). Program EC – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, RO 001 – Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan, dengan pagu pendukung Rp3,08 miliar dari total pagu Rp3,08 miliar.
 - c). Program EC – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, RO 001 – Koordinasi,

Tabel 4. 4. Alokasi Rincian Output Regulasi yang Belum Sesuai dalam Belanja Ketahanan Pangan K/L 2024

BA	RO	Pendukung (Miliar Rp)	Utama (Miliar Rp)	Total (Miliar Rp)	% Pendukung
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	2,26	-	2,26	100%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	0,32	-	0,32	100%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan	0,68	-	0,68	100%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	202 – Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan	3,08	-	3,08	100%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	0,31	-	0,31	100%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	502 – Layanan Kerjasama	15,65	-	15,65	100%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	0,83	2,81	3,63	23%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	001 – NSPK Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	0,05	0,17	0,22	23%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	001 – NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,03	0,17	0,20	15%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Bimtek, Monev, dan Pelaporan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, dengan pagu pendukung Rp2,26 miliar dari total pagu Rp2,26 miliar.

- 2). Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 2 RO yang melebihi ketentuan, yaitu:

- a). Program HB – Pengelolaan Perikanan

dan Kelautan, RO 001 – NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, dengan biaya pendukung Rp0,03 miliar dari total pagu Rp0,2 miliar (15 persen).

- b). Program HB – Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, RO 001 – NSPK Bidang Operasi Armada dan Pengembangan Sarana Prasarana PSDKP, dengan biaya

Tabel 4. 5. Alokasi Rincian Output Non Regulasi yang Belum Sesuai dalam Belanja Ketahanan Pangan K/L 2024

BA	RO	Pendukung (Miliar Rp)	Utama (Miliar Rp)	Total (Miliar Rp)	% Pendukung
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	001 – Operasi Intelijen Pengawasan	0,54	1,46	2,00	27%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	001 – Audit Pemanfaatan Ruang Laut yang Dilaporkan	0,03	0,03	0,07	51%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	002 – Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhan	3,00	6,53	9,53	31%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

pendukung Rp0,05 miliar dari total pagu Rp0,22 miliar (21 persen).

b. Kementerian/Lembaga dengan RO Non Regulasi yang Belum Sesuai

Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat memiliki 3 RO yang melampaui ambang batas pada Program HB – Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, yaitu:

- 1). RO 002 – Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhanannya, dengan biaya pendukung Rp3 miliar dari total pagu Rp9,53 miliar (31 persen).
- 2). RO 001 – Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dengan biaya pendukung Rp0,54 miliar dari total pagu Rp2 miliar (27 persen).
- 3). RO 001 – Audit Pemanfaatan Ruang Laut Yang Dilaporkan, dengan biaya pendukung Rp0,03 miliar dari total pagu Rp0,07 miliar (51 persen).

c. Kementerian/Lembaga dengan RO Barang Non Infrastruktur yang Belum Sesuai

Kementerian Pertanian memiliki 4 RO yang seluruhnya berada dalam Program DL – Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yaitu:

- 1). RO 001 – Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur, dengan biaya pendukung Rp0,46 miliar dari total pagu Rp3,9 miliar (12 persen).
- 2). RO 001 – Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian

Sarjana Terapan (D-IV), dengan biaya pendukung Rp20,48 miliar dari total pagu Rp109,2 miliar (19 persen).

- 3). RO 002 – Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma III (D-III), dengan biaya pendukung Rp2,3 miliar dari total pagu Rp16,52 miliar (14 persen).

- 4). RO 003 – Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian, dengan biaya pendukung Rp2,39 miliar dari total pagu Rp12,01 miliar (20 persen).

d. Kementerian/Lembaga dengan RO Barang Infrastruktur yang Belum Sesuai

- 1). Kementerian Pertanian tercatat memiliki 5 RO yang melampaui batas, dua di antaranya dengan nilai terbesar:

- a). Program EC – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, RO 010 – Horticulture Development of Dryland Areas Project, dengan biaya pendukung Rp95,64 miliar dari total pagu Rp184,6 miliar (52 persen).

- b). Program DL – Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, RO 001 – Sarana Pelatihan Pertanian dengan biaya pendukung Rp2,61 miliar dari total pagu Rp3,26 miliar (80 persen).

- 2). Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 4 RO yang seluruhnya terdapat pada Program WA – Dukungan Manajemen, dua di antaranya dengan nilai terbesar:

Tabel 4. 6. Alokasi Rincian Output Barang Non Infrastruktur yang Belum Sesuai dalam Belanja Ketahanan Pangan K/L 2024

BA	RO	Pendukung (Miliar Rp)	Utama (Miliar Rp)	Total (Miliar Rp)	% Pendukung
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur	0,46	3,44	3,90	12%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV)	20,48	88,72	109,20	19%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	002 – Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (D-III)	2,30	14,22	16,52	14%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	003 – Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian	2,39	9,62	12,01	20%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 4. 7. Alokasi Rincian Output Barang Infrastruktur yang Belum Sesuai dalam Belanja Ketahanan Pangan K/L 2024

BA	RO	Pendukung (Miliar Rp)	Utama (Miliar Rp)	Total (Miliar Rp)	% Pendukung
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Sarana Pelatihan Pertanian	2,61	0,65	3,26	80%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	001 – Prasarana Pendidikan Menengah untuk Pertanian	0,23	–	0,23	100%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	010 – <i>Horticulture Development of Dryland Areas Project</i>	95,64	88,95	184,60	52%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	007 – Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	0,10	1,36	1,46	7%
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	002 – Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	0,04	–	0,04	100%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	001 – Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	2,57	1,00	3,57	72%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	001 – Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,38	–	1,38	100%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	001 – Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,81	–	1,81	100%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)	001 – Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP	0,20	–	0,20	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

- RO 001 – Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen, dengan biaya pendukung Rp2,57 miliar dari total pagu Rp3,57 miliar (72 persen).
- RO 001 – Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan biaya pendukung Rp1,81 miliar dari total pagu Rp1,81 miliar (100 persen).

Dengan demikian, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa terdapat sejumlah program dan rincian output (RO) di beberapa K/L yang realisasi biaya pendukungnya melampaui batas ketentuan. Hal ini perlu mendapat perhatian agar alokasi anggaran lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai standar struktur biaya yang berlaku. Diperlukan penyesuaian peraturan jika peraturan yang terakhir ditetapkan di tahun 2021, dirasa kurang dapat mengakomodir kebutuhan struktur anggaran K/L.

Komposisi Pagu dan Realisasi Ketahanan Pangan Nasional

Dalam periode 2023-2024 terdapat kenaikan alokasi pagu sebesar 2,7 persen yang semula sebesar Rp51,38 triliun pada 2023 menjadi Rp triliun pada 2024. Penyerapan belanja Ketahanan Pangan dalam periode 2023 s.d. 2024 berada di bawah 90 persen dengan persentase realisasi tahun 2023 hanya sebesar 88,4 persen dan pada tahun 2024 turun menjadi 82,5 persen. Tidak tercapainya penyerapan tersebut disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak terserap secara maksimal, antara lain kegiatan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan pada tahun 2023 dengan persentase realisasi sebesar 65,5 persen dan kegiatan Perencanaan Ruang Laut pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 18,6 persen.

Belanja Ketahanan Pangan pada tingkat nasional dilaksanakan oleh 5 (lima) Kementerian, antara lain Badan Pangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Di antara ke lima K/L tersebut, alokasi pagu tertinggi pada tahun 2024 terletak pada

Grafik 4.5. Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023 - 2024



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Kementerian PUPR dengan jumlah sebesar Rp29,6 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk mayoritas kegiatan Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan alokasi sebesar Rp18,5 triliun. Selain itu, terdapat kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi dan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana dengan alokasi masing-masing sebesar Rp4,9 triliun dan Rp4,8 triliun.

Pada rentang tahun 2023-2024 persentase penyerapan Kementerian PUPR untuk belanja ketahanan pangan secara keseluruhan kurang optimal dengan persentase realisasi tahun 2023 s.d. 2024 berturut-turut sebesar 82 persen dan 76 persen.

Berikutnya, Kementerian Pertanian juga memiliki alokasi pagu yang cukup besar untuk belanja ketahanan pangan. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi sebesar Rp15,6 triliun dengan realisasi sebesar

Rp14,2 triliun (92 persen). Tingginya penyerapan tersebut mayoritas berasal dari terserapnya kegiatan, antara lain (1) Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum dengan pagu sebesar Rp1,22 triliun dan realisasi sebesar Rp1,21 triliun (99,02 persen); (2) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan pagu sebesar Rp1,06 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,04 triliun (98,33 persen); dan (3) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan dengan pagu sebesar Rp1,03 triliun dan realisasi sebesar Rp1,00 triliun (96,4 persen). Selanjutnya pada tahun 2024, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi sebesar Rp15,6 dengan realisasi sebesar Rp14,3 triliun (91,5). Tingginya penyerapan tersebut mayoritas berasal dari kegiatan, antara lain (1) Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan pagu sebesar Rp2,31 triliun dan realisasi sebesar Rp2,11 triliun (91,11 persen); (2) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan pagu sebesar Rp2,1 triliun dan realisasi sebesar Rp1,85 triliun (87,98 persen); dan (3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan pagu sebesar Rp1,85 triliun dan realisasi sebesar Rp1,77 triliun (95,7 persen). Pada rentang tahun 2023-2024 persentase penyerapan Kementerian Pertanian untuk belanja ketahanan pangan secara keseluruhan sudah optimal dengan persentase realisasi tahun 2023 s.d. 2024 berturut-turut sebesar 97 persen dan 92 persen.

Selanjutnya, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki alokasi yang cukup besar untuk belanja ketahanan pangan. Pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi sebesar Rp6,4 triliun dengan realisasi sebesar Rp6,3 triliun (97,81 persen). Angka penyerapan yang tinggi tersebut diperoleh dari tingginya penyerapan beberapa kegiatan dengan pagu besar, antara lain (1) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp1,04 triliun dan realisasi sebesar Rp1,03 triliun (98,78 persen); (2) Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan

pagu sebesar Rp0,78 triliun dan realisasi sebesar Rp0,77 triliun (99,75 persen); dan (3) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan pagu sebesar Rp0,44 triliun dan realisasi sebesar Rp0,43 triliun (99,01 persen). Kemudian pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan kenaikan alokasi menjadi sebesar Rp7,2 triliun dan realisasi sebesar Rp6,2 triliun (86,57 persen). Penyerapan tersebut di bawah target 90 persen berasal dari beberapa kegiatan, antara lain (1) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp1,09 triliun dan realisasi sebesar Rp1,07 triliun (97,7 persen); (2) Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan pagu sebesar Rp0,71 triliun dan realisasi sebesar Rp0,58 triliun (81,99 persen); dan (3) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan pagu sebesar Rp0,5 triliun dan realisasi sebesar Rp0,48 triliun (95,84 persen). Pada tahun 2023 s.d. 2024 persentase penyerapan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk belanja ketahanan secara berturut-turut mengalami penurunan cukup signifikan yaitu dari 97,81 persen ke 86,57 persen. Hal tersebut disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang memiliki serapan rendah, antara lain Perencanaan Ruang Laut (18,62 persen), Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan (49,01 persen), dan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (65,52 persen).

Berikutnya pada Kementerian Perdagangan memiliki alokasi yang cukup kecil untuk belanja ketahanan pangan dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya. Pada tahun 2023 s.d. 2024, Kementerian Perdagangan mendapatkan berturut-turut alokasi sebesar Rp205,03 miliar dan Rp241,03 miliar dengan realisasi sebesar Rp204,64 miliar (99,81 persen) dan Rp239,4 miliar (99,31 persen). Angka penyerapan yang tinggi tersebut diperoleh dari tingginya penyerapan kegiatan terkait belanja ketahanan pangan, yaitu kegiatan Peningkatan

Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Terakhir, pada Badan Pangan Nasional memiliki alokasi pagu untuk belanja ketahanan pangan yang paling kecil dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya. Pada tahun 2023 s.d. 2024, Badan Pangan Nasional mendapatkan berturut-turut alokasi sebesar Rp44,1 miliar dan Rp29,12 miliar dengan realisasi sebesar Rp43,6 miliar (98,9 persen) dan Rp28,96 miliar (99,43 persen). Angka penyerapan yang tinggi tersebut diperoleh dari tingginya penyerapan kegiatan terkait belanja ketahanan pangan, yaitu kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

IV.5. PERKEMBANGAN KETAHANAN PANGAN PER REGIONAL

IV.5.A. Regional Jawa

IV.5.A.1. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Regional Jawa tahun 2024 menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang relatif kuat dan merata di sebagian besar provinsi, meskipun masih terdapat disparitas antarwilayah. Jawa Tengah mencatat nilai tertinggi sebesar 85,34, mencerminkan kinerja terbaik dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Disusul oleh DI Yogyakarta dengan 84,15, Jawa Timur 83,86, serta Jawa Barat 82,97, yang keseluruhannya berada pada kategori tinggi. DKI Jakarta juga menunjukkan capaian yang

baik dengan nilai 85,13, mencerminkan akses pangan yang kuat meskipun wilayahnya sangat urban. Sementara itu, Provinsi Banten mencatat nilai terendah di Pulau Jawa, yaitu 79,25, yang menunjukkan perlunya peningkatan pada beberapa indikator ketahanan pangan. Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah di Jawa telah memiliki fondasi ketahanan pangan yang solid, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan antarprovinsi dan menjaga stabilitas ketahanan pangan secara berkelanjutan.

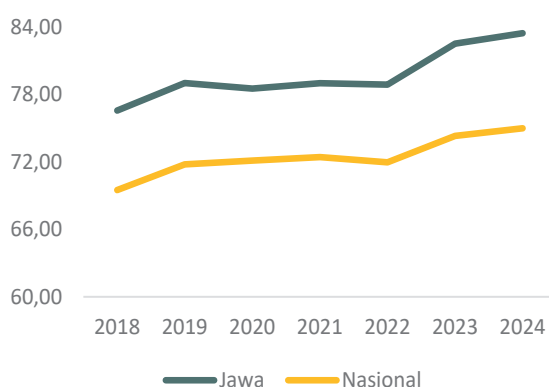
Sebanyak 118 Kab/Kota atau 99 persen dari 119 Kab/Kota memiliki skor IKP yang tinggi dengan sebaran sebagai berikut: 114 Kab/Kota (Sangat Tahan); 4 Kab/Kota (Tahan); dan 1 Kab (Agak Rentan) yaitu pada Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten/Kota pada Regional Jawa, diperoleh 5 (lima) Kab/Kota dengan urutan skor terbaik, yaitu (1) Kota Bekasi (93,90); (2) Kota Surabaya (93,06); (3) Kota Semarang (92,74); (4) Kota Madiun (92,29); dan (5) Kota Jakarta Timur (91,81). Sedangkan 5 (lima) Kab/Kota dengan urutan skor terendah, yaitu (1) Kab. Kep. Seribu (58,05); (2) Kab Bogor (70,01); (3) Kota Serang (71,95); (4) Kab. Lebak (72,76); dan (5) Kab. Probolinggo (74,22).

Gambar 4.1. Indeks Ketahanan Pangan Regional Jawa Tahun 2024



Sumber : BPS 2024, diolah

Grafik 4.6. Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Jawa dan Nasional Tahun 2018-2024



Sumber : BPS 2024, diolah

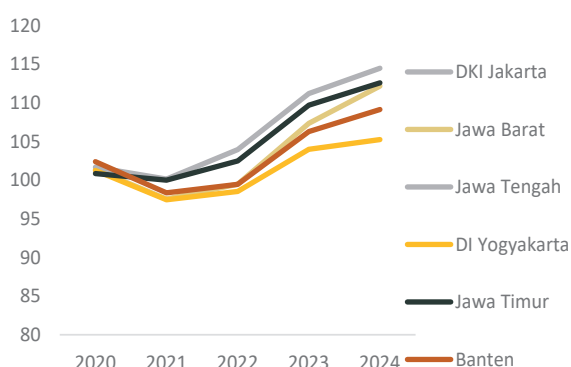
Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Jawa dan Nasional pada periode 2018–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Secara umum, indeks Ketahanan Pangan di

Regional Jawa selalu berada di atas capaian nasional, mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang relatif lebih kuat di regional tersebut. IKP Regional Jawa meningkat dari 76,57 pada 2018 menjadi 83,45 pada 2024, dengan lonjakan signifikan pada 2023–2024 yang menandakan adanya perbaikan kinerja ketahanan pangan regional.

IV.5.A.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani

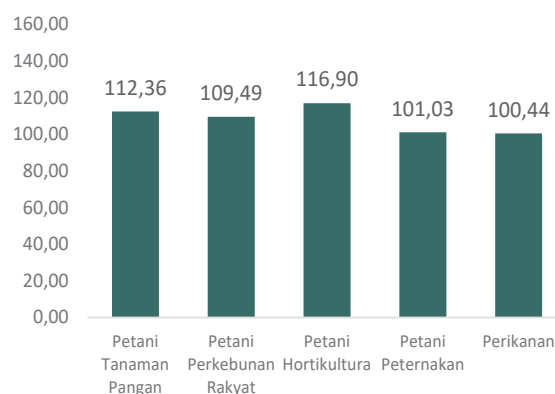
Secara umum, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2024 pada regional Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan capaian NTP tertinggi (114,48) kemudian disusul berturut-turut oleh Jawa Timur (112,59), Jawa Barat (112,17), dan Banten (109,14), dan DI Yogyakarta (105,25). Berdasarkan subsektor Nilai Tukar Petani (NTP) pada wilayah Jawa menunjukkan variasi yang cukup jelas antarprovinsi. Jawa Tengah mencatat subsektor unggul pada tanaman pangan (117,7) dan hortikultura (118,57). Pada Jawa Timur memiliki subsektor hortikultura tertinggi di seluruh Jawa (126,7), kemudian pada Jawa Barat relatif kuat dengan subsektor tanaman pangan (113,2) dan hortikultura (116,65), sementara peternakan cukup baik (104,13). Pada DI Yogyakarta mencatat nilai subsektor hortikultura sangat menonjol (125,35) dibandingkan subsektor lainnya. Pada Banten memiliki nilai subsektor tanaman pangan yang baik (113,73) tetapi nilai hortikultura cukup tertekan (97,22) di bawah

Grafik 4.7. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Jawa



Sumber : BPS 2024, diolah

Grafik 4.8. Perbandingan Subsektor NTP Regional Jawa



Sumber : BPS 2024, diolah

angka 100. Secara umum, subsektor hortikultura menjadi penggerak utama tingginya NTP di Jawa, kecuali di Banten yang justru mengalami kelemahan di subsektor ini.

Pada Provinsi Banten, upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian terus dilakukan, salah satu yang telah dilakukan adalah pemberian fasilitas mesin pengolahan gabah dan teknologi pertanian yang meningkatkan nilai jual gabah. Selain itu terdapat pemberian bantuan sosial dan program subsidi yang diyakini dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (lb konsumsi rumah tangga petani) di Banten. Pada Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan produksi pertanian, telah dilakukan berbagai upaya yaitu pemberian subsidi pupuk menekan biaya produksi petani dan subsidi bunga kredit melalui KUR untuk memberikan akses pembiayaan murah bagi petani. Pada Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian yaitu pelaksanaan kegiatan Gerakan Tanam Padi bersama dalam mencapai swasembada pangan dengan Bank BJB dalam acara Panen Raya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian antara lain: (1) penggunaan varietas unggul, yakni mendorong penanam padi varietas unggul yang memiliki produksi tinggi dan tahan terhadap kondisi ekstrem seperti kekeringan atau banjir; (2) Pemupukan berimbang, yaitu penerapan prinsip “6 tepat” dalam penggunaan

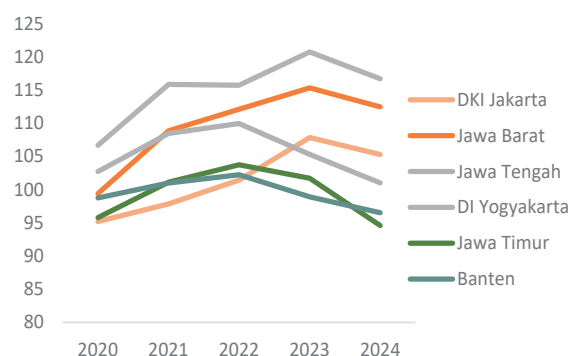
pupuk yaitu tepat tepat, harga, jumlah, mutu, jenis, dan waktu, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pemupukan; (3) Optimalisasi infrastruktur pertanian, yaitu pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian; dan (4) Penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti *combine harvester*, untuk mengurangi kehilangan hasil panen dan meningkatkan efisiensi.

Secara umum, subsektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura menjadi penggerak utama nilai tukar petani (NTP) di Jawa, bahkan untuk subsektor tanaman pangan, regional Jawa menjadi yang paling tinggi secara nasional dibandingkan regional lainnya. Sebaliknya, subsektor perikanan dan peternakan di Jawa masih lemah dengan capaian yang cukup rendah.

IV.5.A.3. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Secara umum, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2024 pada regional Jawa, yaitu Provinsi DI Yogyakarta menjadi daerah dengan capaian NTN tertinggi (116,69) kemudian disusul berturut-turut oleh Jawa Barat (112,45), DKI Jakarta (105,28), Jawa Tengah (101), Banten (96,51) dan Jawa Timur (94,59). Dalam 2 tahun terakhir tren NTN pada Provinsi DKI Jakarta mengalami tekanan yang semakin besar. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren penurunan tersebut antara lain (1) Kenaikan biaya produksi – harga pupuk, BBM, dan bahan baku lainnya yang terus meningkat; (2) Dampak Perubahan Iklim – Cuaca ekstrem akibat fenomena El-Nino sehingga mempengaruhi produktivitas hasil tangkapan nelayan; dan (3) terdapat akses terbatas ke pasar dan modal yang diakibatkan oleh kendala dalam akses pembiayaan dan pemasaran hasil perikanan. Berikutnya pada dalam rangka mengoptimalkan produksi perikanan, pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya melakukan diversifikasi produk perikanan melalui hilirisasi; pengembangan produk turunan seperti susu ikan; akses pasar yang lebih luas; peningkatan kualitas hasil

Grafik 4.9. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Jawa



Sumber : BPS 2024, diolah

tangkapan dan minawisata. Pada Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan produktivitas perikanan, antara lain: (1) melaksanakan forum diskusi berupa talkshow pada Acara Festival Bahari Jateng untuk menampung dan memecahkan isu; (2) Pameran pangan hasil laut dan berbagai olahan pangan hasil laut untuk menggaungkan hasil pangan laut kepada khalayak umum; dan (3) Pemberian bantuan mesin kapal untuk kesejahteraan nelayan. Pada Provinsi Jawa Timur terdapat tren penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas perikanan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain: (1) Revitalisasi pelabuhan perikanan; (2) Pemberdayaan masyarakat nelayan; (3) Akses permodalan; dan (4) Program kampung nelayan bersih yang bertujuan meningkatkan kesadaran nelayan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan pemukiman.

IV.5.A.4. Analisis Belanja Program Prioritas Pemerintah

Belanja ketahanan pangan dilaksanakan oleh 5 (lima) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pangan Nasional. Di antara kelima K/L tersebut, alokasi pagu tertinggi terletak pada Kementerian PUPR karena adanya alokasi pagu untuk pembangunan yang ada di Jawa Barat.

Kinerja program ketahanan pangan di regional

Tabel 4. 8. Kinerja Anggaran Program Ketahanan Pangan Regional Jawa vs Nasional 2024

K/L–Program	Jawa		Total	
	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
BPN – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	19,9	19,8	29,1	29,0
KKP – Program Dukungan Manajemen	2.595,9	2.448,2	3.991,7	3.815,9
KKP – Program Kualitas Lingkungan Hidup	76,5	67,8	131,5	121,3
KKP – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	191,3	152,7	214,5	172,6
KKP – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	211,2	194,2	380,7	340,2
KKP – Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.031,9	1.383,9	2.529,9	1.825,0
PUPR – Program Ketahanan Sumber Daya Air	11.837,9	8.880,3	29.636,6	22.670,8
Kemendag – Program Perdagangan Dalam Negeri	241,1	239,4	241,1	239,4
Kementan – Program Dukungan Manajemen	2.863,0	2.474,4	3.518,7	3.072,4
Kementan – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6.376,4	5.927,6	9.760,5	9.033,5
Kementan – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.178,8	1.076,1	1.456,5	1.327,0
Kementan – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	517,8	507,8	883,3	866,2
Total	28.141,7	23.372,4	52.774,1	43.513,4

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Jawa didominasi oleh Kementerian PUPR dengan porsi terbesar, yaitu pagu Rp11,84 triliun atau sekitar 42 persen dari total pagu ketahanan pangan di Jawa. Kontribusi signifikan juga datang dari Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pagu Rp6,38 triliun dengan realisasi 92 persen, yang memperkuat sisi hulu produksi dan ketersediaan pangan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan senilai Rp2 triliun dengan realisasi 68 persen, mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya laut. Secara keseluruhan, realisasi anggaran ketahanan pangan di Jawa mencapai Rp23,37

triliun dari total pagu Rp28,14 triliun, dengan dominasi kegiatan infrastruktur dan produksi pangan utama.

Pada level KRO, kinerja program ketahanan pangan di regional Jawa didominasi oleh Kementerian PUPR dengan tiga KRO utama, yaitu Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (pagu Rp6,54 triliun, realisasi 76 persen), Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Rp3,37 triliun, realisasi 57 persen), dan OM Prasarana Jaringan SDA (Rp1,58 triliun, realisasi 99 persen). Ketiganya menyerap sekitar 30 persen dari total pagu dan 36,5 persen dari total realisasi regional Jawa, menegaskan fokus pada penguatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan air untuk mendukung produktivitas

Tabel 4. 9. Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan Regional Jawa 2024

Nama K/L	Nama KRO	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
BPN	Bantuan Masyarakat	19,9	19,8
KKP	Bantuan Peralatan / Sarana	440,9	417,3
KKP	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.959,8	1.895,6
KKP	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	505,8	216,8
PUPR	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	1.584,8	1.576,2
PUPR	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	6.538,3	5.014,6
PUPR	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	3.366,9	1.942,7
Kemendag	Data dan Informasi Publik	5,4	5,2
Kemendag	Koordinasi	6,4	5,5
Kemendag	Pemantauan produk	227,3	227,1
Kementan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.319,2	2.141,9
Kementan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.698,0	2.518,7
Kementan	Sarana Pengembangan Kawasan	2.588,5	2.464,3
Lainnya		5.880,45	4.926,56
Total		28.141,7	23.372,4

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

pangan. Dari sisi Kementerian Pertanian, KRO Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup menjadi yang terbesar (pagu Rp2,69 triliun, realisasi 93,32 persen), diikuti Prasarana Pengembangan Kawasan (Rp2,59 triliun, realisasi 95,20 persen). Kedua KRO ini memperlihatkan komitmen pada peningkatan sarana produksi dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan.

Ketahanan pangan di beberapa provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2024 melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan dukungan pemerintah daerah melalui APBN maupun TKD. Di Provinsi Jawa Barat, terdapat tiga kementerian pengampu utama, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian PUPR, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari ketiganya, Kementerian PUPR memiliki alokasi terbesar yang difokuskan pada pembangunan bendungan, irigasi, dan perbaikan embung di sejumlah wilayah. Kementan sendiri mendapatkan alokasi signifikan, di antaranya Rp227 miliar untuk pembangunan 1.886 unit irigasi perpompaan besar wilayah barat, serta kegiatan prioritas nasional seperti asuransi pertanian, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas pemuda di sektor pertanian yang berdampak pada tingginya penyerapan anggaran. Sementara itu, KKP mengalokasikan pagu untuk pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan, penyediaan sarana perbenihan ikan, dan prasarana produksi budidaya perikanan. Namun, capaian output di Jawa Barat tidak sepenuhnya optimal karena adanya blokir anggaran hingga akhir tahun, serta peran Balai Embrio Ternak Cipelang Kementan yang menyalurkan indukan sapi untuk seluruh Indonesia tidak berjalan maksimal. Di DI Yogyakarta, belanja ketahanan pangan terbesar dikelola oleh SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak (PUPR), dengan proyek besar seperti pembangunan Daerah Irigasi Slinga tahap II dan program percepatan tata guna air irigasi. Selain itu, dukungan TKD melalui DAK Fisik (bidang irigasi, jalan, kelautan dan perikanan, serta pertanian) dan DAK Non Fisik juga berperan penting. Alokasi terbesar

dari DAK Fisik dikelola Pemda DIY, terutama di bidang irigasi di Kulon Progo, jalan dan pertanian di wilayah lain, serta kelautan dan perikanan di Kabupaten Sleman.

Sementara itu, Jawa Timur mencatat peningkatan signifikan dalam alokasi belanja ketahanan pangan 2024 yang ditopang oleh empat K/L, yaitu Kementan, KKP, PUPR, dan Badan Pangan Nasional. Kementan mencatat realisasi sebesar 92,1 persen dengan capaian KRO standardisasi produk benih ternak unggul melebihi target. KKP merealisasikan anggarannya sebesar 92,31 persen, sedangkan PUPR memiliki alokasi tertinggi untuk pembangunan infrastruktur utama seperti Bendungan Bagong, namun realisasi fisiknya hanya 69,16 persen sehingga secara agregat realisasi belanja PUPR mencapai 76,08 persen. Badan Pangan Nasional justru mencatatkan kinerja terbaik dengan realisasi 99,08 persen meski alokasinya paling kecil. Di sisi lain, TKD diarahkan pada penguatan infrastruktur pertanian (irigasi, embung, jalan usaha tani), sarana pasca panen (fasilitas pengeringan, penyimpanan, rice milling unit), peningkatan kapasitas produksi (alat mesin pertanian, pupuk organik), penguatan sistem cadangan pangan (lumbung desa, cadangan pangan daerah), pengelolaan sumber daya air (teknologi hemat air), hingga peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Alokasi DAK Fisik di Jawa Timur juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada bidang jalan, irigasi, dan pertanian dengan rata-rata realisasi mencapai 92,96 persen. Dari sisi APBD, Pemda Jawa Timur turut melaksanakan program strategis seperti peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, pengembangan kawasan agropolitan, serta peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.

Sementara di Provinsi Banten, terdapat tiga K/L (Kementan, KKP, dan PUPR) dengan 18 satker yang mengelola anggaran ketahanan pangan sebesar Rp369,9 miliar dengan realisasi 98,89 persen, menunjukkan kinerja optimal. Penyaluran dana dilakukan juga melalui TKD

yang terdiri dari DAK Fisik (bidang irigasi, jalan, kelautan dan perikanan, serta pertanian) dan DAK Non Fisik. Meskipun pagu DAK Fisik di empat bidang tidak terserap penuh karena perbedaan kebijakan kontrak Pemda dengan pihak ketiga, capaian output tetap cukup beragam. Beberapa hasil nyata di antaranya adalah pemeliharaan dan peningkatan jalan pada ruas Cikupaeun–Turus dan Cibitung–Lebak, rehabilitasi jaringan irigasi di 18 daerah, pengadaan alsintan seperti pemipil jagung, pembangunan infrastruktur kesehatan hewan, serta pengadaan kolam ikan, mesin kapal, dan sarana prasarana budidaya perikanan air laut maupun tawar. Dari DAK Non Fisik, terdapat program pengembangan pekarangan pangan lestari (P2L) untuk mendukung penanganan stunting di daerah rawan, serta kegiatan penyuluhan tematik bercocok tanam, kursus tani, dan sosialisasi. Dukungan untuk puskesmas juga diberikan melalui penyediaan obat hewan, biaya distribusi sampel laboratorium, dan operasional harian. Dari sisi APBD, Banten melaksanakan program penting seperti penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan, penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha, hingga penyuluhan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas pangan (padi, jagung, kacang tanah, cabai, pisang, kelapa) dan ternak (sapi, kerbau, domba, kambing), melalui pengadaan alsintan seperti cultivator, hand tractor, corn seeder, serta pengembangan varietas unggul padi (organik dan biofortifikasi), jagung, kelapa, kacang, serta ternak berkualitas unggul. Secara umum, di keempat provinsi tersebut, strategi ketahanan pangan dilaksanakan secara terpadu melalui program K/L, dukungan TKD, dan program APBD yang menyasar infrastruktur, peningkatan produktivitas, pascapanen, cadangan pangan, serta pengembangan SDM petani untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah.

IV.5.A.5. Analisis Permasalahan Spesifik

Ketahanan pangan merupakan salah satu

isu strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda sehingga menghadapi tantangan yang beragam dalam mewujudkan ketahanan pangan. Beberapa provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, memperlihatkan dinamika yang kompleks mulai dari keterbatasan lahan, ancaman bencana alam, keterbatasan infrastruktur, hingga perubahan iklim. Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan tersebut menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, serta kualitas pangan bagi seluruh masyarakat.

Pada Provinsi DKI Jakarta, tantangan utama muncul dari kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Sebagai provinsi dengan luas daratan yang relatif kecil dan didominasi wilayah perairan, Jakarta menghadapi masalah serius berupa penurunan muka tanah dan banjir musiman. Kawasan pesisir seperti Cengkareng Barat dan Pantai Indah Kapuk menjadi daerah yang paling rentan. Upaya mitigasi telah dilakukan, baik jangka pendek seperti pembangunan tanggul dan waduk, maupun jangka panjang melalui proyek terintegrasi *National Integrated Coastal Development*. Namun, di sisi lain, keterbatasan infrastruktur transportasi, kemacetan parah, dan perawatan jalan yang belum optimal juga menambah kerumitan dalam mendistribusikan pangan secara merata dan efisien di wilayah metropolitan ini.

Berbeda dengan Jakarta, tantangan di Provinsi Jawa Barat lebih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan air bersih. Kekeringan yang berulang kali terjadi, terutama di wilayah selatan telah menimbulkan krisis yang berimbas langsung pada sektor pertanian dan kesehatan masyarakat. Kekeringan pada tahun 2019 di Tasikmalaya, misalnya, menyebabkan gagal panen dan krisis air bersih di sejumlah

kecamatan. Data terbaru BPBD 2024 mencatat ada 12 daerah dengan status siaga darurat kekeringan, berdampak pada 34 kecamatan dan lebih dari 17 ribu rumah tangga. Fakta ini menegaskan bahwa tanpa pengelolaan air yang baik, ketahanan pangan akan terus terganggu, terlebih karena air merupakan faktor vital bagi irigasi pertanian dan kelangsungan hidup masyarakat.

Di Provinsi Jawa Tengah, tantangan ketahanan pangan lebih kompleks karena melibatkan aspek ketersediaan, aksesibilitas, hingga distribusi. Laju konversi lahan pertanian menjadi permukiman, industri, dan infrastruktur telah mengurangi luas lahan produktif, sementara perubahan iklim memicu risiko gagal panen akibat banjir maupun kekeringan. Meskipun produksi pangan relatif tinggi, ketergantungan pada impor gandum dan kedelai masih belum dapat dihindari. Di sisi lain, infrastruktur distribusi pangan yang tidak merata menimbulkan ketimpangan pasokan antarwilayah. Masyarakat miskin semakin rentan karena daya beli mereka terganggu oleh fluktuasi harga beras dan komoditas pokok lainnya. Urbanisasi yang cepat menekan lahan pertanian dan memperparah persoalan distribusi. Semua faktor ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah membutuhkan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menjamin distribusi pangan yang adil dan berkelanjutan.

Di Provinsi DI Yogyakarta, situasi menjadi unik karena target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menuntut ketersediaan pangan yang stabil, sementara sektor pertanian justru melambat. Laju pertumbuhan pesat pada sektor jasa, pariwisata, serta penyediaan akomodasi dan makanan memperbesar permintaan bahan pangan, namun laju konversi lahan pertanian ke fungsi lain semakin meningkat. Fragmentasi lahan akibat sistem warisan dan minimnya regenerasi petani memperburuk kondisi. Data BPS DIY menunjukkan mayoritas petani berusia lanjut dengan pendidikan rendah, sementara jumlah petani milenial masih sangat sedikit. Konsekuensinya, produktivitas rendah, nilai tambah minim, dan kesejahteraan petani sulit

meningkat. Fenomena El Niño 2023 semakin memperburuk situasi, menurunkan produksi pertanian hingga 50–60 persen. Meski angka Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100, subsektor tanaman pangan dan peternakan masih belum sejahtera. Hal ini menegaskan bahwa tanpa inovasi pertanian, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, dan dukungan generasi muda, ketahanan pangan DIY akan sulit terjaga.

Dari gambaran keempat provinsi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, melainkan juga menyangkut persoalan infrastruktur, tata ruang, distribusi, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat. Jakarta membutuhkan solusi integratif dalam penanggulangan banjir dan pengelolaan wilayah pesisir, Jawa Barat memerlukan manajemen sumber daya air yang lebih baik, Jawa Tengah harus memperkuat distribusi dan mengendalikan alih fungsi lahan, sedangkan DIY dituntut untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sektor pertanian. Dengan perencanaan kebijakan yang tepat, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keberpihakan pada petani dan masyarakat kecil, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pembangunan.

IV.5.A.6. Strategi dan Potensi Pengembangan Komoditas Lokal

Strategi dan kebijakan implementasi belanja ketahanan pangan di berbagai provinsi Indonesia menggambarkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, setiap daerah memiliki prioritas kebijakan yang mengarah pada tujuan nasional, yakni tercapainya kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Dalam Provinsi DKI Jakarta, keterbatasan lahan pertanian mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi melalui kebijakan *urban*

farming, pemanfaatan ruang vertikal, dan sistem pertanian terpadu di kawasan perkotaan. Belanja daerah diarahkan pada penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah (RAD-PG), reformasi tata kelola distribusi pangan, serta pengembangan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Selain itu, kebijakan ini turut memperhatikan isu ketimpangan sosial dan akses terhadap pangan bergizi dengan mengalokasikan anggaran untuk memperkuat jejaring distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan pangan murah dan berkualitas.

Di Provinsi Jawa Tengah, implementasi kebijakan belanja ketahanan pangan memiliki dimensi yang lebih agraris dan produktif. Provinsi ini berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan orientasi belanja yang fokus pada peningkatan produksi dan efisiensi sistem pertanian. Melalui program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai), pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan benih unggul, mekanisasi pertanian, dan perbaikan jaringan irigasi. Belanja publik juga diarahkan untuk memperkuat cadangan pangan daerah, guna mengantisipasi krisis pangan akibat bencana alam atau gangguan iklim. Selain itu, anggaran signifikan dialokasikan untuk program sosial seperti BPNT, Rastra, dan PKH, yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin agar tetap memiliki akses terhadap pangan pokok. Melalui strategi ini, Provinsi Jawa Tengah tidak hanya memperkuat sisi produksinya, tetapi juga memperhatikan dimensi distribusi dan konsumsi secara seimbang, menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan adil.

Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menampilkan model ketahanan pangan berbasis kearifan lokal melalui program Lumbung Mataraman, yang menjadi simbol revitalisasi tradisi pangan nusantara. Belanja pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan lumbung pangan hidup di tingkat kalurahan yang mengintegrasikan produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan secara mandiri.

Pendanaan program ini sebagian besar berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) yang dikelola secara partisipatif, melibatkan masyarakat, kelompok tani, dan lembaga adat. Penggunaan Tanah Kas Desa (*Sultan Ground*) menjadi bentuk inovatif pemanfaatan aset publik untuk ketahanan pangan berbasis komunitas. Selain fungsi produksi, program ini juga berperan dalam edukasi pangan dan gizi, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan produktif. Strategi belanja yang diterapkan tidak hanya menargetkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan budaya, menjadikan DIY contoh nyata daerah yang menggabungkan kebijakan modern dengan nilai-nilai lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Pada Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan basis pertanian dan perkebunan yang kuat dikarenakan menerapkan strategi belanja ketahanan pangan melalui pendekatan agribisnis dan agropolitan. Pemerintah daerah menyalurkan anggaran besar untuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Pengembangan Agribisnis, dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Fokus belanja diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, penyediaan sarana dan prasarana produksi seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengembangan jaringan irigasi. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan menjadi instrumen penting untuk menciptakan sentra-sentra produksi pangan berbasis komoditas unggulan lokal yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri). Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan belanja untuk memperkuat penyuluhan pertanian dan sistem informasi pasar, serta menerapkan *Good Agricultural Practices (GAP)* guna memastikan keamanan dan mutu pangan. Pendekatan ini menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu model daerah dengan sistem pertanian yang modern, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim global.

IV.5.A.7. Rekomendasi

Ketahanan pangan merupakan aspek penting pembangunan yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Melalui kebijakan dan belanja daerah yang terarah, tiap provinsi berupaya memastikan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau, tidak hanya lewat peningkatan produksi tetapi juga perbaikan distribusi, akses, pemberdayaan ekonomi, dan informasi pangan. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, sistem pangan nasional diharapkan semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Di Provinsi DKI Jakarta, strategi implementasi belanja ketahanan pangan diarahkan pada penguatan koordinasi antar-dinas dan efisiensi program lintas sektor. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) memegang peranan penting dalam memastikan ketersediaan pangan melalui optimalisasi pasokan dan peningkatan efisiensi distribusi beras. Selain itu, upaya diversifikasi pangan lokal terus ditingkatkan agar masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas pokok. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) bersama Dinas Kesehatan berkolaborasi melaksanakan program bantuan gizi berbasis kebutuhan, seperti edukasi pola makan sehat dan pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil serta balita. Di sisi lain, Dinas Sosial berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga rentan melalui pembinaan UMKM pangan, sementara Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk beasiswa dan kampanye pentingnya pendidikan perempuan guna memperkuat peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Pendekatan holistik ini menjadikan Jakarta sebagai contoh integrasi kebijakan pangan, gizi, dan kesejahteraan sosial di wilayah perkotaan.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, implementasi kebijakan belanja ketahanan pangan menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah daerah bekerja sama

dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat interkoneksi sistem informasi keuangan daerah melalui integrasi antara OM-SPAN dan sistem Pemda. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, menghindari duplikasi program, serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam monitoring dan evaluasi belanja. Di sisi substantif, kebijakan diarahkan pada perlindungan lahan pertanian melalui regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pembangunan infrastruktur distribusi pangan, serta penerapan teknologi pertanian berbasis inovasi. Jawa Tengah juga memperluas program diversifikasi pangan dan edukasi gizi masyarakat, sekaligus menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas petani untuk memperkuat rantai pasok, efisiensi produksi, dan stabilitas harga.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menonjolkan pendekatan kebijakan yang berbasis kearifan lokal dan tata kelola berkelanjutan. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan menetapkan batas kawasan pertanian, penerapan zonasi tata ruang, dan pemberian insentif bagi petani agar tetap mengelola lahan produktif. Belanja daerah difokuskan untuk pengembangan infrastruktur pertanian, urban farming, agroforestry, serta pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) guna memperkuat pengawasan lahan. Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan efektivitas produksi melalui akses teknologi modern, penyediaan benih unggul, konservasi tanah, dan perbaikan sistem pemasaran hasil pertanian. Dalam aspek stabilisasi harga, DIY melanjutkan kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dukungan terhadap program Lumbung Mataraman, optimalisasi Dana Keistimewaan, serta penguatan KAD (Kerja Sama Antar Daerah) menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan pangan lokal yang inklusif, adaptif, dan berbasis masyarakat.

Tabel 4. 10. IPMRegionalSumateraTahun2021-2024

Provinsi	IPM			
	2021	2022	2023	2024
Aceh	72,18	72,8	74,7	75,36
Sumatera Utara	72,00	72,71	75,13	75,76
Sumatera Barat	72,65	73,26	75,64	76,43
Riau	72,94	73,52	74,95	75,67
Jambi	71,63	72,14	73,73	74,36
Sumatera Selatan	70,24	70,9	73,18	73,84
Bengkulu	71,64	72,16	74,3	74,91
Lampung	69,90	70,45	72,48	73,13
Kepulauan Bangka Belitung	71,69	72,24	74,09	74,55
Kepulauan Riau	75,79	76,46	79,08	79,89

Sumber : BPS 2024, diolah

Sementara itu, Provinsi Jawa Timur mengarahkan kebijakan belanja ketahanan pangan pada peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Program seperti Peningkatan Produksi Pertanian, Pengembangan Kawasan Agropolitan, dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian menjadi prioritas. Anggaran daerah digunakan untuk memperluas akses terhadap pupuk bersubsidi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta pembangunan irigasi. Jawa Timur juga menekankan penguatan agribisnis terpadu melalui pengembangan agroindustri dan sistem informasi pasar yang efisien. Pengembangan *Good Agricultural Practices (GAP)* diterapkan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan hasil produksi. Selain itu, pemerintah provinsi memperkuat kapasitas SDM pertanian melalui pelatihan dan revitalisasi penyuluh agar mampu beradaptasi terhadap tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar global. Belanja ini bukan hanya investasi ekonomi, melainkan juga bentuk investasi sosial dalam menciptakan sistem pangan yang adil, tangguh, dan berdaya saing.

Adapun Provinsi Banten menyiapkan strategi belanja ketahanan pangan yang terfokus pada pengembangan sistem pangan regional berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah berupaya memperluas areal pertanian produktif, memperbaiki jaringan irigasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Selain itu, Banten memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui program pemberdayaan perempuan tani dan diversifikasi pangan berbasis komoditas

Tabel 4. 11. Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Tahun 2021-2024

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi C-to-C			
	2021	2022	2023	2024
Aceh	72,18	72,8	74,7	75,36
Sumatera Utara	72,00	72,71	75,13	75,76
Sumatera Barat	72,65	73,26	75,64	76,43
Riau	72,94	73,52	74,95	75,67
Jambi	71,63	72,14	73,73	74,36
Sumatera Selatan	70,24	70,9	73,18	73,84
Bengkulu	71,64	72,16	74,3	74,91
Lampung	69,90	70,45	72,48	73,13
Kepulauan Bangka Belitung	71,69	72,24	74,09	74,55
Kepulauan Riau	75,79	76,46	79,08	79,89

Sumber : BPS 2024, diolah

lokal seperti umbi-umbian dan hortikultura. Penguatan koordinasi antarinstansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi prioritas dalam memastikan kebijakan belanja yang efektif dan terukur. Dengan mengedepankan transparansi, kolaborasi, dan keberlanjutan, Banten diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan regional sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas pangan nasional.

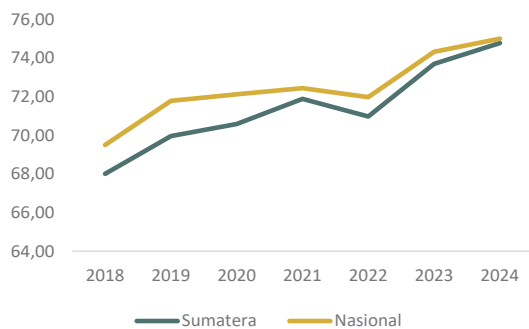
Dengan demikian, kebijakan implementasi belanja ketahanan pangan di keenam provinsi ini menunjukkan integrasi yang kuat antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. DKI Jakarta fokus pada efisiensi distribusi dan pemberdayaan masyarakat perkotaan; Jawa Tengah menekankan tata kelola anggaran dan teknologi pertanian; DIY mengutamakan keberlanjutan dan kearifan lokal; Jawa Timur memperkuat sektor agribisnis; sedangkan Banten berfokus pada pengembangan potensi lokal. Sinergi antarwilayah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global.

IV.5.B. REGIONAL SUMATERA

IV.5.B.1. Perkembangan Indikator Ketahanan Pangan

Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Regional Sumatera menunjukkan tren peningkatan dari 68,00 pada 2018 menjadi 74,77 pada 2024, tumbuh sebesar 6,77 poin. Meskipun konsisten meningkat, capaian

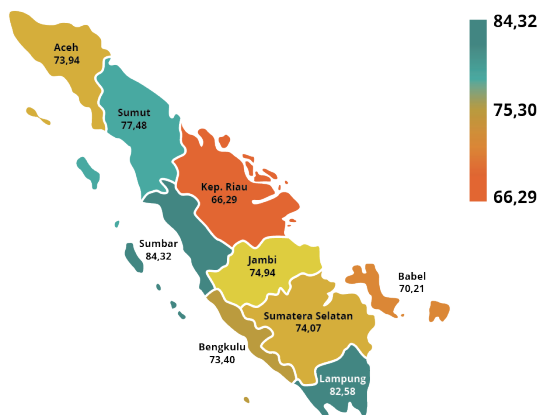
Grafik 4.10. Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2018-2024



Sumber : BPS 2024, diolah

Sumatera masih sedikit di bawah rata-rata nasional yang naik dari 69,50 menjadi 74,99 dalam periode yang sama. Kesenjangan antara Sumatera dan nasional terus menyempit, mencerminkan perbaikan ketahanan pangan yang semakin merata di wilayah tersebut.

Gambar 4.2. Indeks Ketahanan Pangan Regional Sumatera Tahun 2024



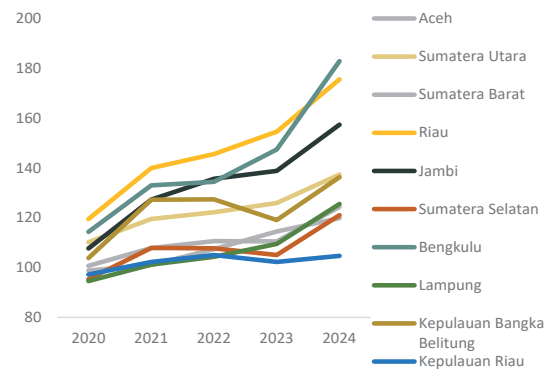
Sumber : BPS 2024, diolah

Secara umum, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2018-2024. Peningkatan tertinggi terjadi di Sumatera Barat dan Lampung, yang masing-masing mencapai 84,32 dan 82,58 pada 2024, menandakan ketahanan pangan yang relatif kuat. Provinsi seperti Aceh, Jambi, dan Sumatera Utara juga mencatat kenaikan stabil di atas 73 poin. Sementara itu, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah 71 poin, menunjukkan masih perlunya penguatan akses dan ketersediaan pangan di wilayah kepulauan.

IV.5.B.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara keseluruhan, Nilai Tukar Petani (NTP) provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2020-2024, mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani. Riau dan Bengkulu menjadi provinsi dengan lonjakan tertinggi, masing-masing mencapai 175,54 dan 182,86 pada 2024. Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung juga mencatat pertumbuhan stabil di atas 120 poin, menandakan sektor pertanian yang semakin kuat. Sementara itu, Kepulauan Riau mengalami kenaikan paling lambat, dengan NTP relatif stagnan di kisaran 104-105.

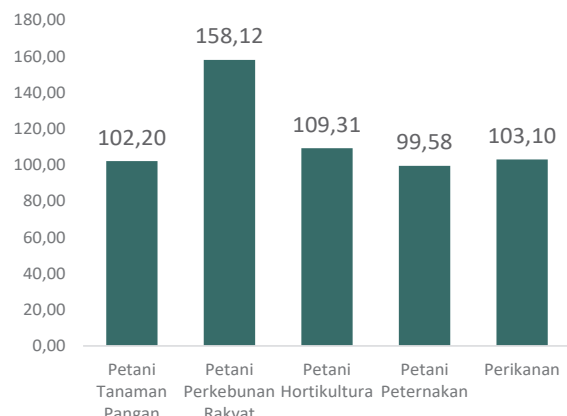
Grafik 4.11. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Sumatera



Sumber : BPS 2024, diolah

Secara umum, subsektor perkebunan menjadi penggerak utama nilai tukar petani (NTP) di Sumatera, bahkan untuk subsektor

Grafik 4.12. Perbandingan Subsektor NTP Regional Sumatera

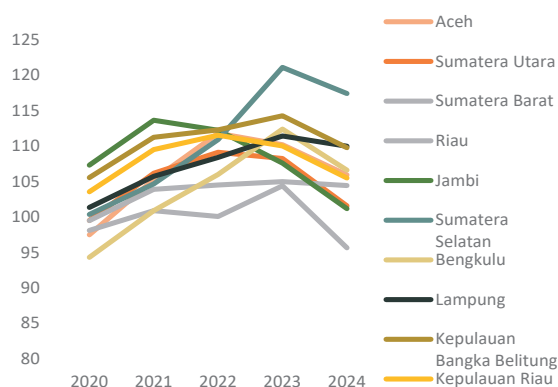


Sumber : BPS 2024, diolah

Perkebunan, regional Sumatera mencatatkan nilai yang jauh melebihi subsektor lainnya. Sebaliknya, subsektor di luar perkebunan termasuk tanaman pangan di Sumatera masih lemah dengan capaian yang cukup rendah.

IV.5.B.3. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Grafik 4.13. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2020 -2024 Regional Sumatera



Sumber : BPS 2024, diolah

Secara umum, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di provinsi-provinsi Sumatera menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Provinsi dengan kinerja paling tinggi adalah Sumatera Selatan, yang mencapai puncak 121,11 pada 2023 sebelum sedikit menurun di 2024. Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau juga menunjukkan stabilitas dengan NTN konsisten di atas 100, menandakan daya beli nelayan yang relatif terjaga. Sebaliknya,

Sumatera Barat dan Aceh mengalami penurunan pada 2024, yang mengindikasikan adanya tekanan pada kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Kinerja NTP dan NTN yang meningkat di sebagian besar provinsi Sumatera berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kenaikan daya beli petani dan nelayan mendorong aktivitas ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi basis utama wilayah tersebut. Daerah dengan peningkatan NTP dan NTN tertinggi, seperti Riau dan Bengkulu, juga menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Secara keseluruhan, sinergi antara kesejahteraan pelaku utama ekonomi lokal dan pembangunan manusia memperkuat ketahanan sosial-ekonomi di Sumatera.

IV.5.B.4. Analisis Belanja Program Prioritas Pemerintah

Kinerja Sumatera relatif sejalan dengan pola nasional, meski tingkat realisasi di Sumatera (22 persen) masih sedikit di bawah rata-rata nasional (sekitar 26 persen). Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, porsi regional Sumatera terhadap total program ketahanan pangan nasional tahun 2024 mencapai sekitar 18 persen dari total pagu nasional sebesar Rp52,77 triliun, dengan realisasi Rp2,10 triliun dari Rp9,39 triliun atau sekitar 21 persen dari total realisasi nasional (Rp9,76 triliun).

Tabel 4. 12. Kinerja Anggaran Program Ketahanan Pangan Regional Sumatera vs Nasional 2024

K/L–Program	Sumatera		Total	
	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
BPN – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	5,7	5,7	29,1	29,0
KKP – Program Dukungan Manajemen	463,0	455,2	3.991,7	3815,9
KKP – Program Kualitas Lingkungan Hidup	14,8	14,5	131,5	121,3
KKP – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	7,9	6,7	214,5	172,6
KKP – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	48,8	41,9	380,7	340,2
KKP – Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	168,7	160,1	2.529,9	1825,0
PUPR – Program Ketahanan Sumber Daya Air	6.823,0	5739,9	29.636,6	22670,8
Kemendag – Program Perdagangan Dalam Negeri	–	–	241,1	239,4
Kementan – Program Dukungan Manajemen	272,1	255,6	3.518,7	3072,4
Kementan – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.386,5	1325,5	9.760,5	9033,5
Kementan – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	105,7	92,7	1.456,5	1327,0
Kementan – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	95,9	94,5	883,3	866,2
Total	9.392,1	8.192,4	52.774,1	43.513,4

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Tabel 4. 13. Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan Regional Sumatera 2024

Nama K/L	Nama KRO	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
BPN	Bantuan Masyarakat	5,7	5,7
BPN	Layanan Dukungan Manajemen Internal	439,5	435,4
KKP	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	40,2	37,8
KKP	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	30,0	29,9
PUPR	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	1.091,6	1077,4
PUPR	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	4.317,9	3513,5
PUPR	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	1.272,1	1062,6
PUPR	Layanan Dukungan Manajemen Internal	237,4	232,0
Kementan	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	313,9	295,8
Kementan	Prasarana Pengembangan Kawasan	975,6	934,8
Lainnya		668,1	567,5
Total		9.392,1	8.192,4

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Kinerja program ketahanan pangan di regional Sumatera didominasi oleh Kementerian PUPR dengan porsi terbesar, yaitu pagu Rp6,82 triliun dan realisasi Rp1,67 triliun atau sekitar 80 persen dari total pagu ketahanan pangan Sumatera. Kontribusi signifikan juga datang dari Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pagu Rp1,39 triliun dan realisasi Rp268,9 miliar, yang memperkuat sisi hulu produksi dan ketersediaan pangan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan senilai Rp168,7 miliar dan realisasi Rp27,4 miliar, mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya laut. Secara keseluruhan, realisasi anggaran ketahanan pangan di Sumatera mencapai Rp2,10 triliun dari total pagu Rp9,39 triliun, dengan dominasi kegiatan infrastruktur dan produksi pangan utama.

Pada level KRO, kinerja program ketahanan pangan di regional Sumatera didominasi oleh Kementerian PUPR dengan tiga KRO utama, yaitu Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (pagu Rp4,32 triliun, realisasi Rp1,27 triliun), Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Rp1,27 triliun, realisasi Rp230,1 miliar), dan OM Prasarana Jaringan SDA (Rp1,09 triliun, realisasi Rp169,6 miliar). Ketiganya menyerap sekitar 60 persen dari total pagu dan 69 persen dari total realisasi regional Sumatera, menegaskan fokus pada penguatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan air untuk mendukung produktivitas pangan.

Dari sisi Kementerian Pertanian, KRO Prasarana

Pengembangan Kawasan menjadi yang terbesar (pagu Rp975,6 miliar, realisasi Rp160,4 miliar), diikuti Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (Rp313,9 miliar, realisasi Rp71,3 miliar). Kedua KRO ini memperlihatkan komitmen pada peningkatan sarana produksi dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, KKP berkontribusi melalui Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan pagu Rp439,5 miliar dan realisasi Rp54,1 miliar, menunjukkan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan sumber daya laut. Adapun BPN memiliki peran relatif kecil melalui Bantuan Masyarakat dengan pagu Rp5,7 miliar.

IV.5.B.5. Analisis Permasalahan Spesifik

Ketahanan pangan di Regional Sumatera menghadapi tantangan struktural yang relatif serupa antarprovinsi, meskipun masing-masing wilayah memiliki tekanan dan karakteristik yang berbeda. Secara umum, permasalahan utama berasal dari penurunan kapasitas produksi pangan, keterbatasan infrastruktur dan kelembagaan, ketimpangan distribusi dan akses, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal.

Dari sisi ketersediaan, beberapa provinsi masih menghadapi tren penurunan produksi padi akibat alih fungsi lahan yang semakin masif, terutama di Riau dan Jambi, di mana sawah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit atau kawasan pemukiman. Di daerah lain seperti

Bangka Belitung dan Jambi, dominasi sawah tadah hujan menyebabkan produksi bergantung pada musim, rentan terhadap perubahan iklim, dan tidak mampu menopang kebutuhan pangan sepanjang tahun. Sementara itu, di Aceh dan Bengkulu, walaupun produksi gabah relatif tinggi, hilirisasi belum berjalan optimal sehingga banyak gabah dijual keluar daerah dan ketersediaan beras lokal tidak mencerminkan potensi produksinya. Selain itu, beberapa wilayah seperti Kepulauan Riau hampir tidak memiliki kapasitas produksi beras sehingga ketergantungan pada suplai dari luar daerah mencapai lebih dari 99%.

Permasalahan berikutnya muncul pada aspek akses dan distribusi pangan. Ketimpangan infrastruktur antarwilayah mengakibatkan biaya logistik tinggi yang mendorong fluktuasi harga, seperti yang terlihat pada Lampung yang memiliki rantai distribusi beras yang cukup panjang serta Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPPT) tinggi. Hal ini menjadikan seringnya beras menjadi faktor penyumbang inflasi di Lampung. Selain itu, inflasi beras juga diakibatkan oleh adanya pengangkutan gabah basah ke Pulau Jawa, serta lemahnya kapasitas penggilingan di Lampung. Di wilayah kepulauan seperti Mentawai dan Kepri tantangan geografis menyebabkan harga pangan lebih mahal dan rentan terhadap gangguan suplai. Disparitas tingkat kemiskinan dan akses air bersih di beberapa daerah Sumatera, terutama di Sumut dan Jambi, semakin memperlebar kesenjangan keterjangkauan pangan di tingkat rumah tangga.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi kendala yang cukup menonjol. Di wilayah dengan peluang ekonomi non-pertanian yang lebih tinggi, seperti Kepri dan kota-kota besar di Sumatera lainnya, minat generasi muda untuk masuk sektor pertanian menurun tajam, berimplikasi pada menyusutnya tenaga kerja tani. Di sisi lain, kapasitas teknis petani dan penyuluh masih beragam dan belum sepenuhnya mampu mengadopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Regional Sumatera menghadapi sejumlah tantangan ketahanan pangan yang cukup kompleks dan saling terkait. Tantangan utama terletak pada ketidakstabilan produksi akibat alih fungsi lahan yang terus meningkat di beberapa provinsi, terutama di Riau dan Jambi, serta keterbatasan irigasi yang menyebabkan banyak daerah masih mengandalkan sawah tadah hujan seperti di Bangka Belitung dan sebagian wilayah Jambi. Produktivitas pertanian yang tidak merata, minimnya modernisasi alat pertanian, dan lemahnya hilirisasi seperti terlihat di Aceh dan Bengkulu yang masih menjual gabah mentah menyebabkan nilai tambah pertanian belum optimal dan pasokan beras lokal tidak mencerminkan kapasitas produksi sebenarnya. Selain itu, rantai distribusi dan akses pangan masih menghadapi hambatan signifikan, di mana biaya logistik yang tinggi, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau dan Mentawai, membuat harga pangan rentan fluktuasi, sementara daerah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Medan mengalami defisit beras akibat keterbatasan lahan produksi dan tingginya konsumsi. Kualitas konsumsi pangan masyarakat juga belum merata; skor Pola Pangan Harapan (PPH) di beberapa provinsi seperti Bangka Belitung masih berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan bahwa diversifikasi konsumsi belum berjalan optimal, sementara tingkat kemiskinan dan keterbatasan akses air bersih di beberapa wilayah Sumatera turut membatasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang bergizi dan beragam.

IV.5.B.6. Strategi dan Potensi Pengembangan Komoditas Lokal

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi penguatan ketahanan pangan regional perlu diarahkan pada diversifikasi produksi dan konsumsi pangan, modernisasi sistem pertanian, serta integrasi tata kelola lintas sektor. Diversifikasi pangan lokal meliputi pengembangan jagung, umbi-umbian, hortikultura, dan sagu menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan

mendorong pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Modernisasi pertanian melalui revitalisasi irigasi, optimalisasi bendungan strategis seperti Way Sekampung dan Margatiga, peningkatan kapasitas pascapanen melalui pembangunan *Rice Milling Unit modern*, serta penerapan teknologi pertanian cerdas dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperbaiki kualitas hasil. Sinergi pendanaan APBN, APBD, DAK, dan *creative financing* seperti SMV juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur pangan yang strategis. Selain itu, peningkatan kapasitas penyuluh, pelatihan petani, dan pemberian insentif bagi generasi muda untuk masuk sektor pertanian menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan tenaga kerja pertanian di wilayah yang telah mengalami penurunan minat bertani, seperti Kepri dan kawasan industri lainnya. Interkoneksi pangan antardaerah juga perlu diperkuat, terutama antara provinsi surplus seperti Sumut, Sumbar, dan Sumsel dengan provinsi defisit seperti Kepri, Jambi, dan Bengkulu, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan regional.

IV.5.B.7. Rekomendasi

Atas permasalahan serta tantangan yang ada pada regional Sumatera, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

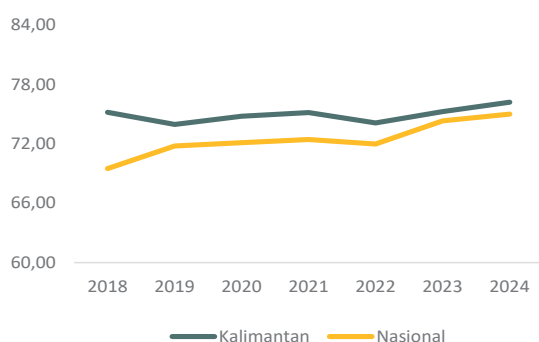
- a. Kementerian/Lembaga perlu memperkuat perlindungan lahan pertanian melalui implementasi LP2B dan pengetatan izin alih fungsi lahan, terutama di provinsi dengan lahan sawah yang terus menurun. Revitalisasi irigasi dan percepatan pembangunan jaringan irigasi baru harus diprioritaskan untuk daerah tadah hujan di Babel dan Jambi. Modernisasi pascapanen termasuk penyediaan RMU modern, fasilitas pengeringan, dan *cold storage* perlu diatur sebagai standar minimal daerah agar tidak lagi bergantung pada penjualan gabah mentah. K/L juga perlu menyempurnakan penyaluran DAK pangan agar lebih tepat sasaran pada produktivitas, air bersih, dan
- b. Bapanas perlu memperkuat interkoneksi suplai pangan antarprovinsi dengan memfasilitasi kerja sama suplai beras antara daerah surplus (Sumut, Sumbar, Sumsel) dan daerah defisit (Kepri, Bengkulu, Jambi). Bapanas juga perlu merumuskan regulasi stabilisasi harga yang lebih efektif untuk wilayah rawan inflasi pangan seperti Lampung dan Sumut.
- c. Pemda perlu memperkuat Perda LP2B serta memastikan pengawasan ketat terhadap konversi lahan. Pemda juga harus memperluas program pangan lokal berbasis B2SA dan mendorong pengembangan kawasan pertanian terpadu, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan seperti Kepri. Monitoring terhadap bansos pangan perlu diperkuat untuk memastikan ketepatan sasaran, khususnya di daerah dengan IKP rendah. Selain itu, Pemda harus memperluas regenerasi petani melalui insentif bagi generasi muda, serta meningkatkan infrastruktur distribusi seperti gudang pangan dan pasar induk guna menekan biaya logistik. Selain itu, pemerintah daerah agar mengoptimalkan *creative financing* melalui *Special Mission Vehicle (SMV)* Kementerian Keuangan untuk mendukung pembangunan daerah.
- d. Bulog perlu meningkatkan kapasitas cadangan pangan daerah, khususnya di provinsi yang sangat bergantung pada suplai dari luar seperti Kepri dan Bengkulu. Bulog juga perlu memperkuat jaringan gudang dan *cold storage* untuk mendukung keberlanjutan stok pangan. Integrasi sistem distribusi Bulog dengan Pemda harus diperkuat agar respons terhadap gejolak suplai, terutama di wilayah kepulauan, menjadi lebih cepat dan efektif.

IV.5.C. REGIONAL KALIMANTAN

IV.5.C.1. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan

Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Regional Kalimantan dan nasional selama 2018–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Kalimantan konsisten berada di atas capaian nasional, mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan rata-rata Indonesia. Nilai IKP Kalimantan bergerak dari 75,17 pada 2018, sempat menurun pada 2019, kemudian mengalami fluktuasi ringan hingga kembali meningkat signifikan menjadi 76,19 pada 2024.

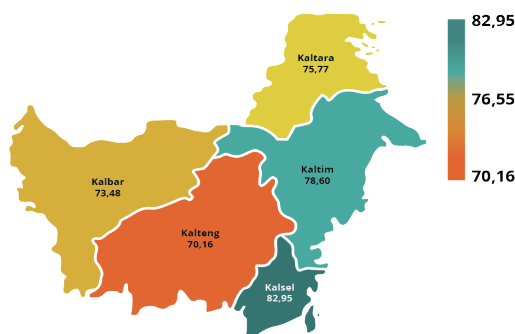
Grafik 4.14. Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2018-2024



Sumber : BPS 2024, diolah

Secara umum IKP Regional Kalimantan tahun 2024 menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang bervariasi antarprovinsi, Kalimantan Selatan mencatat nilai 82,95, menjadikannya provinsi dengan ketahanan pangan tertinggi di Regional Kalimantan, diikuti oleh Kalimantan

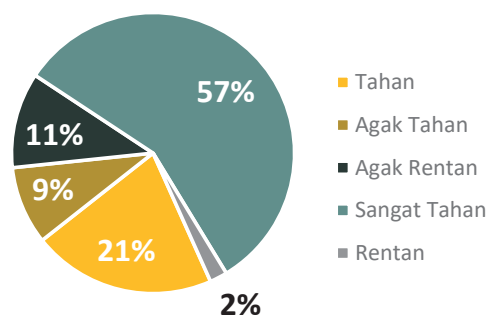
Gambar 4.3. Indeks Ketahanan Pangan Regional Kalimantan Tahun 2024



Sumber : BPS 2024, diolah

Timur dengan 78,60 dan Kalimantan Utara dengan 75,77, yang menunjukkan kinerja cukup solid dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Di sisi lain, Kalimantan Barat berada pada level menengah dengan nilai 73,48, sementara Kalimantan Tengah mencatat nilai terendah yaitu 70,16, mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dari nilai IKP tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antardaerah di Kalimantan, sehingga penguatan akses pangan, peningkatan infrastruktur dasar, serta percepatan pelayanan kesehatan dan gizi menjadi strategi penting untuk meningkatkan ketahanan pangan secara merata di seluruh provinsi.

Grafik 4.15. Kategori Skor IKP Regional Kalimantan



Sumber : BPS 2024, diolah

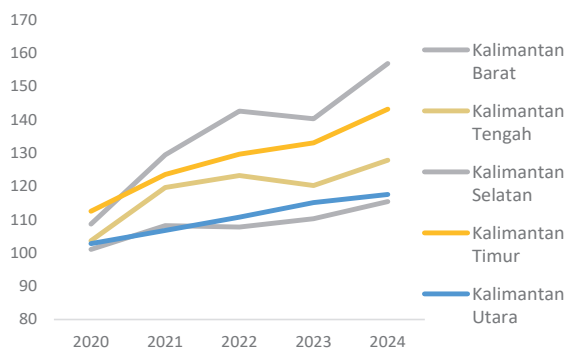
Sebanyak 32 Kab/Kota atau 57 persen dari 56 Kab/Kota memiliki skor IKP yang tinggi dengan sebaran sebagai berikut: 32 Kab/Kota (Sangat Tahan); 12 Kab/Kota (Tahan); 5 Kab (Agak Tahan), 6 Kab (Agak Rentan), dan 1 Kab (Rentan) yaitu pada Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten/Kota pada Regional Kalimantan, diperoleh 5 (lima) Kab/Kota dengan urutan skor terbaik, yaitu (1) Kota Balikpapan (91,40); (2) Kota Samarinda (88,97); (3) Kota Bontang (88,76); (4) Kabupaten Tapin (88,09); dan (5) Kabupaten Penajam Paser Utara (87,40). Sedangkan 5 (lima) Kab/Kota dengan urutan skor terendah, yaitu (1) Kabupaten Murung Raya (49,08); (2) Kabupaten Melawai (70,01); (3) Kabupaten Gunung Mas (55,49); (4) Kabupaten Mahakam Ulu (57,68); dan (5) Kabupaten Kutai

Barat (58,39).

IV.5.C.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani

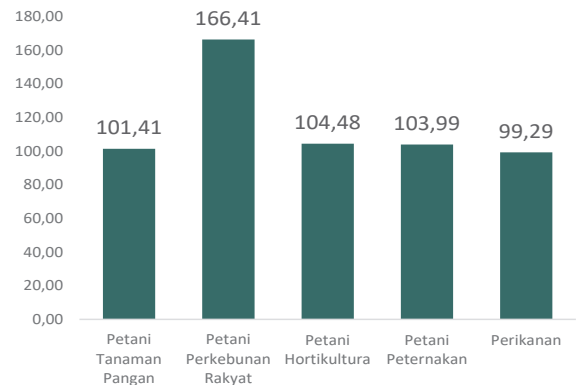
Secara umum, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2024 pada regional Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah dengan capaian NTP tertinggi (156,89) kemudian disusul berturut-turut oleh Kalimantan Timur (143,18), Kalimantan Tengah (127,85), Kalimantan Utara (117,56, dan Kalimantan Selatan (115,42). Berdasarkan subsektor Nilai Tukar Petani (NTP) pada wilayah Kalimantan menunjukkan variasi subsektor yang cukup jelas antarprovinsi. Kalimantan Selatan mencatat subsektor unggul pada tanaman pangan (106,51) dan peternakan (105,92), serta pembudidayaan (102,89) meskipun hortikultura relatif lebih rendah (98,26). Kalimantan Timur menonjol pada subsektor hortikultura (113,63), tertinggi di antara provinsi pada Regional Kalimantan, dengan dukungan subsektor perkebunan yang juga kuat (186,93). Kalimantan Utara relatif kuat pada perkebunan (176,84), terutama pembudidayaan (105,59), meski subsektor pangan hanya sedikit di atas 100 (101,68). Kalimantan Tengah menunjukkan kinerja cukup seimbang dengan nilai hortikultura (104,66) dan peternakan (103,53), namun perkebunan relatif lebih rendah dibanding provinsi lain (146,92). Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat subsektor perkebunan paling tinggi (187,57), namun subsektor tanaman pangan relatif rendah (97,03), di bawah angka 100.

Grafik 4.16. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Kalimantan



Sumber : BPS 2024, diolah

Grafik 4.17. Perbandingan Subsektor NTP Regional Kalimantan



Sumber : BPS 2024, diolah

Secara umum, subsektor perkebunan menjadi penggerak utama nilai tukar petani (NTP) di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, sementara hortikultura memperkuat capaian di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Sebaliknya, subsektor tanaman pangan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih lemah dengan capaian cukup rendah.

Ketahanan pangan salah satu pilar utama guna mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 karena berkaitan dengan aspek kuantitas, kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan. Ketersediaan pangan terkhususnya beras merupakan hal yang vital untuk menjaga ketahanan pangan yang akan berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, luas panen padi di Kalimantan Barat diperkirakan mengalami kenaikan 13,85 persen sehingga berdampak pada tingkat produksi padi dan beras yang turut mengalami kenaikan. Kalimantan Barat memiliki luas panen padi terbesar di regional Kalimantan. Puncak produksi padi terjadi pada bulan Maret, mengikuti pola tanam yang dipengaruhi oleh musim hujan. Kabupaten Sambas menjadi kontributor utama produksi padi di provinsi ini dengan kontribusi antara 19,30–25,33 persen selama periode 2019–2024. Sementara itu, Kota Pontianak memiliki produksi padi terendah. Di sisi lain, kebutuhan beras di Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan, mencapai 442,79 ribu ton pada tahun 2024, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Tren

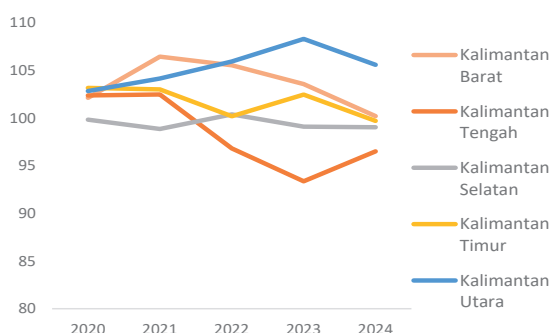
keseimbangan antara *supply* dan *demand* beras menunjukkan bahwa sejak 2021 hingga 2023, *supply* berada di bawah tingkat *demand*.

Sedangkan pada provinsi Kalimantan Tengah, tantangan pembangunan tanaman pangan salah satunya peningkatan produktivitas guna pemenuhan kebutuhan domestik yang stabil dan terjangkau. Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penyangga IKN dan menjadi lumbung pangan (food estate) di Indonesia. Terdapat 5 Kabupaten sentra Produksi di Kalimantan Tengah yaitu Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Barito Timur dan Kotawaringin Timur. Permasalahan utama dalam pembangunan tanaman pangan di Kalimantan Tengah adalah produk tanaman pangan (beras belum mempunyai nilai mutu produk berkualitas sehingga belum memenuhi daya saing. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan memfasilitasi 1 Unit *Rice Milling Plant* dan 1 Unit *Rice Milling Unit Rice to Rice*.

IV.5.C.3. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Secara umum, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2024 pada regional Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Utara menjadi daerah dengan capaian NTN tertinggi (105,59) kemudian disusul berturut-turut oleh Kalimantan Barat (100,21), Kalimantan Timur (99,71), Kalimantan Selatan (99,04), dan Kalimantan Tengah (96,51). Meskipun NTN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2024

Grafik 4.18. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Kalimantan



Sumber : BPS 2024, diolah

mengalami kenaikan, namun nilai NTN tersebut masih berada di bawah 100, yang berarti pengeluaran nelayan secara umum masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang mereka peroleh. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan masih menghadapi tantangan, meskipun ada tren perbaikan.

Secara keseluruhan, sektor pertanian di Kalimantan menunjukkan tren positif dengan kenaikan NTP di semua provinsi, sementara sektor perikanan menghadapi tantangan dengan NTN yang cenderung menurun di beberapa daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun daya beli petani meningkat, nelayan masih perlu menghadapi berbagai hambatan seperti fluktuasi harga hasil tangkapan dan biaya produksi yang tinggi.

IV.5.C.4. Analisis Belanja Program Prioritas Pemerintah

Belanja ketahanan pangan dilaksanakan oleh 5 (lima) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pangan Nasional. Ketahanan pangan di beberapa provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2024 melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan dukungan pemerintah daerah melalui APBN maupun TKD.

Kinerja program ketahanan pangan di regional Kalimantan didominasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pagu Rp1,16 triliun dan realisasi 85,49 persen, yang memperkuat sisi hulu produksi dan ketersediaan pangan. Kontribusi signifikan juga datang dari Kementerian PUPR dengan pagu Rp1,13 triliun dengan realisasi 92 persen atau sekitar 40 persen dari total pagu ketahanan pangan Kalimantan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan senilai Rp60,4 miliar dengan realisasi 95,69 persen, mendukung ketahanan pangan berbasis

Tabel 4. 14. Kinerja Anggaran Program Ketahanan Pangan Regional Kalimantan vs Nasional 2024

K/L-Program	Kalimantan		Total	
	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
BPN – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	-	29,1	29,0
KKP – Program Dukungan Manajemen	107,8	104,2	3.991,7	3815,9
KKP – Program Kualitas Lingkungan Hidup	7,5	7,3	131,5	121,3
KKP – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2,9	2,3	214,5	172,6
KKP – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	380,7	340,2
KKP – Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	60,4	57,8	2.529,9	1825,0
PUPR – Program Ketahanan Sumber Daya Air	1.134,4	1.044,9	29.636,6	22670,8
Kemendag – Program Perdagangan Dalam Negeri	-	-	241,1	239,4
Kementan – Program Dukungan Manajemen	96,3	87,5	3.518,7	3072,4
Kementan – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.165,8	996,8	9.760,5	9033,5
Kementan – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	28,9	26,0	1.456,5	1327,0
Kementan – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	65,4	64,3	883,3	866,2
Total	2.669,4	2.391,1	52.774,1	43.513,4

Sumber : BPS 2024, diolah

sumber daya laut. Secara keseluruhan, realisasi anggaran ketahanan pangan di Kalimantan mencapai Rp2,39 triliun dari total pagu Rp2,67 triliun, dengan dominasi kegiatan infrastruktur dan produksi pangan utama.

Pada level KRO, kinerja program ketahanan pangan di regional Kalimantan didominasi oleh Kementerian PUPR dengan tiga KRO utama, yaitu Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (pagu Rp472,1 miliar, realisasi 86 persen), Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Rp165 miliar, realisasi 94,9 persen), dan OM Prasarana Jaringan SDA (Rp417,7 miliar, realisasi 99 persen). Ketiganya menyerap sekitar 36 persen dari total pagu dan 41 persen dari total realisasi regional Kalimantan, menegaskan fokus pada penguatan infrastruktur irigasi dan pengelolaan

air untuk mendukung produktivitas pangan. Dari sisi Kementerian Pertanian, KRO Prasarana Pengembangan Kawasan menjadi yang terbesar (pagu Rp844,6 miliar, realisasi 86,24 persen), diikuti Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup (Rp147,1 miliar, realisasi 81 persen). Kedua KRO ini memperlihatkan komitmen pada peningkatan sarana produksi dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan.

Belanja program prioritas di Kalimantan memperlihatkan karakteristik yang beragam sesuai dengan kondisi geografis tiap provinsi. Belanja TKD dengan tematik ketahanan pangan pada Provinsi Kalimantan Tengah hanya pada penyaluran DAK Fisik bidang Jalan, Pertanian, Irigasi, Kelautan dan Perikanan, serta Kehutanan

Tabel 4. 15. Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan Regional Kalimantan 2024

Nama K/L	Nama KRO	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
KKP	Bantuan Peralatan / Sarana	11,8	11,7
KKP	Layanan Dukungan Manajemen Internal	98,0	96,2
KKP	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	17,2	17,1
PUPR	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	417,7	414,9
PUPR	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	472,1	406,6
PUPR	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	165,0	156,6
Kementan	Dukungan Teknis	118,2	94,3
Kementan	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	147,1	119,2
Kementan	Prasarana Pengembangan Kawasan	844,6	728,4
Lainnya		377,7	346,2
Total		2.669,4	2.391,1

Sumber : BPS 2024, diolah

dengan Subbidang Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani). Namun DAK Fisik Bidang Kehutanan gagal salur sepenuhnya. DAK Fisik tersebut telah tersalur Rp386,7 Miliar (95,2 persen dari Pagu) per 31 Desember 2024.

Pada Provinsi Kalimantan Selatan, konsep lumbung pangan terganggu oleh banjir dan degradasi lahan, sehingga keberlanjutan program sulit terjaga. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset besar berupa Bendungan Telake dan Babulu yang potensial menopang ribuan hektar sawah, tetapi integrasi pemanfaatannya untuk produksi pangan belum optimal. Sementara itu pada Provinsi Kalimantan Barat, irigasi teknis relatif terbatas sehingga ketersediaan air sangat bergantung pada iklim.

Program alsintan & saprodi di seluruh Kalimantan sering terkendala distribusi yang lambat akibat proses pengadaan yang panjang. Banyak alat dan sarana produksi tiba di akhir tahun, sehingga tidak sejalan dengan musim tanam. Sementara itu, program bantuan benih umumnya tersalurkan, namun tidak diikuti mekanisme penyerapan gabah yang kuat sehingga petani tetap menghadapi harga jual rendah akibat lemahnya jaringan pabrik pascapanen.

IV.5.C.5. Analisis Permasalahan Spesifik

Pada Regional Kalimantan, permasalahan ketahanan pangan memiliki pola yang relatif serupa meskipun tiap provinsi menghadapi nuansa berbeda. Dari sisi perencanaan, koordinasi pusat–daerah masih lemah sehingga terjadi tumpang tindih lokasi, konsentrasi berlebihan pada satu komoditas, atau bahkan penurunan belanja pangan daerah seperti di Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah menyoroti ketergantungan pada food estate padi tanpa diversifikasi memadai, sementara Kalimantan Selatan terkendala integrasi data FSVA ke perencanaan desa. Pengadaan barang dan/atau jasa menghadapi hambatan

klasik berupa keterlambatan kesiapan lahan, dokumen teknis, hingga terbatasnya penyedia, sehingga realisasi DAK beberapa bidang gagal salur seperti di Kalimantan Tengah. Pada aspek eksekusi, penyerapan anggaran dan output fisik terhambat faktor eksternal (banjir di Kalimantan Selatan, blokir anggaran di Kalimantan Barat), maupun koordinasi lintas sektor yang lemah dalam mengoptimalkan infrastruktur besar seperti Bendungan Telake di Kalimantan Timur. Sedangkan di sisi SDM, kapasitas penyuluh, petani, dan pengelola proyek menjadi tantangan nyata, mulai dari kekurangan tenaga di food estate Kalimantan Tengah hingga budaya non-bertani di Kalimantan Utara.

Regional Kalimantan dengan potensi alam yang sangat besar, baik dalam sektor pertanian, perikanan, maupun kehutanan sangat mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Timur masih menghadapi beberapa tantangan utama yang harus diperhatikan: produksi pangan, keterbatasan infrastruktur dan distribusi, dampak perubahan iklim. Tantangan utama pada regional Kalimantan adalah menjaga stabilitas produksi di tengah perubahan iklim, keterbatasan koordinasi lintas instansi, serta dominasi orientasi beras yang membuat komoditas alternatif kurang berkembang. Kalimantan Barat memiliki luas panen padi terbesar di regional Kalimantan, namun, dari segi produksi padi dan beras, Kalimantan Barat berada di bawah Kalimantan Selatan.

IV.5.C.6. Strategi dan Potensi Pengembangan Komoditas Lokal

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan di regional Kalimantan, beberapa program dan upaya yang telah disusun oleh pemerintah daerah antara lain peningkatan produktivitas lahan pertanian (perbaikan penggunaan varietas tanaman, pengelolaan air, optimalisasi lahan), pengurangan dampak perubahan iklim (pengendalian organisme pengganggu tanaman,

mengurangi susut panen dan pengolahan hasil panen), penguatan kelembagaan petani (ketersediaan kredit usaha rakyat dan lembaga distribusi pangan masyarakat, pemasaran produk pertanian) dan pengembangan unit sarana penyedia pangan (bantuan modal usaha dan pelatihan pengolahan hasil pertanian).

Disamping itu, strategi yang diusulkan meliputi diversifikasi pangan (jagung, umbi, protein perikanan), penguatan sinergi pendanaan APBN-APBD-DAK, pemanfaatan aset infrastruktur strategis, serta peningkatan kapasitas SDM pertanian. Potensi komoditas lokal cukup kaya, mulai dari padi dan jagung di Kalimantan Tengah, umbi-umbian di Kalimantan Selatan, hingga perikanan tangkap dan budidaya di Kalimantan Utara. Namun jika dilihat dari NKP subsektor di regional Kalimantan, maka potensi pengembangan komoditas lokal juga termasuk mempertahankan sektor perkebunan dimana Kalimantan memiliki NKP tertinggi untuk subsektor perkebunan di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sektor perkebunan tetap harus menjaga peningkatan produktivitas tanpa menambah luas lahan perkebunan terutama karena sudah berlaku moratorium perluasan lahan khusus untuk perkebunan sawit, sehingga fokus pengembangan adalah mengoptimalkan program peremajaan kebun, hilirisasi industri, dan peningkatan kemampuan berkebun yang baik (*good agricultural practices*).

IV.5.C.7. Rekomendasi

Atas permasalahan serta tantangan yang ada pada regional Kalimantan, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga perlu memprioritaskan program yang berdampak langsung pada ketahanan pangan, seperti pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan kapasitas petani. Sementara itu, alokasi anggaran untuk dukungan manajemen sebaiknya diminimalkan dan dialihkan ke program-program yang secara langsung memperkuat ketahanan pangan, guna memastikan efektivitas dan optimalisasi penggunaan

sumber daya.

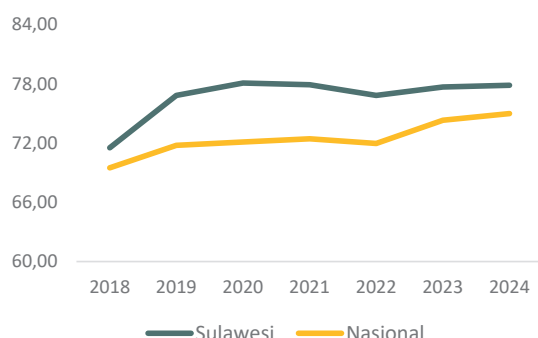
- b. Pemerintah daerah perlu melakukan diversifikasi komoditas pangan dengan meningkatkan produksi jagung, ubi, dsb agar dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan di regional Kalimantan dan dapat mencukupi kebutuhan konsumsi normatif masyarakat di seluruh Kalimantan.
- c. Masalah Keterbatasan SDM untuk mengelola *Food Estate* dapat diatasi dengan (1) Melakukan program transmigrasi dan dukungan terhadap transmigran untuk mendukung *food estate* melalui Dinas Transmigrasi setempat; (2) Membuka jurusan pertanian pada Universitas-Universitas di Kalimantan Tengah agar lulusannya bisa segera dapat terserap ke lapangan usaha sektor Pertanian khususnya *Food Estate*; dan (3) Memaksimalkan program Brigade Pangan dan juga Petani Millenial untuk mencukupi kebutuhan SDM baik untuk mengelola lahan pertanian dan juga mengoperasikan pabrik *Rice Milling Unit* dalam skala yang sangat besar.
- d. Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian perlu membuat kebijakan interkoneksi kebutuhan pangan antar daerah agar daerah penghasil beras utama seperti Jawa dapat memenuhi kebutuhan beras daerah lainnya seperti di Kalimantan. Kerja sama ini diharapkan dapat menjaga harga pangan tetap stabil.
- e. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan pangan seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan (gudang, *cold storage*) untuk mendukung kelancaran distribusi pangan.

IV.5.D. REGIONAL SULAWESI

IV.5.D.1. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan

Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Regional Sulawesi dan nasional pada periode 2018–2024 menunjukkan tren peningkatan dengan pola perkembangan yang relatif stabil, di mana Sulawesi secara konsisten berada

Grafik 4.19. Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Sulawesi dan Nasional Tahun 2018-2024

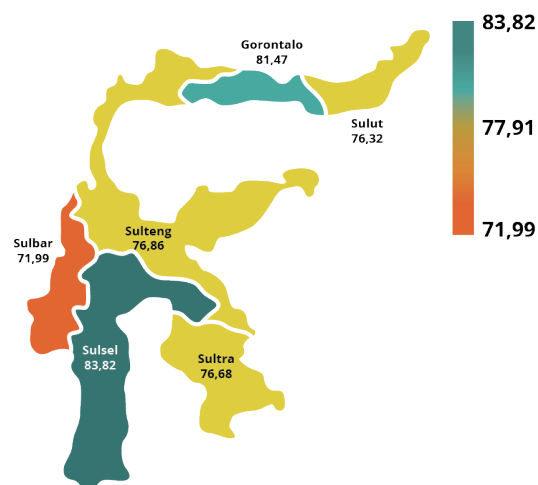


Sumber : BPS 2024, diolah

di atas capaian nasional. Nilai IKP Sulawesi meningkat dari 71,53 pada 2018 menjadi 78,09 pada 2020, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2021–2023 sebelum kembali naik menjadi 77,86 pada 2024. Perbedaan level antara Sulawesi dan nasional mengindikasikan bahwa wilayah Sulawesi memiliki ketahanan pangan yang relatif lebih kuat, meskipun tetap menunjukkan dinamika yang dipengaruhi faktor ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Regional Sulawesi tahun 2024 menunjukkan variasi capaian antardaerah, dengan Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan ketahanan pangan tertinggi dan Sulawesi Barat berada pada posisi terendah. Sulawesi Selatan mencatat nilai 83,82, mencerminkan kinerja sangat baik

Gambar 4.4. Indeks Ketahanan Pangan Regional Sulawesi Tahun 2024



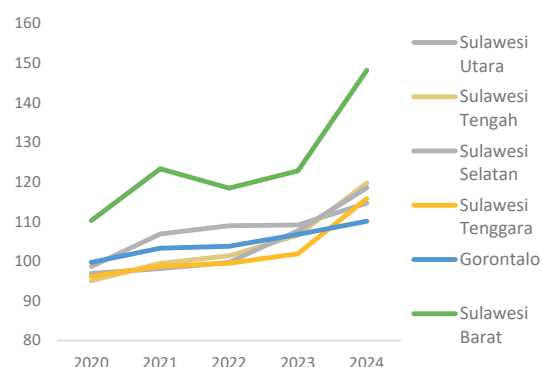
Sumber : BPS 2024, diolah

dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Gorontalo menyusul di posisi kedua dengan 81,47, sementara Sulawesi Utara mencatat 76,32, Sulawesi Tengah 76,86, dan Sulawesi Tenggara 76,68, yang seluruhnya berada pada kategori menengah–tinggi. Adapun Sulawesi Barat dengan nilai 71,99 menunjukkan masih adanya tantangan signifikan dalam sistem ketahanan pangan di wilayah tersebut. Peta IKP ini menggambarkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah Sulawesi memiliki performa yang cukup baik, kesenjangan antardaerah masih perlu menjadi perhatian, terutama melalui peningkatan akses pangan, perbaikan infrastruktur dasar, dan penguatan layanan kesehatan serta gizi untuk memperkuat ketahanan pangan secara merata di seluruh kawasan Sulawesi.

IV.5.D.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara keseluruhan, Nilai Tukar Petani (NTP) di provinsi-provinsi Sulawesi menunjukkan peningkatan yang konsisten sepanjang 2020–2024, mencerminkan penguatan kesejahteraan petani di kawasan tersebut. Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan lonjakan tertinggi, melonjak dari 110,26 pada 2020 menjadi 148,18 pada 2024, diikuti Sulawesi Tengah yang meningkat signifikan hingga mencapai 119,72 pada 2024. Sulawesi Selatan juga menunjukkan tren pertumbuhan kuat dengan kenaikan dari 96,93 pada 2020 menjadi 118,53 pada 2024. Sementara itu, Sulawesi Tenggara dan

Grafik 4.20. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Sulawesi

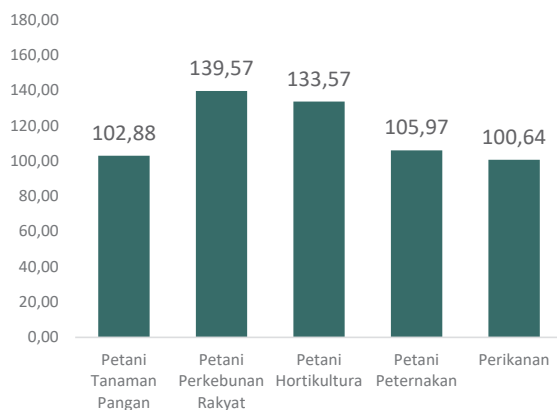


Sumber : BPS 2024, diolah

Sulawesi Utara mencatat peningkatan lebih moderat namun tetap positif, masing-masing mencapai 115,81 dan 114,65 pada 2024. Adapun Gorontalo menunjukkan peningkatan terendah dengan kenaikan dari 99,72 pada 2020 menjadi 110,09 pada 2024. Secara umum, perkembangan ini menggambarkan perbaikan kinerja sektor pertanian dan daya beli petani di sebagian besar wilayah Sulawesi.

Berdasarkan subsektor Nilai Tukar Petani (NTP) pada wilayah Sulawesi menunjukkan variasi yang cukup jelas antarprovinsi dengan Sulawesi Utara mendominasi pada tiga subsektor. Sulawesi Utara mencatat subsektor unggul pada tanaman pangan (108,74) dan hortikultura (160,29), dan peternakan (116,38). Di sektor tanaman perkebunan dan pembudidayaan ikan Sulawesi Barat unggul dengan nilai (186,66) dan (109,54). Subsektor hortikultura dan tanaman perkebunan menjadi penggerak utama NTP di wilayah Sulawesi. Masih terdapat beberapa provinsi dengan nilai subsektor di bawah 100 di sektor nelayan dan pembudidayaan ikan. Sebanyak empat provinsi di sektor nelayan yang mempunyai nilai di bawah 100 seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Selain itu, terdapat 3 provinsi dengan nilai di bawah 100 di subsektor pembudidayaan ikan seperti di Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, dan Gorontalo.

Grafik 4.21. Perbandingan Subsektor NTP Regional Sulawesi



Sumber : BPS 2024, diolah

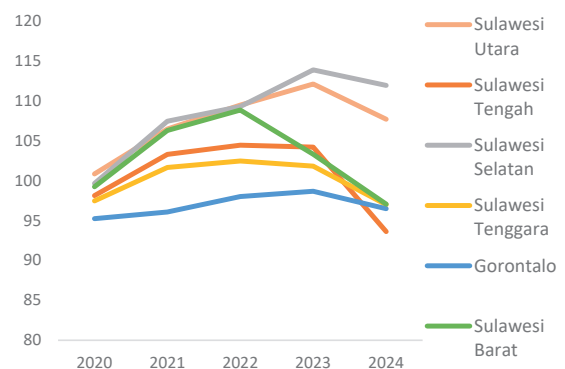
Subsektor perkebunan dan hortikultura menjadi penggerak utama nilai tukar petani

(NTP) di wilayah Sulawesi, bahkan untuk subsektor perkebunan, regional Sulawesi menjadi yang paling tinggi ketiga secara nasional setelah Kalimantan dan Sumatera. Sebaliknya, subsektor Tanaman pangan, perikanan dan peternakan di wilayah ini masih mengalami pelemahan dengan capaian yang rendah.

IV.5.D.3. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Secara umum, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di wilayah Sulawesi menunjukkan tren peningkatan hingga 2023 sebelum mengalami koreksi pada 2024. Kinerja terbaik dicatat oleh Sulawesi Selatan yang mencapai puncak 113,86 pada 2023 dan tetap berada pada level tinggi sebesar 111,92 pada 2024, diikuti Sulawesi Utara yang meningkat stabil dari 100,83 pada 2020 hingga 112,09 pada 2023 sebelum menurun menjadi 107,68 pada 2024. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan lebih moderat, mencapai 104,43 dan 102,45 pada 2022, namun masing-masing melemah pada 2024 menjadi 93,61 dan 96,98. Di sisi lain, Gorontalo dan Sulawesi Barat berada pada level NTN yang lebih rendah, dengan Gorontalo bergerak dari 95,23 pada 2020 menjadi 98,66 pada 2023 dan kembali turun menjadi 96,47 pada 2024, sementara Sulawesi Barat mencapai 108,83 pada 2022 namun kemudian turun signifikan ke 97,05 pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan daya beli nelayan hingga 2023, sebagian besar provinsi di Sulawesi menghadapi tekanan pada 2024, terutama terkait biaya produksi dan akses

Grafik 4.22. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2020 -2024 Regional Sulawesi



Sumber : BPS 2024, diolah

pasar nelayan.

Secara umum, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2024 pada regional Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan capaian NTN tertinggi (111,92) kemudian disusul berturut-turut oleh Sulawesi Utara (107,68), Sulawesi Barat (97,05), Sulawesi Tenggara (96,98), Gorontalo (96,47), dan Sulawesi Tengah (93,61). Dalam 2 tahun terakhir, semua provinsi mengalami penurunan NTN, terutama Provinsi Sulawesi tengah yang mengalami penurunan dari (104,19) pada tahun 2023 ke (93,61) atau (10,59) poin.

IV.5.D.4. Analisis Belanja Program Prioritas Pemerintah

Kinerja Sulawesi menunjukkan pola yang relatif sejalan dengan capaian nasional, meskipun tingkat realisasinya baru mencapai sekitar 13% dari total pagu wilayah (Rp6,37 triliun dengan realisasi Rp852,9 miliar), lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang mencapai sekitar 19% dari total pagu (Rp52,77 triliun dengan realisasi Rp9,76 triliun). Kontribusi Sulawesi terhadap total pagu nasional tercatat sekitar 12%, namun kontribusi terhadap realisasi nasional masih berada di kisaran 9%, mencerminkan bahwa akselerasi pelaksanaan program di kawasan ini perlu terus didorong.

Kinerja program ketahanan pangan di regional Sulawesi didominasi oleh Program dengan alokasi terbesar yaitu PUPR dengan program Ketahanan Sumber Daya Air dengan pagu Rp5,13 triliun dengan realisasi 65,86 persen, mencerminkan dominasi sektor infrastruktur air dalam struktur belanja Sulawesi. Sementara itu, alokasi dan realisasi tertinggi berikutnya terdapat pada sektor pangan melalui Kementan dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Rp375,4 miliar dengan realisasi 95,12 persen). Beberapa program strategis lainnya masih menunjukkan tingkat serapan yang relatif rendah, termasuk program vokasi, nilai tambah industri perikanan, serta program dukungan manajemen pada Kementan. Secara keseluruhan, meskipun alokasi anggaran untuk Sulawesi cukup signifikan dalam struktur nasional, tingkat pemanfaatan anggaran yang masih moderat (71,55 persen) menunjukkan perlunya percepatan implementasi program agar kontribusi wilayah terhadap target ketahanan pangan nasional dapat semakin optimal dalam periode pelaksanaan berjalan.

Pada level KRO, kinerja program ketahanan pangan di regional Sulawesi didominasi oleh Kementerian PUPR untuk RO Prasarana Bidang SDA dan Irigasi yang memiliki pagu terbesar Rp3,57 triliun dengan realisasi 62,13 persen, disusul OM Prasarana Jaringan SDA dengan

Tabel 4. 16. Kinerja Anggaran Program Ketahanan Pangan Regional Sulawesi vs Nasional 2024

K/L-Program	Sulawesi		Total	
	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
BPN – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3,4	3,4	29,1	29,0
KKP – Program Dukungan Manajemen	372,9	366,1	3.991,7	3815,9
KKP – Program Kualitas Lingkungan Hidup	8,6	8,4	131,5	121,3
KKP – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5,6	4,9	214,5	172,6
KKP – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	58,8	51,8	380,7	340,2
KKP – Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	88,3	79,6	2.529,9	1825,0
PUPR – Program Ketahanan Sumber Daya Air	5.127,9	3.377,5	29.636,6	22670,8
Kemendag – Program Perdagangan Dalam Negeri			241,1	239,4
Kementan – Program Dukungan Manajemen	144,2	130,2	3.518,7	3072,4
Kementan – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	375,4	357,1	9.760,5	9033,5
Kementan – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	73,1	69,1	1.456,5	1327,0
Kementan – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	111,9	110,1	883,3	866,2
Total	6.370,1	4.558,4	52.774,1	43.513,4

Sumber : BPS 2024, diolah

Tabel 4. 17. Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Ketahanan Pangan Regional Sulawesi 2024

Nama K/L	Nama KRO	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
Bapanas	Bantuan Masyarakat	3,4	3,4
KKP	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	23,5	20,7
KKP	Layanan Dukungan Manajemen Internal	354,0	349,9
KKP	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	27,2	26,6
PUPR	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	751,0	734,9
PUPR	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	3.566,5	2.215,9
PUPR	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	675,9	307,2
Kementan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	115,9	113,0
Kementan	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	218,5	207,2
Kementan	Prasarana Pengembangan Kawasan	82,3	78,7
Lainnya		552,0	501,0
Total		6.370,1	4.558,4

Sumber : BPS 2024, diolah

alokasi Rp750,96 miliar dengan penyerapan yang cukup baik di 97,85 persen, serta pembangunan Prasarana Jaringan SDA sebesar Rp675,9 miliar dengan realisasi 45,45 persen, sehingga menegaskan bahwa infrastruktur sumber daya air menjadi fokus utama belanja regional. Kontribusi berikutnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan pagu Rp353,96 miliar dan realisasi 98,84 persen, program Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp23,51 miliar dengan realisasi 88 persen, dan Pendidikan Vokasi senilai Rp27,16 miliar dengan realisasi 97,79 persen, yang memperkuat kapasitas sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) berkontribusi lewat penguatan prasarana pertanian dan dukungan kelembagaan dengan total pagu mencapai Rp416,68 miliar dan realisasi sekitar Rp398,9 miliar, sementara Badan Pangan Nasional mendukung intervensi masyarakat dengan pagu Rp3,44 miliar dan realisasi Rp13,82 juta.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran ketahanan pangan Sulawesi mencapai Rp4,56 triliun dari total pagu Rp6,37 triliun, mencerminkan bahwa fokus belanja masih terkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur sumber daya air serta dukungan kapasitas sektor kelautan dan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan regional.

IV.5.D.5. Analisis Permasalahan Spesifik

Secara umum, permasalahan spesifik pada program ketahanan pangan berfokus pada tiga isu utama: stabilitas harga dan pasokan, dukungan infrastruktur, serta sarana produksi. Permasalahan mendasar adalah volatilitas harga komoditas pangan utama, terutama beras. Hal ini menuntut intervensi pemerintah daerah melalui penyaluran bantuan pangan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk mengendalikan permintaan dan menekan lonjakan harga. Selain itu, aspek distribusi dan kestabilan pasokan juga menghadapi risiko signifikan. Diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan inspeksi berkala untuk mengantisipasi praktik penimbunan beras dan risiko panic buying, khususnya menjelang waktu-waktu tertentu seperti Pilkada dan akhir tahun, yang dapat memicu ketidakstabilan pasokan.

Lebih lanjut, program ketahanan pangan dihadapkan pada tantangan terkait dukungan infrastruktur dan sarana produksi. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan pangan daerah, dibutuhkan pemutakhiran pada aspek distribusi seperti pembangunan gudang dengan skema resi gudang. Di sisi produksi, optimalisasi sangat diperlukan pada distribusi pupuk, pengembangan teknologi agribisnis, serta penggunaan bibit unggul/hibrida untuk menjamin hasil panen yang optimal dan berkelanjutan.

Tantangan terhadap ketahanan pangan di Regional Sulawesi sangat mendesak mengingat

jumlah penduduk yang besar dan cakupan geografis yang luas. Faktor seperti perubahan iklim terutama fenomena El Niño pada 2023-2024 yang menyebabkan kekeringan, mengakibatkan pergeseran masa tanam dan penurunan produktivitas pangan. Masalah ini diperparah oleh alih fungsi lahan pertanian, kurangnya akses petani terhadap pupuk dan benih berkualitas, serta terbatasnya alat pertanian modern. Selain itu, ketergantungan pada komoditas impor menimbulkan risiko kerawanan pangan jika terjadi gangguan rantai distribusi.

Ketahanan pangan adalah faktor krusial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, karena gangguan pangan dapat memicu kerawanan sosial dan mengancam stabilitas. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan pasokan pangan yang mencukupi, tersebar, dan mudah diakses, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Target 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Target 2 (Mengakhiri Kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan).

IV.5.D.6. Strategi dan Potensi Pengembangan Komoditas Lokal

Secara umum, strategi dan kebijakan implementasi belanja ketahanan pangan di daerah diarahkan pada tiga fokus utama: manajemen pasokan dan harga, pengembangan infrastruktur dan distribusi, serta peningkatan sarana produksi.

Di bidang manajemen pasokan dan stabilitas harga, kebijakan diimplementasikan melalui intervensi pasar dan penyaluran bantuan. Pemerintah Daerah didorong untuk menyalurkan bantuan pangan dari CBP kepada masyarakat sebagai upaya konkret untuk mengendalikan permintaan dan mencegah lonjakan harga komoditas pangan. Selain itu, strategi mencakup implementasi komunikasi yang efektif dan inspeksi berkala kepada pemangku kepentingan untuk mencegah

praktik-praktik yang merusak pasar, seperti penimbunan beras dan fenomena *panic buying*.

Untuk memperkuat distribusi dan logistik, strategi implementasi belanja diarahkan pada pemutakhiran aspek-aspek pendukung distribusi komoditas pangan. Hal ini mencakup investasi dalam pembangunan gudang dan penerapan skema resi gudang untuk menjamin kualitas dan ketersediaan stok pangan di daerah.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan sarana produksi, kebijakan belanja bertujuan pada optimalisasi sektor pertanian. Strategi yang harus diimplementasikan meliputi optimalisasi distribusi pupuk, pengembangan teknologi agribisnis, serta penggunaan bibit unggul/hibrida untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen di tingkat petani, yang secara keseluruhan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengentasan kemiskinan.

IV.5.D.7. Rekomendasi

Secara umum, rekomendasi perubahan regulasi berfokus pada penyempurnaan implementasi belanja di tingkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan, terutama dalam isu ketahanan pangan dan penurunan angka pengangguran.

Diperlukan pengoptimalan implementasi belanja yang mendukung ketahanan pangan. Rekomendasi regulasi tersebut harus mendorong Pemerintah Daerah untuk memastikan penyaluran bantuan pangan dari CBP terlaksana secara efektif untuk mengendalikan harga dan permintaan. Regulasi juga perlu disempurnakan untuk mewajibkan adanya strategi komunikasi dan inspeksi berkala kepada pemangku kepentingan guna mengantisipasi praktik penimbunan beras dan fenomena *panic buying*. Di samping itu, rekomendasi diarahkan pada pemutakhiran regulasi terkait aspek-aspek pendukung distribusi pangan, seperti pengamanan lahan produksi dan pembangunan gudang dengan skema resi gudang, serta peningkatan

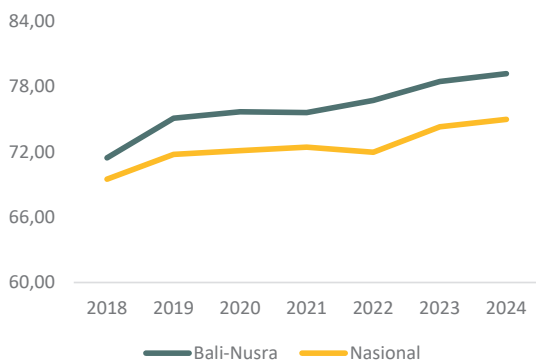
implementasi kebijakan terkait penggunaan bibit unggul/hibrida dan optimalisasi distribusi pupuk.

IV.5.E. REGIONAL BALI - NUSA TENGGARA

IV.5.E.1. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan

Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Regional Bali-Nusa Tenggara dibandingkan nasional pada periode 2018–2024 menunjukkan bahwa wilayah ini mampu mempertahankan ketahanan pangan yang lebih kuat daripada rata-rata nasional, meskipun menghadapi dinamika ekonomi dan kerentanan bencana yang tinggi. Bali-Nusa Tenggara mencatat peningkatan IKP dari 71,45 pada 2018 menjadi 79,19 pada 2024, yang mencerminkan perbaikan struktur ketahanan pangan melalui penguatan akses pangan, peningkatan produksi lokal, dan diversifikasi sumber pangan di tengah tantangan geografis dan ketergantungan pada

Grafik 4.23. Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Bali - Nusa Tenggara dan Nasional Tahun



Sumber : BPS 2024, diolah

sektor pariwisata.

Secara umum Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Regional Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 menggambarkan ketimpangan ketahanan pangan yang cukup nyata antarprovinsi, sekaligus menunjukkan bagaimana faktor geografis, struktur ekonomi, dan kapasitas layanan dasar memengaruhi ketahanan pangan di kawasan ini. Bali mencatat nilai tertinggi, 88,23, menegaskan posisi provinsi tersebut sebagai wilayah dengan sistem pangan paling kuat di Bali-Nusa Tenggara, didukung oleh

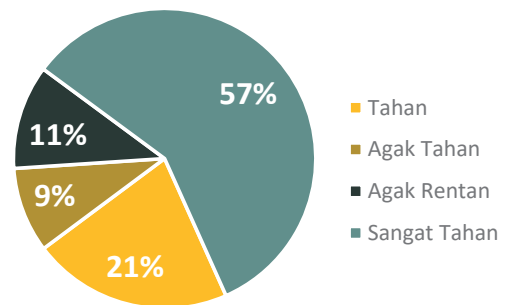
Gambar 4.5. Indeks Ketahanan Pangan Regional Bali - Nusa Tenggara Tahun 2024



Sumber : BPS 2024, diolah

infrastruktur yang lebih baik, akses pangan yang lebih stabil, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang relatif maju. Di sisi lain, Nusa Tenggara Barat (NTB) berada pada kategori menengah dengan nilai 78,44, mencerminkan adanya kemajuan dalam produksi pangan dan peningkatan akses, namun masih menghadapi tantangan dalam stabilitas distribusi dan mitigasi risiko bencana. Kondisi terberat dialami Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencatat nilai 70,91, menunjukkan keterbatasan signifikan pada aspek ketersediaan dan pemanfaatan pangan, dipengaruhi oleh kerentanan iklim,

Grafik 4.24. Sebaran Skor IKP Regional Bali – Nusa Tenggara Tahun 2024



Sumber : BPS 2024, diolah

kemiskinan struktural, serta infrastruktur dasar yang belum merata.

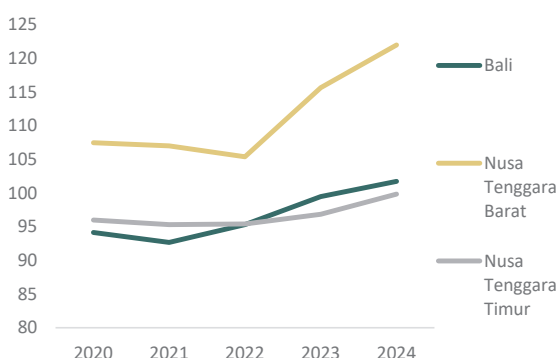
Sebanyak 21 Kab/Kota atau 51 persen dari 41 Kab/Kota memiliki skor IKP yang tinggi dengan sebaran sebagai berikut: 21 Kab/Kota (Sangat Tahan); 13 Kab/Kota (Tahan); 6 Kab (Agak Tahan), dan 1 Kab (Agak Rentan) yaitu pada

Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten/Kota pada Regional Kalimantan, diperoleh 5 (lima) Kab/Kota dengan urutan skor terbaik, yaitu (1) Kota Denpasar (95,80); (2) Kabupaten Gianyar (92,16); (3) Kabupaten Badung (91,59); (4) Kabupaten Tabanan (90,54); dan (5) Kabupaten Klungkung (87,53). Sedangkan 5 (lima) Kab/Kota dengan urutan skor terendah, yaitu (1) Kabupaten Sabu Raijua (58,42); (2) Kabupaten Sumba Barat Daya (62,66); (3) Kabupaten Alor (65,43); (4) Kabupaten Lombok Utara (65,92); dan (5) Kabupaten Manggarai Timur (66,69).

IV.5.E.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara umum, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2024 pada regional Bali – Nusa Tenggara, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan capaian NTP tertinggi (121,96) kemudian disusul berturut-turut oleh Bali (101,72) dan Nusa Tenggara Timur (99,83). Berdasarkan subsektor Nilai Tukar Petani (NTP) pada wilayah Bali – Nusa Tenggara menunjukkan variasi yang cukup kontras antarprovinsi. Nusa Tenggara Barat menonjol sangat kuat pada subsektor hortikultura (158,45), tertinggi di kawasan ini, serta memiliki kinerja baik pada subsektor pangan (121,81), peternakan (108,8), dan nelayan (103,26). Nusa Tenggara Timur menunjukkan kinerja cukup berimbang pada subsektor peternakan (108,52) dan pembudidayaan ikan (100,59), namun subsektor tanaman pangan

Grafik 4.25. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Bali - Nusa Tenggara

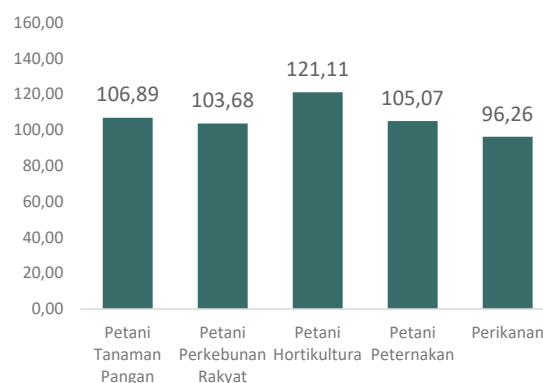


Sumber : BPS 2024, diolah

(98,79), perkebunan (98,11), dan nelayan (89,49) masih di bawah 100 yang menandakan tekanan daya tukar petani di sektor tersebut. Bali relatif stabil dengan nilai mendekati 100 di hampir semua subsektor; sedikit lebih baik pada perkebunan (107,2) dan pembudidayaan ikan (107,72), namun subsektor nelayan (91,65) masih tertekan.

Secara umum, subsektor hortikultura menjadi penggerak utama nilai tukar petani di kawasan Bali – Nusa Tenggara, terutama di NTB yang mencatat capaian jauh di atas rata-rata.

Grafik 4.26. Perbandingan Subsektor NTP Regional Bali - Nusa Tenggara



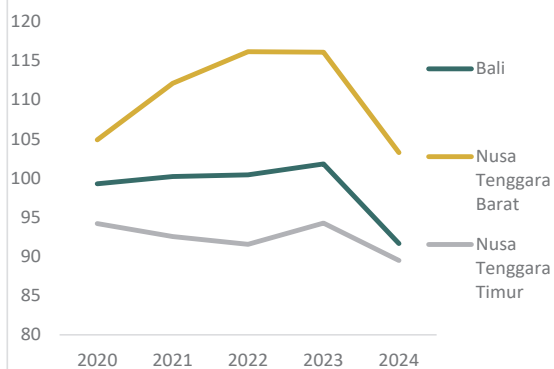
Sumber : BPS 2024, diolah

Sementara itu, subsektor nelayan menjadi titik lemah di semua provinsi, khususnya di NTT dan Bali dengan nilai jauh di bawah 100. Hal ini menunjukkan perlunya strategi khusus pada sektor perikanan tangkap dan distribusi hasil laut, sementara subsektor hortikultura di NTB dapat dijadikan motor penggerak ekonomi regional.

IV.5.E.3. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Secara umum, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2024 pada regional Bali – Nusa Tenggara, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan capaian NTN tertinggi (103,26) kemudian disusul berturut-turut oleh Bali (91,65), dan Nusa Tenggara Timur (89,49). Sepanjang tahun 2024, Capaian indeks NTN pada provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lain dalam regional Bali

Grifik 4.27. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2020 -2024 Regional Maluku-Papua



Sumber : BPS 2024, diolah

– Nusa Tenggara serta masih lebih rendah dari capaian NTN secara nasional. Capaian ini masih selalu defisit disebabkan oleh tingginya indeks harga yang harus dibayar oleh nelayan dibandingkan indeks harga yang diterima.

Usaha untuk peningkatan NTN dan kesejahteraan nelayan dilaksanakan melalui alokasi anggaran untuk sektor kelautan, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Melalui DAK Fisik tahun 2024 telah terdaftar 383 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp81,70 miliar. Kontrak-kontrak yang telah terdaftar ini adalah untuk Pembangunan kolam atau bak pemijahan/ induk/pakan alami/tandon/bak pendederan, pembangunan dermaga, pembangunan kolam pelabuhan, pembangunan tempat pemasaran ikan dan pengadaan sarana dan prasarana

seperti mesin kapal perikanan, perahu/kapal penangkapan ikan dengan ukuran lebih kecil dari 5 GT dan untuk output-output lainnya.

IV.5.E.4. Analisis Belanja Program Prioritas Pemerintah

Belanja ketahanan pangan dilaksanakan oleh 5 (lima) Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pangan Nasional. Ketahanan pangan di beberapa provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2024 melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan dukungan pemerintah daerah melalui APBN maupun TKD.

Kinerja program ketahanan pangan di regional Bali-Nusa Tenggara didominasi oleh Program dengan alokasi terbesar yaitu PUPR dengan program Ketahanan Sumber Daya Air dengan pagu Rp3,25 triliun dan realisasi 74,66 persen, mencerminkan dominasi sektor infrastruktur air dalam struktur belanja Bali-Nusa Tenggara. Sementara itu, alokasi dan realisasi tertinggi berikutnya terdapat pada KKP dengan program dukungan manajemen (Rp235,5 miliar dengan realisasi 97,8 persen), serta Kementan dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Rp194,2 miliar dengan realisasi 85,32 persen). Beberapa program strategis lainnya masih menunjukkan tingkat

Tabel 4. 18. Kinerja Anggaran Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Regional Bali - Nusa Tenggara Tahun 2024

K/L-Program	Bali-Nusa Tenggara		Total	
	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
BPN – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	-	29,1	29,0
KKP – Program Dukungan Manajemen	235,5	230,3	3.991,7	3815,9
KKP – Program Kualitas Lingkungan Hidup	15,2	14,9	131,5	121,3
KKP – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3,2	3,0	214,5	172,6
KKP – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	33,5	28,1	380,7	340,2
KKP – Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	71,1	57,9	2.529,9	1825,0
PUPR – Program Ketahanan Sumber Daya Air	3.251,0	2.427,5	29.636,6	22670,8
Kemendag – Program Perdagangan Dalam Negeri	-	-	241,1	239,4
Kementan – Program Dukungan Manajemen	78,1	71,1	3.518,7	3072,4
Kementan – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	194,2	165,7	9.760,5	9033,5
Kementan – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	21,0	18,8	1.456,5	1327,0
Kementan – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	32,1	30,2	883,3	866,2
Total	3.934,9	3.047,4	52.774,1	43.513,4

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

serapan yang relatif rendah, termasuk program vokasi, nilai tambah industri perikanan, serta program dukungan manajemen pada Kementan. Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan alokasi anggaran untuk Bali-Nusa Tenggara yang masih moderat (77,44 persen) menunjukkan perlunya percepatan implementasi program agar kontribusi wilayah terhadap target ketahanan

ketahanan pangan Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp3,05 triliun dari total pagu Rp3,93 triliun, mencerminkan bahwa fokus belanja masih terkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur sumber daya air serta dukungan kapasitas sektor kelautan dan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan regional.

Tabel 4. 19. Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Program Ketahanan Pangan Regional Bali - Nusa Tenggara Tahun 2024

Nama K/L	Nama KRO	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
KKP	Layanan Dukungan Manajemen Internal	205,6	202,4
KKP	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	17,6	17,2
KKP	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	17,4	6,8
PUPR	OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	133,1	132,7
PUPR	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	193,1	192,1
PUPR	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	2.775,9	1.962,8
Kementan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	65,3	64,3
Kementan	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	141,4	114,8
Kementan	Sarana Pengembangan Kawasan	26,9	25,5
Lainnya		358,6	328,8
Total		3.934,9	3.047,4

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

pangan nasional dapat semakin optimal dalam periode pelaksanaan berjalan.

Pada level KRO, kinerja program ketahanan pangan di regional Bali-Nusa Tenggara didominasi oleh Kementerian PUPR untuk RO Prasarana Bidang SDA dan Irigasi yang memiliki pagu terbesar Rp2,77 triliun dengan realisasi 70,7 persen, sehingga menegaskan bahwa infrastruktur sumber daya air menjadi fokus utama belanja regional. Kontribusi berikutnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan pagu Rp205,6 miliar dan realisasi 98,44 persen, dan Pendidikan Vokasi bidang Pertanian dan perikanan senilai Rp17,6 miliar dengan realisasi 97,72 persen, yang memperkuat kapasitas sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) berkontribusi lewat penguatan prasarana pertanian, pengembangan kawasan dan dukungan kelembagaan dengan total pagu mencapai Rp233,6 miliar dan realisasi sekitar Rp204,6 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran

Implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Bali didukung dari dana APBN dalam bentuk alokasi dana pada K/L dan TKD (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) alokasi pagu yang didominasi untuk mendukung infrastruktur dan jaringan pengairan dan irigasi dengan 2 Proyek Strategis Nasional yang besar yaitu Bendungan Tamblang dan Bendungan Sidan. Dari sisi APBD, alokasi pagu belanja ketahanan pangan tahun 2024 turun 33,04 persen dibandingkan tahun lalu, dengan pagu Rp28,16 miliar dari sebelumnya 42,06 miliar. Program dalam APBD selaras program APBN yakni didominasi infrastruktur dan jaringan pengairan dan irigasi sebagai salah satu komponen utama pendukung produktivitas pangan.

Pada Provinsi NTB, untuk tahun anggaran 2024 tiga kementerian/lembaga utama menerima alokasi belanja dengan tagging Belanja Ketahanan Pangan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp39,98 miliar), Kementerian PUPR (Rp683,2 miliar), dan Kementerian Pertanian (Rp107,8 miliar). Anggaran ini digunakan untuk program strategis, seperti pengelolaan perikanan, pengembangan irigasi,

dan peningkatan daya saing industri pangan. Pemerintah daerah juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp93,8 miliar untuk air minum, Rp60,31 miliar untuk irigasi, dan Rp157,1 miliar untuk sektor pertanian. Hibah internasional dari IsDB (Rp16,18 miliar) dan IFAD (Rp33,27 miliar) turut mendukung pembangunan infrastruktur, permodalan, dan pelatihan.

Sementara itu, pada Provinsi NTT, selain Belanja Pemerintah Pusat, belanja ketahanan pangan juga dialokasikan pada Belanja Transfer ke Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) maupun DAK Nonfisik yang didistribusikan ke dalam beberapa bidang. Sejumlah proyek strategis nasional yang antara lain Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, serta Bendungan Napun Gete. Keberadaan bendungan di tiga daerah berbeda memberikan dampak yang beragam terhadap luas panen padi di sawah irigasi yang menjadi jangkauannya. Dari tiga bendungan, bendungan Raknamo menunjukkan dampak yang signifikan terhadap luas panen padi di sawah irigasi, terutama pada tahun 2022 yang mencapai puncaknya dalam lima tahun terakhir dengan luas panen padi hampir mencapai 5.000 Ha.

Secara umum, untuk regional Bali – Nusa Tenggara, belanja program prioritas menghadapi hambatan spesifik geografis dan struktural. Lumbung pangan di Provinsi Bali sulit berkembang karena adanya keterbatasan lahan dan alih fungsi sawah, sehingga defisit beras masih terjadi. Untuk air & irigasi/perpompaan, Bali mengandalkan sistem subak tradisional yang perlu revitalisasi dan integrasi dengan teknologi modern, sedangkan di NTT keterbatasan infrastruktur irigasi membuat sebagian besar lahan pangan hanya mengandalkan tadah hujan. Bantuan benih berperan penting di NTB untuk jagung dan padi, namun di NTT hasilnya belum signifikan karena minim pendampingan dan infrastruktur pascapanen. Sementara itu, cetak sawah dan optimasi lahan di NTT terkendala kondisi tanah kering dan berbatu, sehingga fokus diarahkan pada diversifikasi komoditas (sorgum, ubi, singkong) ketimbang perluasan sawah. Di NTB, program optimasi lahan masih

menjanjikan karena lahan potensial masih tersedia, sedangkan di Bali kebijakan ini nyaris tidak relevan mengingat luas lahan pertanian semakin menyempit.

IV.5.E.5. Analisis Permasalahan Spesifik

Pada Provinsi Bali, permasalahan perencanaan muncul akibat perbedaan fokus pusat dan daerah—pusat mendorong perbaikan gizi dan protein, sementara daerah lebih menitikberatkan hortikultura dan peternakan. Hambatan pengadaan barang dan jasa tampak dari kegagalan lelang infrastruktur akibat minimnya penyedia, sementara untuk eksekusi program sosial sering tertunda karena retur bantuan dan keterlambatan juknis. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pejabat perbendaharaan tersertifikasi masih terbatas di luar satker besar.

Sedangkan pada Provinsi NTB, masalah perencanaan terletak pada kurangnya fokus hilirisasi komoditas dan keterhubungan perdagangan antarpulau. pengadaan barang dan jasa menghadapi kendala dokumen tidak lengkap sehingga DAK gagal salur di beberapa daerah, sementara eksekusi anggaran lambat akibat revisi kontrak dan keterbatasan distribusi pembiayaan (KUR, UMi). Selain itu, SDM lokal masih terbatas untuk inovasi hilirisasi.

Sementara itu, NTT menanggung beban kerawanan pangan tertinggi di Indonesia dengan 14,68 persen penduduk rawan pangan. Permasalahan perencanaan adalah dominasi program beras dan jagung tanpa diversifikasi memadai; sementara pengadaan barang dan jasa meski mendapat alokasi DAK besar (Rp701,65 miliar), realisasi fisiknya masih rendah.

IV.5.E.6. Strategi dan Potensi Pengembangan Komoditas Lokal

Implementasi ketahanan pangan pada regional Bali – Nusa Tenggara dengan kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau disamping memberikan manfaat berupa besarnya potensi kelautan yang dimiliki serta keanekaragaman

potensi sumber daya alam dan pariwisata antar pulauanya, namun disisi lain juga menyimpan berbagai tantangan dalam pembangunan daerahnya, baik tantangan ekonomi, sosial kependudukan maupun tantangan geografis.

Tantangan utama Provinsi Bali adalah defisit beras tahunan, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pasokan luar daerah. Strateginya adalah memperkuat sistem subak dan irigasi modern serta mendorong diversifikasi konsumsi pangan.

Sedangkan tantangan utama Provinsi NTB adalah risiko iklim, kebutuhan industrialisasi produk pertanian, dan ketergantungan pada impor komoditas tertentu. Strategi NTB lebih diarahkan pada optimalisasi surplus beras ± 300 ribu ton per tahun, penguatan hilirisasi, dan pengembangan rumput laut serta jagung sebagai komoditas unggulan.

Sementara itu tantangan utama Provinsi NTT adalah keterbatasan distribusi, iklim kering, dan kerentanan sosial ekonomi. Strategi diarahkan pada diversifikasi pangan lokal (sorgum, ubi kayu, ubi jalar), perbaikan irigasi, dan mekanisasi pertanian. Potensi komoditas ternak dan perikanan tangkap juga menjadi penopang ketahanan protein.

IV.5.E.7. Rekomendasi

Atas permasalahan serta tantangan yang ada pada regional Bali – Nusa Tenggara, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga agar menyusun juknis dan jadwal kegiatan sebelum dimulainya tahun anggaran mengingat permasalahan pada belanja K/L yang mendukung DAK Fisik terkait eksekusi kegiatan yang baru dilaksanakan pada semester II dikarenakan sesuai juknis dan jadwal yang ditentukan oleh pusat.
- b. Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian antara lain melalui pengendalian alih fungsi lahan, mengoptimalkan pengenalan

teknologi pertanian yang berkelanjutan, dan penyediaan bibit yang unggul dan ramah lingkungan, serta pemberian insentif bagi petani muda.

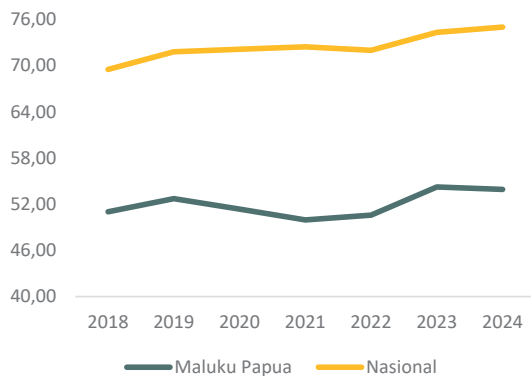
- c. Program-program pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, agar diarahkan untuk mencari solusi agar luas lahan dan produksi pertanian bisa meningkat, sehingga dapat tercipta swasembada pangan pada regional Bali – Nusa Tenggara misalnya dengan modernisasi alat dan sistem pertanian, Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (irigasi sekunder dan tersier), peningkatan ketrampilan dan pengetahuan pertanian bagi para petani, program mitigasi dan antisipasi perubahan iklim terhadap pertanian dan sebagainya.
- d. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dapat difungsikan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan keamanan dan kualitas pangan yang beredar di pasaran. Selain itu, OKKPD juga dapat berperan dalam memberikan edukasi tentang keamanan pangan dan cara memilih pangan sehat kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih kurang terpapar informasi tentang gizi seimbang.
- e. Pengambilan kebijakan hendaknya terus dilakukan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan. Data Susenas dan BPS dapat digunakan untuk memantau pola konsumsi masyarakat dan mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi khusus.

IV.5.F. REGIONAL MALUKU - PAPUA

IV.5.F.1. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan

Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan (IKP) kawasan Maluku–Papua menunjukkan fluktuasi dalam tujuh tahun terakhir, bergerak dari (47,51) pada 2018, sempat menurun hingga (45,54)

Grafik 4.28. Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Regional Maluku-Papua dan Nasional Tahun 2018-2024

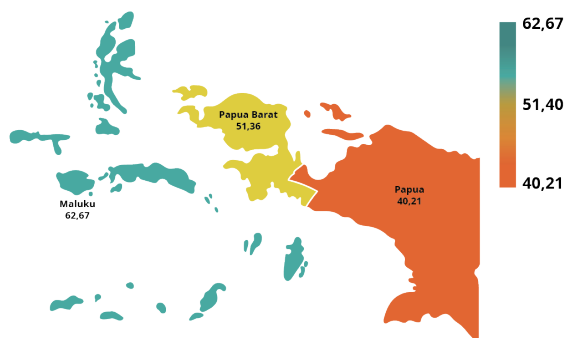


Sumber : BPS 2024, diolah

pada 2021, kemudian kembali meningkat dan mencapai (49,80) pada 2024. Secara keseluruhan, peningkatan 2018–2024 tercatat sebesar (2,29) poin, menandakan perbaikan yang mulai menguat pada periode akhir. Namun, capaian ini masih berada jauh di bawah rata-rata nasional, yang terus naik dari (69,50) pada 2018 menjadi (74,99) pada 2024 dengan pertumbuhan (5,49) poin. Kesenjangan antara Maluku–Papua dan nasional masih cukup lebar dan belum menunjukkan penyempitan yang signifikan, mencerminkan bahwa ketahanan pangan di wilayah ini memerlukan intervensi lebih intensif untuk mengejar level nasional.

Secara umum, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di wilayah Maluku–Papua menunjukkan perkembangan yang beragam sepanjang periode 2018–2024. Provinsi Maluku dan Papua Barat tampak mengalami penguatan ketahanan pangan yang lebih stabil dibanding

Gambar 4.6. Indeks Ketahanan Pangan Regional Maluku-Papua Tahun 2024



Sumber : BPS 2024, diolah

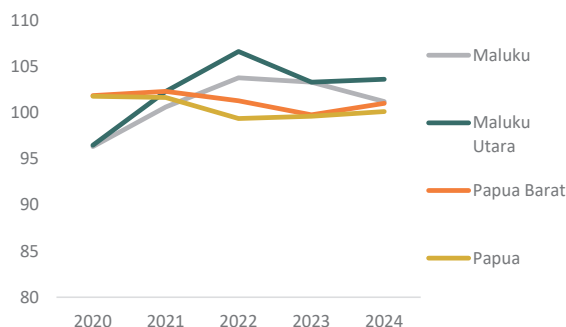
wilayah lainnya, di mana Maluku meningkat dari (52,80) pada 2018 menjadi (62,68) pada 2024, sedangkan Papua Barat naik dari (44,02) menjadi (51,36) dalam periode yang sama. Di sisi lain, Maluku Utara dan Papua menunjukkan tren yang lebih fluktuatif. Maluku Utara sempat berada pada level (68,96) pada 2019, namun menurun dan berakhir di (61,44) pada 2024, sementara Papua turun dari (40,44) pada 2018 menjadi (35,48) pada 2021 sebelum kembali meningkat sedikit menjadi (40,21) pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa perbaikan ketahanan pangan di Maluku–Papua belum merata dan masih dipengaruhi oleh akses pangan, infrastruktur, serta kemampuan produksi di daerah kepulauan dan pedalaman. Dengan capaian tertinggi baru berada pada kisaran 62–63 poin, intervensi lebih kuat masih diperlukan agar wilayah ini dapat bergerak mendekati tingkat ketahanan pangan nasional.

Dari total 63 Kabupaten/Kota, sebanyak 42 atau 67 persen memiliki skor IKP yang tergolong rendah antara Sangat Rentan (33 persen), Rentan (22 persen), dan Agak Rentan (11 persen). Sisanya sebanyak 21 atau 33 persen masuk dalam kategori lebih tinggi dengan sebaran Agak Tahan (12 persen), Tahan (8 persen), dan Sangat Tahan (13 persen). Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten/Kota pada Regional Maluku-Papua, diperoleh 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan urutan skor terbaik, yaitu (1) Kota Ternate (88,24); (2) Kota Ambon (84,56); (3) Kab. Merauke (84,07); (4) Kab. Mimika (83,64); dan (5) Kab. Buru (80,21). Sedangkan 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan urutan skor terendah, yaitu (1) Kab. Intan Jaya (14,14); (2) Kab. Nduga (17,10); (3) Kab. Lanny Jaya (21,33); (4) Kab. Deiyai (21,35); dan (5) Kab. Mamberamo Tengah (21,51).

IV.5.F.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara keseluruhan, Nilai Tukar Petani (NTP) di wilayah Maluku–Papua menunjukkan pertumbuhan moderat dengan kecenderungan fluktuasi sepanjang 2020–2024, mencerminkan perbaikan yang masih berlangsung namun belum sekuat wilayah lain. Maluku Utara menjadi

Grafik 4.29. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan 2020 -2024 Regional Maluku Papua

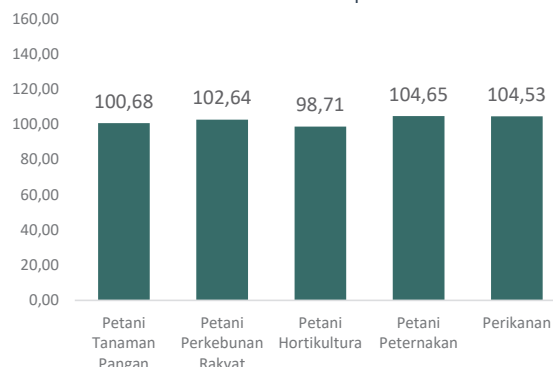


Sumber : BPS 2024, diolah

provinsi dengan peningkatan paling konsisten, naik dari (96,47) pada 2020 hingga mencapai (103,61) pada 2024, sementara Maluku juga menunjukkan tren penguatan meski berbalik turun pada 2024 setelah sempat mencapai puncak (103,77) pada 2022. Di sisi lain, Papua Barat dan Papua bergerak relatif datar dengan nilai yang cenderung berada di kisaran 99–101, mengindikasikan daya beli petani yang stabil tetapi belum meningkat signifikan.

Pemekaran provinsi pada 2024 menampilkan capaian yang beragam. Secara umum, kinerja NTP Maluku–Papua menunjukkan bahwa kesejahteraan petani terus membaik namun masih memerlukan penguatan produktivitas, akses pasar, dan daya saing komoditas agar peningkatan dapat lebih progresif dan merata di seluruh wilayah. Secara umum, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2024 pada regional Maluku-Papua, yaitu Provinsi Maluku Utara menjadi daerah dengan capaian NTP tertinggi (103,61) kemudian disusul berturut-turut oleh Maluku (101,2), Papua Barat Daya (101,07), Papua Barat (101), Papua Pegunungan (100,85), Papua Selatan (100,13), Papua (100,12), dan Papua Tengah (99,39). Berdasarkan subsektor Nilai Tukar Petani (NTP) pada wilayah Maluku-Papua menunjukkan variasi yang cukup jelas antarprovinsi dengan Maluku Utara mendominasi pada tiga subsektor. Maluku Utara mencatat subsektor unggul pada tanaman pangan (106,92) dan hortikultura (105,55), dan pembudidayaan ikan (104,78). Di sektor peternakan provinsi Papua Tengah

Grafik 4.30. Perbandingan Subsektor NTP Regional Maluku - Papua



Sumber : BPS 2024, diolah

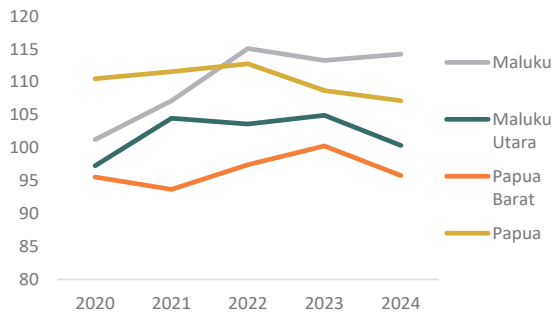
dan Papua Selatan unggul dengan nilai 108,62 dan 108,38. Subsektor peternakan menjadi penggerak utama NTP di wilayah Maluku-Papua, justru di Maluku Utara yang justru mengalami kelemahan di subsektor ini dengan nilai 98,04. Masih terdapat beberapa provinsi dengan nilai subsektor di bawah 100 sebanyak tiga atau lebih seperti Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Serta Papua Tengah yang tidak memiliki nilai pada beberapa subsektor seperti Perkebunan, nelayan, dan pembudidayaan ikan.

Secara umum, dari kelima subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan belum ada yang cukup menonjol untuk dapat menjadi penggerak utama nilai tukar petani (NTP) di wilayah Maluku-Papua. Seluruh kelima subsektor tersebut masih lemah dengan capaian di sekitar 100 kecuali untuk subsektor perikanan yang sedikit berada di atas nilai 100.

IV.5.F.3. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Secara umum, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di wilayah Maluku–Papua menunjukkan perkembangan yang bervariasi sepanjang 2020–2024. Maluku menjadi provinsi dengan capaian relatif kuat dan stabil, meningkat dari (101,26) pada 2020 hingga mencapai (115,10) pada 2022, sebelum turun tipis namun tetap tinggi di angka (114,24) pada 2024. Sementara itu, Papua juga mempertahankan kinerja positif dengan nilai berada di atas 107 pada 2024, setelah sebelumnya mencatat level tertinggi (112,78) pada 2022. Di sisi lain, Maluku Utara

Grafik 4.31. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2020 -2024 Regional Maluku-Papua



Sumber : BPS 2024, diolah

bergerak fluktuatif dengan tren menurun pada 2024 menuju (100,37), mengindikasikan tekanan pada daya beli sebagian nelayan. Papua Barat bahkan berada di bawah 100 pada 2024, menurun dari level (100,29) di 2023, yang menunjukkan pelemahan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Adapun pemekaran provinsi baru pada 2024 memperlihatkan variasi awal NTN, di mana Papua Selatan tampil tertinggi dengan (112,28), disusul Papua Tengah sebesar (108,63), sementara Papua Barat Daya berada di posisi lebih rendah dengan (95,11). Secara keseluruhan, ketahanan ekonomi nelayan di Maluku-Papua masih belum merata, dengan beberapa wilayah kuat dan stabil, namun sebagian lainnya masih menghadapi tantangan daya beli dan produktivitas.

NTN tahun 2024 pada regional Maluku Papua,

yaitu Provinsi Maluku menjadi daerah dengan capaian NTN tertinggi (114,24) kemudian disusul berturut-turut oleh Papua Selatan (112,28), Papua Tengah (108,63), Papua (107,17) Maluku Utara (100,37), Papua Barat (95,80), dan Papua Barat (95,11). Sementara pada provinsi Papua Pegunungan tidak mempunyai NTN dikarenakan tidak mempunyai nelayan/garis pantai. Dalam 2 tahun terakhir, Provinsi Maluku menjadi satu-satunya wilayah yang berhasil mempertahankan dan bahkan sedikit meningkatkan NTN-nya dari (113,29) pada 2023 menjadi (114,24) pada 2024. Provinsi lain seperti Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua masing-masing turun sebesar (4,58), (4,49), dan (1,54) dibanding tahun 2023.

IV.5.F.4. Analisis Belanja Program Prioritas Pemerintah

Kinerja Maluku-Papua dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2024 menunjukkan pola yang sejalan dengan capaian nasional, meskipun tingkat realisasi anggaran di kawasan ini masih relatif moderat. Dari total pagu nasional sebesar Rp52,77 triliun, wilayah Maluku-Papua memperoleh alokasi sebesar Rp2,27 triliun atau sekitar 4,3 persen dari total pagu ketahanan pangan nasional, dengan realisasi mencapai Rp425,5 miliar. Capaian tersebut juga berkontribusi sekitar 4,4 persen dari total realisasi nasional (Rp9,76

Tabel 4. 20. Kinerja Anggaran Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Regional Maluku-Papua Tahun 2024

K/L-Program	Maluku – Papua		Total	
	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)	Pagu (Miliar Rp)	Real (Miliar Rp)
BPN – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	–	–	29,1	0,5
KKP – Program Dukungan Manajemen	216,7	212,0	3.991,7	588,1
KKP – Program Kualitas Lingkungan Hidup	8,8	8,4	131,5	33,3
KKP – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3,7	3,0	214,5	52,3
KKP – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	28,3	24,3	380,7	79,1
KKP – Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	109,5	85,6	2.529,9	413,2
PUPR – Program Ketahanan Sumber Daya Air	1.462,3	1.200,7	29.636,6	5.791,6
Kemendag – Program Perdagangan Dalam Negeri	–	–	241,1	130,8
Kementan – Program Dukungan Manajemen	65,1	53,6	3.518,7	438,1
Kementan – Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	262,2	260,8	9.760,5	1.647,6
Kementan – Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	49,1	44,2	1.456,5	463,3
Kementan – Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	60,4	59,3	883,3	120,7
Total	2.266,0	1.951,7	52.774,1	9.758,7

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

triliun), menandakan bahwa peran Maluku–Papua dalam ketahanan pangan nasional terus berlangsung namun masih perlu diperkuat agar optimal.

Struktur program ketahanan pangan di Maluku–Papua didominasi oleh Kementerian PUPR, terutama melalui Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan pagu Rp1,46 triliun dan realisasi 82,11 persen menjadi porsi terbesar, hampir mencapai 65 persen dari total pagu kawasan. Kontribusi berikutnya datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan bernilai Rp109,5 miliar dengan realisasi 78,17 persen. Kementerian Pertanian (Kementan) turut memperkuat aspek produksi melalui Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pagu Rp262,2 miliar, dengan kinerja realisasinya yang baik di 99,46 persen. Secara umum, komposisi anggaran ketahanan pangan Maluku–Papua menunjukkan dominasi pada pembangunan infrastruktur air dan pengelolaan sektor kelautan-perikanan sebagai penopang utama ketahanan pangan wilayah timur Indonesia. Optimalisasi realisasi anggaran ke depan berpotensi memperkuat ketahanan pangan berbasis komoditas darat dan laut, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Maluku–Papua.

Pada level KRO, kinerja program ketahanan pangan di regional Maluku–Papua didominasi oleh Kementerian PUPR dengan tiga KRO utama, yaitu Prasarana Bidang SDA dan Irigasi dengan pagu Rp1,08 triliun dengan realisasi

76,15 persen, Prasarana Jaringan Sumber Daya Air dengan pagu Rp172,4 miliar dengan realisasi 99 persen, serta OM Prasarana Jaringan SDA dengan pagu Rp156,3 miliar dengan realisasi 98,5 persen. Ketiganya merupakan penopang terbesar alokasi anggaran wilayah ini, dengan total pagu mencapai lebih dari separuh keseluruhan dan realisasi terbesar dibanding KRO lainnya, mencerminkan fokus pada penguatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai fondasi utama ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. Dari sisi Kementerian Pertanian, KRO Prasarana Pengembangan Kawasan menjadi komponen terbesar dengan pagu Rp235,8 miliar dengan realisasi 99 persen. Sementara KRO Sarana Pengembangan Kawasan memiliki pagu lebih kecil yaitu Rp39,2 miliar dengan realisasi 94,89 persen, menunjukkan konsentrasi dukungan pada pengembangan sarana produksi pertanian dan perluasan kawasan budidaya. Adapun KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal mengalokasikan pagu Rp45,7 miliar dengan realisasi Rp43,5 miliar sebagai penguatan tata kelola dan efisiensi operasional.

Sementara itu pada KKP, kontribusi terbesar berasal dari KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan pagu Rp201,5 miliar dan realisasi 98,75 persen, diikuti Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam dengan pagu Rp60,9 miliar (realisasi 64,69 persen), serta Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan yang mengalokasikan pagu Rp12,9 miliar dengan realisasi 94,57 persen. Total keseluruhan pagu KRO ketahanan pangan Maluku–Papua sebesar Rp2,26 triliun dengan

Tabel 4. 21. Kinerja Anggaran Klasifikasi Rincian Output Program Ketahanan Pangan Regional Maluku–Papua Tahun 2024

Nama K/L	Nama KRO	Pagu	Real
KKP	Layanan Dukungan Manajemen Internal	201,5	199,0
KKP	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	60,9	39,4
KKP	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	12,9	12,2
PUPR	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	156,3	154,1
PUPR	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	1.079,1	821,8
PUPR	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	172,4	170,8
KEMENTAN	Layanan Dukungan Manajemen Internal	45,7	43,5
KEMENTAN	Prasarana Pengembangan Kawasan	235,8	235,0
KEMENTAN	Sarana Pengembangan Kawasan	39,2	37,2
Lainnya		262,2	238,7
Total		2.266,0	1.951,7

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

realisasi Rp1,95 triliun, memperlihatkan dominasi infrastruktur pengelolaan air dan dukungan kelembagaan sumber daya alam sebagai motor utama peningkatan ketahanan pangan di wilayah ini.

IV.5.F.5. Analisis Permasalahan Spesifik

Secara umum, tantangan ketahanan pangan di regional Maluku Papua ini tidak hanya terkait produksi, tetapi juga masalah akses ekonomi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani/nelayan. Isu utama di beberapa wilayah adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok secara mandiri. Defisit pangan pokok terjadi provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Daerah tersebut menghadapi defisit produksi padi lokal yang signifikan. Defisit ini menyebabkan tingginya ketergantungan pada impor pangan dari luar wilayah. Ketergantungan ini membuat ketahanan pangan rentan terhadap gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga di luar daerah. Masalah ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan daya beli dan kesejahteraan para produsen pangan lokal. NTN dan/atau NTP di Provinsi Papua dan provinsi baru berada jauh di bawah NTN/NTP Nasional. Penyebab utama rendahnya NTN adalah tingginya harga konsumsi rumah tangga, yang berarti pendapatan petani/nelayan tidak mampu mengimbangi biaya hidup, termasuk harga pangan itu sendiri.

Pada regional Maluku Papua menghadapi tantangan dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam (SDA) spesifik masing-masing wilayah dan kendala pembangunan yang bersifat struktural dan geografis. Provinsi Maluku Utara dengan komoditas kunci di sektor pertambangan menghadapi kerentanan terhadap fluktuasi harga global karena dominasi nikel dan industri pengolahan. Ketergantungan pada sektor tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan pergeseran sumber daya (lahan, tenaga kerja) dari sektor pertanian dan perikanan, sehingga mengancam diversifikasi dan ketersediaan pangan lokal. Berbeda dengan Provinsi Maluku Utara, potensi Provinsi Maluku

di sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar namun belum dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pangan. Pada provinsi Papua Barat mengalami defisit produksi padi lokal yang menyebabkan ketergantungan tinggi pada distribusi pangan dari luar wilayah. Hal ini mengindikasikan program peningkatan produksi belum optimal. Secara umum, regional ini menghadapi isu ketahanan pangan, kerentanan ekonomi, dan kendala geografis yang menghambat pengembangan potensi SDA secara merata dan berkelanjutan.

IV.5.F.6. Strategi dan Potensi Pengembangan Komoditas Lokal

Strategi dan kebijakan implementasi belanja pemerintah untuk ketahanan pangan di regional Maluku Papua harus bersifat terpadu dari hulu ke hilir. Kebijakan implementasi belanja harus berfokus pada tiga aspek utama yaitu peningkatan produksi dan hilirisasi, penguatan akses dan kesejahteraan produsen, serta perbaikan tata kelola dan stabilitas harga.

Belanja harus diprioritaskan untuk peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas lokal. Untuk mengatasi defisit pangan, khususnya di Papua Barat dan optimalisasi sumber daya yang rendah di Maluku, alokasi belanja untuk diversifikasi dan intensifikasi produksi, termasuk belanja untuk pengadaan sarana dan prasarana pertanian/perikanan yang modern dan berkelanjutan, serta program penelitian untuk mengembangkan pangan lokal seperti ubi-umbian sebagai alternatif pangan pokok. Selain itu, belanja modal harus diarahkan untuk hilirisasi industri komoditas unggulan (kelautan, perkebunan rempah, atau hasil bumi lainnya) melalui insentif fiskal daerah dan penyertaan modal. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja lokal.

Selanjutnya, implementasi belanja dapat diarahkan untuk penguatan akses dan kesejahteraan produsen. Tingginya angka kemiskinan di Maluku dan rendahnya Nilai

Tukar Nelayan (NTN) di Papua menunjukkan masalah akses ekonomi dan harga. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus mencakup subsidi seperti subsidi bahan bakar untuk nelayan atau pupuk untuk menekan biaya produksi dan secara langsung meningkatkan pendapatan bersih petani/nelayan. Belanja modal juga dapat difokuskan pada jalan, pelabuhan, serta cold storage untuk mengatasi kendala geografis, memotong rantai pasok yang panjang, dan menstabilkan harga antardaerah.

Kemudian, strategi belanja juga harus didukung oleh tata kelola anggaran dan harmonisasi kebijakan yang kuat. Belanja harus dipastikan bahwa Dana Otsus di Papua dan Papua Barat dialokasikan secara terukur untuk program yang berdampak langsung pada ketahanan pangan. Perlu ada belanja untuk peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam hal penyusunan anggaran berbasis kinerja dan perbaikan mekanisme Pelaporan Keuangan APBD agar lebih transparan dan mudah diakses, sehingga alokasi dana pembangunan, termasuk untuk ketahanan pangan, dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara efektif.

IV.5.F.7. Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan ketahanan pangan untuk Regional Maluku-Papua menekankan perlunya penguatan anggaran, infrastruktur, logistik, diversifikasi pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk Maluku, fokus utamanya adalah pemerataan alokasi APBN/APBD ke daerah dengan IKP rendah (seperti Kota Tual dan Kepulauan Aru), perbaikan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak terpusat di Ambon, serta investasi pada infrastruktur transportasi dan cold storage untuk mendukung distribusi pangan lokal, terutama ikan. Di Maluku Utara, strategi diarahkan pada diversifikasi pangan (sagu, ubi, ikan) dan pembangunan infrastruktur logistik bersubsidi, didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan di klaster kecamatan prioritas. Untuk Papua, Pemerintah Daerah diminta untuk menyerahkan DAK Fisik Ketahanan Pangan secara optimal dan

memastikan bahwa program besar seperti food estate dilaksanakan dengan memperhatikan kemakmuran penduduk asli dan kelestarian alam. Sementara itu, Papua Barat berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pemerataan akses pupuk dan bibit bersubsidi, penyediaan fasilitas pascapanen (*cold storage*), serta pembangunan jalur distribusi dan kepastian status tanah ulayat/adat untuk lahan pertanian baru, selain memastikan ketersediaan BBM dengan harga resmi bagi nelayan. Secara keseluruhan, sinergi pemerintah pusat dan daerah serta dorongan partisipasi sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan dan distribusi pangan.

*Halaman ini
sengaja dikosongkan*

A photograph of a train on a bridge with a large clock tower in the background. The train is white and blue, moving towards the viewer. The bridge has multiple tracks. In the background, there is a tall, red and white clock tower with a large clock face. The sky is overcast. The text "V. SIMPULAN DAN SARAN" is overlaid on the left side of the image.

V. SIMPULAN DAN SARAN



V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

V.1. SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan umum dan analisis yang telah diulas pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi dan Kesejahteraan

1. Perkembangan perekonomian Indonesia di tahun 2024 yang juga merupakan masa transisi pemerintahan yang diwarnai dengan berbagai isu global, menunjukkan performa yang resilient dengan menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp22.139 triliun sehingga berhasil mencapai Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan tersebut telah berhasil melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi global dan mendekati asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2024 sebesar 5,2 persen (y-on-y). Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Maluku-Papua yaitu sebesar 7,81 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi paling rendah tercatat pada regional Sumatera dengan tingkat pertumbuhan 4,45 persen.
2. Tingkat inflasi Indonesia di tahun 2024 berhasil menurun ke angka 1,57 persen (y-on-y) setelah meningkat tinggi di tahun 2022 hingga 5,51 persen (y-on-y) akibat pandemi. Permintaan yang sempat tertahan mulai stabil, dan rantai pasokan kembali berfungsi normal. Penurunan tingkat inflasi juga ditopang oleh terjaganya berbagai komponen inflasi. Dari sisi tingkat inflasi regional, Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi baru memiliki tingkat inflasi tertinggi secara nasional yaitu 5,36 persen (y-on-y), tingginya inflasi Provinsi ini beriringan dengan tingginya inflasi pada Provinsi Papua Tengah yang juga merupakan provinsi baru dengan inflasi sebesar 3,27 persen. Tingginya inflasi pada kedua provinsi tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai provinsi baru, selain itu juga relatif masih rendahnya aksesibilitas dan distribusi.
3. Sejalan dengan peningkatan perekonomian, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan, antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 meningkat menjadi 75,02 dari 70,81 di tahun 2020. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kemampuan dasar manusia untuk hidup sehat, berpengetahuan dan memiliki standar hidup layak.
- b. Di tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan nasional yang diukur melalui Gini Ratio membaik di angka 0,379, level terendah dalam tujuh tahun terakhir.
- c. Indonesia kembali ke tren penurunan yang mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,06 juta atau menjadi 8,57 persen pada bulan September 2024.
- d. Dengan ekonomi kembali tumbuh, konsumsi meningkat, investasi kembali bergerak sehingga sektor-sektor padat karya mulai kembali menyerap tenaga kerja, dan jumlah pengangguran mengalami penurunan cukup signifikan dari 9,77 juta jiwa pada Agustus 2020 menjadi 7,47 juta jiwa pada Agustus 2024.
- e. Nilai Tukar Petani menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024 yang meningkat cukup signifikan hingga mencapai 120,26. Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100, menandakan kesejahteraan petani yang relatif baik.
- f. Khusus untuk indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) di 5 tahun terakhir masih terjadi tren fluktuatif, Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) mengalami penurunan di tahun 2024 dari 122 pada tahun 2023 menjadi 120,86, hal ini disebabkan karena penurunan pada komponen penerimaan Penangkapan Laut sebesar 1,36 basis poin (*y-on-y*).

Perkembangan Fiskal APBN, APBD dan Anggaran Konsolidasian

4. Perbaikan kondisi perekonomian juga turut meningkatkan capaian pendapatan negara. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 2,4 persen (*y-on-y*) dari Rp2.783,93 triliun di tahun 2023 menjadi Rp2.850,60 triliun pada tahun 2024, realisasi tersebut melewati target tahun 2024 hingga 101,72 persen. Adapun kontribusi komponen Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 3,60 persen dari sebesar Rp2.154,21 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp2.231,84 triliun pada tahun 2024. Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2024 tersebut tercapai sebesar 100,61 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp2.218,40 triliun. Sementara itu, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 tercatat sebesar Rp584,38 triliun, atau menurun 4,60 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar Rp612,54 triliun.
5. Belanja negara juga mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen dari Rp3.121,22 triliun di tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.359,77 triliun di tahun 2024. Realisasi tersebut melampaui alokasi APBN 2024 sebesar 100,49 persen dari target Rp3.343,49 triliun. Realisasi belanja K/L antara lain digunakan untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN, dan pelaksanaan pemilu tahun 2024, sementara belanja non K/L dimanfaatkan untuk pembayaran bunga utang, pembayaran subsidi energi dan pupuk, dan penyaluran bantuan kemasyarakatan.
6. Pertumbuhan negatif terjadi pada realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 2,03 persen menjadi sebesar Rp863 triliun di tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan Dana Bagi Hasil hingga 25,52 persen menjadi sebesar Rp153,17 triliun di tahun 2024

akibat penurunan penerimaan ekspor dan harga komoditas pertambangan di tahun sebelumnya. Kalimantan mendapatkan proporsi terbesar dari realisasi DBH yaitu sebesar 42,04 persen; sedangkan Jawa mendapatkan proporsi terbesar untuk realisasi DAU sebesar 31,59 persen. Kontraksi yang terjadi di sebagian besar wilayah menandakan adanya penyesuaian kebijakan transfer fiskal.

7. Realisasi defisit APBN 2024 tercatat sebesar Rp509,16 triliun atau setara 2,29 persen dari PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan target defisit dalam Perpres Nomor 206 Tahun 2024 yang dipatok sebesar Rp541,03 triliun (2,37 persen dari PDB), seiring dengan meningkatnya kinerja penerimaan perpajakan dan PNBPN yang melampaui target. Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2024 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit di bawah 3 persen. Selama tahun 2024, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
8. Kinerja APBD di tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan kenaikan target pendapatan APBD sebesar Rp123,72 triliun (10,05 persen, y-on-y), seiring dengan target, realisasi pendapatan juga mengalami peningkatan sebesar Rp97,39 triliun (7,75 persen, y-on-y). Sementara itu kinerja belanja juga mengalami kenaikan di alokasi pagu sebesar Rp120,61 triliun (9,30 persen y-on-y), dengan peningkatan realisasi belanja sebesar Rp86,53 triliun (6,85 persen y-on-y) dibandingkan tahun sebelumnya.
9. Dalam kurun waktu 2022 - 2024, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Target pendapatan mengalami peningkatan (y-on-y) baik di komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,34 persen dari Rp358,09

triliun menjadi Rp385,98 triliun dan pada komponen Pendapatan Transfer sebesar 11,14 persen dari Rp855,45 triliun menjadi Rp944,94 triliun. Adapun Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan sebesar 26,36 persen dari Rp17,36 triliun menjadi Rp23,70 triliun. Secara keseluruhan, arah kebijakan fiskal daerah tahun 2024 menunjukkan pengelolaan yang lebih sehat dengan defisit yang menyempit menjadi surplus, berkurangnya kebutuhan pembiayaan, serta pemanfaatan anggaran yang lebih optimal untuk mendukung capaian pembangunan daerah.

10. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 tercatat Rp1.353,82 triliun yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,75 persen. Pajak daerah menjadi kontributor utama PAD dengan porsi 71,80 persen, yaitu sebesar Rp275,84 triliun. Hal ini memperlihatkan perbaikan ekonomi domestik dan efektivitas kebijakan intensifikasi pajak di berbagai daerah. Di samping PAD, dana transfer masih menjadi penopang utama pendapatan daerah dengan realisasi dana transfer tercatat sebesar Rp882,71 triliun, meningkat 8,60 persen dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer daripada pendapatannya sendiri dalam menggerakkan perekonomian daerah.
11. Realisasi belanja daerah Tahun 2024 tercatat Rp1.350,40 triliun atau mencapai 95,26 persen dari target belanja yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran. Persentase capaian belanja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu (6,85 persen) dengan porsi terbesar dari Belanja Operasi sebesar Rp931,19 triliun atau 68,96 persen dari total belanja, yang mencerminkan sebagian besar anggaran daerah masih diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
12. Seiring dengan pertumbuhan

perekonomian daerah, kondisi surplus/defisit APBD tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dari tahun sebelumnya yang defisit, di tahun 2024 menjadi surplus Rp3,42 triliun yang menandakan keseimbangan yang lebih baik antara pendapatan dan belanja daerah di tingkat nasional. Kebutuhan daerah untuk menutup gap fiskal melalui pembiayaan juga berkurang dengan penurunan di sisi pembiayaan menjadi sebesar Rp72,29 triliun di 2024 atau turun sebesar 26,50 persen. Daerah juga mulai mengoptimalkan penggunaan anggarannya, sehingga sisa anggaran yang tidak terpakai cenderung berkurang dengan penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) menjadi Rp75,71 triliun di 2024 atau turun 16,72 persen.

13. Dalam rangka mendukung implementasi penganggaran berbasis kinerja melalui Monev Pelaksanaan Anggaran, sejak tahun 2019, seluruh Satker K/L telah melaporkan data capaian output dengan tingkat partisipasi pada tahun 2024 mencapai 99,89 persen setiap bulan. Sebagai upaya untuk mendorong kualitas dan pemanfaatan data capaian output Satker K/L, telah dilakukan identifikasi dan pengelompokan output-output yang bersifat strategis berdasarkan sektor prioritas untuk mempermudah proses identifikasi dan pemaknaan data capaian output secara lebih makro. Adapun pengelompokan tersebut disajikan menjadi 5 (lima) bidang/sektor prioritas belanja K/L yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor perlindungan sosial, dan sektor ketahanan pangan. Untuk mendukung ketercapaian output tersebut, pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga telah merealisasikan belanja K/L pada tahun 2024 mencapai Rp1.321,93 triliun. Realisasi belanja K/L tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 72,8 persen yang disebabkan karena: (1) kegiatan-

kegiatan operasional 86 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak.

Monev Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD 2024

14. Monitoring dan evaluasi sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik dilakukan terhadap 6 bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu bidang air minum, bidang jalan, bidang kesehatan dan KB, bidang pendidikan, bidang pertanian dan bidang sanitasi yang dialokasikan pada beberapa K/L antara lain, Kementerian PUPR, Kemendikbud Ristek, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.
15. Alokasi belanja terbesar dengan nominal Rp56.941,1 miliar ada di bidang jalan dengan kinerja penyerapan anggaran yang sangat baik yaitu realisasi mencapai 98,1%. Untuk bidang kesehatan dan KB, alokasi belanja K/L mencapai Rp144,1 miliar dengan realisasi 70,1% atau Rp101 miliar. Selanjutnya, kinerja realisasi anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik bidang pendidikan menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan realisasi sebesar 98,1%. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam belanja untuk mendukung berbagai program di sektor pendidikan. Di bidang pertanian, realisasi belanja K/L mencapai 94,8% atau sebesar Rp2.863,6 miliar. Hal ini menunjukkan efektivitas penyaluran yang baik dengan beberapa RO menunjukkan penyerapan optimal mendekati 100%, antara lain area penyaluran benih jagung, benih padi, jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi, dan layanan kesehatan hewan. Berikutnya, realisasi belanja K/L untuk bidang sanitasi mencapai 64,7% atau sebesar 2.733,9 miliar. Hal ini menunjukkan

proyek-proyeksanitasitelahberjalan dengan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran yang lebih baik.

16. Belum ada payung hukum yang mengikat satker yang memiliki RO Harmonis untuk melaksanakan sinkronisasi dengan Pemda yang memiliki DAK Fisik. Beberapa permasalahan atau tantangan dalam melaksanakan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik meliputi: (1) penganggaran, (2) pengadaan barang dan jasa, (3) eksekusi kegiatan, (4) regulasi dalam pelaksanaan kegiatan dan (5) Sumber Daya Manusia.

Sinergi Pusat-Daerah Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan

17. Rata-rata IKP nasional mencapai sekitar 76,6. Perkembangan IKP di seluruh regional dalam periode 2018-2024 berada di rentang 65-80, kecuali regional Maluku-Papua yang berada di rentang 45-50. Daerah Indonesia timur dengan rata-rata nilai IKP rendah masih menghadapi tantangan pada aspek konektivitas logistik, ketergantungan pada komoditas tunggal, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
18. Beberapa wilayah menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang stagnan atau menurun, seperti Maluku (103,3 turun ke 101,2) dan Papua Barat (99,76 ke 101,0) yang peningkatannya sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan struktural seperti akses pasar, biaya logistik tinggi, dan terbatasnya diversifikasi usaha tani masih menjadi faktor pembatas kesejahteraan petani. Wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi kontributor utama peningkatan NTP nasional, seiring dengan pulihnya harga komoditas perkebunan ekspor dan penguatan rantai pasok hasil pertanian. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur masih memerlukan dukungan lebih kuat dalam bentuk subsidi input pertanian, infrastruktur irigasi, serta penguatan kelembagaan petani. Dengan tren positif

ini, tahun 2024 dapat dikatakan sebagai periode penguatan kesejahteraan petani, namun tantangan utama ke depan adalah memastikan peningkatan NTP juga diikuti oleh keberlanjutan produksi, diversifikasi komoditas, dan stabilitas harga input agar kesejahteraan petani dapat terjaga secara berkelanjutan

19. Secara nasional, tahun 2024 menunjukkan penurunan rata-rata Nilai Tukar nelayan (NTN). Sebagian besar provinsi mengalami penurunan nilai, menandakan adanya tekanan pada sektor perikanan tangkap, terutama akibat fluktuasi harga ikan di pasar domestik, kenaikan biaya bahan bakar (BBM) untuk melaut, serta cuaca ekstrem yang memengaruhi frekuensi dan volume tangkapan. Perbandingan NTN 2023-2024 memperlihatkan bahwa kesejahteraan nelayan mengalami tekanan, meskipun sebagian wilayah tetap stabil. Diperlukan langkah terpadu antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keseimbangan harga ikan di tingkat nelayan, memperluas akses pasar ekspor dan domestik, serta memperkuat ketahanan ekonomi pesisir melalui inovasi pembiayaan dan modernisasi alat tangkap yang ramah lingkungan.

V.2. REKOMENDASI

Di tahun 2024 kebijakan fiskal dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dengan masa transisi pemerintahan, namun perekonomian Indonesia cukup berhasil dalam melewati tantangan domestik dan global dengan APBN dan APBD sebagai instrumen pemerintah yang secara konsisten dapat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif dan menjaga risiko sebagai *buffer* perekonomian tetap terkendali, sehingga sehat dan berkelanjutan. Belanja pemerintah pusat dan daerah juga mampu menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian.

APBN dan APBD tahun 2024 menjadi fondasi dalam menyeimbangkan berbagai tujuan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi,

serta melanjutkan berbagai pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. APBN terus berupaya untuk menjadi instrumen yang dapat melindungi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN dan APBD harus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas, sehingga peran APBN dan APBD dapat berjalan secara optimal dan terjaga.

Berdasarkan capaian kinerja perekonomian, kesejahteraan, dan fiskal tahun 2024 sebagaimana telah diulas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan **rekomendasi untuk pemerintah pusat** sebagai berikut:

- a. Kebijakan efisiensi anggaran belanja barang khususnya belanja perjalanan dinas dapat dilanjutkan dan diterapkan di tahun berikutnya dengan harapan dapat dialokasikan pada belanja yang bersifat produktif dan memberikan *multiplier effect*. Selain itu, diperlukannya percepatan dari satker K/L dalam merealisasikan belanja modal yang terbukti dapat memberikan *multiplier effect* dengan memastikan proyek strategis nasional (PSN) berjalan sesuai jadwal, mengurangi kendala teknis dalam eksekusi proyek, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam proses persetujuan anggaran.
- b. Pemerintah perlu membuat *tagging* anggaran yang terkait PSN sehingga selanjutnya dapat dibangun sistem informasi untuk monitoring perkembangan seluruh kegiatan dan belanja pemerintah yang terkait dengan PSN hingga capaian outputnya. Untuk keperluan pelaporan dan pengambilan keputusan pimpinan, proses pengisian output khusus untuk kegiatan dan belanja pemerintah yang terkait dengan PSN dapat dilaksanakan setiap minggu.
- c. Pemangku kebijakan perlu mendorong ekstensifikasi pajak melalui peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak dari sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti industri pengolahan dan sektor jasa, serta meningkatkan insentif bagi sektor manufaktur dan industri hilir untuk memperluas kontribusi terhadap penerimaan pajak dan mengurangi dampak volatilitas harga komoditas. Selain itu, juga perlu dilakukan penguatan kebijakan perpajakan yang mendukung digitalisasi dan ekonomi kreatif sebagai sumber penerimaan pajak baru.
- d. Sebagai salah satu sumber penerimaan bukan pajak, pendapatan BLU perlu terus didorong, antara lain dengan mendorong instansi/ satuan kerja yang berbasis pelayanan untuk dapat ditetapkan sebagai BLU/ BLUD sehingga dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan mendorong implementasi berbagai inovasi untuk mendorong pendapatan negara. Disamping itu, pengembangan digitalisasi pada sistem layanan dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan masyarakat yang lebih cepat, berkualitas dan terjangkau juga dapat mendorong peningkatan penerimaan negara.
- e. Proses pengadaan barang dan jasa masih menghadapi kendala terkait keterbatasan penyedia dalam e-Katalog serta hambatan teknis dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat pelelangan dini, memperbanyak penyedia lokal yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta meningkatkan pemanfaatan *e-purchasing* guna mempercepat realisasi anggaran. Selain itu, penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa perlu menjadi prioritas agar hambatan administratif dapat di minimalisir.
- f. Penguatan Kebijakan Berbasis Anggaran untuk Ketahanan Pangan. Pemerintah perlu memastikan distribusi anggaran APBN dan APBD lebih merata ke wilayah yang memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) rendah seperti beberapa kota/kabupaten di wilayah

timur. Selain itu, skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik harus diperbaiki agar lebih merata dan dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan. Efektivitas belanja APBN dan APBD juga harus ditingkatkan dengan mengalokasikan dana secara lebih proporsional terhadap sektor produksi pangan, transportasi, serta infrastruktur penunjang ketahanan pangan agar hasilnya lebih optimal.

- g. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi implementasi anggaran pemerintah dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan serta mendukung program pembangunan melalui partisipasi dalam proyek infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sementara itu, media dan LSM dapat mengawal transparansi serta akuntabilitas dengan menyebarkan informasi, mengadakan dialog publik, dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kebijakan pembangunan lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Sedangkan **rekomendasi atas hasil analisis ekonomi dan fiskal regional** sebagaimana telah diulas pada bab-bab sebelumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Regional Sumatera

Hasil konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah di regional Sumatera selama tiga tahun terakhir masih berada di posisi defisit. Realisasi pendapatan negara dan hibah di Sumatera mencapai Rp140,2 triliun atau tumbuh 5,16 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp345,49 triliun yang meningkat 4,44 persen dari tahun sebelumnya masih didominasi oleh belanja barang dengan porsi 42,80 persen.

Pengembangan Regional Sumatera dapat dilakukan melalui dukungan pengembangan sektor industri dari segi sarana dan prasarana seperti dukungan infrastruktur baik fisik maupun non fisik sehingga berdampak pada nilai tambah produk industri. Dukungan

dapat berjalan optimal dengan harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berjalan dengan baik. Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat tergolong sangat melimpah. Namun, kondisi geografis dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SDA tergolong rendah menyebabkan produktivitas ekonomi masih rendah. Selain itu diperlukan pengoptimalan iklim investasi serta birokrasi dan perizinan. Adapun rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM di tingkat kelurahan dalam pengelolaan anggaran melalui pelatihan teknis, sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta pendampingan dalam realisasi DAU Pendanaan Kelurahan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan tata kelola dana desa guna mencegah penyalahgunaan anggaran, dengan memperkuat peran inspektorat daerah dan mekanisme audit internal yang lebih proaktif.
- 2) Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Konsumsi (PBJT). Kampanye kesadaran pajak dan inovasi dalam sistem pembayaran pajak berbasis teknologi juga perlu diperluas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 3) Belanja daerah harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan dukungan untuk pemilu/pilkada serentak. Pemda perlu mengadopsi prinsip *spending better* dengan fokus pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, porsi belanja modal khususnya yang berdampak

jangka panjang seperti jalan, irigasi dan jaringan perlu dialokasikan lebih namun hal tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang sehingga di masa depan dapat dirasakan manfaatnya (ekonomi tumbuh dan PAD meningkat).

- 4) Pemerintah daerah perlu memanfaatkan secara maksimal potensi ekspor yang ada di wilayah Sumatera seperti komoditas produk hasil perkebunan, seperti komoditas kelapa sawit dengan mengoptimalkan program bantuan pemerintah yang tersedia melalui BLU BPDP terutama kepada pekebun swadaya. Namun disamping itu, perlu juga digali potensi dari komoditas atau sektor lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas dan sektor tertentu sehingga mengurangi risiko penurunan nilai ekspor disaat terjadi pelemahan harga komoditas di pasar global.

b. Regional Jawa

Hasil konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah menunjukkan surplus anggaran sebesar Rp92,04 triliun di tahun 2024, walau angka ini menurun tajam dari tahun sebelumnya hingga 64,76 persen (y-on-y). Tren penurunan menunjukkan adanya tekanan dari sisi belanja yang lebih ekspansif dibandingkan kenaikan pendapatan. Pendapatan negara dan hibah meningkat 1,79 persen dibandingkan tahun 2023 menjadi Rp2.504,19 triliun di tahun 2024. Sedangkan belanja negara di regional Jawa tumbuh 9,69 persen (y-on-y) mencapai Rp2.412,15 triliun. Pertumbuhan ini terutama disebabkan juga oleh penambahan dan penguatan kementerian/lembaga di tahun 2024 dan pelaksanaan program prioritas nasional yang ditempatkan di wilayah Jawa.

Untuk pengembangan dan pembangunan di Regional Jawa, dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat difokuskan pada peningkatan belanja di sektor potensial regional. Di samping itu, pengelolaan SDA masih memiliki tantangan dalam penurunan kuantitas dan kualitas

cadangan air bersih, pemanfaatan kawasan hutan yang kurang, pencurian dan kebakaran hutan, peningkatan jumlah timbunan sampah, kegiatan tambang tanpa izin yang merusak lingkungan, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Selain itu, realisasi investasi membaik dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya belum cukup tinggi. Adapun rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah agar melakukan *tagging* belanja prioritas pada APBD seperti ketahanan pangan, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, dan/atau penanganan stunting agar dapat lebih mudah dalam pengukuran pengeluaran APBD untuk mendukung belanja prioritas tersebut.
- 2) Berkaitan dengan ketahanan pangan di area Jawa, ketersediaan lahan sangat berpengaruh terhadap produksi pangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah agar melakukan pengendalian alih fungsi lahan, khususnya lahan yang menjadi sumber produksi pangan, tetap terjaga sesuai peruntukannya.
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota bersama dengan Kementerian/ Lembaga terkait harus memperkuat sektor industri berbasis inovasi dan teknologi, mendorong investasi dengan kebijakan yang lebih pro-bisnis, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Pemerataan pembangunan di pedesaan perlu diprioritaskan dengan peningkatan infrastruktur, akses keuangan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Selain itu, penguatan sektor pertanian dan perikanan melalui modernisasi teknologi dan jaminan pasar bagi petani dan nelayan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peluang-peluang akses pembiayaan dari program pemerintah seperti program pinjaman daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur dan program kredit UMKM.

- 4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah agar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah serta mendorong inovasi dalam pemanfaatan aset daerah. BPKAD agar melakukan percepatan realisasi belanja modal prioritas dengan mengatasi kendala administrasi dan teknis dalam pengadaan proyek infrastruktur. Organisasi Pemerintah Daerah agar meningkatkan efisiensi dalam belanja daerah, transparansi penggunaan anggaran, serta koordinasi lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
- 5) Pemerintah Daerah bersama dengan Kementerian/Lembaga dan semua pihak yang terkait perlu memperkuat regulasi perlindungan lahan pertanian, meningkatkan infrastruktur distribusi pangan, serta mendorong penggunaan teknologi pertanian berbasis inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga harus mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas petani guna meningkatkan efisiensi rantai pasok dan stabilitas harga pangan.
- 6) Pemerintah Daerah hendaknya berupaya mengurangi surplus dan *idle cash* dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan/kegiatan dan realisasi belanja serta tidak menunda pembayaran hak-hak kepegawaian dan tagihan pihak ketiga agar manfaat pembangunan/aktivitas pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat

c. Regional Kalimantan

Laporan keuangan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah regional Kalimantan menunjukkan peningkatan pendapatan negara dan hibah di beberapa tahun terakhir. Di tahun 2024, pendapatan negara dan hibah tumbuh sebesar 0,98 persen yang terutama didorong

oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang mencapai Rp86,62 triliun. Realisasi belanja di regional ini naik 1,52 persen (y-on-y) dengan lonjakan signifikan bersumber dari belanja pemerintah pusat melalui pelaksanaan program prioritas nasional di Kalimantan, utamanya pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

Komoditas utama di regional Kalimantan adalah hasil sumber daya alam dengan kekayaan alam yang melimpah di wilayah ini. Namun, pengelolaannya masih belum optimal. Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pertambangan dan penggalian masih cukup tinggi sehingga menimbulkan eksposur yang rentan terhadap kondisi pasar global. Adapun rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di wilayah Kalimantan, pemerintah daerah perlu mendorong upaya untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas melalui diversifikasi terutama mengembangkan sektor manufaktur, industri hilir, sektor jasa berbasis digital, serta ekonomi kreatif.
- 2) kapasitas fiskal desa harus ditingkatkan dengan memastikan Dana Desa digunakan secara efektif untuk pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur perdesaan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mendorong agar setiap desa tidak hanya bergantung pada transfer Dana Desa tetapi juga pengembangan potensi ekonomi lokal yang lebih mandiri dan produktif.
- 3) Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kewenangan BPKAD dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD dan sekaligus menilai kinerja pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga dapat mengadopsi teknis/cara yang dilakukan Kanwil DJPb dalam melakukan monitoring dan evaluasi seperti *Spending Review*, *Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA)*, dan *Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*.

- 4) Dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan di wilayah Kalimantan, terutama dalam membiayai pembangunan infrastruktur yang tidak dapat diakomodir melalui APBD maupun APBN, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan *creative financing* seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi dan sukuk daerah, pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maupun investasi swasta dan asing.
- 5) Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang inklusif dan berkelanjutan, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi yang fokus pada penguatan sektor hilir dan pengembangan sektor baru. Hilirisasi industri tambang dan pertanian/perkebunan harus diprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, seperti pengolahan batubara menjadi bahan bakar cair atau energi terbarukan, serta pengolahan kelapa sawit menjadi biodiesel dan produk kosmetik. Selain itu, diversifikasi ke sektor ekonomi kreatif, dan pariwisata dapat menjadi motor penggerak baru yang lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global dan isu *sustainability* atas *extraction-based resource* dalam jangka panjang.
- 6) Mendorong penguatan infrastruktur yang juga menjadi kunci utama dalam mendukung konektivitas antardaerah dan efisiensi distribusi barang dan jasa. Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan harus dipercepat, sementara kawasan industri terpadu yang didukung

infrastruktur logistik modern perlu dikembangkan untuk menarik lebih banyak investasi. Skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah swasta (KPBU) atau penerbitan obligasi daerah dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis tanpa membebani anggaran pemerintah.

d. Regional Sulawesi

APBN regional mencatatkan pertumbuhan pendapatan negara dan hibah hingga 8,59 persen (y-on-y) atau sebesar Rp43,96 triliun di tahun 2024. Sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi daerah dari sektor industri pengolahan sektor transportasi dan pergudangan, pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang mencapai Rp36,14 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara di wilayah Sulawesi meningkat 2,23 persen (y-on-y) sebesar Rp162,98 triliun yang didorong oleh belanja pemerintah pusat.

Komoditas utama dari regional Sulawesi adalah di sektor pertanian dan perkebunan dengan produksi kakao, kelapa dan kopi sebagai salah satu area produksi terbesar di Indonesia. Disamping itu, sektor perikanan dan kelautan serta pertambangan di Sulawesi juga menjadi sektor potensial yang dapat dikembangkan lebih jauh dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan rendahnya sumber daya yang tersedia di daerah, maka sinergi, kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan menjadi sangat penting. Berikut rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah:

- 1) Untuk mendorong kepatuhan pajak, pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa diskon pajak bagi UMKM yang secara konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha kecil, tetapi juga membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pertukaran data perpajakan perlu diperkuat untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergalai.

- 2) Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu aplikasi digital agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan lebih mudah dan efisien. Dengan adanya sistem terpusat ini, berbagai layanan administratif, pembayaran pajak, dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan. Selain itu, penerapan tanda tangan digital dan sistem pengarsipan elektronik perlu segera diimplementasikan guna mempercepat pengurusan dokumen serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang sering menyebabkan keterlambatan birokrasi. Pemerintah juga dapat meluncurkan layanan pengaduan online berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu merespons keluhan masyarakat secara cepat dan akurat.
- 3) Sistem pengadaan barang dan jasa perlu dioptimalkan melalui percepatan pelelangan dini serta peningkatan jumlah penyedia lokal dalam e-Katalog. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan lebih efisien dan tidak terhambat oleh keterbatasan penyedia yang memenuhi syarat. Pemanfaatan *e-purchasing* juga perlu diperluas guna mempercepat realisasi anggaran serta mengurangi potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan pengadaan agar hambatan administratif dapat diminimalisir.
- 4) Memprioritaskan pengembangan

sumber daya manusia (SDM). Pemerintah perlu menyediakan pelatihan vokasi dan sertifikasi untuk tenaga kerja di sektor-sektor strategis seperti teknologi dan industri pengolahan. Program pemberdayaan berbasis komunitas juga penting untuk mengurangi disparitas antara pedesaan dan perkotaan, termasuk dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pemasaran produk untuk meningkatkan daya saing masyarakat lokal. Peningkatan pendidikan berbasis sains dan teknologi (STEM), serta dukungan terhadap riset dan inovasi, harus terus diperkuat untuk menciptakan SDM yang kompetitif sehingga mampu mendorong inovator untuk berkembang dan menyiapkan Angkatan kerja yang memiliki daya saing tinggi.

- 5) Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah perlu menyederhanakan proses perizinan usaha melalui platform digital yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan sistem perizinan yang lebih cepat dan transparan, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya. Selain itu, pemberian insentif pajak daerah bagi industri yang berinvestasi dalam hilirisasi produk pertanian, perikanan, dan pertambangan perlu diterapkan guna menarik lebih banyak investor. Kemitraan dengan Kadin dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga perlu diperkuat guna membuka jalur investasi langsung dengan mitra internasional.

e. Regional Bali-Nusa Tenggara

Selama 3 tahun terakhir, laporan keuangan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara terus mengalami defisit. Namun demikian, pendapatan negara dan hibah di tahun 2024

masih dapat tumbuh 20,12 persen (y-on-y) sebesar Rp36,15 triliun dengan pendorong utama dari sektor penerimaan perpajakan yang meningkat signifikan hingga mencapai 29,3 triliun. Sementara itu, dari sisi belanja negara di Bali dan Nusa Tenggara juga naik 4,05 persen sebesar Rp89,57 triliun.

Disamping sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menjadi komoditas pendorong utama di area Bali dan Nusa Tenggara, pariwisata dan kerajinan adalah sumber pendapatan utama di wilayah ini. Pengembangan aktivitas sektor selain pariwisata memiliki urgensi pengembangan agar mengurangi ketergantungan wilayah pada sisi pariwisata. Beberapa rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Guna mengoptimalkan peran APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di regional Bali-Nusa Tenggara, seluruh pemda diharapkan dapat memperbaiki pola penyerapan anggaran. Akselerasi belanja APBD harus terus didorong dan dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, untuk menghindari penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran. Dengan realisasi anggaran yang lebih smooth, merata dan proposional disetiap triwulan, diharapkan dapat memberikan dorongan, stimulus dan *multiplier effect* yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi regional.
- 2) Guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, maka berbagai langkah strategis perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk menarik investasi ke wilayah ini. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan di daerah, baik melalui pinjaman daerah maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha. Disamping itu, dengan implementasi UU HKPD khususnya terkait dengan penguatan *local taxing power* melalui

penerapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diharapkan pemda dapat menggali potensi pendapatan daerahnya seoptimal mungkin.

- 3) Regional Bali - Nusa Tenggara merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan ketahanan pangan paling berat. Secara geografis, wilayah tersebut memiliki kondisi alam yang kering dan berbatu, dengan curah hujan rendah dan musim kemarau yang panjang. Selama kurun waktu 7 tahun terakhir beberapa indikator ketahanan pangan menunjukkan tanda-tanda yang perlu mendapat perhatian, diantaranya luas dan hasil panen komoditas padi dan jagung yang menurun, permintaan akan kebutuhan padi justru mengalami peningkatan, serta tingkat defisit produksi beras yang semakin meningkat. Pemda dapat menjadikan indikator tersebut sebagai *early warning system* terhadap tingkat ketahanan pangan di area ini. Program-program pembangunan dibidang pertanian dan ketahanan pangan, agar diarahkan untuk mencari solusi agar luas lahan dan produksi pertanian bisa meningkat, sehingga dapat tercipta swasembada pangan misalnya dengan modernisasi alat dan sistem pertanian, pembangunan sarana dan prasarana pertanian (irigasi sekunder dan tersier), peningkatan ketrampilan dan pengetahuan pertanian bagi para petani, program mitigasi dan antisipasi perubahan iklim terhadap pertanian dan sebagainya.
- 4) Perlunya BLU pada regional Bali - Nusa Tenggara melakukan *sharing knowledge* kepada BLUD yang memiliki rumpun sama terkait bagaimana mengelola badan usaha sehingga tingkat kemandiriannya dapat meningkat, hal ini untuk membantu peningkatan kontribusi BLUD terhadap peningkatan

ekonomi regional.

- 5) Wilayah ini tidak lepas dari permasalahan sampah, kemacetan, dan ketimpangan antar wilayah dan antar sektor. Perlu ada tindakan dari pemerintah daerah seperti menggalakkan edukasi tentang pengolahan sampah rumah tangga, kebijakan pembatasan kendaraan, peningkatan fasilitas transportasi umum, percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah (jalan tol, LRT, bandara), dan penguatan sektor pertanian dan perikanan agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata.

f. Regional Maluku-Papua

Pendapatan negara dan hibah di wilayah Maluku dan Papua pada kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Di tahun 2024, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp31,02 triliun, tumbuh 20,77 persen (y-on-y) dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor perdagangan dan jasa yang kembali pulih menjadi pendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga di wilayah timur, sehingga menumbuhkan penerimaan perpajakan sebesar 23,79 persen. Dari sisi belanja negara, realisasi regional Maluku dan Papua mencapai Rp136,91 triliun atau meningkat tipis 0,34 persen. Sejalan dengan peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur, dukungan pendidikan serta belanja pegawai, belanja pemerintah pusat mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 15,44 persen atau sebesar Rp43,87 triliun. Maluku-Papua masih mencatatkan defisit sebesar Rp105,88 triliun, sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah defisit yang relatif stabil menunjukkan peningkatan pendapatan yang berjalan seiring dengan peningkatan belanja pemerintah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Berikut rekomendasi untuk pemerintah daerah di Maluku dan Papua:

- 1) Pemerintah daerah melalui Bappeda dan Inspektorat perlu menginisiasi

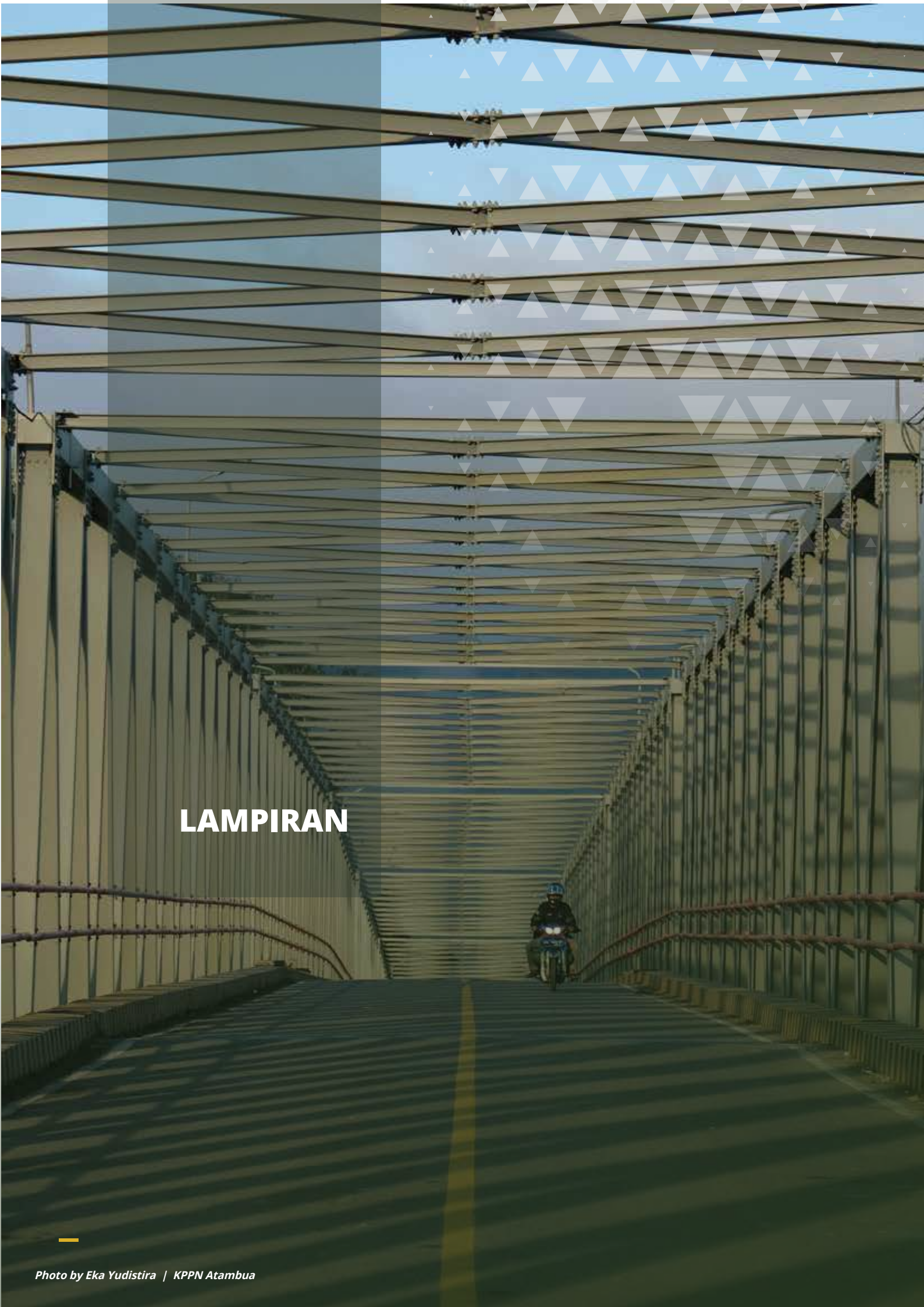
pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi dengan perencanaan kegiatan untuk memastikan bahwa output dan nilai realisasi anggaran telah sesuai dengan perencanaan anggaran/kegiatan. Kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui kegiatan *joint monev* dapat dilakukan sebagai upaya harmonisasi anggaran pusat dan daerah, tidak hanya dari sisi perencanaan namun juga pelaksanaan anggaran.

- 2) Percepatan pelaksanaan anggaran daerah dimulai dengan pelaksanaan lelang dini. Pemerintah Daerah perlu menguatkan peran LPSE/UKPBJ Pemda antara lain dengan pemusatan pelaksanaan pengadaan melalui LPSE/UKPBJ Pemda dan penggunaan e-katalog.
- 3) Pemberian *reward*/penghargaan dapat diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran SKPD di lingkup regional Maluku – Papua.
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi UMKM perlu dilakukan secara masif oleh pemerintah daerah (Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan) agar mampu memberikan *multiplier effect* di tingkat regional, sebagai contoh UMKM milik Orang Asli Papua (OAP) agar semangat Otonomi Khusus Papua terkait pemberdayaan masyarakat asli Papua dapat benar-benar terwujud. Kolaborasi dan harmonisasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan dalam upaya memberdayakan dan membina UMKM potensial. Misalnya, melalui pengembangan UMKM di bidang kopi karena memiliki potensi yang sangat luar biasa di wilayah Papua.
- 5) Dalam upaya untuk mempercepat pembangunan di wilayah Maluku dan Papua, Pemerintah Daerah perlu

memberikan jaminan keamanan dan kepastian regulasi agar investor tertarik untuk berinvestasi terutama di Papua. Pemerintah daerah disarankan untuk tidak hanya bekerja sama atau menggandeng TNI/Polri saja, namun melibatkan juga tokoh-tokoh adat, agama dan pemuda agar lebih mudah membangun komunikasi dengan masyarakat setempat.

- 6) Faktor cuaca dan kondisi geografis yang sulit sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur, terutama di bidang Jalan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang, seperti penggunaan teknologi konstruksi yang lebih adaptif terhadap cuaca serta pengadaan alat dan kendaraan khusus yang dapat mempermudah mobilitas dalam kondisi medan yang berat.
- 7) Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Pangan. Aksesibilitas pangan di Maluku dan Papua masih menjadi tantangan besar, sehingga pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian harus menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan konektivitas transportasi baik melalui jalur darat maupun laut sangat penting agar distribusi pangan antar pulau dapat berjalan lebih lancar dan merata. Pengembangan sistem logistik pangan dan pasar lokal juga harus dilakukan untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil.
- 8) Mengingat sektor perikanan merupakan kekuatan utama daerah, modernisasi teknologi penangkapan dan pengolahan ikan harus diprioritaskan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, pengembangan industri pangan berbasis kelautan, seperti produksi ikan asap, abon ikan, serta olahan hasil laut lainnya,

dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai sumber utama pangan.

A photograph of a long suspension bridge, likely the Atambua Bridge, viewed from a low angle looking down the road. The bridge's steel truss structure is prominent, with many vertical and diagonal beams creating a strong sense of perspective. A person on a motorcycle is visible in the distance, riding towards the camera. The sky is clear and blue. The word 'LAMPIRAN' is overlaid in white text on the left side of the image.

LAMPIRAN

I. Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Tahun 2022-2024 (c-to-c)

No	Nama Provinsi	Regional	Pertumbuhan Ekonomi (CtoC)		
			2022	2023	2024
1	Aceh	Sumatera	4,21%	4,23%	4,66%
2	Sumatera Utara	Sumatera	4,73%	5,01%	5,03%
3	Sumatera Barat	Sumatera	4,36%	4,62%	4,36%
4	Riau	Sumatera	4,55%	4,21%	3,52%
5	Jambi	Sumatera	5,13%	4,66%	4,51%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	5,23%	5,08%	5,03%
7	Bengkulu	Sumatera	4,31%	4,26%	4,62%
8	Lampung	Sumatera	4,28%	4,55%	4,57%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	4,40%	4,38%	0,77%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	5,09%	5,20%	5,02%
11	DKI Jakarta	Jawa	5,25%	4,96%	4,90%
12	Jawa Barat	Jawa	5,45%	5,00%	4,95%
13	Jawa Tengah	Jawa	5,31%	4,98%	4,95%
14	DI Yogyakarta	Jawa	5,15%	5,07%	5,03%
15	Jawa Timur	Jawa	5,34%	4,95%	4,93%
16	Banten	Jawa	5,03%	4,81%	4,79%
17	Bali	Bali-Nusra	4,84%	5,71%	5,48%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	6,95%	1,80%	5,30%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	3,05%	3,52%	3,73%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	5,07%	4,46%	4,90%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	6,45%	4,14%	4,46%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	5,11%	4,84%	5,05%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	4,48%	6,22%	6,17%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	5,34%	4,94%	4,57%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	5,42%	5,48%	5,39%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	15,17%	11,91%	9,89%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	5,09%	4,51%	5,02%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	5,53%	5,35%	5,40%
29	Gorontalo	Sulawesi	4,04%	4,50%	4,13%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	2,30%	5,25%	4,76%
31	Maluku	Maluku-Papua	5,11%	5,21%	5,34%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	22,94%	20,49%	13,73%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	2,01%	3,91%	20,80%
34	Papua	Maluku-Papua	8,97%	5,22%	4,11%
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua			3,60%
36	Papua Selatan	Maluku-Papua			4,55%
37	Papua Tengah	Maluku-Papua			4,36%
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua			4,75%
	NASIONAL		5,31%	5,05%	5,03%
1	Regional Sumatera	Sumatera	4,69%	4,69%	4,45%
2	Regional Jawa	Jawa	5,31%	4,96%	4,92%
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	4,94%	5,43%	5,52%
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	7,05%	6,37%	6,18%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	5,08%	4,00%	5,04%
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	8,65%	6,94%	7,81%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

II. Nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2022-2024

No	Nama Provinsi	Regional	Nominal PDRB (Juta Rupiah)					
			2022		2023		2024	
			Nominal	Kontribusi	Nominal	Kontribusi	Nominal	Kontribusi
1	Aceh	Sumatera	211.750,02	1,11%	227.110,20	1,11%	243.202,09	1,10%
2	Sumatera Utara	Sumatera	955.193,09	4,99%	1.050.995,41	5,12%	1.146.919,75	5,21%
3	Sumatera Barat	Sumatera	285.378,64	1,49%	312.770,28	1,52%	332.936,44	1,51%
4	Riau	Sumatera	991.589,59	5,18%	1.026.472,05	5,00%	1.112.481,62	5,05%
5	Jambi	Sumatera	276.316,37	1,44%	293.729,31	1,43%	322.975,53	1,47%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	591.603,48	3,09%	629.099,66	3,06%	663.961,72	3,02%
7	Bengkulu	Sumatera	90.111,95	0,47%	96.551,38	0,47%	103.991,92	0,47%
8	Lampung	Sumatera	414.131,42	2,16%	448.880,25	2,19%	483.882,92	2,20%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	95.285,43	0,50%	102.635,65	0,50%	107.504,82	0,49%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	308.842,68	1,61%	331.889,50	1,62%	352.436,43	1,60%
11	DKI Jakarta	Jawa	3.186.469,91	16,64%	3.442.980,93	16,77%	3.679.358,60	16,71%
12	Jawa Barat	Jawa	2.422.782,32	12,65%	2.625.218,58	12,79%	2.823.338,73	12,82%
13	Jawa Tengah	Jawa	1.560.899,02	8,15%	1.696.795,42	8,26%	1.817.776,96	8,25%
14	DI Yogyakarta	Jawa	165.690,21	0,87%	180.689,95	0,88%	193.514,56	0,88%
15	Jawa Timur	Jawa	2.730.907,09	14,26%	2.953.546,91	14,38%	3.168.295,58	14,39%
16	Banten	Jawa	747.250,29	3,90%	814.124,34	3,96%	873.626,25	3,97%
17	Bali	Bali-Nusra	245.233,24	1,28%	274.355,72	1,34%	298.441,51	1,36%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	156.944,05	0,82%	166.394,91	0,81%	182.265,19	0,83%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	118.718,20	0,62%	128.523,13	0,63%	137.282,48	0,62%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	255.797,28	1,34%	274.468,58	1,34%	300.166,89	1,36%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	199.947,90	1,04%	208.846,41	1,02%	222.864,50	1,01%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	251.256,54	1,31%	269.296,45	1,31%	286.818,87	1,30%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	921.332,98	4,81%	843.571,25	4,11%	858.430,74	3,90%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	138.718,18	0,72%	147.278,62	0,72%	146.793,48	0,67%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	157.028,36	0,82%	171.969,42	0,84%	187.374,29	0,85%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	323.617,16	1,69%	347.139,17	1,69%	376.950,32	1,71%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	605.144,68	3,16%	652.574,05	3,18%	696.252,76	3,16%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	158.761,13	0,83%	176.179,90	0,86%	189.481,75	0,86%
29	Gorontalo	Sulawesi	47.574,43	0,25%	51.374,40	0,25%	54.554,50	0,25%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	54.070,98	0,28%	58.551,82	0,29%	64.214,88	0,29%
31	Maluku	Maluku-Papua	53.692,91	0,28%	58.489,79	0,28%	62.646,24	0,28%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	70.902,61	0,37%	85.145,36	0,41%	95.787,67	0,43%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	91.291,75	0,48%	97.675,84	0,48%	76.177,48	0,35%
34	Papua	Maluku-Papua	262.515,82	1,37%	287.902,65	1,40%	37.040,34	0,17%
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua					85.914,33	0,39%
36	Papua Selatan	Maluku-Papua					33.382,85	0,15%
37	Papua Tengah	Maluku-Papua					174.942,95	0,79%
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua					26.561,43	0,12%
	NASIONAL		19.146.749,71	100,00%	20.533.227,32	100,00%	22.020.549,40	100,00%
1	Regional Sumatera	Sumatera	4.220.202,67	22,04%	4.520.133,69	22,01%	4.870.293,24	22,12%
2	Regional Jawa	Jawa	10.813.998,84	56,48%	11.713.356,13	57,05%	12.555.910,68	57,02%
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	1.767.052,88	9,23%	1.743.461,32	8,49%	1.815.074,48	8,24%
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	1.346.196,74	7,03%	1.457.788,76	7,10%	1.568.828,50	7,12%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	520.895,49	2,72%	569.273,77	2,77%	617.989,18	2,81%
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	478.403,09	2,50%	529.213,64	2,58%	592.453,29	2,69%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

III. Tingkat Inflasi Tahun 2022-2024

No	Nama Provinsi	Regional	Inflasi Gabungan		
			2022	2023	2024
1	Aceh	Sumatera	5,89%	1,53%	2,17%
2	Sumatera Utara	Sumatera	6,12%	2,25%	2,12%
3	Sumatera Barat	Sumatera	7,43%	2,47%	0,89%
4	Riau	Sumatera	6,81%	2,50%	1,25%
5	Jambi	Sumatera	6,35%	3,22%	1,43%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	5,94%	3,17%	1,20%
7	Bengkulu	Sumatera	5,92%	3,09%	0,84%
8	Lampung	Sumatera	5,51%	3,47%	1,57%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	5,38%	2,65%	0,75%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	5,83%	2,76%	2,09%
11	DKI Jakarta	Jawa	4,21%	2,28%	1,48%
12	Jawa Barat	Jawa	6,04%	2,48%	1,64%
13	Jawa Tengah	Jawa	5,63%	2,89%	1,67%
14	DI Yogyakarta	Jawa	6,49%	3,17%	1,28%
15	Jawa Timur	Jawa	6,52%	2,92%	1,51%
16	Banten	Jawa	5,08%	3,06%	1,88%
17	Bali	Bali-Nusra	6,20%	2,54%	2,34%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	6,23%	3,02%	1,28%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	6,65%	2,42%	1,19%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	6,30%	2,02%	1,71%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	6,32%	2,64%	1,03%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	6,99%	2,43%	1,95%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	5,35%	3,46%	1,47%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	4,74%	2,44%	1,29%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	4,00%	2,87%	0,44%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	5,96%	2,35%	1,29%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	5,77%	2,81%	1,23%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	7,39%	2,58%	1,05%
29	Gorontalo	Sulawesi	5,15%	3,88%	-0,79%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	4,85%	1,82%	1,49%
31	Maluku	Maluku-Papua	6,39%	2,81%	1,28%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	3,37%	4,41%	1,50%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	3,87%	2,94%	2,53%
34	Papua	Maluku-Papua	5,68%	1,65%	1,75%
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua			1,87%
36	Papua Selatan	Maluku-Papua			1,78%
37	Papua Tengah	Maluku-Papua			3,27%
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua			5,36%
	NASIONAL		5,51%	2,61%	1,57%

Sumber: BRS masing-masing provinsi, Badan Pusat Statistik, 2024

IV. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022-2024

No	Nama Provinsi	Regional	Inflasi Gabungan		
			2022	2023	2024
1	Aceh	Sumatera	72,8	74,7	75,36
2	Sumatera Utara	Sumatera	72,71	75,13	75,76
3	Sumatera Barat	Sumatera	73,26	75,64	76,43
4	Riau	Sumatera	73,52	74,95	75,67
5	Jambi	Sumatera	72,14	73,73	74,36
6	Sumatera Selatan	Sumatera	70,9	73,18	73,84
7	Bengkulu	Sumatera	72,16	74,3	74,91
8	Lampung	Sumatera	70,45	72,48	73,13
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	72,24	74,09	74,55
10	Kepulauan Riau	Sumatera	76,46	79,08	79,89
11	DKI Jakarta	Jawa	81,65	83,55	84,15
12	Jawa Barat	Jawa	73,12	74,24	74,92
13	Jawa Tengah	Jawa	72,79	73,39	73,87
14	DI Yogyakarta	Jawa	80,64	81,09	81,62
15	Jawa Timur	Jawa	72,75	74,65	75,35
16	Banten	Jawa	73,32	75,77	76,35
17	Bali	Bali-Nusra	76,44	78,01	78,63
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	69,46	72,37	73,1
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	65,9	68,4	69,14
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	68,63	70,47	71,19
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	71,63	73,73	74,28
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	71,84	74,66	75,19
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	77,44	78,2	78,79
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	71,83	72,88	73,41
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	73,81	75,04	75,68
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	70,28	71,66	72,24
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	72,82	74,6	75,18
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	72,23	72,94	73,62
29	Gorontalo	Sulawesi	69,81	71,25	72,01
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	66,92	69,8	70,46
31	Maluku	Maluku-Papua	70,22	72,75	73,4
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	69,47	70,98	71,84
33	Papua Barat	Maluku-Papua	65,89	67,47	67,69
34	Papua	Maluku-Papua	61,39	63,01	73,83
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua			69,65
36	Papua Selatan	Maluku-Papua			68,86
37	Papua Tengah	Maluku-Papua			60,25
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua			54,43
	NASIONAL		72,91	74,39	75,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

V. Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2022-2024

No	Nama Provinsi	Regional	Tingkat Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Aceh	Sumatera	14,75%	14,45%	12,64%	818.470	806.750	718.960
2	Sumatera Utara	Sumatera	8,33%	8,15%	7,19%	1.262.090	1.239.710	1.110.920
3	Sumatera Barat	Sumatera	6,04%	5,95%	5,42%	343.820	340.370	315.430
4	Riau	Sumatera	6,84%	6,68%	6,36%	493.130	485.660	473.040
5	Jambi	Sumatera	7,70%	7,58%	7,26%	283.820	280.680	272.700
6	Sumatera Selatan	Sumatera	11,95%	11,78%	10,51%	1.054.990	1.045.680	948.840
7	Bengkulu	Sumatera	14,34%	14,04%	12,52%	292.930	288.460	261.150
8	Lampung	Sumatera	11,44%	11,11%	10,62%	995.590	970.670	939.300
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	4,61%	4,52%	5,08%	69.690	68.690	78.580
10	Kepulauan Riau	Sumatera	6,03%	5,69%	4,78%	148.890	142.500	124.960
11	DKI Jakarta	Jawa	4,61%	4,44%	4,14%	494.930	477.830	449.070
12	Jawa Barat	Jawa	7,98%	7,62%	7,08%	4.053.620	3.888.600	3.668.350
13	Jawa Tengah	Jawa	10,98%	10,77%	9,58%	3.858.230	3.791.500	3.396.340
14	DI Yogyakarta	Jawa	11,49%	11,04%	10,40%	463.630	448.470	430.470
15	Jawa Timur	Jawa	10,49%	10,35%	9,56%	4.236.510	4.188.810	3.893.820
16	Banten	Jawa	6,24%	6,17%	5,70%	829.660	826.130	777.490
17	Bali	Bali-Nusra	4,53%	4,25%	3,80%	205.360	193.780	176.210
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	13,82%	13,85%	11,91%	744.690	751.230	658.600
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	20,23%	19,96%	19,02%	1.149.170	1.141.110	1.107.940
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	6,81%	6,71%	6,25%	356.510	353.350	333.990
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	5,22%	5,11%	5,26%	144.520	142.170	149.240
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	4,61%	4,29%	4,02%	201.950	188.930	180.200
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	6,44%	6,11%	5,51%	242.300	231.070	211.880
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	6,86%	6,45%	5,38%	50.580	47.970	41.110
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	7,34%	7,38%	6,70%	187.330	189.000	173.300
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	12,30%	12,41%	11,04%	389.710	395.660	358.330
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	8,66%	8,70%	7,77%	782.320	788.850	711.770
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	11,27%	11,43%	10,63%	314.740	321.530	305.270
29	Gorontalo	Sulawesi	15,51%	15,15%	13,87%	187.350	183.710	170.030
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	11,92%	11,49%	10,71%	169.260	164.140	155.910
31	Maluku	Maluku-Papua	16,23%	16,42%	15,78%	296.660	301.610	293.990
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	6,37%	6,46%	6,03%	82.130	83.800	79.690
33	Papua Barat	Maluku-Papua	21,43%	20,49%	21,09%	222.360	214.980	108.280
34	Papua	Maluku-Papua	26,80%	26,03%	18,09%	936.320	915.150	161.070
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua			16,95%			96.810
36	Papua Selatan	Maluku-Papua			19,35%			103.020
37	Papua Tengah	Maluku-Papua			27,60%			287.540
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua			29,66%			331.120
	NASIONAL		9,57%	9,36%	8,57%	26.363.270	25.898.550	24.054.720
1	Regional Sumatera	Sumatera	9,47%	9,27%	8,42%	5.763.420	5.669.170,00	5.243.880
2	Regional Jawa	Jawa	9,03%	8,79%	8,05%	13.936.580	13.621.340,00	12.615.540
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	5,90%	5,67%	5,30%	995.860	963.490,00	916.420
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	10,06%	10,08%	9,12%	2.030.710	2.042.890,00	1.874.610
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	13,46%	13,29%	12,15%	2.099.220	2.086.120,00	1.942.750
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	20,10%	19,68%	18,62%	1.537.470	1.515.540,00	1.461.520

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

VI. Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Tahun 2022-2024

No	Nama Provinsi	Regional	Inflasi Gabungan		
			2022	2023	2024
1	Aceh	Sumatera	0,291	0,296	0,294
2	Sumatera Utara	Sumatera	0,326	0,309	0,306
3	Sumatera Barat	Sumatera	0,292	0,280	0,287
4	Riau	Sumatera	0,323	0,324	0,306
5	Jambi	Sumatera	0,335	0,343	0,315
6	Sumatera Selatan	Sumatera	0,330	0,338	0,331
7	Bengkulu	Sumatera	0,315	0,333	0,343
8	Lampung	Sumatera	0,313	0,324	0,301
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	0,255	0,245	0,235
10	Kepulauan Riau	Sumatera	0,325	0,340	0,357
11	DKI Jakarta	Jawa	0,412	0,431	0,431
12	Jawa Barat	Jawa	0,412	0,425	0,428
13	Jawa Tengah	Jawa	0,366	0,369	0,364
14	DI Yogyakarta	Jawa	0,459	0,449	0,428
15	Jawa Timur	Jawa	0,365	0,387	0,373
16	Banten	Jawa	0,377	0,368	0,359
17	Bali	Bali-Nusra	0,362	0,362	0,348
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	0,374	0,375	0,364
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	0,340	0,325	0,316
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	0,311	0,321	0,314
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	0,309	0,317	0,304
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	0,309	0,313	0,298
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	0,317	0,322	0,310
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	0,270	0,277	0,259
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	0,359	0,370	0,347
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	0,305	0,304	0,309
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	0,365	0,377	0,360
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	0,366	0,371	0,365
29	Gorontalo	Sulawesi	0,423	0,417	0,413
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	0,371	0,351	0,330
31	Maluku	Maluku-Papua	0,306	0,288	0,291
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	0,309	0,300	0,296
33	Papua Barat	Maluku-Papua	0,384	0,370	0,385
34	Papua	Maluku-Papua	0,393	0,386	0,405
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua			0,347
36	Papua Selatan	Maluku-Papua			0,424
37	Papua Tengah	Maluku-Papua			0,355
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua			0,346
NASIONAL			0,381	0,388	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik, per September 2024

VII. Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2022-2024

No	Nama Provinsi	Regional	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*)			Tingkat Pengangguran**)			Jumlah Pengangguran (orang)***)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Aceh	Sumatera	63,50%	64,77%	65,11%	6,17%	6,03%	5,75%	157.568	157.107	152.929
2	Sumatera Utara	Sumatera	69,75%	71,06%	71,36%	6,16%	5,89%	5,60%	472.496	472.085	457.794
3	Sumatera Barat	Sumatera	69,30%	69,61%	70,28%	6,28%	5,94%	5,75%	180.106	179.505	178.278
4	Riau	Sumatera	63,86%	64,45%	66,33%	4,37%	4,23%	3,70%	144.889	132.454	121.361
5	Jambi	Sumatera	67,84%	68,75%	68,87%	4,59%	4,53%	4,48%	86.459	85.576	86.075
6	Sumatera Selatan	Sumatera	69,31%	70,72%	70,82%	4,63%	4,11%	3,86%	208.256	188.511	179.709
7	Bengkulu	Sumatera	69,81%	70,91%	71,71%	3,59%	3,42%	3,11%	38.619	37.845	35.339
8	Lampung	Sumatera	70,06%	70,04%	70,41%	4,52%	4,23%	4,19%	207.965	207.242	209.161
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	67,38%	68,34%	68,87%	4,77%	4,56%	4,63%	36.631	35.812	37.214
10	Kepulauan Riau	Sumatera	68,94%	68,68%	69,17%	8,23%	6,80%	6,39%	103.715	74.330	71.572
11	DKI Jakarta	Jawa	63,08%	65,21%	65,10%	7,18%	6,53%	6,21%	377.294	354.496	337.992
12	Jawa Barat	Jawa	66,15%	66,49%	67,71%	8,31%	7,44%	6,75%	2.125.606	1.888.287	1.768.226
13	Jawa Tengah	Jawa	70,84%	71,75%	73,74%	5,57%	5,13%	4,78%	1.084.475	1.080.260	1.047.451
14	DI Yogyakarta	Jawa	72,60%	74,08%	74,78%	4,06%	3,69%	3,48%	94.945	81.984	78.667
15	Jawa Timur	Jawa	71,23%	72,59%	73,45%	5,49%	4,88%	4,19%	1.255.719	1.165.587	1.020.651
16	Banten	Jawa	64,72%	64,44%	66,17%	8,09%	7,52%	6,68%	523.013	448.432	414.754
17	Bali	Bali-Nusra	76,86%	77,08%	77,11%	4,80%	2,69%	1,79%	131.469	72.421	48.676
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	70,93%	73,31%	77,23%	2,89%	2,80%	2,73%	80.833	83.243	87.011
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	75,23%	75,72%	77,50%	3,54%	3,14%	3,02%	107.128	93.815	94.216
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	68,97%	69,42%	70,44%	5,11%	5,05%	4,86%	137.680	147.574	146.201
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	67,23%	67,18%	68,71%	4,26%	4,10%	4,01%	59.829	57.762	58.631
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	67,55%	69,76%	70,22%	4,74%	4,31%	4,20%	104.025	93.576	93.256
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	64,73%	65,57%	67,07%	5,71%	5,31%	5,14%	105.882	103.565	107.022
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	67,62%	70,35%	70,35%	4,33%	4,01%	3,90%	16.028	15.553	15.343
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	63,08%	64,09%	66,07%	6,61%	6,10%	5,85%	82.123	81.201	81.180
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	69,99%	69,85%	71,10%	3,00%	2,95%	2,94%	49.145	47.076	48.434
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	66,18%	65,66%	67,38%	4,51%	4,33%	4,19%	205.725	203.500	204.760
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	68,82%	70,07%	72,81%	3,36%	3,15%	3,09%	46.474	43.894	45.572
29	Gorontalo	Sulawesi	68,91%	70,79%	69,95%	2,58%	3,06%	3,13%	16.284	19.904	20.404
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	73,00%	71,05%	71,40%	2,34%	2,27%	2,68%	17.545	17.273	20.876
31	Maluku	Maluku-Papua	65,46%	63,60%	66,52%	6,88%	6,31%	6,11%	59.737	57.504	59.100
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	64.88%	67,77%	69,13%	3,98%	4,31%	4,03%	24.273	28.600	27.747
33	Papua Barat	Maluku-Papua	68,55%	67,24%	67,81%	5,37%	5,38%	4,13%	27.665	31.919	12.511
34	Papua	Maluku-Papua	77,75%	77,20%	71,25%	2,83%	2,67%	6,48%	56.330	67.182	31.773
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua			68,40%			6,48%			20.627
36	Papua Selatan	Maluku-Papua			71,67%			4,05%			9.554
37	Papua Tengah	Maluku-Papua			73,13%			2,75%			22.047
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua			88,22%			1,32%			13.485
	NASIONAL		9,57%	9,36%	70,63%	5,86%	5,32%	4,91%	8.425.931	7.855.075	7.465.599
1	Regional Sumatera	Sumatera	9,47%	9,27%		5,37%	5,04%	5,04%	1.636.704	1.570.467	1.529.432
2	Regional Jawa	Jawa	9,03%	8,79%		6,66%	5,97%	5,71%	5.461.052	5.019.046	4.667.741
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	5,90%	5,67%		4,97%	4,73%	4,81%	423.444	418.030	420.453
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	10,06%	10,08%		4,09%	3,96%	4,05%	417.296	412.848	421.226
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	13,46%	13,29%		3,73%	2,88%	2,61%	319.430	249.479	229.903
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	20,10%	19,68%		4,22%	3,95%	4,25%	168.005	185.205	196.844

Sumber:

*) BRS masing-masing Provinsi

**) BRS data per-agustus 2024

***) Sakernas Indonesia 2022, 2023, dan 2024

VIII. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022-2024

No	Nama Provinsi	Regional	2022		2023		2024	
			Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
1	Aceh	Sumatera	5.379.937	1,95%	5.515.839	1,96%	5.554.800	1,97%
2	Sumatera Utara	Sumatera	15.305.230	5,56%	15.471.582	5,51%	15.588.500	5,54%
3	Sumatera Barat	Sumatera	5.624.143	2,04%	5.750.326	2,05%	5.836.200	2,07%
4	Riau	Sumatera	6.646.390	2,41%	6.861.237	2,44%	6.728.100	2,39%
5	Jambi	Sumatera	3.642.763	1,32%	3.760.275	1,34%	3.724.300	1,32%
6	Sumatera Selatan	Sumatera	8.646.686	3,14%	8.889.913	3,17%	8.837.300	3,14%
7	Bengkulu	Sumatera	2.047.110	0,74%	2.098.089	0,75%	2.112.200	0,75%
8	Lampung	Sumatera	8.901.566	3,23%	9.051.459	3,22%	9.419.600	3,34%
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	1.472.427	0,53%	1.521.723	0,54%	1.531.500	0,54%
10	Kepulauan Riau	Sumatera	2.101.215	0,76%	2.178.610	0,78%	2.183.300	0,78%
11	DKI Jakarta	Jawa	11.249.585	4,09%	11.337.563	4,04%	10.684.900	3,79%
12	Jawa Barat	Jawa	48.637.180	17,66%	49.899.992	17,78%	50.345.200	17,88%
13	Jawa Tengah	Jawa	37.488.277	13,61%	38.125.191	13,58%	37.892.300	13,46%
14	DI Yogyakarta	Jawa	3.677.522	1,34%	3.722.296	1,33%	3.759.500	1,34%
15	Jawa Timur	Jawa	41.144.067	14,94%	41.644.099	14,83%	41.814.500	14,85%
16	Banten	Jawa	12.145.161	4,41%	12.469.997	4,44%	12.431.400	4,41%
17	Bali	Bali-Nusra	4.287.193	1,56%	4.344.554	1,55%	4.433.300	1,57%
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	5.473.507	1,99%	5.619.450	2,00%	5.646.000	2,00%
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	5.514.216	2,00%	5.609.049	2,00%	5.656.000	2,01%
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	5.482.046	1,99%	5.557.277	1,98%	5.695.500	2,02%
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	2.672.790	0,97%	2.753.049	0,98%	2.809.700	1,00%
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	4.141.533	1,50%	4.234.214	1,51%	4.273.400	1,52%
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	3.891.849	1,41%	4.007.736	1,43%	4.045.900	1,44%
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	709.620	0,26%	747.415	0,27%	739.800	0,26%
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	2.664.313	0,97%	2.660.415	0,95%	2.701.800	0,96%
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	3.074.958	1,12%	3.154.499	1,12%	3.121.800	1,11%
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	9.255.930	3,36%	9.400.283	3,35%	9.463.400	3,36%
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	2.690.791	0,98%	2.753.707	0,98%	2.793.100	0,99%
29	Gorontalo	Sulawesi	1.203.921	0,44%	1.237.185	0,44%	1.227.800	0,44%
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	1.447.186	0,53%	1.451.657	0,52%	1.503.200	0,53%
31	Maluku	Maluku-Papua	1.886.735	0,69%	1.911.943	0,68%	1.945.600	0,69%
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	1.337.368	0,49%	1.365.091	0,49%	1.355.600	0,48%
33	Papua Barat	Maluku-Papua	1.161.028	0,42%	1.178.985	0,42%	578.700	0,21%
34	Papua	Maluku-Papua	4.357.024	1,58%	4.440.728	1,58%	1.060.600	0,38%
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua					627.100	0,22%
36	Papua Selatan	Maluku-Papua					542.100	0,19%
37	Papua Tengah	Maluku-Papua					1.472.900	0,52%
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua					1.467.000	0,52%
	NASIONAL		275.361.267	100,00%	280.725.428	100,00%	281.603.900	100,00%
1	Regional Sumatera	Sumatera	59.767.467	21,71%	61.099.053,00	21,76%	61.515.800	21,84%
2	Regional Jawa	Jawa	154.341.792	56,05%	157.199.138,00	56,00%	156.927.800	55,73%
3	Regional Kalimantan	Kalimantan	16.897.838	6,14%	17.299.691,00	6,16%	17.564.300	6,24%
4	Regional Sulawesi	Sulawesi	20.337.099	7,39%	20.657.746,00	7,36%	20.811.100	7,39%
5	Regional Bali-Nusa Tenggara	Bali-Nusra	15.274.916	5,55%	15.573.053,00	5,55%	15.735.300	5,59%
6	Regional Maluku-Papua	Maluku-Papua	8.742.155	3,17%	8.896.747,00	3,17%	9.049.600	3,21%

Sumber:

Data BPS Sensus Penduduk

Data Kemendagri

IX. NTP dan NTN Tahun 2022-2024

No	Nama Provinsi	Regional	NTP			NTN		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Aceh	Sumatera	107,38	114,49	119,86	111,81	110,2	105,94
2	Sumatera Utara	Sumatera	122,2	125,92	137,34	109,13	108,25	101,58
3	Sumatera Barat	Sumatera	110,63	110,51	124,35	100,08	104,4	95,65
4	Riau	Sumatera	145,55	154,55	175,54	104,52	104,99	104,44
5	Jambi	Sumatera	135,63	138,8	157,36	112,24	107,6	101,18
6	Sumatera Selatan	Sumatera	107,74	105,03	121,03	110,92	121,11	117,43
7	Bengkulu	Sumatera	134,39	147,42	182,86	106,01	112,4	106,61
8	Lampung	Sumatera	104,33	109,51	125,52	108,41	111,43	109,99
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	127,38	119,09	136,28	112,3	114,28	109,78
10	Kepulauan Riau	Sumatera	105,02	102,25	104,69	111,54	110,02	105,51
11	DKI Jakarta	Jawa	-	-	-	101,43	107,83	105,28
12	Jawa Barat	Jawa	99,48	107,35	112,17	112,09	115,31	112,45
13	Jawa Tengah	Jawa	103,95	111,2	114,48	109,94	105,3	101,00
14	DI Yogyakarta	Jawa	98,54	103,99	105,25	115,7	120,72	116,68
15	Jawa Timur	Jawa	102,48	109,7	112,59	103,73	101,7	94,58
16	Banten	Jawa	99,45	106,29	109,14	102,23	98,91	96,51
17	Bali	Bali-Nusra	95,3	99,46	101,72	100,42	101,81	91,65
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	105,37	115,63	121,96	116,14	116,07	103,26
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	95,39	96,84	99,83	91,55	94,26	89,49
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	142,6	140,31	156,89	105,55	103,57	100,21
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	123,27	120,23	127,85	96,82	93,37	96,51
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	107,79	110,26	115,42	100,39	99,1	99,04
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	129,65	133,05	143,18	100,19	102,47	99,71
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	110,73	115,12	117,56	105,94	108,31	105,59
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	108,96	109,14	114,65	109,45	112,09	107,68
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	101,36	106,59	119,72	104,43	104,19	93,61
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	99,71	107,68	118,53	109,27	113,86	111,92
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	99,48	101,88	115,81	102,45	101,8	96,98
29	Gorontalo	Sulawesi	103,77	106,78	110,09	98	98,66	96,47
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	118,45	122,81	148,18	108,83	103,3	97,05
31	Maluku	Maluku-Papua	103,77	103,3	101,2	115,1	113,29	114,24
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	106,62	103,3	103,61	103,62	104,95	100,37
33	Papua Barat	Maluku-Papua	101,28	99,76	101	97,44	100,29	95,80
34	Papua	Maluku-Papua	99,36	99,61	100,12	112,78	108,71	107,17
35	Papua Barat Daya	Maluku-Papua			101,07			95,11
36	Papua Selatan	Maluku-Papua			100,13			112,28
37	Papua Tengah	Maluku-Papua			99,39			108,63
38	Papua Pegunungan	Maluku-Papua			100,85			
	NASIONAL		107,39	112,72	120,26	106,45	106,14	101,76

Sumber:

Data BPS Tahunan

X. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

No	Nama Provinsi	Regional	IKP				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	Sumatera	70,92	71,63	70,16	72,96	73,94
2	Sumatera Utara	Sumatera	71,84	72,25	71,22	75,97	77,49
3	Sumatera Barat	Sumatera	78,64	79,55	79,45	83,22	84,32
4	Riau	Sumatera	64,12	66,84	67,59	68,68	70,42
5	Jambi	Sumatera	70,00	74,18	69,50	72,17	74,94
6	Sumatera Selatan	Sumatera	68,67	69,55	69,64	73,82	74,07
7	Bengkulu	Sumatera	70,28	70,32	67,99	72,27	73,39
8	Lampung	Sumatera	77,43	77,96	78,61	81,56	82,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	71,21	73,22	71,71	71,14	70,21
10	Kepulauan Riau	Sumatera	62,70	63,26	63,83	65,10	66,29
11	DKI Jakarta	Jawa	77,97	78,01	78,25	83,80	85,13
12	Jawa Barat	Jawa	76,78	77,79	77,55	82,19	82,97
13	Jawa Tengah	Jawa	82,31	82,73	82,95	84,80	85,34
14	DI Yogyakarta	Jawa	80,67	81,43	80,88	83,17	84,15
15	Jawa Timur	Jawa	79,90	79,70	79,85	82,46	83,86
16	Banten	Jawa	73,48	74,38	73,78	78,71	79,25
17	Bali	Bali-Nusra	84,54	83,82	85,19	87,65	88,23
18	Nusa Tenggara Barat	Bali-Nusra	75,60	75,67	76,58	76,51	78,44
19	Nusa Tenggara Timur	Bali-Nusra	66,92	67,35	68,42	71,25	70,91
20	Kalimantan Barat	Kalimantan	71,13	71,32	70,81	72,20	73,49
21	Kalimantan Tengah	Kalimantan	72,58	73,68	69,96	68,90	70,16
22	Kalimantan Selatan	Kalimantan	80,04	80,29	81,05	81,26	82,95
23	Kalimantan Timur	Kalimantan	78,24	77,46	77,65	79,29	78,61
24	Kalimantan Utara	Kalimantan	71,90	73,02	71,04	74,59	75,77
25	Sulawesi Utara	Sulawesi	77,79	78,30	74,30	77,32	76,32
26	Sulawesi Tengah	Sulawesi	75,10	75,73	75,92	75,83	76,87
27	Sulawesi Selatan	Sulawesi	81,81	80,82	81,38	83,36	83,82
28	Sulawesi Tenggara	Sulawesi	77,06	76,64	75,04	74,96	76,68
29	Gorontalo	Sulawesi	80,40	80,52	80,35	81,63	81,47
30	Sulawesi Barat	Sulawesi	76,36	75,49	74,04	73,03	71,99
31	Maluku	Maluku-Papua	58,15	58,70	60,20	64,37	62,68
32	Maluku Utara	Maluku-Papua	63,12	59,58	58,39	62,34	61,44
33	Papua Barat	Maluku-Papua	49,40	46,05	45,92	47,95	51,36
34	Papua	Maluku-Papua	34,79	35,48	37,80	42,27	40,21
NASIONAL			72,11	72,43	71,97	74,32	74,99

Sumber:

Data BPS Tahunan

XI. Ikhtisar Realisasi APBN Menurut Regional Tahun 2022-2024

No	Regional	Pendapatan APBN					
		2022		2023		2024	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	145.201,08	5,51%	133.314,68	4,79%	140.198,79	4,92%
2	Jawa	2.328.928,20	88,36%	2.460.187,89	88,37%	2.504.189,89	87,85%
3	Kalimantan	78.439,60	2,98%	94.162,32	3,38%	95.084,29	3,34%
4	Sulawesi	37.108,70	1,41%	40.480,49	1,45%	43.959,58	1,54%
5	Bali-Nusra	23.281,80	0,88%	30.096,50	1,08%	36.150,68	1,27%
6	Maluku-Papua	22.883,66	0,87%	25.687,79	0,92%	31.022,00	1,09%
	Nasional	2.635.843,05	100,00%	2.783.929,68	100,00%	2.850.605,24	100,00%

No	Regional	Belanja APBN					
		2022		2023		2024	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	306.700,05	9,91%	330.795,47	10,60%	345.489,49	10,28%
2	Jawa	2.279.425,88	73,62%	2.198.988,60	70,45%	2.412.146,38	71,80%
3	Kalimantan	154.719,78	5,00%	209.491,10	6,71%	212.675,47	6,33%
4	Sulawesi	144.001,85	4,65%	159.423,85	5,11%	162.982,48	4,85%
5	Bali-Nusra	82.608,33	2,67%	86.077,57	2,76%	89.567,63	2,67%
6	Maluku-Papua	128.806,83	4,16%	136.440,66	4,37%	136.905,26	4,07%
	Nasional	3.096.262,72	100,00%	3.121.217,25	100,00%	3.359.766,71	100,00%

No	Regional	Surplus/Defisit APBN					
		2022		2023		2024	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	-161.498,97	35,08%	-197.480,79	58,55%	-205.290,70	40,32%
2	Jawa	49.502,31	-10,75%	261.199,29	-77,44%	92.043,52	-18,08%
3	Kalimantan	-76.280,18	16,57%	-115.328,77	34,19%	-117.591,17	23,10%
4	Sulawesi	-106.893,14	23,22%	-118.943,36	35,26%	-119.022,90	23,38%
5	Bali-Nusra	-59.326,53	12,89%	-55.981,07	16,60%	-53.416,95	10,49%
6	Maluku-Papua	-105.923,16	23,01%	-110.752,87	32,84%	-105.883,26	20,80%
	Nasional	-460.419,67	100,00%	-337.287,57	100,00%	-509.161,46	100,00%

Sumber:

Data Kemenkeu

XII. Ikhtisar Realisasi APBD Menurut Regional Tahun 2022-2024

No	Regional	Pendapatan APBD					
		2022		2023		2024	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	280.233,47	24,18%	287.620,00	22,89%	301.982,28	22,31%
2	Jawa	400.276,21	34,53%	506.920,14	40,35%	541.689,38	40,01%
3	Kalimantan	133.061,97	11,48%	164.670,27	13,11%	197.849,20	14,61%
4	Sulawesi	112.527,89	9,71%	120.109,54	9,56%	125.701,38	9,28%
5	Bali-Nusra	59.864,14	5,16%	79.089,16	6,29%	85.948,66	6,35%
6	Maluku-Papua	173.213,79	14,94%	98.021,85	7,80%	100.645,99	7,43%
	Nasional	1.159.177,46	100,00%	1.256.430,96	100,00%	1.353.816,89	100,00%

No	Regional	Belanja APBD					
		2022		2023		2024	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	279.761,98	23,47%	293.896,01	23,25%	304.891,66	22,58%
2	Jawa	459.764,82	38,57%	508.587,88	40,24%	540.534,82	40,03%
3	Kalimantan	116.711,05	9,79%	164.992,04	13,05%	196.782,33	14,57%
4	Sulawesi	110.373,90	9,26%	123.143,14	9,74%	124.898,55	9,25%
5	Bali-Nusra	67.169,03	5,63%	77.965,82	6,17%	83.849,35	6,21%
6	Maluku-Papua	158.398,57	13,29%	95.289,13	7,54%	99.442,48	7,36%
	Nasional	1.192.179,35	100,00%	1.263.874,02	100,00%	1.350.399,19	100,00%

No	Regional	Surplus/Defisit APBD					
		2022		2023		2024	
		Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi	Nilai (miliar)	Kontribusi
1	Sumatera	471,49	-1,43%	-6.276,01	84,32%	-2.909,38	-85,13%
2	Jawa	-59.488,61	180,26%	-1.667,75	22,41%	1.154,56	33,78%
3	Kalimantan	16.350,92	-49,55%	-321,77	4,32%	1.066,87	31,22%
4	Sulawesi	2.153,99	-6,53%	-3.033,61	40,76%	802,83	23,49%
5	Bali-Nusra	-7.304,89	22,13%	1.123,34	-15,09%	2.099,31	61,42%
6	Maluku-Papua	14.815,21	-44,89%	2.732,73	-36,72%	1.203,51	35,21%
	Nasional	-33.001,89	100,00%	-7.443,06	100,00%	3.417,70	100,00%

Sumber:

Data Kemenkeu

I-Account (Miliar Rp)	Realisasi APBN (Miliar Rupiah)								
	2022			2023			2024		
	Pagu	Realisasi	%Realisasi	Pagu	Realisasi	%Realisasi	Pagu	Realisasi	%Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	2.266.198,93	2.635.843,05	116,31%	2.637.248,88	2.783.929,68	105,56%	2.802.462,15	2.850.605,24	101,72%
Pendapatan Perpajakan	1.783.987,99	2.034.552,44	114,05%	2.118.348,00	2.154.208,22	101,69%	2.218.401,10	2.231.839,82	100,61%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	481.631,10	595.594,55	123,66%	515.800,88	612.537,30	118,75%	549.137,45	584.378,06	106,42%
Pendapatan Hibah	579,85	5.696,06	982,33%	3.100,00	17.184,16	554,33%	34.923,60	34.387,36	98,46%
Belanja Negara	3.106.425,26	3.096.262,72	99,67%	3.117.176,34	3.121.217,25	100,13%	3.343.494,32	3.359.766,71	100,49%
Belanja Pemerintah Pusat	2.301.644,78	2.280.027,89	99,06%	2.302.457,85	2.239.786,70	97,28%	2.485.902,58	2.496.223,90	100,42%
Belanja Pegawai	426.523,29	402.441,66	94,35%	442.507,21	412.711,32	93,27%	484.430,93	464.859,26	95,96%
Belanja Barang	339.731,04	426.149,08	125,44%	375.881,91	432.714,97	115,12%	406.983,77	523.368,04	128,60%
Belanja Modal	199.196,63	240.570,30	120,77%	210.322,96	303.041,29	144,08%	247.474,23	355.511,13	143,66%
Belanja Pembayaran Bunga Utang	405.866,90	386.341,82	95,19%	441.400,00	439.882,58	99,66%	497.319,60	488.426,42	98,21%
Belanja Subsidi	283.660,95	252.812,91	89,13%	298.497,12	269.592,09	90,32%	285.971,98	292.692,59	102,35%
Belanja Hibah	4.824,30	5.803,27	120,29%	10,09	219,14	2172,76%	6,58	278,43	4231,69%
Bantuan Sosial	147.431,48	161.523,08	109,56%	148.516,87	156.601,63	105,44%	157.302,98	154.949,83	98,50%
Belanja Lain-lain	494.410,19	404.385,77	81,79%	385.321,69	225.023,67	58,40%	406.412,50	216.138,19	53,18%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	804.780,47	816.234,83	101,42%	814.718,49	881.430,54	108,19%	857.591,74	863.542,81	100,69%
Dana Transfer Umum	518.430,37	546.414,11	105,40%	532.259,97	603.696,19	113,42%	570.799,23	582.385,17	102,03%
a) Dana Bagi Hasil	140.430,37	168.414,11	119,93%	136.259,97	205.666,56	150,94%	143.099,93	153.174,56	107,04%
b) Dana Alokasi Umum	378.000,00	378.000,00	100,00%	396.000,00	398.029,63	100,51%	427.699,30	429.210,61	100,35%
Dana Transfer Khusus	189.593,84	173.164,64	91,33%	185.797,26	181.357,56	97,61%	187.587,07	181.331,31	96,67%
a) Dana Alokasi Khusus Fisik	60.874,00	54.783,95	90,00%	53.422,46	50.334,74	94,22%	53.822,46	50.890,08	94,55%
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.719,84	118.380,69	91,97%	132.374,79	131.022,82	98,98%	133.764,61	130.441,23	97,52%
Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal)	7.000,00	6.993,67	99,91%	8.000,00	7.906,03	98,83%	8.000,00	7.001,74	87,52%
Dana Keistimewaan DIY	1.320,00	1.320,00	100,00%	1.420,00	1.372,73	96,67%	1.420,00	1.420,00	100,00%
Dana Otonomi Khusus	20.436,26	20.436,26	100,00%	17.241,26	17.241,26	100,00%	18.271,49	18.271,49	100,00%
Dana Desa	68.000,00	67.906,14	99,86%	70.000,00	69.856,77	99,80%	71.000,00	70.925,93	99,90%
Surplus/Defisit	-840.226,32	-460.419,67	54,80%	-479.927,46	-337.287,57	70,28%	-541.032,17	-509.161,46	94,11%
Pembiayaan	840.226,32	590.978,14	70,34%	479.927,46	356.663,75	74,32%	541.032,17	554.888,57	102,56%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		130.558,47			19.376,18			45.727,11	

Sumber: LKPP Audited



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan